



TOP RISET

Perempuan dan Dinamikanya

Fatimah M.
Katrin Bandel
Yayuk Anggraini
Sri Murlianti
Sumarni
Rina Juwita
Fajar Apriyani
Andi Wahyu Irawan
Riza Hayati Ifroh
Uni W. Sagena
Ishaq Rahman
Moh. Dino Khairri S.
Diah Rahayu
Dina Lusiana
Rahman Baidawi
Reny Noviasy
Danial
Hera Wahyuni

Pusat Penelitian Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak
LP2M Universitas Mulawarman

**Perempuan
dan
Dinamikanya**



Perempuan dan Dinamikanya

Fatimah M.
Katrin Bandel
Yayuk Anggraini
Sri Murlianti
Sumarni
Rina Juwita
Fajar Apriyani
Andi Wahyu Irawan
Riza Hayati Ifroh
Uni W. Sagena
Ishaq Rahman
Moh. Dino Khairri S.
Diah Rahayu
Dina Lusiana
Rahman Baidawi
Reny Noviaasty
Danial
Hera Wahyuni

Perempuan dan Dinamikanya

Penulis:

Fatimah M. - Katrin Bandel - Yayuk Anggraini - Sri Murlianti

Sumarni - Rina Juwita - Fajar Apriyani

Andi Wahyu Irawan - Riza Hayati Ifroh - Danial

Uni W. Sagena, Ishaq Rahman, Mohd Dino Khairri Shariffuddin -

Diah Rahayu - Dina Lusiana, Rahman Baidawi, Reny Noviaasty - Hera Wahyuni

Editor:

Diah Rahayu - Nur Hasanah - Aisyah

Frentika Wahyu Retnowatik - Rahmawati Al Hidayah

Pengarah:

Anton Rahmadi - Uni W. Sagena

Penanggungjawab:

Yayuk Anggraini

(Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

LP2M Universitas Mulawarman)

Desain sampul & Layout:

Sony Prasetyotomo

Cetakan pertama, April 2021

16x23cm, x +264 halaman

ISBN :

PENERBIT MULAWARMAN UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI dan APPTI

Gedung LP2M Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua,

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75119

Telp/Faks: (0541) 747432

Website : www.mup.unmul.ac.id

E-mail: mup@unmul.ac.id, mup@lppm.unmul.ac.id

Bekerjasama dengan

PENERBIT BINTANG PUSTAKA MADANI

(CV. BINTANG SURYA MADANI)

Anggota IKAPI

Jl. Wonosari Km 8,5 Gandu Sendangtirto, Berbah

Sleman, Yogyakarta 57773

www.bintangpustaka.com

ISBN : 978-623-7480-66-2

Pengantar

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Rektor Universitas Mulawarman

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas diterbitkannya buku hasil dari book coaching yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (LP2M) Universitas Mulawarman Samarinda. Buku ini merupakan hasil kajian/penelitian para dosen/peneliti dari lingkungan Universitas Mulawarman sendiri maupun dosen/peneliti dari universitas lain. Kajian/penelitian yang secara khusus membahas perempuan dan anak dari berbagai perspektif sangat dibutuhkan karena masih banyak isu-isu, stigma serta wacana-wacana yang cenderung diskriminatif terkait kehidupan perempuan dan anak yang terjadi dan beredar di masyarakat.

Beberapa dokumen yang tersusun dalam buku ini lebih memperhatikan pengalaman dan pengetahuan yang bersumber dari perempuan itu sendiri merupakan substansi penting sebagai subjek penelitian yang sangat tepat dilakukan hari ini. Dengan kata lain, penelitian yang lebih memperhatikan subjektivitas perempuan atau berdasarkan pengalamannya sendiri sehingga perempuan akan terlepas dari objektifikasi (perempuan tidak menjadi objek). Selain itu, dokumen-dokumen yang terdapat di dalam buku ini juga mampu

memperlihatkan kompleksitas kehidupan perempuan yang dikaji dari berbagai perspektif; sosial, politik, ekonomi, antropologi, linguistik, hukum, kesehatan, sastra hingga budaya populer, sehingga dapat memperlihatkan pandangan subjektifitas perempuan yang semakin luas.

Oleh karena itu, kami sebagai pimpinan lembaga atau Universitas Mulawarman menyambut baik atas penerbitan buku ini dan berharap akan terus melanjutkan kajian serupa yang menunjuk kasus-kasus lain sehingga akan semakin memperkaya khasanah pengetahuan/keilmuan tentang studi-studi perempuan dan anak di tanah air. Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (LP2M) Universitas Mulawarman dan para dosen/peneliti/penulis yang telah terlibat dalam penerbitan buku ini.

Samarinda, April 2021

Kata Pengantar: Perempuan dan Kemanusiaan

Yayuk Anggraini

Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
LP2M Universitas Mulawarman Samarinda

Representasi sebuah wacana dipahami bukan sebagai sebuah proses netral dimana realitas faktual disampaikan apa adanya lewat teks atau gambar. Representasi selalu penuh bias, dan ada berbagai konsep, pemahaman, dan penilaian yang terkonstruksi lewat proses tersebut. Dalam setiap representasi akan terjadi pemaknaan terhadap tindakan tersebut, sehingga lewat pengulangan representasi yang serupa, maka segala sesuatu yang terkait tentang perempuan akan semakin melekat dengan imaji, gagasan, tujuan dan emosi tertentu.

Secara empirik, seorang perempuan sebenarnya tidak terabaikan tapi keberadaan perempuan seringkali digambarkan terselubung karena suara laki-laki sekaligus mewakili suara perempuan dan anak. Ketika seorang peneliti atau penulis menggali informasi tentang pengalaman perempuan maupun anak yang ditanya justru informan laki-laki karena keterangan laki-laki sudah dianggap mewakili mereka. Otomatis hal itu menjadi biasa dan suara perempuannya sendiri justru tidak muncul, subyektifitasnya menjadi tertiadakan.

Artinya perspektif perempuan dan anak dihalangi dan tidak bisa langsung mengungkapkan pengalamannya. Hal itu menunjukkan

kegagalan para peneliti selama ini atau penulis yang bermaksud ingin menggali pengalaman perempuan dan anak berdasarkan subyektifitasnya sendiri sehingga suara perempuan dan anak yang sesungguhnya tidak masuk dalam ranah analisis.

Para antropolog feminis berpendapat, kegagalan para peneliti di masa lalu untuk memperlakukan isu perempuan, anak dan gender sebagai isu yang signifikan telah mengarahkan pada kurangnya pemahaman tentang pengalaman manusia itu sendiri. Keadaan ini sama saja tetap membungkam perempuan dan anak sekaligus menjadikan perempuan dan anak sebagai objek karena realitas dan pandangan mereka diekspresikan dengan model laki-laki yang dominan. Tentu saja laki-laki dan perempuan serta anak punya pandangan berbeda tentang dunia yang melingkupinya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, agama maupun politik.

Bahkan pandangan laki-laki dan perempuan dari kelas sosial-ekonomi yang berbeda mempunyai perbedaan pandangan tentang dunia yang signifikan. Pandangan laki-laki yang berasal dari kelas menengah atas secara sosial dengan perempuan dan anak dari kelas sosial biasa tidak sama, begitu juga sebaliknya. Bahwa politik pengetahuan merupakan kunci isu pedagogis, karena bagaimana kita menceritakan kisah-kisah (persepsi diri) berkaitan erat dengan “cara kita memposisikan kisah sejarah pengalaman yang berhubungan satu dengan yang lainnya”.

Bagaimana caranya menuliskan perempuan dan anak agar dapat mengungkap pengalamannya sendiri atau menunjukkan perempuan dan anak sebagai subjek yang aktif berbicara? Penerbitan buku ini ingin menjembatani bagaimana seorang peneliti menuliskan perempuan dan anak yang semuanya bersumber langsung dari mereka sendiri (tanpa diwakilkan oleh siapapun/laki-laki) dan lebih mengedepankan sisi kemanusiaannya. Maka, kumpulan tulisan yang terangkum dalam buku ini adalah hasil penelitian dan merupakan sebagian gambaran perempuan beserta dinamikannya, seperti masih adanya diskriminasi dan kekerasan, upaya-upaya yang ditempuh perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya hingga perlawanannya.

Daftar Isi

Pengantar

- *Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.*

(*Rektor Universitas Mulawarman*)

v

Kata Pengantar:

Perempuan dan Kemanusiaan

- *Yayuk Anggraini (Pusat Penelitian Kesetaraan Gender*

dan Perlindungan Anak LP2M Universitas Mulawarman)

vii

BAB I

PERLAWANAN PEREMPUAN

1

GAMBARAN PEREMPUAN DI DALAM REALITAS
SOSIAL AMERIKA ABAD KE-19 DALAM CERPEN
PILIHAN KARYA CHARLOTTE PERKINS GILMAN

- *Fatimah M.*

3

CINTA, PERJODOHAN, DAN SPIRITUALITAS
RUMAH TANGGA DI ERA DIGITAL:

Kasus Novel Hati Suhita dan Pembacanya

- *Katrin Bandel*

17

PEREMPUAN KHEK SINGKAWANG MELAWAN
KEMISKINAN DAN KEKERASAN (STRUKTURAL)

- *Yayuk Anggraini*

33

BAB II

MENGIDENTIFIKASI DIRI

73

KLINIK KECANTIKAN: Komodifikasi Distingsi Sosial Baru
dalam Praktik Perawatan Kecantikan

- *Sri Murlianti*

75

KOMPETENSI WANITA DALAM BERBAHASA:

Antara Mitos dan Realita

- *Sumarni*

99

BAB III	
PENDAYAGUNAAN PEREMPUAN	107
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MEDIA DIGITAL: Sebuah Paradigma Komunikasi	
- <i>Rina Juwita</i>	109
PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA	
- <i>Fajar Apriani</i>	135
GURU BERSAYAP (SALING BERDAYA, ADAPTIF, DAN PROGRESIF): Sebuah Pendekatan dalam Menggugat Ketimpangan Gender di Sekolah	
- <i>Andi Wahyu Irawan</i>	159
KADER KESEHATAN: Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat	
- <i>Riza Hayati</i>	169
BAB IV	
KEKERASAN DAN DISKRIMINASI	195
ISU KEAMANAN DALAM KASUS <i>COMFORT WOMEN</i> JEPANG: Pendekatan Tradisional dan Non-Tradisional	
- <i>Uni W. Sagena, Ishaq Rahman, Mohd. Dino Khairri S.</i>	197
STRATEGI KOPING PEREMPUAN PENYITAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
- <i>Diah Rahayu</i>	211
STRES KERJA PADA PEKERJA PEREMPUAN DI REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN	
- <i>Dina Lusiana Setyowati, Rahman Baidawi, Reny Noviasty</i>	223
OBESITAS DAN KESEHATAN REPRODUKSI WANITA	
- <i>Danial</i>	247
DAMPAK <i>POST TRAUMATIC STRESS DISORDER</i> PADA ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL	
- <i>Hera Wahyuni</i>	263
PROFIL PENULIS	281

BAB I

PERLAWANAN
PEREMPUAN

GAMBARAN PEREMPUAN DI DALAM REALITAS SOSIAL AMERIKA ABAD KE-19 DALAM CERPEN PILIHAN KARYA CHARLOTTE PERKINS GILMAN

Fatimah M.

Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Mulawarman Samarinda
e-mail: fatimah_muhajir@yahoo.com

Pendahuluan

Gambaran perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi isu krusial yang banyak ditemui dalam berbagai aspek kehidupan. Umumnya, perempuan selalu mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan publik maupun lingkungan domestik. Perempuan selalu dianggap lebih pantas berada di lingkungan rumah, sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya sebagai istri yang melayani suami dan mengurus seluruh urusan rumah tangga lainnya. Hal tersebut dianggap menimbulkan permasalahan sebagai bentuk ketidaksamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat sehingga permasalahan tersebut mengundang kritikan dan kecaman dari masyarakat maupun para ahli, termasuk sastrawan.

Jika para kritikus mengkritik kasus melalui protes, melalui media massa, atau media elektronik, maka penulis sastra pun turut mengambil bagian dalam mengkritisi masalah sosial tersebut dalam bentuk tulisan atau karya sastra yang mereka ciptakan. Ada banyak karya sastra yang ditulis oleh para pengarang utamanya pengarang perempuan. Mereka

berusaha menyampaikan kepeduliannya terhadap kondisi perempuan dalam wujud kritikan yang dituangkan ke dalam bentuk karya sastra baik dalam bentuk novel, cerpen, puisi maupun dalam bentuk karya sastra lainnya.

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) adalah salah satu contoh penulis perempuan Amerika yang aktif menyuarakan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Amerika. Gilman telah menulis lebih dari dua ratus cerpen tentang masalah sosial, termasuk kehidupan perempuan dan peran perempuan dalam lingkungan sosial sehari-hari. Gilman secara jelas menggambarkan tentang berbagai problema yang dihadapi oleh kaum perempuan Amerika di abad ke-19 seperti yang terlihat dalam karya sastranya *The Yellow wall paper and Other Stories*. Karya tersebut merupakan kumpulan cerpen yang terdiri dari tujuh judul cerpen, diantaranya adalah *Turned*, *Making A Chance*, *If I were A Man*, *When I Was A Witch* dan *The Yellow wall paper*. Semua judul cerpen tersebut menceritakan tentang kondisi perempuan di Amerika abad ke-19.

Dari kumpulan cerpen tersebut, penulis memilih dua judul cerpen, yakni *Turned* dan *Making A Chance* sebagai bahan objek analisis dalam kajian ini. Cerpen dengan judul *Turned* ditulis oleh Gilman dengan menggambarkan kisah tiga tokoh penting dalam cerita, yakni Tuan Marroner, Nyonya Marroner dan seorang gadis muda bernama Gerta. Tuan Marroner adalah seorang pengusaha sukses dan memiliki seorang istri yang cerdas, yaitu Nyonya Marroner. Keseharian mereka dilayani oleh seorang pelayan muda bernama Gerta. Di awal cerita, Gerta dikisahkan termenung dalam kesedihan dipenuhi rasa takut dan cemas karena ketahuan ternyata diam-diam telah menjalin hubungan dengan majikannya yang tak lain adalah Tuan Marroner sendiri. Di sisi lain, Nyonya Marroner bahkan telah menganggap Gerta sebagai sahabatnya sendiri yang sangat disayaginya sejak kedatangannya di rumah mereka. Di sinilah muncul problema tentang hubungan yang rumit antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berumah tangga, yang secara perlahan-lahan menunjukkan bagaimana sesungguhnya peran para tokoh perempuan di dalam cerpen.

Hampir mirip dengan cerpen *Turned*, cerpen kedua dengan judul

Making a Change juga mengangkat kisah tentang konflik dalam keluarga tuan Frank Gordins dan istrinya bernama Julia. Mereka tinggal bersama ibu mertuanya, yaitu Nyonya Gordin Senior. Julia adalah seorang istri yang akhirnya meninggalkan profesinya sebagai guru setelah dia menikah dengan Tuan Gordin. Setelah melahirkan seorang bayi laki-laki, dia menjadi seorang ibu baru yang membuatnya dilema menghadapi berbagai kesulitan dalam rutinitas kesehariannya, termasuk kesulitannya dalam mengasuh bayinya sendiri serta kesulitannya dalam beradaptasi dengan ibu mertuanya sendiri. Di sisi lain, dia masih sangat bersemangat untuk tetap menjadi guru musik. Hal tersebutlah yang menimbulkan masalah pada diri Julia, dia merasa putus asa dengan tugas dan perannya, antara memilih menjadi ibu rumah tangga sejati atau menjadi wanita karir. Dalam kondisi dilema, merasa begitu tertekan sampai suatu ketika dia berusaha bunuh diri.

Dari kedua cerita ini, nampaknya Gilman menyuguhkan gambaran kehidupan para tokoh perempuan yang dihadapkan pada permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan domestik maupun dalam realitas sosial. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Lisa Hoffmann, dia menjelaskan bahwa Gilman berharap karyanya *Making A Change*, dapat menginspirasi perempuan agar melampaui batas antara ranah privat, publik dan akhirnya memasuki dunia kerja (Hoffmann, 2011). Dengan demikian, baik cerita *Turned* maupun *Making A change* dapat memperluas wawasan pembaca mengenai bagaimana gambaran peran tokoh perempuan abad ke-19 di masyarakat Amerika. Kumpulan cerpen Gilman itu disebut sebagai karya-karya feminis, karena pengarangnya sendiri adalah sastrawan feminis yang telah banyak berjasa dan berkontribusi ke dalam karya-karya sastra feminis dalam kesusastraan Amerika.

Dengan demikian kajian tentang subordinasi perempuan, penekanan pada perempuan dan pengaturan sosial yang menundukkan atau menindas perempuan dapat ditinjau lebih jauh melalui kajian feminisme. Teori feminis bervariasi, semuanya menganalisis pengalaman perempuan tentang subordinasi gender, akar dari penindasan perempuan, bagaimana ketidaksetaraan gender dilestarikan, dan menawarkan

solusi yang berbeda untuk ketidaksetaraan gender (Jones dan Michelle, 2008). Dalam buku *Kritik Sastra Feminis*, dijelaskan bahwa nilai-nilai tradisional menjadi penyebab yang menjadikan inferioritas dan peran, yang menghapuskan hak dan kebebasan perempuan sehingga tidak lagi menjadi perempuan ketergantungan. Seperti dalam masyarakat, mereka bergantung pada laki-laki, ayah, saudara laki-laki atau suami, terutama dalam ketergantungannya dari segi finansial, gagasan dan intelektual.

Dalam bidang sosial perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Karena budaya tradisional memaksa mereka untuk menjadi ibu rumah tangga, istri, atau ibu, menghabiskan waktu di lingkungan domestik saja, tidak berhak atas pendidikan dan profesi. Untuk itu, ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan memunculkan pemikiran mereka untuk memperjuangkan persamaan hak, baik dalam bidang ekonomi, masyarakat maupun pendidikan (Djajanegara, 2003:7). Dari fenomena seperti ini memicu munculnya gerakan feminisme untuk mendapatkan otonomi atau kebebasan menentukan dirinya sendiri. Feminisme memperjuangkan dua hal; pertama, perjuangan untuk persamaan hak. Kedua, memperjuangkan otonomi perempuan untuk menentukan apa yang baik untuk dirinya sendiri. Analisis feminisme harus mampu mengungkap aspek-aspek penindasan perempuan. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Castle (2007:94) bahwa, Mary Wollstonecraft salah satu kritikus feminisme dalam bukunya *Vindication of the Rights of Women* (1792), secara jelas mengkritik stereotip perempuan sebagai emosional dan naluriah, dia berpendapat bahwa perempuan harus mencita-citakan rasionalitas yang sama yang dihargai oleh laki-laki sebagai produk pencerahan. Wollstonecraft berpendapat bahwa perempuan harus menikmati kesetaraan sosial, hukum, dan intelektual seperti halnya para laki-laki.

Pembahasan

Gambaran perempuan dalam cerpen pertama berjudul *Turned*, Gilman dengan jelas menunjukkan kepada pembaca tentang bagaimana potret dua tokoh perempuan yang sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ilustrasinya, pertama Gilman mengilustrasikan tokoh perempuan yang berperan sebagai seorang pelayan bernama Gerta

Petersen. Dia adalah gadis muda yang lugu. Datang ke keluarga kelas menengah atas untuk mendapatkan pekerjaan diusia delapan belas tahun. Gerta adalah seorang yang cukup kuat, cantik dan penurut, akan tetapi tidak berpendidikan dan berjiwa kekanak-kanakan, berikut kutipannya:

“She had come like a meek young goddess into that perfectly ordered house, strong, beautiful, full of goodwill and eager obedience, but ignorant and childish — a girl of eighteen” (Gilman, 1995:48).

Menjadi pelayan muda di keluarga Maroner, Gerta tinggal di kamar kecil sederhana dilantai atas. Secara fisik, dia digambarkan sebagai perempuan yang cukup kuat dan cantik. Tapi secara emosional, dia sangat lemah dan tidak bisa membanggakan dirinya yang masih muda, cantik, dan kuat karena penderitaan, rasa sedih, rasa malu dan masa depan tanpa harapan.

“In her uncarpeted, thin-curtained, poorly furnished chamber on the top floor, Gerta Petersen lay sobbing on the narrow, hard bed. She was of larger frame than her mistress, grandly built and strong; but all her proud young womanhood was prostrate now, convulsed with agony, dissolved in tears. She did not try to control herself” (Gilman, 1995:47).

Dari kutipan ini dapat dikatakan bahwa, Gerta sesungguhnya adalah perempuan yang lemah dan polos. Dia lebih memilih merenungi dan menangisi nasibnya ketimbang mengendalikan dirinya, atau sekedar berfikir mencari solusi terhadap masalah yang menimpanya, tidak bisa menyampaikan pendapatnya, serta cara pandang yang terbatas. Dari sosok Gerta yang memiliki keterbatasan, pembaca akan merasa kasihan padanya. Gerta hanyalah gadis muda, naif, bodoh dan tidak berpendidikan. Dia menjalankan perannya sebagai seorang pelayan yang taat dan polos. Dalam narasi lain, karakter tersebut terlihat sangat jelas seperti komentar dari Nyonya Marroner sendiri:

“I never saw anyone so docile,” Mrs Marroner had often commented. “It is perfection in a servant, but almost a defect in character. She is so helpless and confiding” (Gilman, 1995:45).

Dari komentar ini, pembaca dapat melihat bagaimana Nyonya Marroner mengakui, bahwa Gerta adalah seorang pelayan yang penurut. Kata “docile” dapat diartikan perempuan “polos atau lugu” yang sangat patuh. Gilman mengungkapkan bahwa bagi seorang perempuan yang berperan sebagai pelayan adalah baik bagi perannya jika dia penurut, akan tetapi jika dia terlalu penurut pada apapun maka tidak baik bagi dirinya sendiri secara karakter. Karena, jika dia terlalu patuh pada apapun, itu akan membuatnya tidak berdaya sebagai seorang perempuan, dan membuatnya menjadi perempuan tak punya pendirian, yang bisa merugikan dirinya sendiri. Seperti pada narasi berikutnya, ketika Nyonya memeriksanya di kamar dilantai paling atas, “Nyonya Marroner menyaksikan wajah Gerta yang tak berdaya, karakter tak berdaya, dan ketaatan yang membuatnya begitu menarik” sehingga begitu mudah menjadi korban dari ketidakadilan majikannya.

Gambaran tokoh perempuan selanjutnya dalam cerpen ini, yaitu perempuan yang berperan sebagai seorang pendidik yang bijak, adalah Nyonya Marroner sendiri. Seperti yang diilustrasikan oleh Gilman pada halaman 56, bahwa Nyonya Maroner adalah “seorang istri yang penyayang, dan cukup bijaksana”. Gilman merepresentasikan sosok perempuan dalam kehidupan masyarakat melalui tokoh Nyonya Maroner sebagai tokoh perempuan yang pintar, dermawan, bijaksana, pandai mengambil sikap dalam rumah tangganya, berjiwa penyayang, bersikap baik kepada pelayannya dan mencintai suaminya.

“She had tried to teach Gerta, and had grown to love patiently, sweet-natured child, in spite of her dullness. At work with her hands, she was clever, if not quick, and could keep small accounts from week to week. But to the woman who held a Ph.D., who had been on the faculty of a college, it was like baby-tending. Perhaps having no babies of her own made her love the big child the more, though the years between them were but fifteen” (Gilman, 1995:50).

Gambaran sosok perempuan pada kutipan ini, yaitu Nyonya Maroner sebagai seorang perempuan mandiri, perempuan terpelajar yang bahkan pernah menyandang gelar Ph.D dan mengajar mahasiswa disebut

perguruan tinggi. Pembaca dapat melihat bahwa, Gilman menjelaskan bahwa sebagian perempuan sudah mulai menjadi guru, atau tutor di lingkungan masyarakat. Disini Gilman menggambarkan bahwa peran perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja yang tinggal di lingkungan keluarga sebagai pengurus rumah tangga. Sebagian perempuan sudah bisa berkarir di luar rumah dan mempekerjakan pembantu di rumah mereka. Sebagai seorang perempuan berpendidikan, Nyonya Marroner merasa bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing Gerta, seperti halnya seorang ibu yang mendidik anaknya sebagaimana mestinya. Dia begitu mencintai Gerta, bahkan memperlakukannya sebagai “the big child” seperti anaknya sendiri.

“But the training of the twenty-eight years which had elapsed before her marriage; the life at college, both as a student and teacher; the independent growth which she had made, formed a very different background for grief from that in Gerta’s mind” (Gilman, 1995).

Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa ada dua sosok perempuan dengan peran dan kedudukan yang sangat berbeda, yang satu adalah seorang istri yang berpendidikan sedangkan yang lainnya adalah seorang pelayan, yaitu gadis muda tidak berpendidikan. Seperti pada pernyataan “Here were two women and a man. One woman was a wife,...One was a servant” adalah seorang gadis muda yang lugu dan miskin, tidak berpendidikan yang hanya mencari nafkah dengan menjadi seorang pelayan. Karena dia sangat bersyukur atas segala kebaikan yang dia peroleh, dia tidak bisa menolak godaan tuan Marroner, majikannya sendiri.

Hal lain yang diangkat juga dalam deskripsi selanjutnya adalah Gilman menyampaikan bahwa beberapa perempuan sudah bisa mengenyam pendidikan formal seperti di perguruan tinggi “college”. Selain itu, beberapa perempuan kelas bawah sudah mulai dididik walaupun dalam bentuk pendidikan informal. Sebagai seorang istri yang terpelajar, Nyonya Maroner adalah perempuan yang berusaha menangani masalah rumah tangganya dengan cara yang bijak. Dengan cara berfikir yang tenang dia berusaha mencari jalan solusi atas masalah serius yang menimpanya.

Dari kasus perselingkuhan antara suami dan pembantunya, memaksa Nyonya Maroner untuk memainkan perannya sebagai istri dan benar-benar tertantang sebagai seorang perempuan terpelajar dalam mengatasi masalah. Nyonya Marroner bukannya mengusir suami dan pembantunya sendiri keluar rumah, namun dia cukup bijak untuk hal itu meskipun sebelumnya dia curiga kepada Gerta, namun Nyonya Marroner akhirnya “berbalik” untuk bersimpati kepada Gerta bahwa kesalahan tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan Gerta sebagai perempuan polos dan lugu. Dia mungkin seorang pelayan yang malang yang harus menghadapi betapa sulitnya godaan dari tuannya sendiri. Gilman menunjukkan bagaimana seorang perempuan seperti Nyonya Maroner memiliki kualitas yang cukup sebagai wanita yang ideal, penyayang, dan bijaksana, dalam menghadapi masalah keluarga.

Dia lebih memilih mengabaikan perasaannya sendiri ketimbang mengabaikan pikiran logisnya, misalnya dengan memikirkan nasib gadis malang dan bayinya kelak. Dia berkata “Aku akan berdiri disisi orang miskin, bodoh sampai semuanya selesai” dia bukan perempuan pengecut dan egois, dia memikirkan kehidupan gadis itu, dan memastikan bahwa gadis itu tidak terluka lagi. Dia lebih mengutamakan nasib orang lain ketimbang dirinya sendiri, “Karena wanita yang lebih tua, lebih bijaksana memaksa dirinya untuk memahami gadis itu” (Gilman, 1995:57). Selain itu, dengan latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman yang cukup baik di perguruan tinggi, kemudian dia mampu menjadi seorang guru, membangun kemandirian dan kedewasaan berfikir dan mengambil tindakan dan keputusan. Dengan demikian tokoh Nyonya Maroner sangat berbanding terbalik dengan tokoh Gerta. Demikian gambaran kedua tokoh perempuan dalam cerpen “Turned”.

Gambaran tokoh perempuan selanjutnya dapat dilihat di dalam cerpen kedua yang berjudul *Making A Change*. Karya ini juga merupakan salah satu karya sastra feminis paling terkenal dari pengarang Carrlotte Perkins Gilman. Cerita ini merupakan objek penelitian kedua, dimana di dalamnya menggambarkan secara gamblang tentang potret kehidupan perempuan yang direpresentasikan oleh tokoh utama bernama Nyonya Julia Gordin yang dapat dilihat ilustrasinya dalam penjelasan berikut ini:

Nyonya Julia adalah seorang istri dari tuan Frank Gordins. Dia

adalah seorang ibu muda dengan bayi laki-laki yang baru lahir. Dia tinggal bersama dengan ibu mertuanya, Nyonya Gordin senior. Di awal cerita para pembaca bisa melihat bagaimana peran dari tokoh perempuan ini. Ketika Julia diminta oleh suaminya Tuan Frank Gordins untuk menangani/menenangkan bayinya yang menangis terus menerus, tetapi dia sendiri tidak bisa menanganinya sebagaimana yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang ibu.

“WA-A-A-A! Waa-a-a-aaa!”

“Frank Gordins set down his coffee cup so hard that it spilled over into the saucer. “Is there no way to stop that child crying?” he demanded. “I do not know of any,” said his wife, so definitely and politely that the words seemed cut off by machinery” (Gilman, 1995:63).

Tuan Frank merasa stres dengan tangisan bayinya, Julia sendiri pun demikian, namun Julia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanyalah seorang ibu muda yang tidak memiliki cukup pengalaman dalam hal merawat bayi dengan baik. Selain itu Bu Gordins Senior bahkan merasa resah dengan tangisan cucunya. Sampai dia berkata “Sekali lagi tangisan lelah itu menjadi ratapan” (Gilman, 1995:63). Bu Gordin senior dan Frank mengolok Julia karena masalah itu, namun demikian sebagai seorang menantu perempuan dia cukup sabar terhadap ibu mertuanya. Dia menghormati mertuanya dan tidak pernah berkata kasar kepadanya, dia dengan lembut dan sopan berbicara kepadanya. Sementara itu, Ibu mertua Julia menganggap Julia telah mengabaikan kewajibannya, kurang bertanggung jawab atas perannya sebagaimana ibu. Seperti kutipan dibawah ini:

“The child was her child, it was her duty to take care of it, and take care of it she would. She spent her days in unremitting devotion to its needs, and to the care of her neat flat; and her nights had long since ceased to refresh her” (Gilman, 1995:66).

Ibu Gordins senior, mengkritik menantu perempuannya yang sudah memiliki seorang anak, tetapi belum cukup mampu menjalankan tanggung jawabnya, dalam mengasuh anaknya, merawat rumahnya agar rapi,

bukan menghabiskan banyak waktu untuk kepentingannya sendiri lalu mengabaikan peran utamanya adalah sebagai ibu dan istri. Dalam kasus lain, Tuan Frank juga mengungkapkan kekecewaannya dengan Julia.

“This being married—and bringing up children—is not what it’s cracked up to be.” That was the feeling in the back of his mind. But it did not find full admission, much less expression” (Gilman, 1995:67).

Gambaran perempuan dikutipan ini memperlihatkan bagaimana seorang perempuan yang telah menjadi ibu dituntut untuk bisa merawat anaknya dengan baik. Sebagaimana ilustrasi dari Tuan Frank ketika dia merasa sangat stres dengan istrinya, dia menuntut istrinya agar bisa merawat bayinya seperti yang pernah dilakukan ibunya yang dulu. Dia sangat berharap mendapatkan kebahagiaan dari pernikahannya, memiliki anak dan membesarkan anak mereka dengan baik, memiliki keluarga yang harmonis sebagaimana mestinya, namun harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimanapun dia cukup baik untuk menjaga masalah keluarganya dari orang lain. Ketika dia keluar, dan orang-orang bertanya kepadanya tentang tangisan putranya. Sebagai narasinya:

“When a friend asked him, “All well at home?” he said, “Yes, thank you—pretty fair. Kid cries a good deal— but that’s natural, I suppose” (Gilman, 1995:67).

Pada percakapan ini, terlihat bahwa tuan Frank merasa tidak terlalu penting untuk memberi tahu orang-orang tentang kehidupan keluarganya, termasuk tangisan anak laki-lakinya yang secara tidak langsung akan berkaitan dengan tanggung jawab istrinya. Dia nampak menjaga citra istrinya dengan mengatakan bahwa tangisan bayi yang terdengar itu hal yang wajar. Kemudian dibagian akhir cerita, pembaca dapat menyadari, fakta bahwa Julia adalah istri yang cukup baik meski belum bisa menjadi ibu yang baik. Dia hanyalah seorang perempuan muda yang telah menikah namun masih ingin mengejar karirnya. Namun demikian dia tetap menunjukkan betapa dia mencintai keluarganya.

“And dear—my own love —I don’t mind it now at all! I love my home, I love my work, I love my mother, I love you. And as to children —I wish I had six!”

... “And in after years he was heard to remark, “This being married and bringing up children is as easy as can be —when you learn how!” (Gilman, 1995:75).

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa meskipun Julia seorang wanita karir, yang mencintai pekerjaannya. Dia tetap berusaha menunjukkan kecintaannya kepada keluarganya, suaminya, ibu mertuanya, rumah serta anaknya. Bahkan justru ingin melahirkan anak yang lebih banyak lagi. Meskipun dia masih muda dan belum cukup kompeten untuk merawatnya, akan tetapi dia akan belajar membesarkan anak-anaknya. Dari kutipan ini Gilman nampak menyampaikan tentang peran perempuan, selain berkarir dan terlibat langsung di lingkungan publik, perempuan juga tetap punya tanggung jawab di rumahnya, dimana naluri seorang perempuan adalah sebagai istri dan sebagai ibu yang melahirkan generasi.

Kesimpulan

Setelah melakukan kajian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Gilman menampilkan ideologi feminis yang dituangkan dalam cerpen *Turned* dan *Making A Change*. Kedua cerpen tersebut dengan jelas menunjukkan citra perempuan pada abad ke-19, yang menginginkan persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan tidak hanya ditempatkan di ranah domestik saja tapi juga dilibatkan di lingkungan sosial masyarakat. Ringkasnya, cerpen *Turned*, mengelaborasi citra perempuan di bawah sistem patriarki yang pada akhirnya bangkit melawan ketidakadilan sistem patriarki. Gambaran perempuan yang direpresentasi oleh Nyonya Maroner lebih memilih “Berbalik” menjadi perempuan berpendidikan yang terlibat langsung berpartisipasi di lingkungan akademik sebagai pendidik yang cerdas, ketimbang tetap berada dalam perlakuan tidak adil suaminya yang tidak loyal. Ini merupakan bukti nyata bahwa perempuan bangkit memperjuangkan kebebasan dan melawan ketidakadilan.

Sementara itu, pada cerpen yang kedua juga jelas menggambarkan kondisi perempuan tentang ekstremitas kebutuhan perempuan dalam

menghadapi konflik keluarga, seperti dalam upaya bunuh diri yang direpresentasikan oleh tokoh Julia Gordins dalam *Making A Change*, yang pada akhirnya “membuat perubahan” sebagai solusi terhadap tuntutan peran perempuan dirumah domestik saja atau ikut berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Sehingga gambaran perempuan yang direpresentasikan oleh tokoh Julia memperlihatkan bagaimana pentingnya keselarasan dan keseimbangan, dimana perempuan bisa tetap berkarir di luar rumah seperti halnya menjadi guru namun juga tidak mengabaikan kepedulian dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Secara sederhana baik cerita *Turned* maupun *Makin A Change* seolah-olah mematahkan tradisi lama bahwa perempuan dimasa lalu hanya disimbolkan sebagai sosok yang lemah yang tidak punya kemampuan untuk turut berperan andil dalam lingkungan sosial masyarakat. Akan tetapi, kedua cerpen ini menyampaikan bagaimana perempuan menginginkan hak yang sama dengan laki-laki baik dalam hak perolehan pendidikan, pengembangan profesional, serta turut berperan andil dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Castle, Gregory, *The Blackwell Guide to Literary Theory*, USA: Blackwell Publishing, 2007.

Djajanegara, Soenarjati, *Kritik Sastra Feminist*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Gilman, Charlotte Perkins, *The Yellow Wallpaper and Other Stories*, England: Penguin Books, 1995.

Guzelyurt, Sedef, “Motherhood and Liberation in *Making a Change* by Charlotte Perkins Gilman”, *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, Turkey: Istanbul Aydın University, Volume 5 Issue 1 June 2018. Retrieved on February, 20 2020.

Hoffmann, Lisa, Charlotte Perkins Gilman's "Making A Change", Literature and Diversity UNC Chapel Hill, 2011. Retrieved on February, 20 2020.

Jones and Michelle, Feminine Theory, University of Massachusetts Publications, 2008.

CINTA, PERJODOHAN, DAN SPIRITUALITAS RUMAH TANGGA DI ERA DIGITAL: Kasus Novel *Hati Suhita* dan Pembacanya

Katrin Bandel

Pascasarjana Kajian Budaya,
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

***Hati Suhita*: sebuah Novel Pesantren di Tengah Politik Identitas Khas Era Digital**

Era masa kini, yaitu era dimana internet memainkan peran yang semakin besar serta dapat diakses dengan semakin mudah, dinamai dengan berbagai istilah, di antaranya era digital, atau era informasi. Oleh Manuel Castells, masyarakat khas era ini disebut sebagai *network society*, yang didefinisikannya sebagai berikut:

“A network society is a society whose social structure is made of networks powered by microelectronics-based information and communication technologies.” (Castells 2004, hlm. 3)

Informasi yang mengalir tanpa batas yang tegas tersebut, kerap kali secara global, menjadi realitas keseharian kita, yang mempengaruhi hampir semua aktifitas kita. Antara lain, pembentukan identitas pun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh media. Dengan menggunakan konsep *network society* yang diperkenalkan oleh Castells, Imma Tubella menyimpulkan:

“The development of the media has transformed identity and, above all, identity building, a process increasingly dependent on forms of interaction which involve media products such as books, television, cinema, and the Internet.” (Tubella 2004, hlm. 397-398)

Simbol dan informasi yang digunakan dalam pembentukan identitas, baik identitas individual maupun komunal, lazim dikomunikasikan lewat jaringan internet atau media lain. Meskipun identitas tersebut pada dasarnya bersifat plural, dengan kemungkinan pembentukan identitas yang seakan-akan hampir tanpa batas sama sekali, pada kenyataannya jaringan-jaringan tertentu lebih berkuasa daripada yang lainnya, misalnya disebabkan oleh kekuatan finansial, akses, penguasaan teknologi, atau kecanggihan wacana.

Maka tidak terlalu mengherankan kalau era digital ini disambut oleh masyarakat Indonesia dengan sikap yang cenderung ambivalen. Di satu sisi muncul antusiasme akan berbagai kemudahan dan kesempatan baru yang dibawa oleh media baru di era digital tersebut. Tapi di sisi lain, berbagai kekhawatiran pun terus-menerus disuarakan, terutama terkait pembentukan identitas generasi muda. Pengaruh akses informasi yang semakin meluas, begitu sulit diprediksi. Bagaimana caranya agar remaja dan anak muda jangan terlalu terpengaruh oleh jaringan-jaringan dominan, entah dalam arti, misalnya, meniru gaya hidup ala film Hollywood, ataupun sebaliknya, terserap ke dalam gerakan radikalisme agama yang menyerukan kebencian pada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologinya?

Dalam tulisan ini, saya akan membahas kasus sebuah novel yang lahir dari kalangan masyarakat yang representasinya di internet masih cenderung kalah masif dan “kalah canggih” dengan jaringan-jaringan dominan (yang umumnya bersifat global). Yang saya maksudkan adalah masyarakat pesantren tradisional. Dunia pesantren inilah yang menjadi setting novel *Hati Suhita* karya Khilma Anis yang hendak saya bahas di sini. Yang membuat novel itu relevan dikaji dalam konteks era digital ini adalah bahwa novel tersebut memang pada mulanya ditulis di media sosial. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Khilma mulai menuliskan kisah tersebut secara

bersambung di dinding *facebook*nya. Menurut pengakuannya, saat itu ia belum memiliki niat untuk menjadikannya sebuah novel. Namun karena cerita tersebut disambut dengan amat sangat antusias oleh pembacanya, dan kemudian menyebar luas di internet maupun lewat aplikasi komunikasi khusus *smartphone* seperti grup *WhatsApp*, maka Khilma tergerak untuk melanjutkannya. 13 episode ditulis dan disebar dengan cara seperti itu, sebelum Khilma kemudian menghentikannya, menyelesaikan novel itu secara *offline*, lalu menerbitkannya sebagai buku. Salah satu alasan mengapa Khilma tidak melanjutkan novelnya secara *online* adalah karena mulai ada usaha plagiasi, yaitu orang lain menyebarkan tulisannya dengan mengakuinya sebagai karyanya sendiri.

Yang akan secara khusus saya bicarakan di sini adalah wacana seputar pengalaman berumah tangga, baik dalam teks novel tersebut, maupun dalam respon pembaca yang diperoleh Khilma Anis dari para pembacanya. Mengenai hal terakhir, saya merujuk pada presentasi penulisnya saat novel tersebut didiskusikan di UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) pada tanggal 26 April 2019 (dimana saya menjadi salah satu pembicaranya), pada respon audiens di acara tersebut, dan pada wawancara dengan Khilma pada tanggal 10 Agustus 2019. Perjudohan dan pengalaman berumah tangga memang menjadi topik utama novel tersebut, yang akan saya kaji dari segi konsep perkawinannya yang hibrid, serta dari segi norma dan nilai spiritual yang digunakan dalam memaknainya.

Suhita, Gus Birru, dan Rengganis: Kisah Cinta Segi Tiga Khas Pesantren yang Mengundang Identifikasi Pembaca

Seperti yang sudah disebut di atas, novel *Hati Suhita* bersetting pesantren. Kedua tokoh utamanya, yaitu Alina Suhita dan Gus Albirruni (yang biasa dipanggil Gus Birru), sama-sama merupakan anak kiai. Mereka saling dijodohkan sejak kecil oleh kedua keluarga mereka, dan akhirnya menikah sesuai rencana. Namun malangnya, hati Gus Birru sudah terpaut pada perempuan lain, yaitu Ratna Rengganis. Meskipun patuh pada keinginan orang tuanya untuk menikahi Suhita, selama bulan-bulan pertama pernikahannya, Gus Birru belum memiliki cinta untuk istrinya. Pasangan muda tersebut tinggal bersama orang tua Gus Birru di

pesantren pimpinan mereka, dan Suhita segera ikut mengurus pesantren tersebut sesuai harapan mertuanya. Di depan orang tua tersebut, Gus Birru dan Suhita berperan sebagai pangantin baru yang bahagia. Namun di dalam kamar, Gus Birru mendiamkan istrinya. Suhita tidak diajaknya berkomunikasi, apalagi disentuhnya. Mereka pun tidak tidur seranjang.

Hati Suhita diawali dengan pengisahan dari perspektif Suhita, dan perspektif itulah yang paling dominan sepanjang novel. Khilma Anis menggambarkan penderitaan Suhita dengan mahir dan mendetail, sehingga memudahkan identifikasi pembaca. Berbeda daripada Gus Birru, Suhita siap untuk menjalani perannya sebagai istri, dan ia mengharapkan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari suaminya. Sikap dingin Gus Birru serta kehadiran Rengganis dalam hidupnya, sangat mengecewakan dan menyakiti hatinya. Namun meskipun sadar bahwa dirinya diperlakukan tidak seperti semestinya, Suhita memutuskan untuk bersabar. Dia menangis seorang diri di dalam kamar, tapi bersandiwara di depan mertuanya. Pada ujung novel, setelah tujuh bulan, kesabaran tersebut akhirnya membuahkan hasil. Gus Birru melepas keterikatannya pada Rengganis, dan berpaling pada istrinya.

Menurut cerita Khilma, selain komentar publik di *facebook*, dirinya menerima sangat banyak pesan pribadi sebagai respon atas kisah *Hati Suhita*. Saat saya menanyakan kira-kira berapa jumlah pesan semacam itu yang diterimanya, Khilma menjawab: “tak terhitung banyaknya”. Banyak di antara pesan tersebut mengandung *sharing* pengalaman yang oleh sang pembaca, dengan alasan pengalamannya terwakili oleh plot novel *Hati Suhita*.

Sebetulnya, kisah cinta segi tiga bukanlah hal yang sangat istimewa untuk sebuah karya sastra. Banyak novel menggambarannya. Mengapa novel yang satu ini mendapat respon yang demikian fenomenal? Sesuai pengakuan Khilma, respon yang diterimanya sangat sering berangkat dari identifikasi pembaca dengan salah satu tokoh, berdasarkan pengalaman hidup masing-masing. Ada yang merasa (pernah/sedang) berada di posisi Suhita, Gus Birru, atau Rengganis, ataupun di posisi Kang Darma, yaitu tokoh laki-laki yang sempat agak dekat dengan Suhita (tapi tidak berpacaran seperti Gus Birru dan Rengganis). Di sini novel *Hati Suhita*

memang memberikan ruang identifikasi yang cukup unik, disebabkan oleh topik perjodohan yang menjadi permasalahan utama dalam novel tersebut. Respon pembaca mengisyaratkan bahwa peristiwa semacam itu, yaitu pilihan jodoh yang ditentukan oleh orang tua, serta tantangan yang dibawa oleh perjodohan tersebut bagi sang anak yang mungkin sudah punya pilihannya sendiri, bukanlah hal langka dalam masyarakat Indonesia. Menurut pengakuan Khilma, sebagian pembaca beridentifikasi secara khusus dengan kebiasaan perjodohan di kalangan pesantren, misalnya karena sang pembaca merupakan anak kiai yang dijodohkan, ataupun justru berposisi sebagai pacar anak kiai yang sadar akan risiko patah hati karena sang pacar tidak akan berani menentang pilihan orang tua. Namun, selain itu juga ada pembaca yang berasal dari kalangan lain, yang ternyata tetap menemukan titik-titik identifikasi dalam novel tersebut.

Uniknya, antusiasme pembaca bukan sekadar menggerakkan Khilma untuk lanjut menulis, tapi juga mempengaruhi isi kisah yang ditulisnya, khususnya dalam kaitan dengan aspek naratologis. Awalnya, karena pengisahannya murni dari perspektif Suhita, banyak pembaca mengutarakan rasa jengkel atau benci terhadap Rengganis, juga terhadap Gus Birru. Khilma tidak rela bahwa pembaca menilai tokohnya secara hitam-putih seperti itu. Maka, tokoh yang oleh pembaca dipersepsi sebagai antagonis, dan direspon dengan emosi negatif, kemudian diangkatnya dan diberinya suara (lewat pergantian narator). Pembaca diajak melihat persoalan dari perspektif yang plural, dan dengan demikian, untuk berhenti memberi penilaian negatif pada tokoh tertentu. Tidak ada manusia jahat dalam novel itu. Yang ada hanyalah ujian kehidupan lewat konstelasi cinta segi tiga yang menyakitkan, yang pada akhirnya berhasil dilalui dengan baik oleh semua tokoh yang terlibat.

Topik Perjodohan dalam Sastra Indonesia

Perjodohan (dalam arti: praktek dimana sepasang laki-laki dan perempuan saling dijodohkan oleh pihak ketiga, biasanya keluarga) bukanlah topik baru dalam sastra Indonesia. Justru topik tersebut hadir sejak awal bersama kelahiran sastra modern Indonesia. Novel-novel yang ditulis di zaman kolonial, baik yang diterbitkan oleh penerbit kolonial Balai

Pustaka maupun di luarnya, banyak yang mempersoalkannya. Dalam novel-novel Balai Pustaka awal seperti *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar (1921) atau *Dian yang tak Kunjung Padam* karya Sutan Takdir Alisjahbana (1932), adat perjodohan dipertentangkan dengan cinta. Adat umumnya terkesan kejam dan terkebelakang, sehingga membawa penderitaan bagi tokoh yang dijodohkan. Kecenderungan penggambaran semacam itu sangat sesuai dengan orientasi Balai Pustaka secara keseluruhan, yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan yang melayani kepentingan kolonial (lihat Jedamski 1992). Berbagai aspek adat setempat digambarkan sebagai kolot, bodoh, dan menyengsarakan, sehingga dibutuhkan modernisasi dalam bentuk adopsi gaya hidup Eropa. Adat perjodohan menjadi salah satunya. Maka, kisah rumah tangga bahagia yang berawal dari perjodohan, sulit dicari dalam karya sastra masa itu.

Kecenderungan untuk mempersepsi dan menggambarkan perjodohan sebagai bentuk kekolotan yang mengekang, masih bisa diamati sampai sekarang, baik dalam karya sastra, maupun di masyarakat. Lazim kita mendengar ucapan “ini bukan zaman Sitti Nurbaya lagi”, merujuk pada novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli (1922). Namun pada kenyataannya, praktek perjodohan tidak lenyap di masyarakat Indonesia. Apakah anak-anak muda yang mengalaminya, rata-rata merasa sengsara serupa Samsulbahri dan Nurbaya dalam novel *Sitti Nurbaya*? Saya rasa, antusiasme terhadap novel *Hati Suhita* memberi jawaban terhadap pertanyaan itu. *Hati Suhita* tidak mengidealisasi praktek perjodohan, namun juga tidak mendemonisasi atau merendahnya. Meskipun harus melewati perjuangan yang berat, pada dasarnya Suhita dan Gus Birru novel *Hati Suhita* menerima pernikahan atas pilihan orangtua mereka sebagai hal yang tidak salah atau negatif. Terselenggaranya pernikahan itu tidak digambarkan sebagai paksaan, seperti dalam novel Balai Pustaka. Gus Birru dan Suhita menuruti kehendak keluarga mereka atas dasar pilihan mereka sendiri, bukan karena dipaksa. Dalam kasus Gus Birru, yang mendasari keputusan tersebut adalah rasa kasih sayangnya kepada ibunya: meskipun dengan sangat berat hati, Gus Birru tidak tega untuk melawan keinginan ibunya.

Sejauh yang bisa saya amati, representasi praktek perjodohan

yang lebih berimbang semacam itu memang masih langka dalam sastra Indonesia, maupun dalam kisah cinta di media lain (film, televisi, dsb). Mungkin karena itulah, respon terhadap novel yang satu ini begitu luar biasa, meskipun nama penulisnya belum cukup begitu terkenal, dan tidak ada usaha lebih dalam mempromosikan novel tersebut.

Cinta dan Perjodohan di Tengah Hibriditas Pascakolonial

Ada berbagai cara, bagaimana sebuah rumah tangga dapat diawali. Apakah sang laki-laki dan sang perempuan saling berkenalan secara mandiri, atau dijodohkan oleh pihak ketiga, seperti keluarga, agamawan, atau pengantara lainnya? Dasar dalam memilih pasangan pun beraneka ragam. Apakah pasangan dipilih, misalnya, karena cinta, karena kecocokan dari segi status sosial, agama, atau minat, karena kepentingan ekonomi, atau karena kedekatan antara dua keluarga? Sangat beraneka ragam kemungkinannya.

Seperti yang sudah saya singgung di atas, novel-novel Balai Pustaka awal mengkonstruksi cinta sebagai dasar yang paling sah bagi sebuah rumah tangga, dan menggambarkan pertimbangan lain (seperti keamanan ekonomi, status sosial, atau kebiasaan adat) sebagai kolot dan menyengsarakan. Cinta direpresentasikan sebagai hal yang paling alami dan wajar sebagai dasar pilihan pasangan. Dari manakah asal gagasan tersebut, yaitu bahwa cinta merupakan prasyarat utama bagi sebuah perkawinan? Sosiolog Eva Illouz berpendapat bahwa dalam dunia pra-kapitalis, status sosial dan ekonomis menjadi faktor utama dalam pilihan jodoh. Alasannya adalah bahwa pada masa itu, kehidupan ekonomi berpusat pada keluarga. Orang mencari nafkah bukan secara individual di luar rumah, tapi sebagai unit keluarga yang bekerja sama. Kemampuan finansial menjadi sangat penting di situ, sehingga pilihan untuk menaikkan status diri dengan cara menikahi orang yang memiliki kemampuan finansial lebih, menjadi hal yang sangat wajar. Kapitalisme membawa perubahan yang mendasar terhadap konsep rumah tangga:

“because capitalism made economy into a specialized activity – independent of sexual reproduction and marriage – it also made the

family into a non-economic unit, an emotional hot house in which men and women would become increasingly preoccupied with their mutual love, sexuality, individual self-development and parental affection.” (Illouz 2006, hlm. 42)

Akibat industrialisasi dan profesionalisasi, dalam sistem kapitalis umumnya orang mencari nafkah dengan meninggalkan rumah (ke kantor, pabrik, dsb) selama jam kerja. Suami-istri tidak lagi bekerja sama dalam menjalankan usaha tertentu, dan anak-anak tidak perlu dilibatkan dalam pekerjaan serta dididik mempelajari skill yang sama yang dimiliki oleh orang tuanya, sebab profesi tidak lagi diwariskan dari ayah ke anak seperti di masa lampau. Menurut Illouz, kondisi itulah yang melahirkan konsep cinta romantis sebagai prasyarat rumah tangga. Rumah tangga terkonstruksi sebagai ruang privat yang diharapkan memberi kebahagiaan, cinta, serta memungkinkan ekspresi diri yang otentis – semacam tempat berteduh yang nyaman di tengah dunia luar yang dikuasai oleh pertimbangan ekonomis, efisiensi, dan profesionalisme. Berbeda daripada di zaman pra-kapitalis, cinta mendapat peran yang sangat penting demi kesuksesan dan kebahagiaan hidup:

“I would say that modernity has made love into our categorical imperative, the experience without which we do not feel fully accomplished human beings.” (Illouz 2006, hlm. 43)

Dalam konteks masyarakat pascakolonial seperti yang digambarkan oleh novel *Hati Suhita*, tidak mengherankan kalau gagasan mengenai cinta, perkawinan, dan rumah tangga bersifat hibrid, yaitu campuran antara rumah tangga modern (kapitalis) dan konsep cinta romantis, dengan konsep-konsep lain yang bersifat lokal. Dalam dunia pesantren yang digambarkan di novel tersebut, tugas pengelolaan pondok menurun dari orangtua kepada anak. Pasangan suami-istri hidup bersama dalam keluarga besar (bukan dalam keluarga inti seperti yang lazim bagi rumah tangga modern Barat), dan menjalankan tugas kepemimpinan pesantren secara bersama-sama. Dengan demikian, pilihan jodoh tidak mungkin didasarkan hanya pada rasa cinta, sebab sang pasangan mesti membawa

kemampuan dan pengetahuan yang tidak sedikit demi menjalankan tugasnya di pesantren. Itulah yang menjadi dasar sikap orang tua Gus Birru dalam *Hati Suhita*: Suhita disiapkan jauh-jauh hari, agar memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengambil peran kepemimpinan di pesanten.

Hubungan Gus Birru-Rengganis, di sisi lain, merupakan percintaan romantis khas zaman modern. Mereka berjumpa di luar pengaruh dan pengetahuan keluarga masing-masing, disebabkan oleh minat yang sama, obrolan yang nyambung, serta ketertarikan fisik. Seperti yang diutarakan Illouz, cinta romantis cenderung tidak bisa dipisahkan dari budaya konsumen (Illouz 2006, hlm 43). Apa yang umumnya kita sebut “pacaran”, hampir selalu melibatkan aktifitas konsumtif tertentu, seperti makan bersama atau nonton bersama. Dalam deskripsi hubungan Gus Birru dengan Rengganis, pertemuan yang digambarkan umumnya terjadi di cafe atau warung makan. Berulang kali, terutama untuk pertemuan pertama dan pertemuan terakhir mereka yang dideskripsikan secara mendetail, tempat pertemuan tersebut digambarkan dengan berbagai detail, termasuk suasana cafe/warung dan jenis makanan yang dipesan (bab “Kelana Kejora”, “Riak-riak Ingatan”, dan “Megat Rasa”). Bahkan, pada pertemuan terakhir mereka, pergantian suasana sengaja dilakukan dengan cara pindah cafe, yang memudahkan Rengganis untuk menyampaikan bahwa dirinya berniat kuliah di luar negeri demi mengakhiri kedekatan mereka yang dirasakannya sudah tidak sehat, sebab Gus Birru sudah menikah.

Namun utopia cinta romantis - dengan definisi utopia sebagai “a narrative through which societies think out loud about and formulate their preferred social arrangements” menurut Illouz (Illouz 2006, hlm. 44) – hadir bukan hanya dalam hubungan Gus Birru-Rengganis, tapi juga antara Gus Birru dengan istri pilihan orang tuanya, Suhita. Salah satu bab yang memberi suara pada Gus Birru sebagai narator, diawali dengan kalimat-kalimat seperti berikut:

“Sebenarnya aku bisa saja menggaulinya malam itu juga. Dia toh, sudah hakku. Tubuhnya juga. Tapi aku tak mungkin mengoyak tubuh perempuan tanpa rasa cinta.” (*Hati Suhita*, hlm. 135)

Di satu sisi, Gus Birru menerima perjodohan dengan perempuan pilihan orang tuanya, meskipun dengan berat hati. Artinya, dia menerima untuk memasuki rumah tangga tanpa adanya rasa cinta lebih dahulu. Di sisi lain, pada saat bersamaan ia menuntut diri untuk merasakan cinta romantis lebih dulu sebelum merealisasikan ikatan pernikahan itu di atas ranjang, sesuai dengan tuntutan konsep pernikahan modern. Dari konsep pernikahan yang hibrid inilah, lahirlah drama rumah tangga dikisahkan dengan segala detailnya dalam novel *Hati Suhita*: Suhita berjuang untuk sabar menanti suaminya belajar mencintainya, Rengganis berjuang untuk melepas Gus Birru, dan Gus Birru berjuang untuk melupakan Rengganis dan mencintai Suhita. Di saat yang sama, di hadapan generasi yang lebih tua, rumah tangga hasil perjodohan itu harus diperankan dengan sikap seakan-akan tidak terjadi pertentangan apa pun antara perjodohan atas dasar pilihan orangtua, dan cinta romantis.

Tampaknya hibriditas itulah yang menjadi ruang identifikasi pembaca. Utopia pembaca sama dengan utopia tokoh novel tersebut, yaitu cinta romantis. Di saat yang sama, mereka mengenal, dan kerap kali ikut mengalami, perjodohan yang direncanakan oleh orang tua. Karena mayoritas pembaca *Hati Suhita* berasal dari kalangan pesantren, mereka tentu maklum akan kebutuhan keluarga pengelola pesantren untuk melakukan regenerasi dengan terencana, termasuk dengan cara menjodohkan putra-putri mereka. Kondisi khas itulah, dimana konsep rumah tangga modern atas dasar cinta dan realisasi diri berjumpa dengan konsep lokal pesantren yang menuntut agar kehendak pribadi dikorbankan demi kelanjutan institusi pendidikan agama dengan segala kekhasannya itu, yang tampaknya berhasil dipotret Khilma Anis dengan tepat dalam novelnya, sehingga sekian pembaca merasa tersapa dan terwakili.

Nilai Spiritual Novel *Hati Suhita*

Namun yang disukai pembaca dalam novel tersebut bukan sekadar penggambaran cinta segi tiganya dengan segala perjuangannya dalam kultur khas pesantren, tapi juga nilai-nilai yang disampaikan lewat penggambaran tersebut. Fokus utama dalam hal itu terletak pada sikap tokoh perempuannya, terutama tokoh Suhita. Menurut cerita Khilma

mengenai respon yang didapatkannya dari pembaca, banyak pembaca mengagumi sikap Suhita dalam menghadapi tantangan rumah tangganya. “Banyak yang berkomentar dirinya merasa tercerahnya, misalnya, ‘sayangnya saya baru tahu *mikul duwur* sekarang”, begitu keterangan Khilma. Yang dimaksudkan adalah peribahasa Jawa “mikul duwur mendem jero” (memikul tinggi, memendam dalam), yang mendeskripsikan sikap dimana hanya hal-hal yang baik saja ditampilkan di hadapan orang lain, sedangkan hal buruk atau penderitaan dipendam sendiri. Memang demikianlah sikap Suhita. Ia sering menangis, namun hanya di dalam kamar. Dia luar kamar, ia menampilkan wajah cerah. Kemampuannya mengendalikan emosinya tersebut, menjadikannya tokoh yang terkesan kuat dan anggun.

Yang bagi saya menarik dalam penokohan Suhita tersebut adalah bahwa meskipun Suhita digambarkan sebagai perempuan dengan akhlak yang sangat baik dan sikap yang halus dan kuat, tidak terjadi idealisasi yang berlebihan. Kesabaran Suhita bukanlah semacam sifat bawaan yang dengan ringan dijalani, seakan-akan dirinya memang “sudah ideal dari sononya”. Sebaliknya: ia harus berjuang keras untuk mempertahankannya. Dan kesanggupannya untuk bertahan tersebut, bukan tanpa batas. Misalnya, setelah sekian lama memendam segala permasalahannya seorang diri, ia akhirnya sampai di sebuah titik dimana ia tidak mampu untuk memendamnya lagi, lalu ia tumpahkan semuanya dalam obrolan dengan seorang sahabat baiknya. Lalu menjelang akhir novel, kesabarannya sekali lagi sampai di titik penghabisannya saat Gus Birru tiba-tiba membawa Rengganis berkunjung ke rumah. Dengan terburu-buru ia pergi meninggalkan rumah mertuanya, sehingga untuk beberapa hari seluruh keluarga menjadi cemas karena tidak mengetahui keberadaannya.

Perjuangan yang dilalui oleh Suhita digambarkan bukan sekadar sebagai sebuah strategi untuk bertahan dalam kondisi rumah tangga yang kurang menyenangkan. Cobaan yang dilewatinya, dimaknainya sebagai bagian dari pertumbuhan dirinya. Meskipun berat dijalani, hikmahnya dapat disyukurinya. Di ujung novel, saat hubungan Gus Birru dan Suhita akhirnya membaik, Suhita berefleksi:

“Mas Birru memang menyiksaku dalam diamnya selama tujuh bulan ini, tapi dari sana, aku justru menyadari kekuatanku. Aku tumbuh menjadi menantu yang matang dan istri yang tidak manja. Bahkan aku membesarkan Al-Anwar dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Kebekuan Mas Birru memberiku peluang yang sangat luas untuk membangun kehangatan antara aku, abah, ummik, dan santri-kami. Dalam keangkuhannya, Mas Birru telah mendidikku untuk kuat dan tidak bergantung. Dari sanalah aku memahami diriku dengan lebih utuh sampai aku menyadari potensiku di tengah keluarganya.” (*Hati Suhita*, hlm. 370)

Hibriditas konsep rumah tangga, sekali lagi terekspresikan di sini. Di satu sisi, Suhita mengharapkan cinta romantis, dan ia menderita selama cinta tersebut belum terwujud. Namun di sisi lain, ia sekaligus mementingkan perannya sebagai menantu, serta tugasnya di pesantren Al-Anwar. Di samping itu, pemikirannya sangat diwarnai oleh spiritualitasnya. Kesabarannya pun bukan sekadar dipahaminya sebagai alat untuk mengantarkannya pada kemesraan suami-istri yang telah sekian lama dinantikannya, tapi sebagai penempaan diri yang membuahkan pendewasaan, kekuatan, dan kemandirian.

Adil Genderkah?

Nilai akhlak yang saya gambarkan di atas, bersifat *gendered*. Tentu saja nilai seperti kesabaran atau *mikul duwur* berlaku bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Namun wujud konkritnya tidak bisa disamakan. Kalau kita membayangkan plot novel *Hati Suhita* dengan peran gender yang dibalik, yaitu sang istrilah yang sudah memiliki pacar sebelum menikah dengan laki-laki pilihan orangtuanya, lalu mendiamkan suaminya sambil tetap menjalin hubungan dengan sang pacar, apakah pembaca masih akan berempati? Dan apakah akan terkesan realistis dan masuk akal kalau sang suami digambarkan bersabar selama tujuh bulan sampai istrinya mampu melepas ikatan dengan kekasih masa lalunya? Saya rasa tentu tidak. Tokoh laki-laki semacam itu justru akan dipersepsi sebagai lemah, sedangkan sang istri akan dinilai kurang ajar dan bermoral rendah.

Tata nilai yang diwakili oleh *Hati Suhita* adalah nilai keislaman ala pesantren tradisional, dengan tambahan nuansa filsafat hidup Jawa. Dalam tata nilai tersebut, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki peran yang spesifik, serta diharapkan untuk mengikuti tuntunan perilaku yang spesifik. Perjuangan Suhita adalah perjuangan khas perempuan, yang tentu berbeda daripada perjuangan Gus Birru. Maka, kalau kita menuntut *gender equality* dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan sama satu sama lain, dan boleh berperilaku sama, maka *Hati Suhita* harus kita nilai sebagai tidak adil gender. Memang novel tersebut tidak membela kesetaraan semacam itu.

Pernikahan antara dua orang anak dari keluarga pengelola pesantren seperti yang digambarkan dalam novel *Hati Suhita*, merupakan urusan yang jauh lebih luas daripada sekadar hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tugas kepengurusan pesantren menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dalam keluarga yang sama. Istri yang dipilih kedua orang tua Gus Birru untuk putra mereka mesti siap untuk menjalankan berbagai tugas kepemimpinan dalam pesantren, dan mesti memiliki ilmu yang mumpuni untuk mengajar dan membimbing para santri, khususnya santri putri. Untuk itu, Suhita disiapkan sejak diri. Calon mertuanya yang menentukan seluruh riwayat pendidikannya, baik kuliahnya, maupun pendidikan pesantrennya. Suhita mengikuti permintaan calon mertuanya tersebut, meskipun untuk itu tidak jarang ia harus menomorduakan keinginannya sendiri. Sebagai hasilnya, Suhita memang siap menjalani tugasnya. Tanpa kesulitan, ia segera mengambil peran sebagai pemimpin. Digambarkan dalam salah satu adegannya, misalnya, betapa Gus Birru secara tidak sengaja menyaksikan Suhita memimpin rapat para ustadz dan ustadzah, yang membuatnya takjub akan kemampuan dan wibawa istri yang tidak diinginkannya itu (*Hati Suhita*, hlm. 154-155).

Dalam menggambarkan karakter Suhita, yang sangat dikedepankan adalah nilai-nilai Islam maupun Jawa yang membentuk prilakunya. Ia menjalani hidupnya penuh kepasrahan dan kesabaran. Segala pengorbanan dan penderitaannya, disembunyikannya demi menyenangkan orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Dari segi imaji

gender, ini adalah penokohan yang menarik, yang memang tidak mudah dikategorikan. Apakah tokoh ini mau dikritik sebagai sangat stereotipikal sebab sebagai perempuan, ia kelewat tunduk, pasrah, dan menahan diri? Ataukah sebaliknya, ia layak dikagumi sebagai perempuan perkasa yang mengambil peran vital dalam sebuah institusi pendidikan besar, dan punya kemampuan untuk tetap tegar di tengah kondisi rumah tangga yang tidak membahagiakan? Di tengah tata nilai yang melingkupi kehidupan Suhita, kedua hal itu tidak bertentangan. Kepasrahan, kesabaran, dan kemampuan untuk menahan dan mengolah dirilah yang menjadi kekuatan Suhita, dan menjadikannya sosok berwibawa yang disayangi dan dihormati oleh lingkungannya, serta memampukannya untuk pada akhirnya “menundukkan” hati Gus Birru. Dan tampaknya memang sosok perempuan semacam itulah yang dikagumi banyak pembaca, dan yang prilakunya dipandang layak untuk diteladani.

Dalam kaitan dengan imaji gender, hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa imaji perempuan dalam *Hati Suhita* tidaklah tunggal. Selain Rengganis, perempuan independen yang menentukan jalan hidupnya secara lebih mandiri, juga ada Aruna, sahabat Suhita yang pebisnis, yang memiliki sifat spontan dan ekspresif, berkebalikan dari Suhita. Kedua tokoh itu digambarkan sebagai perempuan yang tidak kalah baik dengan Suhita. Femininitas pengelola pesantren yang menjadi jalan hidup Suhita, bukanlah jalan mereka, namun bukan berarti mereka bukan perempuan ideal. Dengan demikian, nilai spiritual yang menjadi pegangan Suhita hadir sebagai sebuah pilihan, bukan sebagai arahan yang seakan-akan wajib diikuti oleh setiap perempuan.

Spiritualitas Pesantren di Era Digital: sebuah Alternatif?

Khilma Anis mengenyam pendidikan pesantren selama 13 tahun, dengan berpindah pesantren di setiap jenjang pendidikannya. Seperti tokohnya Suhita, ia bagian dari sebuah keluarga pengelola pesantren. Dengan sendirinya, lewat jalan hidupnya tersebut, terbentuk jaringan pertemanan dengan sekian orang pesantren lainnya, yaitu teman sepondok serta keluarga-keluarga pengelola pesantren lain. Jaringan khas dunia pesantren semacam itu bukan fenomena baru, dan sudah ada jauh

sebelum era digital. Namun lewat media baru, kesempatan untuk menjalin hubungan menjadi bertambah. Antara lain, lingkaran orang pesantren inilah yang menjadi *friends facebook* Khilma, sehingga dengan sendirinya mereka berkesempatan mengikuti kisah Suhita sejak awal. Dari situlah, episode-episode yang ditulis di dinding *facebook* tersebut menyebar ke berbagai arah. Misalnya, demikian yang dikisahkan Khilma saat saya wawancarai, ke-13 episode *online* tersebut menyebar sampai kepada grup *WhatsApp* khusus untuk para ibu nyai, yang umumnya tidak akan tertarik untuk membaca novel.

Maka, tampak bahwa ketika sebuah jaringan tradisional berpindah dari *offline* menjadi *online*, terbukalah berbagai kemungkinan baru. Tentu saja, sedahsyat apa pun respon pembaca terhadap *Hati Suhita*, penyebarannya tetap tidak seberapa berarti dibanding jaringan-jaringan dominan di tengah *network society* masa kini. Namun berangkat dari kenyataan bahwa sekian manusia bukan hanya menghubungkan novel tersebut dengan kisah hidup mereka sendiri, tapi juga mencari makna serta nilai pegangan dalam novel tersebut, maka paling tidak kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan yang cukup menggembirakan, yaitu bahwa meskipun cakupannya terbatas, jaringan *online* sekecil ini pun dapat memiliki peran penting dalam pembentukan identitas individu-individu tertentu.

Di samping itu, teks tersebut juga menyebar ke arah-arah yang tidak terduga, keluar dari kalangannya sendiri. Khilma bercerita bahwa meskipun beberapa pembaca dari kalangan pengikut aliran keislaman yang berbeda tidak dapat bersepakat dengan semua hal yang digambarkan dalam novel itu – dengan praktek ziarah dalam adegan Suhita berkunjung ke makam Sunan Pandanaran, misalnya –, nilai-nilai akhlak dengan nuansa Jawa yang menjadi pesan utama novel itu bisa disepakati banyak pihak. Tampaknya, kisah perjuangan cinta yang menghanyutkan dalam novel *Hati Suhita* berhasil menyatukan sekian hati, di luar perbedaan ideologi yang begitu sering mengemuka dalam representasi agama dan moralitas di dunia maya. Bahkan, ada yang mengaku bahwa yang dibayangkannya saat membaca nama Gus Birru adalah “Gus Bahar”, yaitu Habib Bahar, seorang da’i Front Pembela Islam. Entah apa implikasi

hibridisasi imajinasi semacam itu bagi sang pendukung Habib Bahar yang sekaligus menyukai novel pesantren tersebut. Paling tidak, batas kelompok serta jaringan tercairkan untuk sesaat, ketika jaringan alternatif dengan cakupan terbatas ini beririsan dengan jaringan yang berbeda ideologi.

Menyebarkan luasnya ke-13 episode novel yang dipublikasikan lewat *facebook*, serta respon antusias yang diperoleh teks tersebut dari pembaca, menandakan sebuah kebutuhan. Internet memungkinkan kebutuhan itu terungkap: bacaan seperti inilah yang diinginkan pembaca, atau paling tidak, yang diinginkan oleh kalangan tertentu, dan yang dirasakan mewakili pengalaman mereka. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan representasi pengalaman cinta dan rumah tangga yang hibrid, sekaligus kebutuhan akan nilai spiritual yang menyejukkan.

Daftar Pustaka

Castells, Manuel, "Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint", Manuel Castells (ed.), *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, Edward Elgar: Cheltenham & Northampton, 2004.

Illouz, Eva, "Romantic Love", Steven Seidmann, Nancy Fischer, & Chat Meeke (ed.). *Handbook of the New Sexuality Studies*, Routledge: London & New York, 2006.

Jedamski, Doris, "Balai Pustaka – A Colonial Wolf in Sheep's Clothing", *Archipel* 44 (1992).

Khilma Anis, *Hati Suhita*, Telaga Aksara: Yogyakarta, 2019

Tubella, Imma, "Television, the internet, and the construction of identity", Manuel Castells (ed.), *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, Edward Elgar: Cheltenham & Northampton, 2004.

PEREMPUAN KHEK SINGKAWANG MELAWAN KEMISKINAN DAN KEKERASAN (STRUKTURAL)

Yayuk Anggraini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA)
LP2M, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Salah satu stereotipe yang paling melekat pada masyarakat etnis Cina di Indonesia adalah sebagai golongan dengan kekayaan yang melimpah. Pandangan itu sulit disangkal mengingat barisan orang-orang terkaya di Indonesia pun mayoritas dipegang orang etnis Cina. Namun, fakta tersebut berbeda jauh dengan keadaan sebagian masyarakat etnis Cina di Singkawang, bahkan persepsi tersebut bisa berbalik 180 derajat karena sebagian besar kehidupan mereka berhadapan dengan kemiskinan yang sangat akut. Kemiskinan yang menimpa sebagian orang Cina Singkawang adalah keluarga-keluarga pengungsi dari pedalaman Kalimantan Barat akibat peristiwa “mangkok merah”.

Kemiskinan yang mereka alami ini sulit menemukan jalan keluarnya sehingga menyebabkan perempuan-perempuan berusia muda menikah dengan laki-laki asing untuk memperbaiki kesejahteraan hidup keluarganya. Perkawinan ini dikenal dengan istilah ‘pengantin pesanan’. Istilah lain yang lebih kultural digunakan adalah “kawin foto”, mengingat perkawinan yang melibatkan dua calon mempelai, dua keluarga antar

negara ini dijembatani oleh *mak comblang*/agen yang mencarikan calon pengantin perempuan. Sebagai gantinya laki-laki yang tidak bisa menghadiri proses perkenalan hingga pelaksanaan pertunangan/perkawinan cukup mengirimkan foto laki-laki dan keluarganya kepada mempelai perempuan. Atau, seandainya mempelai laki-laki bisa datang ke Singkawang, maka proses perkenalan akan dilakukan bertemu langsung dan pada saat acara pertunangan diadakan foto bersama di pelaminan. Maka, hubungan mereka sebagai suami/istri sudah dianggap sah.

Di samping faktor kemiskinan dan adanya ketimpangan struktur sosial yang dialami perempuan Cina di Singkawang menyebabkan posisinya menjadi semakin sulit, rendah dan tertindas. Mereka harus melawan kemiskinan dengan cara mencari pekerjaan merantau ke kota-kota besar, bahkan tidak sedikit yang memilih ke luar negeri menikah dengan laki-laki Taiwan. Para perempuan “terpaksa” menjadi ‘pengantin pesanan’ ada yang karena tidak tega melihat kondisi keluarganya, ada pula karena disuruh oleh orang tua supaya bisa memperbaiki ekonomi keluarga.

Perempuan yang menikah dengan laki-laki Taiwan seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan agar terlepas dari penderitaan hidup, atau sebuah pilihan yang harus diambil diantara pilihan yang lain. Maka, perempuan dalam ‘pengantin pesanan’ selain menghadapi ‘pengantin pesanan’ sendiri, mereka juga menghadapi penindasan akibat kemiskinan terkait adanya struktur ekonomi besar, yaitu struktur ekonomi Cina Singkawang yang membuat orang Cina Singkawang ini miskin, dan kapitalisme global yang membuat Taiwan tampil hebat. Maka, perempuan yang memilih menjadi ‘pengantin pesanan’ merupakan “exit strategy” atau bentuk perlawanan terhadap kemiskinan dan kuatnya kekerasan struktur sosial yang muncul dalam berbagai bentuk di Singkawang. Dengan kata lain, perempuan etnis Cina telah menjadi korban kemiskinan dan korban kekerasan struktural yang sangat kuat, menghadapi dua patriarki sekaligus, dalam keluarga dan masyarakat Singkawang.

Kerangka Pemikiran

Apa kaitannya ‘pengantin pesanan’ dan wacana *trafficking* dengan pascakolonialitas? Merujuk pada argumentasi Mohanty, ia membedakan

antara kata “*Perempuan*” (dengan huruf “P” besar) dan “*perempuan*” (dengan huruf “p” kecil). “*Perempuan*” adalah imaji tentang perempuan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dengan kata lain, sesuai dengan wacana dominan. Sementara itu, “*perempuan*” (dengan huruf “p” kecil) adalah perempuan sebagai individu nyata.

Menurut Mohanty, umumnya dalam feminisme Barat yang membicarakan perempuan Barat sendiri, dibedakan dengan tegas antara “*Perempuan*” dengan “*perempuan*”. Perempuan atau para feminis Barat sendiri umumnya sadar akan adanya wacana gender yang merugikan diri mereka, dan mereka bisa mengakui bahwa mereka sendiri (subjektivitas mereka) dibentuk oleh wacana tersebut, tapi mereka tidak menganggap wacana tersebut mampu 100% menguasainya. Ada norma-norma tertentu tentang apa dan bagaimana perempuan (artinya apa itu “*Perempuan*”), dan perempuan tidak bisa melepaskan diri darinya. Namun, ada kekhasan pengalaman individual perempuan yang tidak sesuai dengan wacana dominan, dan perempuan terkadang berhasil untuk melawannya (melakukan resistensi). Artinya, sebagai “*perempuan*” perempuan tidak pernah 100% sesuai dengan imaji yang disebut “*Perempuan*”. Subjektivitas perempuan terbentuk oleh wacana “*Perempuan*” tersebut, tapi tidak sepenuhnya (Katrin Bandel, 2016).

Masalahnya muncul ketika para feminis Barat memandang dan membahas perempuan “Dunia Ketiga”. Menurut Mohanty, di situ perbedaan antara “*Perempuan*” dengan “*perempuan*” yang cenderung terlupakan. Misalnya, peneliti feminis Barat akan memandang sebuah masyarakat, kemudian mengkritik wacana dominannya yang patriarkis. Tentu, mereka akan beranggapan bahwa perempuan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya terdefiniskan oleh wacana yang patriarkis. Misalnya, dalam budaya Jawa yang memosisikan perempuan sebagai *konco wingking*, maka perempuan Jawa (atau Indonesia) diyakini semuanya terjebak di wilayah itu. Dengan kata lain, perempuan Indonesia tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi, atau untuk menyadari dan mengkritik sistem masyarakat yang ada – kecuali kalau sudah dibantu dan “disadarkan” oleh feminis Barat. Jadi, asumsi dasarnya (yang tidak disadari oleh feminis sendiri), perempuan non-Barat sepenuhnya dibentuk

oleh wacana gender yang ada di masyarakatnya, tanpa mampu melakukan refleksi, negosiasi, atau resistensi, seperti yang dilakukan perempuan Barat.

Mohanty telah memperlihatkan bagaimana pemikiran feminis Barat yang memang membela perempuan ‘pengantin pesanan’ sebagai perempuan “Dunia Ketiga” yang selalu tertindas (Chandra Talpade Mohanty, 2003), tapi konteksnya seakan-akan seperti “membela adiknya” karena perempuan ‘pengantin pesanan’ tidak bisa meraihnya sendiri, harus dibantu feminis di negara Barat harus bertindak untuk menyelamatkan mereka. Seakan-akan feminis Barat membicarakan orang lain sebagai yang murni menjadi korban yang dikawinkan atau “dijual” di luar kehendaknya. Namun, pada saat yang sama mereka tidak akan bicara hal yang sama (misalnya) tentang kasus pekerja seks komersial perempuan Eropa atau Amerika karena dianggap biasa dan menganggapnya bukan sebagai korban tapi karena keinginan perempuan sendiri. Sebaliknya, perempuan “Dunia Ketiga” atau diluar Barat dianggap sepenuhnya sebagai korban – bahwa dalam realitasnya kehidupan mereka tidak seperti itu, tidak 100% diperdagangkan dan 100% bukan korban.

Dengan kata lain, pengalaman perempuan itu beragam karena itu kekuasaan tergantung pada pengalamannya sendiri. Kalau menganggap semua orang/perempuan ditindas dengan cara yang sama maka akan sia-sia. Menurut Mohanty kita akan memberikan *privelege* terhadap perempuan-perempuan tertentu “P” besar, dan yang peneliti lakukan adalah mengungkap pengalaman “p” kecil. Tapi, Mohanty hanya memberitahu pada kita bahwa perlawanan perempuan itu sifatnya partikular sedangkan cara bagaimana melawannya tidak diberitahu. Oleh sebab itu, yang memberitahu bagaimana cara melawannya adalah Homi Bhabha bahwa perlawanan partikular itu dilawan dengan “mimicry” (Homi K. Bhabha, 1994). Kekuasaan itu dibangun dengan cara membuat jarak, sementara “mimicry” dibuat untuk memperpendek jarak. Meskipun Bhabha tidak secara khusus berbicara tentang perempuan, akan tetapi caranya untuk menjelaskan perlawanan dapat digunakan untuk menjelaskan perlawanan perempuan ‘pengantin pesanan’ ini.

Dengan demikian, perlu dilihat sejauhmana para perempuan

‘pengantin pesanan’ di sini berbicara dalam konteks ikut memilih, memutuskan untuk menikah dan menginginkan perkawinan tersebut – hingga keseharian rumah tangganya. Mungkin juga perempuan sendiri merasa tidak ada pilihan lain dan benar-benar berkeinginan membantu perekonomian keluarga sekaligus mengharapkan sesuatu dari laki-laki asing yang ingin menikahinya atau karena benar-benar tertindas tidak ada pilihan lain selain menikah dengan cara menjadi ‘pengantin pesanan’. Bisa jadi pilihannya ini menjadi yang terbaik diantara yang terburuk. Bahwa, ada kompleksitas yang dialami oleh perempuan, sejauhmana perempuan di sini mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengalaman spesifik kehidupan riilnya terkait faktor kemiskinan, keinginan menaikkan status, kesamaan budaya (identitas kaitannya dengan ke-etnis-an Cina), dan membuat keputusan lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sebenarnya, inti dari teori poskolonial itu sendiri adalah memproblematisasi cara kita mengkonseptualisasi sebuah kekuasaan/ *oppressed*, dan mereka memulainya dengan meminjam cara berfikir post-strukturalisme yang mengatasinya dengan mengatakan kekuasaan (termasuk masalah identitas dan lain-lain) harus dipahami dengan cara “played of different” adalah kekuasaan bisa ada karena menegasikan sesuatu. Maksudnya adalah negasi berfungsi untuk menunjukkan bahwa “anda telah menghambat saya” karena itu “anda harus saya bunuh, saya lawan”. Tapi, “kalau anda hilang sama sekali maka kekuasaan yang saya miliki menjadi tidak berguna karena tidak ada lawannya”.

Situasi yang tidak pernah final tersebut melahirkan apa yang Homi Bhabha sebut dengan “in betwen”. Bahwa ‘pengantin pesanan’ letaknya adalah “in betwen” tapi “kalau anda tetap ada sama artinya saya tidak bisa berkuasa penuh”. Itulah dilemanya kekuasaan, atau paradoksnya kekuasaan. Karena itu kekuasaan tidak pernah final. Dengan kata lain, perempuan Khek Singkawang adalah negasinya laki-laki Taiwan, atau perempuan Khek Singkawang itulah negasinya laki-laki Singkawang. Jadi, mereka berada diwilayah “liminal”, wilayah yang abu-abu, karena itu mereka harus berkamufase. Mereka seperti “bunglon”, misalnya dengan bisa bahasa Mandarin. Kalau mereka bisa berbahasa Mandarin bagi laki-laki Singkawang atau bagi perempuan Melayu maupun Dayak di Singkawang

yang selama ini sering menghina perempuan Khek Singkawang tidak bisa lagi menghina. Itulah ambivalensi yang perempuan Khek Singkawang manipulasi.

Pembahasan

Pengalaman Tjiu dan Liu Memilih menjadi ‘Pengantin Pesanan’

Keluarga Tjiu tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tapi mereka juga tidak mampu membekali pendidikan untuk anak-anaknya. Rumah yang mereka tempati sampai sekarang pun bukan milik keluarganya, tapi milik orang lain. Statusnya seperti menyewa tapi hanya diminta membayar pajak setiap tahun. Bangunan rumah yang hanya terbuat dari kayu, berlantai papan dan beratap seng itu sudah mereka tinggali hampir lima puluh tahun.

“Rumah kami kalau terkena angin atapnya goyang. Waktu itu kami masih kecil-kecil nangis takut kena banting (kerobohan atap), bersembunyi di bawah kolong-kolong. Kasihan mamak saya, perutnya hamil besar naik-naik ke atas loteng benerin atap. Kita selip-selip pakai koran, mamak lindungi kami supaya gak kena hujan. Nah, waktu itu ada kakak saya pergi Hongkong. Dia nikah karena kasihan dengan kami yang masih kecil-kecil. Dia bilang mau pergi ke Hongkong. Mamak sama bapak gak ijin, mamak dan bapak nangis kasihan kan sampai pergi jauh. Dia pergi jauh sendirian disana. Kami dinafkahi, dikirimi uang, bisa sekolah. Gak banyak sih, dikit-dikit kan lumayan, dan mamak kan masih kerja, masih cuci baju. Sampai sekarang kakak masih sering kirim uang ke mamak buat berobat. Kakak saya ada yang umurnya sudah 40 tahun lebih, dia di Hongkong, menanggung adik bapak juga.” (Tjiu, 2017).

Meskipun kakaknya Tjiu seorang perempuan, ia beringinan melawan kondisi keluarganya yang sangat buruk. Kemiskinan yang menimpa keluarganya akan semakin terpuruk jika tidak ada yang berani melakukan sesuatu, dan pergi ke luar negeri menjadi pilihannya. Namun tidak gampang untuk mendapatkan ijin pergi ke luar negeri apalagi menikah dengan laki-laki Hongkong karena kedua orang tuanya benar-benar melarangnya. Kakaknya Tjiu tetap nekat dan tetap memilih berangkat. Ia tidak lagi menghiraukan batas-batas sosial dan kultural dimana seorang

anak perempuan harus tunduk terhadap kedudukan seorang laki-laki. Meskipun di sisi lain kakaknya Tjiu merasa seperti “menjual diri” atau memilih menikah dengan laki-laki asing tapi pilihan itu yang dianggapnya baik daripada makan bubur setiap hari, melihat rumahnya bocor, adiknya kehujaan dan lain sebagainya.

Tjiu tidak mengetahui secara pasti dari mana kakaknya punya keputusan ingin keluar dari Singkawang pergi ke luar negeri. Barangkali sebelumnya ada keluarga, teman atau kerabat dekat yang sudah menikah dengan laki-laki asing kemudian kesejahteraan keluarganya mengalami peningkatan. Hal itu dibenarkan oleh Tjiu bahwasannya banyak keluarga dari bapaknya yang menikah dapat orang Hongkong maupun Taiwan. Seperti yang dikatakan oleh ibu RN, bahwa seandainya ada sebuah keluarga yang sudah menikah dan tinggal di Taiwan menjadi kaya, lalu ada lagi dari tetangganya yang menikah dan tinggal di Taiwan menjadi kaya, akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan ingin menikah dengan laki-laki Taiwan agar menjadi kaya.

“(Orang etnis) Cina itu agak susah sekolahnya, dari faktor ekonomi, pendidikan dan budayanya. Ada yang (sekolahnya) cuma sampai SD.”
(Tjiu, 2017)

Pernyataan ibu RN ini seolah-olah hanya menganggap perempuan Singkawang meninggalkan keluarga dan kampung halamannya menikah dengan laki-laki asing tujuannya mencari laki-laki kaya. Dengan kata lain, kompleksitas kehidupan para perempuan dalam lingkup keluarga maupun struktur sosial tidak pernah diperhatikan bahwa mereka mengalami ketertekanan, ketertindasan, atau penghinaan dalam berbagai tingkatan. Banyak negosiasi yang harus dilakukannya, yaitu tetap bertahan di Singkawang mengalami berbagai penindasan atau nekat ke luar negeri agar terbebas dari berbagai tekanan dan kemiskinan.

Ketika kakaknya Tjiu mengambil keputusan memilih menikah dengan laki-laki asing kesannya seakan bukan atas keinginannya sendiri, tapi karena tergiur oleh keberhasilan orang lain (termasuk saudara, teman atau tetangga) yang sudah lebih dulu pergi ke luar negeri. Alasan keuangan memang tidak mungkin bisa ditampik, tapi semata-mata

menikah demi uang bukan satu-satunya tujuan yang dilakukan para perempuan Singkawang. Sebagai anak pertama yang memiliki 9 adik yang mendapat banyak tekanan. Barangkali kakaknya Tjiu merasa onya tanggungjawab sehingga berani nekat ke luar negeri meskipun resikonya tinggi. Kemiskinan yang menekan kehidupan keluarganya tidak akan mengalami perubahan jika ia hanya berdiam saja di rumah, atau hanya sekedar membantu ibunya hanya kerja mencuci baju sedangkan bapaknya lebih sering bermain judi.

Dengan kata lain, kemiskinan dan kekerasan harus dilawan meskipun harus merelakan diri menanggung risiko demi memperbaiki nasib atau menjadi “penyelamat” keluarganya dengan cara pergi ke luar negeri. Dalam konteks ini tanpa disadari sebenarnya *agency* perempuan sudah mulai muncul – bahwa ketika perempuan sudah memiliki pilihan yang dianggapnya terbaik diantara pilihan yang lain atau berani mengambil keputusan sendiri lebih memilih pergi ke luar negeri menikah dengan laki-laki asing untuk melawan kemiskinan yang menimpa keluarganya dan kekerasan/penindasan yang dialaminya.

Persoalan perempuan miskin tidak hanya terkait dengan ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, antara anak dan orang tua (saudara laki-laki atau bapaknya sendiri), tapi juga relasi kekuasaan antara kelompok miskin dan kelompok yang lebih kuat. Bagi perempuan miskin, persoalan kemiskinan secara ekonomi seringkali mengesampingkan persoalan gender menjadi sesuatu yang wajar karena ada beban yang dianggap lebih berat, yaitu kemiskinan itu sendiri. Bagi perempuan yang hidup dalam keluarga miskin, umumnya memiliki peran ganda yang ditanamkan sejak kecil yang membuat perempuan dengan sendirinya ikut terlibat memikirkan kondisi keluarganya hingga ikut bekerja untuk menambah pendapatan keluarga, ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Wujud dari kenekatan yang dilakukan kakaknya Tjiu atau kebanyakan perempuan Cina Khek Singkawang adalah melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berasal dari negara asing yang dianggap “kaya”. Namun, perkawinan ini pun tanpa didahului oleh proses pengenalan yang memadai, bagaimana latar belakang calon suami serta keluarganya,

dan tanpa dilandasi rasa cinta. Langkah yang sama dilakukan oleh saudara-saudara Tjiu yang lain (saudara sepupu atau keponakan dari bapaknya). Salah satu tujuan utama mereka menempuh jalan perkawinan adalah agar beban ekonomi yang ditanggung keluarganya menjadi lebih ringan dan melawan berbagai ketimpangan. Namun sebaliknya, biasanya wujud dari kenekatan semacam itu seringkali tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang kemungkinan adanya risiko yang lebih besar yang akan mereka hadapi ke depannya, misalnya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penindasan, kekerasan, kasus KDRT, perceraian dan lain sebagainya.

Dimana pun dan dialami oleh siapa pun, kemiskinan hampir pasti membawa penderitaan, bahkan penderitaan itu memberikan dampak yang sangat kompleks dalam berbagai sisi kehidupan. Meskipun begitu, pengalaman dan sikap manusia dalam menghadapi kemiskinan tidak seragam, tapi dibentuk oleh konteks politik, sosial, budaya dan lingkungan dimana mereka hidup. Salah satu unsur yang cukup menentukan adalah gender. Kemiskinan ternyata dialami dan disikapi secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya banyak pandangan di sebagian masyarakat Indonesia (tidak hanya masyarakat etnis keturunan Cina) bahwa anak perempuan dapat digunakan untuk memajukan posisi ekonomi keluarga. Keadaan ini seringkali tidak terhindarkan bahwa seorang perempuan diposisikan sebagai penyeimbang seandainya pendapatan keluarga sangat minim. Perempuan juga banyak diharapkan oleh keluarganya pergi ke kota-kota besar (termasuk pergi ke luar negeri) agar bisa mengirim uang setiap bulannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah, membiayai sekolah adik-adiknya dan sebagainya.

Tjiu sendiri statusnya telah menyandang sebagai seorang janda beranak satu. Ia lahir di Pemangkat, pada 11 Agustus 1981. Sebelumnya, ia sudah pernah menikah dengan laki-laki asal Pemangkat, sama-sama orang Khek. Ketika anaknya baru berumur 12 bulan, dengan terpaksa Tjiu harus bercerai dengan suaminya lantaran sering terjadi percekocokan, suami lebih suka berjudi dan sering melakukan KDRT. Tjiu juga jarang dinafkahi oleh suaminya, bahkan setelah bercerai, mantan suaminya pun

tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari anaknya, tidak membiayai sekolah dan lain-lain. Dalam mencukupi kebutuhan anaknya, saat itu Tjiu tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya mengandalkan sedikit upah dari hasil mengasuh keponakannya (anak salah satu kakak dan adiknya yang bekerja di pasar Pemangkat).

Tjiu lama sekali hidup menjanda, ia seperti sudah kehilangan kepercayaan terhadap laki-laki Khek. Ia trauma, pernikahannya dengan sesama laki-laki Khek yang didasari perasaan saling cinta ternyata tidak menjamin rumah tangganya langgeng, tidak bisa memberinya kebahagiaan, tidak bisa menjamin masa depan anaknya. Sebaliknya, ia malah sering mendapat penghinaan dan kekerasan fisik maupun psikis. Katanya pula, mana mungkin ada laki-laki yang masih bersedia menikahnya, seorang janda beranak satu. Menyandang status janda, beranak satu dan hidup miskin tidaklah mudah, apalagi para tetangga di kampungnya yang terdiri dari orang-orang Cina dan Melayu justru sering melecehkan tidaklah mudah menghadapinya. Ia sebagai perempuan Khek saja dihina, apalagi ditambah dengan statusnya yang sudah janda. Memang, dimana pun tidak ada seorang janda yang dinilai baik, tidak hanya di lingkungan orang-orang Cina saja bahwa secara umum orang sering menganggap perempuan yang berstatus janda punya perilaku buruk sehingga semakin dilecehkan. Bisa saja dikaitkan sebagai perempuan nakal, perempuan yang tidak berkelakuan baik pada suaminya, atau kemudian berimbas pada pelecehan yang sifatnya biologis.

Pada bulan Maret 2015, tiba-tiba Tjiu mendapat telepon dari kakaknya yang sudah dua puluh tahun tinggal di Hongkong. Kata kakaknya, ada laki-laki yang bernama Miao Li-Sheng adalah teman dari salah satu temannya yang kebetulan sedang keliling jalan-jalan di Kalimantan Barat. Tjiu disarankan menemui laki-laki Taiwan tersebut yang sedang mencari perempuan Singkawang untuk dijadikan istri. Mendapat tawaran itu, Tjiu mencoba mempertimbangkannya dan mungkin kakaknya merasa prihatin melihatnya sudah cukup lama hidup menjanda, kakaknya memikirkan masa depannya agar mengalami perbaikan.

“Dik, mau gak ada orang Taiwan mapan, dia itu teman saya, dan

katanya sudah mau pulang (Taiwan). Kakak juga bilang gak selamanya kamu begitu terus (menjanda), dia bilang gitu. Saya pikir, sebenarnya kita kan mau memperbaiki ekonomi. Saya orang susah. Kehidupan saya sehari-hari jadi *baby sitter*, pengasuh anak kakak saya, ngasuh dari bayi, untuk beli susu anak saya yang cowok. Sekarang dia sudah SMP kelas 3, umurnya 14 tahun. Suami saya dulu gak pernah kasih nafkah untuk anak. Mana tahu suami, saya ada dimana. Gak pernah datang bantu anak saya, satu kilo beras pun gak pernah. Kadang-kadang kalau kakak ada bantuan, adanya kita pakai.” (Tjiu, 2017)

Mengingat keadaan Tjiu dan keluarganya masih serba kekurangan, tidak punya pekerjaan tetap bahkan peluang kerja pun tidak ada, dan justru mengalami penghinaan. Setelah ia mempertimbangkan keadaannya selama menjanda, masa depannya dan anaknya, saran kakaknya tersebut dilakukan. Dengan kata lain, ia menjatuhkan pilihannya menikah dengan laki-laki Taiwan meskipun ia sudah dipekerjakan oleh adiknya untuk merawat keponakannya sambil merawat anaknya sendiri dan merawat ibunya yang sedang sakit stroke.

“Pertama-tama niat saya ingin memperbaiki perekonomian kita kan. Saya orang susah. Kehidupan saya sehari-hari jadi *baby sitter*, mengasuh anak kakak saya. Keponakan yang sudah berumur 2 tahun itu pun mengasuh dari bayi, untuk beli susu anak saya yang cowok itu.” (Tjiu, 2017)

Apakah menikah dengan motif ekonomi, atau ingin memperbaiki nasib keluarganya otomatis menjadi perkawinan yang cacat/buruk?. Salah seorang pejabat dinas setempat memandang secara positif bahwa perkawinan ini dapat menambah pendapatan daerah Singkawang. Misalnya, adanya kiriman-kiriman uang dari Taiwan ke Singkawang ketika perayaan Hari Raya Imlek, Cap Go Meh dan sembahyang kubur banyak aspek keuntungan yang didapatkan, seperti pengusaha kuliner, hotel/penginapan, transportasi, pendapatan daerah, perbankan dan lain-lain (Bbg, 2017).

Beberapa hari kemudian Tjiu kedatangan dua orang, perempuan dan laki-laki. Perempuan itu bernama Prili, adalah *mak comblang*, atau

Tjiu menyebutnya *camlang*. Prili berasal dari Singkawang dan sudah menikah dengan laki-laki Taiwan sebanyak tiga kali, tinggal di Taiwan dan sudah menjadi warga negara Taiwan. Sebagai *mak comblang*, ia sering pulang-pergi Taiwan-Singkawang sambil membawa laki-laki Taiwan yang mencari istri. Kemudian laki-laki tersebut bernama Miao Li-Sheng adalah laki-laki Taiwan yang sedang mencari istri perempuan Singkawang, laki-laki yang sebelumnya diinformasikan oleh kakaknya melalui telepon.

Di dalam pertemuan sekaligus perkenalan sesaat itu, *mak comblang* Prili berusaha meyakinkan bahwa laki-laki Taiwan yang sedang bersamanya sudah mempunyai usaha sendiri. Usaha yang dimaksud adalah berjualan mie babi. Seandainya Tjiu bersedia menjadi istrinya dan sudah tinggal bersama di Taiwan diminta ikut membantunya berjualan mie babi.

“Si *camlang* itu bilang, misalnya kamu dikasih suami kamu 8 juta, kamu masih bisa simpan 4 juta. Ya, aku pikir nanti suami kita ada kasih kita kerja, ya gak apa. Kan suami kerja, kita bantu gak salah. Nah, dia bilang jualan mie babi. Kita kalau cari suami cari yang mapan. Kalau gak ada kerja mau makan apa? Mapan punya rumah.” (Tjiu, 2017)

Hari itu Tjiu merasa sangat berbunga-bunga, setelah mendengarkan suara kakaknya melalui sambungan telepon menyarankan agar bersedia menikah lagi. Hal itu seperti yang sudah menjadi angan-angan Tjiu, berumah tangga sama-sama membanting tulang, cari uang untuk membesarkan anak masing-masing dan ia sudah membayangkan sebagai Taiwan dan kelak bisa memboyong anaknya agar bisa sekolah di Taiwan. Dengan bisa memboyong anak laki-lakinya ke Taiwan, bayangan Tjiu masa depannya akan lebih terjamin, bisa sekolah sampai kuliah dan memiliki pekerjaan yang bisa menjamin masa depannya. Angan-angan serta bayangannya itu semakin ia yakini ketika melihat laki-laki Taiwan itu sudah memiliki usaha sendiri.

Mencita-citakan perkawinan yang dapat mengangkat derajatnya dari kemiskinan merupakan harapan yang wajar dan didukung norma budaya bagi seorang perempuan atau keluarga miskin. Barangkali kemiskinan bukan satu-satunya alasan yang membuat perempuan memilih menikah

dengan laki-laki asing, atau tidak sekedar membutuhkan uang. Tapi, ada motivasi lain yang secara keseluruhan untuk ‘memperbaiki’ kualitas kehidupan, adanya ketidakpuasan dan kesejahteraan (seperti kurangnya kesempatan kerja) di negara asal, penindasan. Karena itu, perempuan ‘pengantin pesanan’ berani melawan kemiskinan dengan cara menempuh “dunia yang belum pasti”, jauh dari orang tua/keluarga dan penuh resiko, mengingat perempuan melihat perekonomian Taiwan lebih maju, berharap mendapatkan peluang kerja dan karir yang lebih baik.

Tjiu mengaku sudah merasa cocok dengan laki-laki Taiwan tersebut yang sepertinya memiliki perilaku baik, sopan dan hidupnya pun sudah mapan. Pertimbangan yang paling menguatkan menerima lamaran laki-laki Taiwan adalah ingin merubah nasibnya dari kemiskinan agar menjadi lebih baik dan keluar dari berbagai penindasan yang dialami selama ini, termasuk dengan laki-laki Khek maupun orang-orang Melayu di kampungnya. Tidak ada cara lain yang bisa ia lakukan kecuali mengikuti cara kakaknya pergi ke luar negeri melalui perkawinan.

“Pertama aku pikir, aku lihat dia itu baik, sopan, santun, ada pekerjaan, bilanganya udah mapan, punya rumah. Kalau bicara cinta kan kita udah tua, udah dewasa, gak kayak orang muda lagi, pasti tujuan kita itu mikir serius, hidup berumah tangga gitu. Mikirnya kita hidup serumah membanting tulang, kerja, cari uang, menafkahi anak. Tujuannya masing-masing mau membesarkan anak kita.” (Tjiu, 2017)

Keduanya sudah saling merasa cocok. Tjiu sendiri telah jauh membayangkan perkawinannya dengan laki-laki Taiwan akan merubah penderitaan hidupnya, membayangkan hidup di Taiwan. Prili selaku *mak comblang* kemudian menyarankan agar acara pertunangan segera dilakukan. Saran *mak comblang* langsung disetujui oleh keduanya, termasuk orang tua Tjiu dan saudaranya yang lain. Acara pertunangan telah ditentukan hari, tanggal dan tempat pelaksanaannya. *Mak comblang* menyerahkan *angpao* berjumlah 10 juta kepada orang tua Tjiu, dan membelikan cincin, kalung, pakaian untuk Tjiu. Uang 10 juta bagi keluarga Tjiu jumlahnya tergolong sangat besar mengingat mereka belum pernah memiliki uang sebanyak itu.

Sementara itu, tempat pelaksanaan pertunangan dilangsungkan di rumah orang tua *mak comblang* Prili, bukan di rumah orang tua Tjiu sendiri atau di restoran/hotel seperti yang dilakukan ‘pengantin pesanan’ lain. Pertunangan/perkawinan juga dilaksanakan secara sederhana, makan bersama sekeluarga dan foto bersama memakai baju pengantin berwarna pink dan merah. Foto bersama ini juga dilakukan di sebuah studio foto sambil mengenakan baju pengantin dengan warna pink dan merah. Warna pink dan merah yang dipakai calon pengantin perempuan menandakan sedang bertunangan, sedangkan baju pengantin berwarna putih menandakan sudah menikah. Selesai acara pertunangan dan foto-foto bersama, pasangan pengantin diantarkan *mak comblang* ke Vihara Tri Darma Bumi Raya yang terletak di pusat kota Singkawang, minta diberkati Dewa dihadapan pemuka agama Budha bernama Tjhong Syak Liong.

“Aku pakai baju pink itu artinya tunangan. Setelah tunangan, baru kawin. Merah juga tunangan, dan kalau pakai baju putih itu sudah kawin.” (Tjiu, 2017)

Perempuan ‘pengantin pesanan’ lain yang bersedia penulis temui adalah Liu bertempat tinggal di pemukiman KS. Tubun, Singkawang. Mayoritas penghuni pemukiman di KS. Tubun ini para pengungsi korban “mangkok merah”. Liu hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ia merupakan anak dari suami kedua ibunya. Kedua orang tua Liu bertemu ketika masih berada di barak bekas gudang karet, salah satu tempat penampungan korban pengungsi “mangkok merah”. Ia pun dilahirkan di barak pengungsian tersebut.

Liu mengalami ketertindasan sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya karena sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Liu yang duduk di samping ibunya menuturkan, saat itu ibunya dalam keadaan hamil, orang-orang di sekitarnya saling berbisik bahwa jangan menikah dengan perempuan janda yang sudah beranak dua. Mendapat bisikan seperti itu, lantas bapaknya Liu langsung meninggalkan ibunya begitu saja dalam keadaan hamil muda.

Setelah Liu dilahirkan hingga menginjak usia remaja pun tidak pernah didatangi oleh bapaknya, apalagi dicukupi kebutuhan hidupnya,

makan, susu, biaya sekolah dan seterusnya. Tidak pernah sama sekali. Liu kelihatan sangat marah kepada bapak kandungnya, hatinya seperti sedang berteriak. Kadangkala nada bicaranya menjadi agak meninggi karena merasa bapaknya telah menelantarkan ibunya, menelantarkan dirinya sejak masih berada di dalam kandungan sampai tumbuh menjadi gadis remaja.

“Dia (ibunya) dengar ada orang bilang katanya jangan kawin sama mamak, mamak janda, katanya. Bapak dengar kata orang lain, mamak saya hamil, sedang hamil saya, belum lahir. Saya pernah ketemu dia, saya bilang, saya sih bukan kamu yang lahirkan. Kamu gak piara (pelihara), gak kasih saya makan, susu, gak peduli kita ada makan atau gak ada makan, gak peduli.” (Liu, 2018)

Ibunya Liu yang sedang mengayun bayi di sampingnya pun ikut bergabung bicara meskipun tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa menggunakan bahasa Khék. Ibunya Liu berusaha menceritakan bagaimana kehidupannya waktu masih hidup di pedalaman kemudian diusir orang Dayak dari kampungnya, menjalani kehidupan di penampungan dan banyak penderitaan yang harus dialami dan beban yang ditanggung. Pekerjaan sehari-hari yang bisa dilakukan adalah membuat tikar dari dedaunan (serumpun daun pandan) yang dikerjakan dalam hutan. Tikar yang sudah selesai dikerjakan kemudian dijual ke pasar. Pekerjaannya ini dijalani sampai kemudian mendapatkan lahan pemukiman dan bahan kayu/papan untuk membangun rumah. Suatu hari, Liu pernah mencari keberadaan bapaknya.

“Saya bukan kamu yang lahirkan. Kamu gak piara (pelihara), gak kasih saya makan, susu, gak peduli kita ada makan atau gak ada makan, gak peduli.” (Liu, 2018)

Liu meluapkan kemarahannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membela ibunya, untuk keluarganya. Liu sengaja memprotes bapaknya, karena dianggap tidak punya tanggung jawab, tidak pernah peduli dengan anaknya dan malah menambah keluarganya semakin dihina serta diremehkan orang lain. Liu tidak hanya marah dengan bapaknya,

ia juga marah kepada orang-orang di sekitarnya yang saat itu menghasut bapaknya supaya meninggalkan ibunya yang sedang mengandung dirinya.

Setelah Liu menamatkan pendidikan SMP berusaha mencari pekerjaan di Singkawang. Perempuan kelahiran tahun 1977 ini sebenarnya ingin melanjutkan sekolah ke SMEA. Keinginan tersebut tidak jadi diwujudkan meskipun kedua kakaknya dari lain bapak yang sudah merantau ke Jakarta menjadi pembantu rumah tangga bersedia membiayainya. Liu merasa tidak enak karena selama ini kakaknya sudah banyak membantunya, meringankan beban ibunya hingga Liu bisa lulus SMP. Ia tidak ingin membebani kakaknya lagi, apalagi kakanya sudah memiliki keluarga sendiri di Jakarta, punya suami dan anak yang sama-sama membutuhkan biaya sekolah.

Dalam kondisi itu, Liu punya prinsip harus mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang, meringankan beban ibunya yang sudah mulai berumur tua. Liu memilih bekerja ketimbang melanjutkan sekolah ke SMEA. Beberapa tahun kemudian usaha Liu dalam mencari pekerjaan membuahkan hasil. Ia menjadi pelayan di toko Teknik Jaya, terletak di seberang jalan gedung BNI Kota Singkawang. Di toko yang menjual berbagai jenis mesin milik orang Cina itu, Liu bekerja sebagai pelayan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Namun, gaji bulanan yang diterima tergolong sangat kecil sehingga tidak cukup merubah kesejahteraan keluarganya. Setelah 3 tahun berkerja di toko Teknik Jaya, Liu mulai mengalami dilema, bahwa di satu sisi untuk mendapatkan pekerjaan di Singkawang tidaklah mudah tapi di sisi lain pekerjaan yang ia jalani gajinya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya.

Pada saat bersamaan, tepatnya tahun 1998, ketika kerumunan massa menuntut adanya sistem demokrasi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan di berbagai kota di Indonesia, ada pembakaran toko-toko, penjarahan, pembunuhan serta pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan keturunan Cina, Liu dan keluarganya langsung merasa ketakutan. Mereka merasa sangat khawatir karena ada isu akan terjadi kerusuhan di Singkawang. Pantas saja keluarga Liu merasa ketakutan karena masih memiliki trauma terhadap peristiwa masa lalu, yaitu “mangkuk merah”. Liu berusaha mencari cara agar bisa terhindar

dari ancaman kekerasan tersebut. Ia tidak ingin semakin menderita apalagi sampai menjadi korban pemerkosaan, apalagi menjadi korban pembunuhan. Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah memilih keluar dari Singkawang, yaitu menikah dengan laki-laki Taiwan.

Sebelumnya Liu sendiri belum pernah membayangkan menikah dengan laki-laki dari negara lain karena banyak pertimbangan yang cukup memberatkan; yaitu takut menjadi korban pemerkosaan, jauh dari ibunya dan tidak tahu jalanan di Taiwan. Apa yang Liu pertimbangkan cukup masuk akal karena ia memiliki ikatan batin yang kuat dengan ibunya. Sebab itu ia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Liu berusaha minta pertimbangan kepada ibunya, namun ibunya tetap kembali menyerahkan keputusan itu kepada Liu.

“Saya sih gak bilang saya setuju atau gak setuju sih. Kita, hati masih galau gitu kan. Orang tua bilang terserahlah, gak dipaksa. Sedikit takut kalau kita pergi ke Taiwan. Gak tau jalannya. Nanti kalau ditanya apalah, kita kan belum tau. Kan jauh, bukan dekat-dekat dirumah kita. Kalau dia pukul kita kan kita mau lari gimana? Saya pikir gitu.” (Liu, 2017)

Mendapat jawaban dari ibunya seperti itu, Liu semakin tidak bisa mengambil keputusan. Namun, ada faktor lain yang memberinya keyakinan, yaitu menghindari dari isu adanya kerusuhan, pemerkosaan dan sekaligus ingin memperbaiki perekonomian keluarganya. Akhirnya Liu memutuskan pergi ke Taiwan. Tapi, keputusannya itu belum benar-benar 100 persen, Liu masih terus bernegosiasi terkait kemiskinan yang dialami sehingga ingin merubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik, adanya isu pemerkosaan dan pembunuhan aksi massa 1998, keselamatan dirinya di Taiwan seandainya menikah dengan laki-laki dari sana, nasib ibunya yang akan hidup sendiri di Singkawang dan lain-lain. Maka, ia mencoba mendatangi seorang peramal ingin menanyakan rencana dan masa depan perkawinannya dengan laki-laki Taiwan.

“Saya sih rasanya kalau pergi luar negeri bisa kerja, bantu orang tua sini. Kita bisa dapat uang, jadi pergi ke luar negeri bisa bantu mamak.

Ia (peramal) pernah bilang, “Saya tahu kamu mau kedua kali.” Belum saya kawin, belum saya ke Taiwan dia sudah bilang saya mau (menikah) kedua lagi. Saya gak percaya, dalam hati gak percaya.” (Liu, 2018)

Pada akhirnya, Liu mengambil keputusan bulat, yakni memilih menikah dengan laki-laki Taiwan. Setelah pilihan itu ia putuskan sendiri, acara pertunangan pun langsung mulai dipersiapkan. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan oleh *mak comblang* selaku pihak yang menjodohkan Liu dengan laki-laki Taiwan, ibunya diberi *angpao* sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan Liu sendiri dibelikan kalung dan gelang emas, baju dan sepatu dengan syarat yang diajukan oleh calon suaminya bahwa harganya tidak boleh yang mahal-mahal.

“Lalu ada masak-masak, makan-makan pun di rumah. Kalau di Taiwan baru kita nikah yang benar-benar punya. Menikah di rumah, cuma kita lihat orang Taiwan di hotel Sentosa. Kalau nikah sih di rumah panggil orang-orang (saudara dan tetangga terdekat), pertunangan gitu di sini, gak terlalu nikahlah. Ya cuma foto-foto aja, kawin terus foto, gak ke pekong (klentheng), gak kemana-mana.” (Liu, 2018)

Berdasarkan cerita yang disampaikan Liu di atas, bahwa acara yang langsung hanya sebatas pertunangan saja. Bahkan acara itu tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebuah pernikahan yang ada legal formalnya secara hukum. Tapi, lebih bertumpu pada tradisi, yakni menggelar acara sederhana di rumah mengundang kerabat dan tetangga dekat untuk makan bersama, foto bersama di rumah dan di studio memakai baju pengantin – sudah sah sebagai suami/istri.

Dalam perkawinan tradisi Cina, ketika kedua pasangan melakukan foto bersama menggunakan baju pengantin menandakan mereka sudah resmi menikah. Karena itu, dalam wacana yang berkembang bahwa perkawinan antara perempuan Singkawang dengan laki-laki Taiwan ada yang menyebutnya dengan istilah “kawin foto”. Namun, dibalik istilah itu sering muncul pengertian negatif bahwa pernikahan “kawin foto” seakan-akan ilegal (karena tidak ada legal hukum formalnya). Memang nalar “kawin foto” jika dihadapkan pada hukum formal mengalami kecacatan, sebaliknya

berdasarkan kultur lokal atau kepercayaan (agama) yang mereka yakini sudah dianggap sah. Padahal dalam perkawinan “kawin foto” itu mereka tetap juga mendapatkan legal hukum dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah setempat berupa Akta Pernikahan dan dokumen itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan visa ke Taiwan.

Stigma Perempuan Khek Singkawang

Perempuan Cina Singkawang memiliki sebutan sendiri yang berbeda dengan perempuan Cina lain di Indonesia. Mereka biasa dipanggil “amoy” oleh orang tua atau kakaknya yang lebih tua. Sementara sebutan perempuan Cina di daerah lain (seperti di Jawa) adalah “cicik”. Istilah “amoy” sendiri bagi orang Cina Singkawang **dan sekitarnya merupakan serapan dari dialek Khek**, apabila diartikan secara harafiah bermakna **“adik perempuan”** yang cantik. “Amoy” menjadi panggilan khas untuk adik perempuan yang belum menikah. Istilah “amoy” pun menjadi sangat populer, sehingga ketika ada anak perempuan yang baru lahir pun sudah dipanggil “amoy” termasuk perempuan yang sudah menikah.

Masalahnya yang kemudian hari muncul adalah ada perubahan makna terkait penyebutan “amoy” secara signifikan. Perubahan makna itu muncul sejak banyaknya perempuan Cina Singkawang menikah dengan laki-laki Taiwan terkait adanya praktek dan wacana perempuan ‘pengantin pesanan’ yang diperdagangkan, ditindas, teraniaya dan lain-lain. Penyebutan “amoy” otomatis menjadi bermakna negatif apalagi dalam berbagai pemberitaan di media massa sering menginterpretasikan “amoy” sebagai korban dan kerap menerima pelecehan (Mely G. Tan, 2003). Selain itu, pandangan umum seringkali menilai bahwa “amoy” diidentikkan sebagai perempuan Cina Singkawang yang miskin, bodoh, tidak baik perilakunya secara moral, rendah, murahan dan hina yang menikah dengan cara yang tidak lazim. Atau “amoy-amoy” juga diidentikkan sebagai perempuan yang “menjual dirinya” seperti “barang dagangan” kepada orang Taiwan, bahkan banyak yang menyebut “amoy” sebagai perempuan pelacur.

Stigma itu menempel kuat terhadap semua “amoy” atau perempuan Khek Singkawang, meskipun “amoy” itu tidak menikah dengan laki-laki asing. Keberadaan mereka dimata laki-laki Khek sendiri maupun orang

Cina yang bukan Khek serta orang Melayu dan Dayak menjadi semakin dipandang rendah. Stigma amoy sebagai perempuan cantik sekaligus *berimage* buruk ini juga meluas kepada orang-orang dari luar Singkawang atau Kalimantan Barat. Bahkan, masyarakat di Singkawang sendiri, termasuk seseorang yang sering memberi mereka bantuan hukum mengatakan, bahwa para “amoy” sudah punya persatuan, mereka ada arisan, ada judi amoy-amoy Singkawang di Taiwan. Setiap hari mereka mengadakan pertemuan, berkaraoke dan berjudi. Para amoy banyak juga yang sudah pandai menipu suaminya. Jadi, dalam ‘pengantin pesanan’ selain ada laki-laki yang menipu, ada juga perempuan yang menipu (RN, 2017). Seorang *mak comblang* yang merupakan sama-sama orang Khek juga punya pandangan yang sama, bahwa sebagian besar diantara amoy yang ingin menikah ke Taiwan adalah berangan-angan menjadi orang kaya. Padahal, ketika berada di Taiwan mereka harus bekerja keras khususnya mengurus rumah tangga bahkan harus ikut bekerja keras mencari nafkah membantu suaminya (beritasatu.com).

Seorang informan yang juga sering mencarikan calon pengantin perempuan, menguruskan surat-surat ke kantor kelurahan sekaligus sering memberkati perkawinan mereka di klenteng saat diwawancara semakin menyudutkan “amoy” Singkawang (Ek, 2017, 2018), bahwa awalnya memang banyak amoy-amoy dari daerah perkotaan Singkawang yang berangkat ke luar negeri, tapi sekarang lebih banyak perempuan yang berasal dari daerah perkampungan. Perempuan yang berasal dari daerah perkampungan tidak berbuat licik dibanding perempuan yang tinggal di daerah perkotaan Singkawang (Asg, 2017, 2018). Sementara itu, perempuan yang bukan dari orang etnis Cina merasa kesal dengan para amoy karena dianggap telah menjelekkkan nama kota Singkawang, gara-gara banyak “amoy” menikah dengan laki-laki Taiwan, nama kota Singkawang pun dimata orang lain citranya menjadi ikut buruk (Nkn, 2017).

Mengapa mereka dibilang “amoy”? Orang-orang Singkawang, baik itu orang Khek, Melayu maupun Dayak kelihatan sekali merasa jengkel dan kemungkinan juga karena ada faktor merasa tersaingi. “Amoy” dengan sendirinya mengandung sebutan antara menghina dan memuji,

bahwa mereka memuji para “amoy” ini umumnya memang berparas cantik dan sekarang posisinya mulai terangkat meskipun dengan cara “dibeli” atau menjadi ‘pengantin pesanan’. Hal ini bisa diartikan bahwa mereka sebenarnya merasa iri karena sudah tersaingi. Atau dapat diartikan sebenarnya mereka memuji tapi dengan cara menghina karena mereka merasa tidak bisa seperti para “amoy”, padahal aslinya mereka ingin juga bisa menikah dengan laki-laki Taiwan. Menurut Asg yang sering memberkati pernikahan ‘pengantin pesanan’ di klenteng tempatnya bekerja, kenyataan itu sedikit demi sedikit mulai terjawab mengingat belakangan ini mulai ada beberapa perempuan Dayak yang menjadi ‘pengantin pesanan’ (Asg, 2017, 2018). Hal ini hampir sama pada masa kolonial bahwa perempuan-perempuan pribumi yang cantik dijadikan “gundik” atau “nyai” oleh pejabat Belanda. Maka, orang akan menghina para “nyai” tersebut sebagai perempuan murah, tapi sebenarnya memuji karena status sosialnya sudah naik dengan cara “dibeli” atau dijadikan “gundik”.

Apa yang sebenarnya menyebabkan orang-orang Cina non-Khek, Melayu maupun Dayak selalu menghakimi perempuan Khek dengan memandangnya sangat rendah. Memang, orang-orang Cina Khek mayoritas hidupnya miskin, bangunan rumahnya seperti gubuk, tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak, tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemiskinan itu bukanlah karena keinginannya, diantara penyebabnya adalah, *pertama* karena sistem ekonomi yang berjalan di Singkawang telah dikuasai orang-orang Cina yang berada di perkotaan atau orang Melayu atau lahan mereka yang ditinggalkan di pedalaman telah diambil alih orang Dayak. *Kedua*, cara memetakan data sejarah adalah membiarkannya mereka hidup miskin hingga mati. Maksudnya data sejarah di sini terkait dengan peristiwa “mangkok merah” yang didalangi oleh pemerintah Orde Baru. Tragedi kemanusiaan yang menewaskan ribuan orang Cina di pedalaman demi kelanggengan sebuah kekuasaan tidak pernah ada pengadilan HAM maupun rekonsiliasi antara pemerintah Orde Baru dengan keluarga korban maupun orang-orang Cina lainnya yang menjadi miskin sampai hari ini.

Selain itu, antara orang Cina, Dayak dan Melayu sering dibandingkan. Misalnya, dulu orang Cina dan orang Dayak dianggap sama-sama orang rendahan, bodoh, tidak berpendidikan tapi sekarang ini orang

Dayak dianggap sudah lebih maju terlebih dulu dari pada orang Cina. Dengan kata lain, orang Dayak banyak mengalami perkembangan karena sudah berpendidikan, tidak tersinggung atau mudah marah yang efeknya berupa tindak kekerasan, ada banyak yang menjadi pendeta dan lain sebagainya, sedangkan orang Cina masih tetap sama. Atau, ketika ada orang Melayu bertamu ke rumah orang Cina misalnya disuguhi minuman tidak ada yang bersedia meminumnya karena dianggap ada babinya. Dalam hal ini Tjiu pun paham bahwa babi bagi orang muslim haram hukumnya sehingga tidak mungkin menyuguhkannya, dan seandainya hal itu dilakukan juga dosa. Tjiu mengatakan;

“Justru untuk apa kami kasih kalian makan babi, kami kan takut dosa juga. Kita pakai logika aja, kalau kita gak menyinggung orang gak bikin masalah, untuk apa orang mau pukul kita.” (Tjiu, 2018)

Di samping itu, penghinaan dan ketertindasan yang mereka alami dasarnya memang ada pihak atau (perempuan lain) yang bukan Cina Khek yang merasa tidak rela jika para “amoy” mengalami perbaikan dan kemajuan dalam hidupnya, takut tersaingi dan lain-lain. Ketidakrelaan itu bisa juga diasumsikan bahwa kalau perempuan Khek Singkawang hidupnya sudah maju dianggap akan menjadi pesaing bagi orang lain, pesaing bagi orang-orang Cina sendiri yang berada di perkotaan, orang Melayu maupun Dayak. Seandainya kehidupan orang Khek mengalami kemajuan dalam berbagai bidang tentu saja tidak ada lagi objek yang bisa ditindas, dipinggirkan, disalah-salahkan atau dijadikan ‘kambing hitam’ terkait berbagai kekurangan, ketidakmampuan, kejelekan, tidak ada lagi yang bisa dicurigai dan tidak ada yang dikuasai.

Sementara itu, dihadapan laki-laki Khek sendiri para perempuan Khek juga direndahkan, mengalami berbagai ketertindasan. Padahal dalam perkawinan yang pantas dilakukan perempuan Khek adalah sama-sama berasal dari laki-laki Cina Khek. Meskipun kadangkala ada perkawinan yang berbeda suku, sebagian kecil hanya dilakukan oleh laki-laki Khek dengan perempuan Dayak. Atau, para laki-laki Cina bukan berasal dari suku Khek dengan perempuan Khek, dan kemungkinannya juga sangat sedikit. Hal ini hanya berlaku ketika kondisi perekonomian keluarga

perempuan Khek sudah mengalami sedikit perbaikan. Sebaliknya, Laki-laki non-suku Khek sangat jarang menikahi perempuan Khek yang kondisi ekonomi keluarganya masih sangat miskin.

Bagi seorang perempuan Cina Khek Singkawang tidaklah mudah dalam menentukan jalan hidupnya termasuk memilih pasangan hidup (suami) karena mereka berada diposisi paling bawah di dalam struktur keluarga dan secara status sosial mereka juga dibawah orang-orang Cina lain seperti Hokkian, Teochiu atau orang Melayu, Dayak dan lain-lain yang menganggap lebih tinggi derajatnya. Mereka juga akan kesulitan jika menginginkan menikah dengan orang Melayu karena faktor agama yang berbeda. Demikian halnya perkawinan dengan orang Dayak, meskipun dimasa lalu ketika orang Dayak dan orang Cina sama-sama tinggal di daerah pedalaman sudah terbiasa melakukan perkawinan silang – termasuk pernikahan campur dengan orang Melayu. Tapi, sejak adanya upacara “mangkok merah” yang menewaskan ribuan orang Cina dan pengusiran dari tempat tinggal mereka di pedalaman ke barak pengungsian yang terletak di pinggiran kota Singkawang menyebabkan perkawinan diantara mereka sedikit sekali terjadi (Hari Poerwanto, 2005).

Tidak hanya itu, kasus “mangkok merah” juga membuat keberadaan mereka di pinggiran kota Singkawang selalu dicurigai. Tentu saja kecurigaan itu menimbulkan bermacam implikasi, bahwa seandainya mereka ingin tinggal di daerah pemukiman orang-orang Cina lain yang bukan dari korban “mangkok merah” atau di daerah pemukiman Melayu maupun Dayak bisa saja dipersulit. Sebaliknya juga ketika mereka lebih memilih hidup mengelompok berada di pemukiman antara orang-orang yang menjadi korban “mangkok merah” juga masih dicurigai, dipandang eksklusif atau tidak mau berbaur dengan orang lain. Mereka tidak memiliki cara lain untuk melawannya, apalagi kondisinya miskin, tidak memiliki uang dan menjadi ‘pengantin pesanan’ adalah sebuah pilihan untuk melakukan perlawanan terhadap kemiskinan dan kekerasan struktural yang berlangsung. Dengan menjadi ‘pengantin pesanan’ mereka bisa memiliki pasport, bisa keluar negeri, bisa berbahasa Mandarin dan seterusnya. Karena itu, perlawanan yang dilakukan orang Cina Khek ini bukan dalam pengertian semata-mata ingin membalas dendam atau bukan

akibat “mangkok merah”, tapi disebabkan oleh kecurigaan (implikasi dari “mangkok merah”) dan penghinaan dari berbagai pihak yang selama ini di alami.

Ketertindasan Perempuan Khek di Singkawang

Di dalam keluarga etnis Cina sendiri perempuan selalu dianggap tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mengerti apa-apa dibanding seorang laki-laki yang merasa lebih mengerti dan bisa menentukan segalanya. Penghinaan seperti itu sudah mentradisi dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan di dalam keluarganya maupun oleh suaminya sendiri. Keadaan yang timpang ini mengakibatkan perempuan Cina semakin tertindas dalam berbagai tatanan dan kehidupan sehari-hari. Maka, tidak jarang perempuan biasa diperlakukan seenaknya, termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan seperti mencuci piring, baju, memasak, menyapu, mengurus sembahyang keluarga untuk para leluhur dan lain-lain, tapi mereka juga melakukan pekerjaan kasar yang biasa dilakukan untuk laki-laki. Dalam beberapa pengamatan, peneliti sering menyaksikan seorang perempuan Cina melakukan pekerjaan kasar seperti mencangkul, mengangkut pasir menggunakan gerobak dari pinggir jalan raya dibawa ke pekarangan rumahnya, dan lain-lain.

Pada saat yang sama tidak sedikit laki-laki yang justru duduk santai di warung kopi atau saling berkerumun di sekitar pemukiman rumah mereka. Misalnya, di salah satu pemukiman daerah Kaliasin, Singkawang Selatan, pada saat siang hari sering terlihat pemandangan, dimana banyak laki-laki muda (17 – 25 tahun) berkerumun di ruang kosong dekat gerbang masuk pemukiman. Beberapa laki-laki berjumlah sekitar 5 – 7 orang berkerumun dan bermain. Pada saat yang sama, diantara mereka justru perempuan sibuk menjajakan dagangannya berupa es sirup, jus dan makanan kemasan. Situasional ini memperlihatkan bahwa antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak terpisah dalam ruang pemukiman, akan tetapi masing-masing telah memisahkan diri secara peran dan posisinya. Laki-laki lebih menggunakan ruang dan waktunya untuk bermain-main bersama teman sebayanya, bersantai di warung kopi dan

lain-lain, sementara para perempuan cenderung melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang.

Memang banyak laki-laki Khek yang tidak memiliki pekerjaan mapan, kecuali mereka bersedia menjadi buruh kasar, tukang batu, kuli di perkebunan kelapa atau memilih merantau mencari pekerjaan ke luar kota. Faktor sulitnya lapangan pekerjaan ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab tidak sedikit perempuan khek yang menikah dengan laki-laki Khek mendapat perlakuan tidak adil dalam rumah tangganya. Seringkali suami mereka malas bekerja dan lebih memilih berjudi, melakukan KDRT dan berakibat perceraian.

Kekerasan seringkali tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan, karena laki-laki sebenarnya merasa malu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu menafkahi istri dan anaknya akibatnya menjadi KDRT. Hal ini disebabkan laki-laki harus merasa selalu bertanggungjawab, menjaga wibawanya atau merasa tidak kalah dengan laki-laki lain. Maka, ketika laki-laki sudah merasa tidak mampu, posisinya merasa terjepit, kehilangan kepercayaan diri, kemudian merasa malu, akhirnya melampiaskannya dengan kekerasan, marah-marah dengan istrinya hingga terjadi kekerasan, perceraian dan lain-lain.

Dalam kasus Tjiu dan Liu misalnya, mereka tidak hanya dalam rangka melawan kemiskinan saja yang dialami keluarganya. Mereka lebih memilih laki-laki Taiwan ketimbang laki-laki Singkawang karena laki-laki Singkawang banyak yang tidak setia, suka main pelacur dan berjudi. Selain itu, mereka juga ingin melawan orang-orang di sekitar yang sering menghina. Apalagi orang Cina Singkawang masih terkenal membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Keberadaan anak laki-laki lebih dimaknai dari segalanya, sedangkan anak perempuan tidak pernah diharapkan, bahkan dianggapnya sebuah bencana.

Sistem seperti ini masih berlaku hingga saat ini meskipun sudah tidak seekstrim dulu, tapi masih banyak keluarga yang menerapkannya. Namun, saat ini justru banyak orang mengakui bahwa pihak perempuanlah yang sebenarnya menjadi tumpuan hidup keluarga besarnya. Perempuan bisa bekerja dua kali lebih keras dibanding laki-laki karena sejak kelahirannya anak laki-laki langsung diperlakukan seperti putra mahkota,

pertumbuhannya sangat diistimewakan dan dimanjakan oleh orang tuanya, terutama bapaknya. Akibatnya, ketika tumbuh dewasa anak laki-laki tersebut cenderung menjadi orang yang pemalas dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri maupun keluarganya sehingga lebih menggantungkan hidupnya dari hasil pemberian saudara perempuannya yang menjadi 'pengantin pesanan'. Disatu sisi perempuan diposisikan inferior terhadap laki-laki dan harus tunduk kepada bapak, saudara laki-laki (kakak/adik) dan suaminya, tapi di sisi lain dikonstruksi harus rajin, tugasnya lebih banyak dan harus menghasilkan uang.

Banyak pandangan masyarakat bahwa perempuan diharapkan menikah dengan laki-laki yang tingkatan statusnya lebih tinggi. Dimana pun, tidak hanya masyarakat etnis keturunan Cina dari negara-negara Asia Tenggara dalam perkawinan antar negara, bahkan di masyarakat Barat juga terjadi. Sebaliknya, seandainya ada perempuan yang berpendidikan tinggi atau berasal dari keluarga kaya menikah dengan laki-laki yang pendidikannya rendah atau bekerja sebagai buruh tani/pabrik tentu akan dipandang aneh. Artinya, melihat perempuan miskin dan mengalami ketertindasan yang diharapkan menikah dengan laki-laki yang lebih tinggi statusnya tidak hanya terjadi pada kasus 'pengantin pesanan' saja, tapi terjadi dimana-mana termasuk dalam pernikahan pada umumnya. Sepertinya sistem itu sudah menjadi semakin kapitalis dalam pengertian kalau laki-laki harus lebih tinggi derajatnya (tidak harus secara ekonomi saja tapi bisa dalam bentuk tingkatan derajat yang lain; misal pendidikan, pengetahuan, kemampuan agama dan lain-lain).

Dalam kondisi yang tidak berdaya karena tekanan kemiskinan, pengangguran, atau upah yang tidak layak, sulitnya peluang kerja dan lain-lain, maka laki-laki tidak jarang mengalami rasa frustrasi dan malu karena tidak dapat memenuhi peran yang dipandang wajib bagi laki-laki dalam mayoritas budaya di Indonesia), yaitu mencari nafkah bagi keluarganya. Sebagai implikasinya, frustrasi tersebut kerap kali tersalurkan lewat tindakan destruktif, misalnya kriminalitas, KDRT, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan tidak mengalami hal yang sama sebab tuntutan untuk menjadi "kepala keluarga yang bertanggung jawab" memang hanya khusus dihadapi

oleh laki-laki. Namun kenyataan riil kemiskinan tetap mereka hadapi, dan perempuan lebih terlibat dengan kebutuhan sehari-hari keluarga, misalnya belanja kebutuhan sehari-hari, memasak, kebutuhan anak-anak, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Dalam kondisi tersebut, perempuan tidak jarang menjadi berani (atau bahkan nekat) untuk meninggalkan “batas-batas tradisi” dan perlindungan masyarakat mereka demi memperbaiki nasib keluarganya. Misalnya, mereka terpaksa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penuh risiko, bermigrasi dengan melakukan perjalanan jauh ke luar kota atau luar negeri tanpa jaminan atau perlindungan hukum yang baik. Bahkan, kadangkala perempuan merasa terpaksa meninggalkan batas moral dengan melakukan pekerjaan yang dipandang masyarakat kebanyakan sebagai “aib”, hina, rendah dan lain-lain seperti menjadi buruh rumah tangga, bahkan menikah melalui perijodohan atau dalam ‘pengantin pesanan’ adanya peran agen/*mak comblang*.

Tarik-ulur ‘Pengantin Pesanan’ dan Wacana *Trafficking*

Pengertian ‘pengantin pesanan’ atau istilah lain dari ‘mail-order brides’ menjadikan nilai perkawinan tersebut dianggap berbeda dengan perkawinan umumnya. Faktornya karena ada konteks perijodohan atau ‘pesanan’ atau prosesnya diawali dengan memesan terlebih dulu pada seorang perantara (*mak comblang*) kemudian ditengarai perempuan mengalami ketertindasan, menjadi korban atas perkawinan tersebut. Memang, perkawinan ini banyak yang mengalami kegagalan, tapi yang berhasil pun tidak sedikit. Keberhasilan mereka ini kemudian diikuti oleh perempuan lain, menjadi istri orang kaya, tinggal di luar negeri dan menjadi perempuan internasional.

Masalah utama dalam wacana *trafficking* sebenarnya tidak pernah ingin melihat *agency* perempuannya tapi cenderung menyederhanakan persoalan. Artinya, mereka menikah dengan cara seperti ini adalah sebuah pilihan diantara yang paling buruk, dan pilihan terbaik diantara yang paling buruk karena jika tidak melakukan perkawinan itu hidupnya tidak akan ada peningkatan. Persoalan yang ada sebetulnya adalah relasi kekuasaan global, atau ada konteks global yang sebetulnya bukan hanya membuat

perempuan yang bersangkutan menderita tapi yang perlu dipahami bahwa didalam perkawinan ‘pengantin pesanan’ ada kerumitan yang tidak *cover* oleh wacana tersebut, bukan hanya (misalnya) perempuan sekedar ditipu atau dijual atau karena laki-laki mengeluarkan uang yang besar jumlahnya.

Atas dasar itu, perkawinan ‘pengantin pesanan’ kemudian digeneralisasi sebagai *trafficking*. Artinya, konteks ‘pesanan’ atau perjodohan yang melibatkan (peran *mak comblang*) disini harus dilihat kasusnya terlebih dulu ketika orang berbicara *trafficking* apakah memang spesifik seperti itu atau sekedar generalisasi. Padahal kalau melihat *trafficking* permasalahannya ada bukan soal apakah ini dijodohkan atau tidak dijodohkan. Tapi, persoalannya bahwa pernikahan ini diperantarai oleh orang-orang yang sengaja mengambil keuntungan, kemudian pihak perantara tersebut melakukan kebohongan dan sebagainya sehingga mendapat keuntungan *finansial* dari perkawinan tersebut. Seandainya cara melihatnya memang secara spesifik dari adanya kesalahan sistem yang diterapkan *mak comblangnya*, tentu saja harus membereskan masalah tersebut. Karena itu perlu melihatnya secara spesifik, bahwa seandainya perkawinan ini akan lebih aman jika tanpa ada campur tangan *mak comblang* yang sengaja mengambil keuntungan besar dari perkawinan itu.

Mungkin, sejak awal kedua belah pihak mendapatkan informasi yang salah. Misalnya, laki-laki Taiwan merasa mengeluarkan uang berjumlah besar, sedangkan perempuannya juga merasa tidak menerima banyaknya uang yang dikeluarkan laki-laki. Masalah yang seringkali beredar seakan-akan para perempuan dijodohkan, diperdagangkan, jadi persoalannya bukan karena dijodohkan atau tidak dijodohkan. Sedangkan dalam banyak kasus lain dimana banyak orang dengan sadar lebih memilih dijodohkan – misalnya sebagian umat muslim di Indonesia lebih memilih tradisi ta’aruf padahal orang tuanya menyarankan agar anaknya berpacaran terlebih dulu. Dengan kata lain, perjodohan bukanlah bentuk penindasan terhadap perempuan. Perjodohan tidak bisa diidentikkan perempuan mengalami ketertindasan, dikorbankan, dieksploitasi, diperdagangkan dan lain-lain hanya karena tradisi perkawinan dimulai bukan keduanya sudah berpacaran, tapi prosesnya melalui perjodohan yang dilakukan kedua

orang tua, penghubung, atau agamawan yang memang berjalan diberbagai budaya.

Reaksi-reaksi diatas lebih berkesan memandang perempuan Singkawang yang menikah dengan laki-laki Taiwan hanya sebatas mencari keuntungan dari suami yang kaya. Taiwan dianggap menjadi surganya para perempuan dari negara lain yang menikah dengan laki-laki Taiwan sebagai sarana untuk mendapatkan status hukum agar dapat bekerja di Taiwan. Orang-orang Taiwan juga menilai para perempuan dari Kalimantan Barat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan sangat merindukan 'uang Taiwan' yang menumpuk tinggi hingga menutup lutut kaki (Hsiao-Chuan, 2007). Tapi, kalau keadannya justru berbalik bahwa laki-laki Taiwan ternyata miskin, atau kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh *mak comblang*, mapan, kaya dan lain sebagainya.

Artinya, unsur perempuan yang niatnya menikah dengan laki-laki Taiwan untuk mencari keamanan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Apalagi proses dari awal perkawinan ini saling diiklankan, perempuan diiklankan ke laki-laki dan laki-laknya juga diiklankan ke perempuan yang akhirnya sama-sama mendapat persetujuan. Meskipun kadangkala persetujuan itu bisa menjadi sangat rawan dikemudian hari karena standarnya pasti laki-laki digambarkan lebih baik dan lebih kaya dari fakta riilnya sehingga bisa mengecewakan semua pihak.

Dengan demikian, dalam sistem perjodohan ini perlu adanya perlindungan, jaminan untuk pasangan pengantin dalam mendapatkan kebenaran informasi, tidak ada manipulasi identitas dan sebagainya sebelum proses perjodohan dan pernikahan dilakukan. Sistem itu lah yang seharusnya perlu diperbaiki atau diatur secara jelas berdasarkan ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati pula, bukan dihilangkan atau dihapus bahkan dibiarkan begitu saja. Atau adanya jaminan keamanan (khususnya) para perempuan ketika mau berangkat ke negara asal suami untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang buruk sehingga yang bersangkutan bisa mengadakan permasalahannya untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan. Pasalnya, setiap orang (termasuk perempuan etnis Cina Singkawang) memiliki hak ingin menikah dengan siapa saja, dan apapun alasannya meskipun ada alasan ingin memperbaiki ekonomi,

merubah nasib, menaikkan status sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup dan seterusnya tanpa mengesampingkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami/istri.

Disisi lain, mungkin juga keluarga perempuan memang mengharapkan anak perempuannya menjadi kaya atau berharap bisa kirim uang tapi belum terlaksana. Namun, yang perlu dipahami adalah pengertian mengambil uang itu sendiri bukan sekedar dimaknai mencuri kemudian lari meninggalkan suaminya tapi ada kondisi yang rumit. Misalnya, perempuan merasakan ternyata kondisi di Taiwan lebih sulit dibandingkan kehidupannya di Singkawang, suaminya tidak memiliki pekerjaan mapan, bukan orang kaya seperti yang telah diiklankan sebelumnya oleh *mak comblang* tapi kenyataannya sama-sama susah.

Sebenarnya perkawinan ini bisa dinilai bahwa praktik perkawinan ‘pengantin pesanan’ sebagai *trafficking* atau bukan *trafficking*, tentu harus kembali melihat juga pada definisi *trafficking* itu sendiri, bagaimana batasannya antara *trafficking* dengan hubungan suami istri antar orang Indonesia dan Taiwan dalam kondisi relasi kuasa ada ketimpangan. Dalam setiap hubungan yang memang timpang relasi kuasanya, tentu saja hal itu akan menerangkan bahwa tidak ada batasnya *trafficking*. Setiap orang yang melintas batas (tidak hanya dalam pengertian lintas batas negara atau lintas batas di dalam negara itu sendiri) tapi seperti lintas batas antar beda kelas sosial, berbeda jenjang pendidikannya, berbeda garis keturunan dan lain sebagainya, hak-haknya akan sulit dipenuhi. Karena itu, perlu batasan-batasan yang jelas antara sekedar perkawinan yang terjadi dalam relasi kuasa yang timpang dengan kasus-kasus yang memang seorang perempuan sengaja diperdagangkan diluar kehendaknya sendiri (misalnya mereka dipaksa diperkerjakan untuk jasa pelayanan seks) akan berbeda sehingga jelas sekali relasi kuasanya karena tidak akan seimbang.

Karena itu, persoalannya bukan hanya pada pengalaman dan kompleksitas yang dialami perempuan saja, tapi kenapa para laki-laki Taiwan bersedia menikahi perempuan dari Indonesia, dan kenapa perempuan juga bersedia karena semua itu sudah dibentuk oleh relasi kuasa. Berhubung perempuannya sendiri memang bersedia, bahkan dilakukan secara suka-rela (tidak ada paksaan dari siapapun), perempuan

pengantin tidak ada yang merasa ditipu oleh agen/*mak comblang* sehingga mereka (perempuan dan keluarganya) menolak perkawinan yang dijalani dikatakan ada unsur *trafficking*-nya. Terkait wacana itu, Walikota Singkawang (periode 2007-2012), Hasan Karman menjelaskan perkawinan ini bukan “jual beli” melainkan sah secara adat dan tercatat di kedua negara, lebih cocok disebut dengan pernikahan lintas batas atau pengantin antar negara. Selama menjabat Walikota Singkawang dan sempat bertugas menandatangani surat nikah, Hasan mengaku banyak menandatangani surat nikah antara laki-laki Taiwan dan perempuan Singkawang (cnn. indonesia, 2018).

Pernikahan dimana-mana pastinya juga memiliki masalah, apalagi pernikahan yang melibatkan orang miskin ingin naik kelas. Karena itu, bukan berarti kalau kesannya seakan-akan menolak istilah *trafficking* kemudian perempuan tidak perlu dibantu tapi kasusnya perlu dilihat dengan cara yang berbeda, persoalan dasarnya ada pada relasi kuasa global yang tidak adil. Dengan kata lain, ketika perempuan pengantin sedang memiliki masalah terkait dengan perkawinannya didampingi dalam kerangka istilah *trafficking* justru malah ikut merendahkan dan merugikan perempuan itu sendiri.

Kesimpulan

Masalah kemiskinan ada kaitannya dengan kondisi khusus orang etnis Cina Singkawang tapi miskin. Sebenarnya banyak penduduk Indonesia lainnya juga mengalami kemiskinan yang sama, tapi mereka masih memiliki banyak kemungkinan untuk memperbaiki nasibnya, termasuk menikah dengan laki-laki mapan dari Indonesia sendiri. Apa yang menyebabkan orang etnis Cina Singkawang tidak menemukan cara lain untuk mencoba mengatasi kemiskinan, misalnya dengan bekerja atau menikah dengan laki-laki Indonesia yang dapat menjamin kehidupannya.

Berbeda dengan perempuan Cina Khek Singkawang, misalnya mau menikah dengan orang Cina kaya di Indonesia sepertinya tidak memungkinkan, tentu orang Cina kaya Indonesia lebih memilih perempuan yang kelas sosialnya sama, berpendidikan, punya pekerjaan mapan dan seterusnya. Sementara pendidikan orang Cina Singkawang rendah juga

disebabkan oleh kemiskinan, mencari peluang kerja sulit, gaji rendah, sedangkan laki-laki Cina Singkawang sendiri juga miskin. Seandainya orang Cina Singkawang ingin menikah dengan orang non-Cina tentu saja akan menemui/mengalami banyak kendala karena beda agama, beda etnis dan lain-lain. Sementara itu, dalam sistem keluarga dan lingkungan orang Cina sendiri perempuan selalu dipandang rendah, sebagai anak, atau istri atau ibu terus-menerus mengalami kekerasan/penghinaan. Sebagai anak, perempuan mengalami kekerasan dari orang tua, saudara laki-laki, keluarga dan orang lain, sebagai istri dan ibu mengalami kekerasan dari suami dan mertua. Ia selalu menjadi objek yang tidak berdaya.

Posisi perempuan Cina Singkawang tidak hanya berada di bawah laki-laki Khek atau laki-laki bukan dari Cina Khek, tapi juga berada dibawah laki-laki pribumi lainnya. Mereka mengalami dan korban kekerasan dan kehinaan yang sangat berlapis-lapis, karena itu mereka memilih menikah dengan laki-laki dari luar negeri untuk melakukan perlawanan yang sifatnya simbolik atau “kultural”.

Perempuan yang menikah dengan memilih laki-laki yang statusnya lebih tinggi merupakan tradisi yang ada dimana-mana. Status tinggi tersebut bisa dinilai berdasarkan pengetahuannya, kemampuan kerja dan sebagainya menjadikan unsur ekonominya semakin naik, dan nasibnya akan semakin baik. Perempuan diharapkan menikah dengan cara seperti itu, kemudian mendatangkan *gengsi* tersendiri atau keuangan untuk keluarganya. Dengan demikian, perempuan akan merasa diuntungkan karena menikah dengan laki-laki kaya, pekerjaannya mapan, penghasilannya tinggi sehingga keluarganya akan ikut merasa tertolong juga. Hal seperti itu memang terjadi dimana-mana, bukan hanya terjadi pada perkawinan ‘pengantin pesanan’ antar etnis Cina atau antara Indonesia dan Taiwan saja. Bahwa, gejala perempuan ingin menikah dengan laki-laki mapan atau tinggi status sosialnya bukanlah hal yang aneh, namun, ketika perkawinan itu terjadi antar negara persoalannya akan menjadi rumit, karena berkaitan dengan tekanan kemiskinan, kapitalisme, kesenjangan sosial, patriarki dalam struktur keluarga maupun sosial, dan relasi kuasa baik di dalam negeri maupun secara internasional.

Mencoba memperbaiki nasib dengan cara menikah adalah lumrah,

termasuk menikah dengan laki-laki Taiwan, laki-laki yang dianggap kaya dan akan meningkatkan perekonomian keluarga. Dorongan ekonomi itu tidak lantas membuat perkawinan seperti berstatus sebagai *trafficking*. Namun harus diakui bahwa memang banyak perkawinan yang bermasalah, termasuk resiko adanya eksploitasi, penipuan yang dilakukan oleh agen/*mak comblang*, kurang perlindungan dan jaminan keamanan untuk perempuannya sendiri ketika sudah menetap di Taiwan – artinya perempuan Khek berada dalam situasi yang sangat sulit.

Di sini lah ke-agen-an (*agency*) perempuan Cina Khek sebenarnya sudah mulai muncul, yakni keberaniannya mengambil keputusan atau lebih memilih menjadi ‘pengantin pesanan’. Pilihan itu diambil bukan berarti tidak ada pilihan lain meskipun pilihan-pilihan itu bisa cukup terbatas atau tidak menguntungkan (misalnya pilihan bisa menikah dengan laki-laki Singkawang, pilihan tidak menikah, memilih bekerja dan lain-lain). Sehingga di dalam situasi itu perempuan harus bernegosiasi dengan situasi yang ada sampai akhirnya lebih memilih menikah dengan laki-laki Taiwan yang dianggap lebih menguntungkan diantara pilihan yang lain karena terkait juga ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu bisa berupa keinginannya ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya, membebaskan diri dari kemiskinan, sekaligus strategi untuk melawan kekerasan atau penghinaan yang dialami – keluar dari di Singkawang. Di samping itu, perempuan Cina Khek Singkawang yang bisa pergi ke luar negeri dan mendapatkan suami dari negara yang lebih maju membawa ‘prestise’ tersendiri – adalah perlawanannya terhadap laki-laki Singkawang yang selalu menindasnya karena dianggap tidak pernah mengerti apa-apa.

Daftar Pustaka

Buku:

Baker, Hugh, *Chinese Family and Kinship*, New York: Columbia University Press, 1979.

Bandel, Katrin, *Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial*, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, 2016.

Bhabha, Homi K., "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse" dalam *The Location of Culture*, Routledge 1994.

Brooks, Ann, *Posfeminisme & Cultural Studies*, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2005.

Bariarcianur B., Frino, *Demi Waktu: Potret Tionghoa Singkawang*, Penerbit RAH & Partners Law Firm, Jakarta, 2005.

Bulbeck, Chilla, *Re-Orienting Western Feminism: Women's Diversity in a Postcolonial World*, Cambridge University, 1998.

Connell, Raewyn, *Gender In World Perspective*, First published by Polity Press, USA, 2009.

Darmawan, Darwin, *Identitas Hibrid Orang Cina*, Gading Publishing Yogyakarta, 2014.

Foucault, Michel, *Power/Knowledge*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2002.

Gandhi, Leela, *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, Published Allen & Unwin, Australia, 1998.

Jaber F. Gubrium and James A. Holstein, "Qualitatif Methods", dalam *Encyclopedia of Sociology*, Vol. 3, New York: Macmillan Publishing Company, 1992.

James P. Spradeley, *Metode Etnografi*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2007.

Keri Lasmi Sugiarti, Jamie Davis & Abhijit Dasgupta (ed.), *Ketika Mereka Dijual;Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, ICMC Indonesia & ACILS, 2006.

Krisnaswamy, Revathy & John C. Hawley (ed.), *The Post-colonial and The Global*, Published by the University of Minnesota Press, 2008.

Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Perempuan Tionghoa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Loomba, Ania, *Kolonialisme/Pascakolonialisme*, (terjemahan: Hartono Hadikusumo), Penerbit Narasi bekerjasama dengan Pustaka Prometheus, Yogyakarta, 2016.

Lykke, Nina, *Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing*, Routledge New York, 2010.

Mohanty, Chandra Talpade, "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse", dalam Reina Lewis dan Sara Mills (ed.), *Feminist Postcolonial Theory Reader*, Edinburgh, 2003.

Morton, Stephen, *Gayatri Spivak: Etika, Subaltern dan Kritik Penalaran Poskolonial*, Penerbit Pararaton, Yogyakarta, 2008.

Nicole Constable, *Romance on a Global Stage; Pen Pals, Virtual Ethnography, and 'Mail-Order' Marriages*, University of California Press Berkeley and Los Angeles, 2003.

Outshoorn, Joyce, "The Trafficking Policy Debates", dalam Molly Dragiwicz (ed.), *Critical Contexts For Thinking About Trafficking*, Routledge New York, 2005.

Poerwanto, Hari, *Orang Cina Khek dari Singkawang*, Penerbit Komunitas Bambu, Depok, 2015.

Pilcher, Jane & Imelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender Studies*, SAGE Publications Ltd, 1 Oliver's Yard 55 City Road, London, 2004.

Putnam Tong, Rosemarie, *Feminist Thought (Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis)*, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2008.

Rahmayani, Ani, *Pemukiman Tionghoa di Singkawang Abad 19 (Sejarah Kota Bercirikan Tionghoa)*, BPSNT Pontianak, Kalimantan Barat, 2010.

Ruth Rosenberg (ed.), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ICMC & ACILS Indonesia, 2003.

Said, Edward W., *Orientalism*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1996.

Shakka, Anne, *Cilik-cilik Cina: Autoetnografi Politik Identitas*, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, 2019.

Schwarz, Henry & Sangeeta Ray, *A Companion to Postcolonial Studies*, Blackwell publishing, 2000 – 2005.

Sikwan, Agus dan Maria Harni Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoy Singkawang*, kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.

Spivak, Gayatri, “Can the Subaltern Speak?”, dalam P. Williams and L. Chrisman (ed.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, Hemel Hempstead, Harvester, 1993.

Shelley, Lousie, *Human Trafficking A Global Perspective*, Cambridge University Press, 2010.

Topley, Marjorie, “Marriage Resistance in Rural Kwang Tung” in A.P. Wolf (at Studies in Chinese Society), Stanford University Press, 1978.

Usman, Syafaruddin & Isnawita Din, *Beli Istri Mulai 8 Jeti*, Penerbit MedPres Yogyakarta, 2010.

Weitzer, Ronald and Mellisa Dirmore, “Sex Trafficking: Facts and Fictions” in Ronald Weitzer (ed.), *Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and The Industry Sex*, Routledge, New York, 2010.

Wardoyo, Broto, “Hubungan Taiwan dengan Asia Tenggara”, dalam Taufiq Tanasaldy (ed.), *Hubungan Luar Negeri Taiwan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Yentriyani, Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, Penerbit Galang Press, Yogyakarta, 2004.

Artikel/Jurnal:

Belanger, Daniele, “Marriages with Foreign Women in East Asia: bride trafficking or voluntary migration?”, *Population & Societies*, No.469, July-August, University of Western Ontario, Canada, 2010.

Bonnie Zare & S. Lily Mendoza, "Mail-order Bride in Popular Culture: Colonialist Representations and Absent Discourse", *International Journal Culture Studies*, Vol. 15, 2012.

Chen, Y.W., "Immigrant Brides in Taiwan: New Land, New Hope?", *Student Research Initiative*, 2013.

Chun-Yu Lin, "Working Bodies, Performed Bodies: Marriage Migrant Women's Bodily Works," *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, Volume 4, No 4, 82 285 1, 2012. ee852325@gmail.com.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kotamadya Singkawang, 2017.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kotamadya Singkawang, 2018.

Evelyn Blackwood, "Gender Transgression in Colonial and Postcolonial Indonesia", *The Journal of Asian Studies*; Academic Research Library, Nov 2005.

Hsia, Chuan, "Imaged and Imagined Threat To The Nation: The Media Construction of The 'Foreign Brides' Phenomenon' as Social Problems in Taiwan", *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 8, Number 1, 2007.

Hsia, Chuan, Liou Li Xun An: Ziben Guojihua Xia De, Waiji Xinnianguang, Xiansiang (Internationalisation of Capital and Trade in Asian Women: The Case of Foreign Brides in Taiwan), Taipei: *Radical Quarterly in Social Studies Research*, Series No. 09, 2002.

Hsia- Chuan, *Drifty shores: The "foreign brides" phenomenon in capitalist globalization*, Taipei, Taiwan: *A Radical Quarterly in Social Studies Research*, 2002.

Kim, Minjeong, "Gender and International Marriage Migration," *Sociology Compass*, 4(9), 718-731, 2010. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00314.x>.

Li-jung Wang, "The Formation of 'Transnational Communities': A New Challenge to 'Multicultural Taiwan'", 2015. https://www.researchgate.net/publication/266449256_The_Formation_of_'Transnational_Communities'_A_New_Challenge_to_'Multicultural_Taiwan'.

Melody Chia-Wen Lu, "Commercially Arranged Marriage Migration : Case Studies of Cross-border Marriages in Taiwan," *Indian Journal of Gender Studies*, 2005. <http://ijg.sagepub.com/content/12/2-3/275>.

Mely G. Tan, "Dimensi Sosial dan Kultural Kekerasan Berdasarkan Gender di Indonesia: Dari Penjulukan Ke Diskriminasi Ke Kekerasan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 71, Universitas Indonesia, 2003.

Marcia Zug, "Mail-order Bride Feminism", *William & Mary Journal of Race, Gender and social justice*, Vol.5, issue 1, article 6, 2014.

M. S. Mitchel Vinco, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap PGRS/PARAKU 1963-1967", *Jurnal HISTORIA*, Volume 22/Nomor 1, 2008. <https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f113/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol22no1april2008/KEBIJAKAN%20%20PEMERINTAH%20%20REPUBLIK%20%20INDONESIA%20mithcel%20vinco.pdf>.

Superman, "*Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat Tahun 1967*", *Jurnal HISTORIA* Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017. (<https://media.neliti.com/media/publications/90056-ID-peristiwa-mangkok-merah-di-kalimantan-ba.pdf>).

Suparlan, Parsudi, "Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", *Jurnal Antropologi Indonesia* 71, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Sandel, Todd L., "Is it Just Cultural? Exploring (Mis)perceptions of Individual And Cultural Differences of Immigrants through Marriage in Contemporary Taiwan", dalam <http://www.chinamediaresearch.net>.

Tien, C.-Y. & Wang, H.-Z., "Masculinity and Cross-Border Marriages: Why do Taiwanese men Seek Vietnamese Women To Marry? [In Chinese]", *Taiwan Dongnanya Xuekan*, 2006.

Titiek Suliyati, "Pemahaman Masyarakat Cina terhadap Gender," *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.XI, No. 1, Februari 2007.

Tseng, H., "Racialization of Foreign Woman in The Transnational Marriage Market of Taiwan", *Cultural Politics of Gender and Sexuality in Contemporary Asia*, Chapter 12, 2016.

Wahyuningsih, Sri, “Model Kebijakan Publik Perlindungan Hukum Perempuan ‘Pengantin Pesanan’ (*Mail-Order Bride*) sebagai Salah Satu Bentuk Spesifik *Trafficking* di Kalimantan Barat”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 19 Nomor 1, Universitas Brawijaya, Malang, 2005.

Yulianti, Arkanudin, Likman Dja’far, “Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang”, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013*.

Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal EKSOS*, Universitas Tanjungpura, Volume 8, Nomor 3, Pontianak, 2012.

Ying Chen – Mei, “Becoming Taiwanese: Self Perception of The New Taiwanese Immigrant Females”, *International Journal of Ssia-Pacific Studies*, Vol. 6, 2010.

Media Online:

<https://lifestyle.kompas.com/read/2013/08/27/2149598/Demi.Karier.Perempuan.Taiwan.Bekukan.Sel.Telur>

<https://news.detik.com/berita/2010/1472857dobrak-tradisi-dan-hadapi-tekanan-gadis-taiwan-nikahi-diri-sendiri>.

<http://www.kalbariana.web.id/mimpi-jadi-cinderella-di-singkawang/>

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/13/205316/Etnografi-Tak-Hanya-untuk-Antropologi>.

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/61/name/kalimantan-barat/detail/6172/kota-singkawang>

<https://www.voaindonesia.com/a/makin-banyak-perempuan-taiwan-bekukan-sel-telur/1737615.html>.

Kota Singkawang dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Kota Singkawang; <https://www.slideshare.net/dedegilang/kota-singkawang-dalam-angka-2015-55280173>.

<http://www.berdikarionline.com/peristiwa-mangkok-merah-ketika-imperialisme-mengawini-rasialisme/>.

<http://www.berdikarionline.com/peristiwa-mangkok-merah-ketika-imperialisme-mengawini-rasialisme/>.

<http://www.kalbariana.web.id/mimpi-jadi-cinderella-di-singkawang/>.
Sumber: *Majalah Tempo Online*, 19 Maret 2001.

<https://www.antaraneews.com/berita/29512/kian-banyak-wanita-indonesia-jadi-pengantin-asing-di-taiwan>.

http://www.tempointeraktif.com/jumlah_korban_pengantin_pesanan.htm.

Magistad, M. K., *China's "leftover women"*, unmarried at 27. *BBC News Magazine*, 21 February 2013, <http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21320560>.

<http://suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/10/29/cari-jodoh-amoy-singkawang-wn-taiwan-ditangkap>.

<http://www.suarakita.org/2013/08/demi-karier-perempuan-taiwan-bekukan-sel-telur/>.

<https://news.detik.com/berita/1472857/dobrak-tradisi-dan-hadapi-tekanan-gadis-taiwan-nikahi-diri-sendiri>.

<https://sp.beritasatu.com/home/nudirman-mustahil-seleksi-pimpinan-kpk-tanpa-dpr/14133>.

Wawancara:

KT, Singkawang, 4 Maret 2018.

RN., Singkawang, 18 Agustus 2017.

Fui, Liu, Singkawang, Agustus 2017 – Maret 2018.

Tjiu, Pemangkat, Sambas, Agustus 2017 – Maret 2018.

Ibunya Tjiu, Pemangkat Agustus 2017 – Maret 2018.

Ibu H, Singkawang, Maret 2018.

Ibunya Liu, Singkawang, Agustus 2017.

Ibunya Tjiu, Pemangkat, Sambas, Agustus 2017 – Maret 2018

Alx, Singkawang Agustus 2017, Maret 2018, dan Jakarta Juni 2019.

Asg, juru kunci klenteng, Agustus 2017 – Maret 2018.

EK, Singkawang, Agustus 2017 - Maret 2018.

BAB II

MENGIDENTIFIKASI
DIRI

KLINIK KECANTIKAN: Komodifikasi Distingsi Sosial Baru dalam Praktik Perawatan Kecantikan

Sri Murlianti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
e-mail: sri.murlianti@fisip.unmul.ac.id

Pendahuluan

Tradisi perawatan dan pengelolaan tubuh dalam rangka kecantikan bukanlah gejala baru khas masyarakat modern. Ia telah ada dalam budaya-budaya lama. Di setiap area kebudayaan memiliki idealisme kecantikannya sendiri, termasuk ajaran tentang bagaimana tubuh harus di rawat dan dikelola. Tidak ada satu pun alasan filosofis, sosiologis maupun antropologis membenarkan adanya fenomena kecantikan ideal yang berlaku universal. Kecantikan mestinya terletak di budaya pengamat (Wolf, 2002).

Dulu orang Cina daratan berlomba-lomba mengecilkan kakinya. Orang pedalaman Thailand memanjangkan lehernya dengan spiral tembaga. Orang Dayak di Kalimantan memanjangkan daun telinganya. Semuanya dilakukan dalam rangka mengejar kategori kecantikan yang berlaku pada budaya mereka. Orang Jawa, bahkan memiliki konsep *dandan* yang kompleks dalam ajaran *ngadi saliro ngadi busono* lengkap dengan ramuan-ramuan tradisional untuk merawat dan mendandani tubuh. Namun karakter tradisi budaya lama itu kontras dengan praktek-praktek pengelolaan tubuh jaman sekarang.

Dalam budaya lama pengelolaan tubuh luar bukan pusat dari proses pembentukan diri. Ia berpusat pada jiwa, merujuk pada kualitas pikiran dan moralitas. Salah satu bagian dari kompleks moralitas Jawa misalnya ada ajaran, *'ajining salira gumantung saka busana ajining diri gumantung saka pekerti'* (harga tubuh tergantung dari penampilan, harga diri tergantung dari budi pekerti). Kalimat itu bisa diterjemahkan bebas bahwa penampilan tubuh luar memang penting, namun untuk mengenali diri yang sebenarnya haruslah melihat perilaku keseharian seseorang.

Kini tiba-tiba keadaan terbalik. Bukan hanya penampilan menjadi amat penting, penampilan lah pusat problematika tubuh manusia modern. Dalam penampilan kini diri ingin dikomunikasikan pada orang lain. Tiba-tiba muncul kriteria penampakan kecantikan ideal yang menjadi tujuan bersama penduduk dunia seperti: muda, putih, tinggi, langsing, mancung, halus-mulus, kencang, rambut panjang, mata belok dan seterusnya. Muncul juga masalah kecantikan bersama yang ditakuti penduduk dunia. Mulai dari jerawat, kulit kusam, flek, kegemukan, tinggi badan, bau badan, bulu ketiak, tai lalat, hidung pesek, pipi tembem, pori-pori membesar, garis-garis ekspresi, selulit, kantung mata, mata sipit, dan seterusnya.

Konsep kecantikan yang muncul belakangan ini mendominasi pamaknaan tubuh dan kecantikan manusia modern. Kokohnya dominasi konsep kecantikan ideal ini ditandai dengan maraknya bisnis layanan jasa reparasi tubuh (*body work*). Di antaranya adalah *hair spa, body spa, yoga, aerobik, fitness, hybrid, body language, pilates, botok, mesotherapy, chemical peeling, mikrodermabrasi, laser therapy, tummytuck, liposuction*, hingga suntik *silikon illegal* dan jasa konsultasi diet.

Di Indonesia kini telah berjamuran layanan jasa perawatan kecantikan dengan modus klinis seperti ini. Sebut saja: 'Natasha Skin Care,' 'Larissa Skin Care,' 'London Beauty Centre,' 'Golden Skin Care,' 'White Lily,' 'Impression Body Care Centre,' 'Teta Skin Care' dan sebagainya. Semuanya menggunakan dokter umum sebagai konsultan medisnya. Ragam layanannya pun melampaui apa yang biasa disajikan dalam praktek klinis dermatologi. Popularitas mereka ini jauh mengungguli praktek para dokter spesialis kulit dan kelamin ternama di Yogyakarta (Murlianti S, Vol 6, No.2, 2014).

Pada kesempatan seminar 'Kosmetik Update 2009' di Fakultas Kedokteran UGM, dr. Kristina Etnawati, Sp. K.K (K) memperlihatkan foto-foto korban praktek klinik kecantikan ini. Ada puluhan foto dengan wajah-wajah yang rusak karena pemakaian produk-produk jasa kecantikan. Kondisinya bervariasi; mulai dari iritasi ringan, jerawat kecil-kecil, jerawat bernanah, muka kemerahan dan perih, hingga flek-flek hitam membentuk pulau-pulau di wajah mereka. Tak jarang mereka merupakan korban salah diagnosis dari sebuah klinik kecantikan yang terkenal.

Komodifikasi Distingsi Sosial dalam Perawatan Kecantikan

Kehidupan sosial memang tidak pernah seramah yang tampak dipermukaan. Di dalamnya ada kelompok-kelompok sosial yang saling bersaing untuk menunjukkan diri sebagai yang terkuat. Lapisan kelas atas senantiasa membedakan diri dengan lapisan sosial di bawahnya. Mereka menciptakan beragam pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan hingga atribut-atribut material yang tak terjangkau lapisan sosial dibawahnya. Semuanya itu digunakan sebagai paket distingsi membedakan diri dengan kelompok sosial lain, terutama dengan lapisan sosial yang lebih bawah (Bordieu, *Ibid at.al*).

Pekerjaan, sekolah, makanan, mode pakaian, hobi, kendaraan, rumah, jam tangan, sepatu hingga tas dan sebagainya; digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan diri di kelas sosial yang mana seseorang itu berada. Kejamnya arena permainan sosial seperti ini sudah berlangsung sama lamanya dengan sejarah kebudayaan manusia, tak terkecuali dalam hal kecantikan (Erita Santoesa, 2008:6-7). Distingsi-distingsi tentang kecantikan sebenarnya juga sudah ada lama, jauh sebelum ritual-ritual tubuh itu dikomodifikasikan.

Apakah sebenarnya klinik kecantikan itu? Benarkah ia merupakan layanan jasa kecantikan yang paling sehat? Penelusuran makna klinik kecantikan ini bisa dimulai dengan mengambil salah satu varian penamaannya, yaitu *skin care*. Apakah sebenarnya yang dinamakan *skin care* itu? Apa bedanya dengan produk kosmetik dan salon kecantikan? Apakah ia menyajikan perawatan yang lebih sehat dibanding modus perawatan kecantikan sebelumnya? Mengapa harga produk-produknya

lebih mahal dari produk-produk kosmetik dan salon kecantikan? Benarkah karena ia lebih aman dari sisi wacana medis?

Sejak akhir tahun 1990-an, di Indonesia tumbuh subur layanan jasa perawatan kecantikan yang menggunakan tenaga dokter umum. Bisnis ini muncul dengan beragam nama seperti *skin care*, *skin center*, *skin clinic*, *skin care center*, *beauty clinic*, *aesthetic clinic*, *aesthetic center*, *sliming and skin center*, *beauty center* dan sebagainya. Departemen Kesehatan kemudian menamainya sebagai Klinik Kecantikan Estetika (DirJen Pelayanan Medik Depkes, 2007). Di kalangan masyarakat awam bisnis ini lebih populer dengan sebutan Klinik Kecantikan saja.

Penamaan ini bukannya tidak mendatangkan polemik. Dalam disiplin klinis konsep 'klinik' merujuk pada praktek dokter bersama yang memiliki keahlian atau spesialisasi tertentu. Sebut saja Klinik Mata, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kulit dan Kelamin dan seterusnya. Konsep 'klinik' diasosiasikan sebagai layanan jasa medis dengan keahlian khusus. Sementara pada bisnis-bisnis yang digolongkan sebagai Klinik Kecantikan Estetika, sebagian besar hanya menggunakan tenaga dokter umum yang mendapat tambahan kursus kecantikan.

Walaupun penatalaksanaannya telah diatur ketat oleh Departemen Kesehatan, bukan berarti bisnis ini luput dari penyelewengan. Ada banyak pelanggaran yang terjadi. Dua produk Natasha Skin Care, pernah ditarik BPOM. Krem perawatan mengandung Asam Retinoat (salah satu kandungan terlarang bagi kosmetik) didaftarkan di BPOM sebagai kosmetik dan selama belasan tahun dijual sebagai kosmetik (Pierre Bordieu, 1984). Saat beritanya heboh di media massa, pemiliknya berdalih kesalahan ini hanyalah kesalahan prosedur semata. Ironis, tak lama berselang klinik ini meraih *Top Brand 1999* untuk kategori klinik kecantikan dari Majalah Marketing.

Tidak ada esensi makna baru yang bisa ditarik dari sebuah praktek layanan jasa perawatan kecantikan bernama *skin care*. Jika kata itu digunakan sebagaimana makna esensinya, ia hanya bahasa lain dari perawatan kulit. Sebuah konsep yang merujuk pada berbagai aktivitas yang sudah ada sama lamanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Cuci muka, mandi, keramas, sampai masker, lulur, pijat dan puasa; adalah berbagai

aktivitas perawatan kulit dan tubuh yang sudah ada pada budaya-budaya lama.

Dilihat dari esensi nilai guna; industri kosmetik, salon-salon kecantikan dan *skin care* pada dasarnya sama-sama menjual berbagai ritual tubuh lama itu. Jika kata *skin care* digunakan sebagaimana makna esensinya, seharusnya seluruh ritual tubuh lama itu termasuk dalam aktivitas *skin care*. Tetapi pemahaman seperti itu tidak berlaku dalam dunia bisnis perawatan kecantikan. *Skin care* dan semua varian nama bisnis klinik kecantikan adalah distingsi baru dalam dunia bisnis jasa perawatan kecantikan. Maka untuk memahami makna *skin care*, harus dilakukan dengan menempuh rute perjalanan sejarah distingsi-distingsi budaya kecantikan. Pengembaraan dimulai dari distingsi-distingsi pada budaya lama hingga saat industri kecantikan mengkomodifikasikan ke dalam distingsi-distingsi komoditas kecantikan.

Distingsi Ritual Perawatan Kecantikan dalam Budaya Lama

Fenomena kecantikan sebagai kekuasaan itu fenomena yang sama tuanya dengan sejarah kebudayaan manusia. Kecantikan bisa digunakan untuk menciptakan distingsi-distingsi sosial. Dengan ‘cantik’, seseorang bisa mendapatkan berbagai kemudahan dibanding dengan mereka yang ‘jelek’. Tidak sedikit artefak kebudayaan yang bicara soal perjuangan manusia untuk menjadi lebih cantik, representasi dari hasrat manusia untuk memperoleh kekuasaan dalam hal kecantikan. Namun perbedaan strata sosial membedakan kemampuan sumber daya materi dan pengetahuan yang membentuk konsep-konsep perawatan kecantikan.

Dalam budaya Jawa lama misalnya, paling tidak ada dua distingsi kecantikan, yaitu kuning langsung dan sawo matang. Distingsi ini membedakan kecantikan keraton dengan kecantikan luar keraton. Ritual-ritual tubuh juga mengandung distingsi itu. Sama-sama melakukan cuci muka, mandi, atau keramas; orang keraton memiliki detail ritual yang jauh lebih rumit dibanding orang biasa. Ritual-ritual tubuh yang lebih detail milik keraton terangkum dalam ilmu kecantikan yang dirahasiakan keraton dan tidak diketahui oleh orang luar keraton.

Mandi rempah, mandi susu, lulur, ratus dan sebagainya; adalah

ilmu rahasia sebagai bagian paket distingsi kecantikan ciptaan keraton. Semuanya adalah instrumen distingtif perempuan keraton untuk membedakan diri dengan orang luar keraton. Termasuk dalam paket distingsi itu adalah definisi kecantikan dalam sekumpulan *sanepa* kecantikan fisik: *kulite kuning langsung* (kulit kuning langsung), *alise nanggal sepisan* (alis bentuk bulan sabit), *lambehane mblarak sempal* (berjalan lemah gemulai); dan kecantikan batin: *andap asor* (rendah hati/sopan), *sumeleh* (pasrah), *sumarah*, *sepi ing pamrih* (tidak serakah). Pendeknya, puncak kecantikan adalah perempuan keraton.

Keunggulan itu selalu diwacanakan sebagai keunggulan *bibit*, *bobot*, *bebet*, *bebet*-nya perempuan keraton yang tidak akan pernah bisa disamai para perempuan luar keraton. Tetapi, sebenarnya ia bisa dicapai karena adanya paket ilmu pengetahuan rahasia *laku* kecantikan yang tidak diketahui orang-orang di luar keraton (Erita Santoesa, 2008: 6-7). Di dalamnya terdapat kompleks pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan, pantangan-pantangan, ramuan-ramuan hingga pelayan-pelayan. Semuanya digunakan untuk menyokong pembentukan kecantikan ideal yang ingin ditonjolkan.

Kategori kecantikan fisik bisa dicapai karena disana tersedia dayang-dayang yang khusus merawat dan mendandani para putri keraton setiap saat. Alis *nanggal sepisan* milik para perempuan keraton itu, bukan karena keunggulan genetik (darah keraton) tetapi hasil kerja para penata rias keraton yang mencukuralis mereka hingga *njlirit* laksana sinar bulan tanggal satu Hijriah. Demikian juga kulit kuning langsung, adalah hasil dari perawatan kulit intensif dengan resep rahasia keraton, ditunjang kebebasan dari aktivitas kerja fisik yang berat yang akan merusak “keindahan genetik” kulit mereka.

Kecantikan batin (*inner beauty*) juga bukan karena keunggulan genetik keraton. Ia merupakan hasil tempaan dari para spiritualis keraton yang menjejali mereka dengan ajaran-ajaran *ngadi salira*, *ngadi busana*. Disiplinasi *ngadi salira-ngadi busana* membentuk kepatuhan tubuh dari *gesture* (gerak-gerik tubuh). Ajarannya mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, cara menatap lawan bicara, cara bicara, cara bergabung atau menghindari pembicaraan, bahasa yang harus digunakan, sampai dengan

ketentuan kapan boleh ikut dalam sebuah pembicaraan dan kapan harus diam.

Ajaran ini berpusat pada pendefinisian perempuan Jawa yang diwajibkan *sumeleh, sumarah, sepi ing pamrih*; bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan laki-laki yang mempersuntingnya. Lemah-lembut, kulit kuning langsung, tubuh wangi, alis *nanggal sepisan* dan sederet kategori yang sebenarnya hasil disiplinasi tubuh khas keraton; selalu digambarkan sebagai keunggulan genetik para perempuan keraton.

Kategori-kategori seperti itu jelas sulit dicapai para perempuan luar keraton. Mereka setiap hari terbebani aktifitas kerja fisik yang berat; menopang ekonomi keluarga dan mempersembahkan upeti ke keraton. Ilmu kecantikan untuk orang di luar keraton tidak terangkum dalam bahasa tinggi *laku* kecantikan, tetapi dalam bahasa yang jauh lebih kasar dengan konsep '*masak,*' '*manak,*' '*macak*. Tidak ada referensi yang jelas bagi perempuan biasa dalam membentuk kecantikan yang tercatat.

Distingsi kecantikan antara sesama perempuan biasa berlangsung secara bertingkat, antara para perempuan yang memiliki kecantikan fisik alami dengan mereka yang dianggap jelek. Distingsi-distingsi ini terangkum dalam sejumlah *sanepa* yang sulit dimonopoli oleh para perempuan keraton. Kategori cantik terkumpul dalam sejumlah *sanepa* seperti '*matane blalak-blalak*' (mata belok), '*irunge mbangir*' (hidung mancung), '*rambute ngandan-andan*' (rambut bergelombang) dan sebagainya. Mereka yang secara ekstrim dianggap tidak cantik, juga terangkum dalam kategori *sanepa* khas bahasa akar rumput seperti '*ndomble*' (bibir terlalu tebal), '*keras*' (mata tidak simetris), '*nonong*' (jidat tidak rata), dan sebagainya.

Distingsi-Distingsi Kecantikan dalam Industri Budaya

Tidak ada hal baru yang sanggup diberikan oleh para pelaku bisnis industri budaya dalam menggarap perawatan kecantikan. Distingsi-distingsi sosial tentang kecantikan itu dihadirkan kembali dalam beragam bentuk komoditas. Distingsi-distingsi itu menjadi inspirasi para pelaku bisnis dalam menciptakan beragam produk kecantikan. Mulai dari manfaat yang dijanjikan, prosedur penjualan, bahan, kemasan, model hingga beragam pembenaran; digunakan sebagai distingsi-distingsi produk kecantikan. Masing-masing pelaku bisnis menggunakan permainan distingsi untuk mengklaim sebagai yang terbaik. Sebagai komoditas

mereka muncul dalam bentuk yang berlipat-ganda, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel I.1: Komodifikasi Ritual Perawatan Tubuh dan Kecantikan

Ritual Lama	Industri Kosmetik	Salon Kecantikan	Klinik Kecantikan
Cuci Muka	Sabun Muka, Pembersih (<i>Cleanser</i>), Penyegar, Peeling Masker	<i>Facial</i> (Tradisional / modern)	Organic Facial, Herbal Facial, Chemical Peeling, Jet Peel, Laser Peel, Detoksasi, Microdermarbrasi, Mesoteraphy, Organic Facial, Electro Couter.
Keramas	Shampoo, Hair Conditioner, Hair Tonic	Creembath	Hair Spa, Hair Massage
Mandi	Sabun mandi, Body Lotion, Krem Lulur, Body Peeling-Body Scrub	Lulur, Mandi Susu, Mandi Bunga, Ratus	Body Injection, Body Detox, Body Wrapping, Body Inhection, Bio Shape
Pijat	Alat-alat Pijat	Body Spa	Modern Body Spa
Diet / Puasa	amu dan Obat Pelangsing, alat <i>Fitness</i>	Totok Sintal dan Totok <i>Langs</i>	Slimmy Injection, Body Slimming, Bio Breast, Osmolipolisis.

Kekuatan *skin care* dan semua varian bisnis klinik kecantikan terletak pada sejumlah distingsi yang membedakannya dengan bisnis-bisnis perawatan kecantikan yang ada sebelumnya. Memahami makna klinik kecantikan dengan demikian harus memahami rute permainan distingsi yang ada pada permainan-permainan bisnis industri kecantikan. Penjabaran berikut ini akan mencoba menggambarkan satu persatu permainan-permainan distingsi dari 3 model permainan bisnis yang menjual budaya perawatan kecantikan. Mulai dari industri kosmetik,

salon kecantikan dan klinik kecantikan.

Distingsi-distingsi Industri Kosmetik Industri kosmetik mengkomodifikasikan berbagai tradisi perawatan tubuh lama dalam berbagai bentuk produk kosmetik. Sari Ayu dan Mustika Ratu, adalah contoh para pionir industri kosmetik Indonesia yang mengkomodifikasikan tradisi perawatan kecantikan tradisional keraton. Tidak seluruh '*laku*' kecantikan keraton dikomodifikasikan. Hanya tradisi perawatan tubuh fisik yang disajikan dalam bentuk produk-produk kosmetik. Berbagai idealisme tubuh dalam khas spiritualitas Jawa tidak ditonjolkan. Ramuan-ramuan khas keraton dihadirkan dalam bentuk produk-produk kosmetik instan.

Dua perusahaan kosmetik itu sama-sama "menolong" orang awam untuk menyamakan diri dengan para perempuan keraton. Dulunya hal ini dianggap mustahil untuk dicapai. Yang dieksploitasi adalah tampilan kulit kuning langsung yang dulu digambarkan hanya dimiliki para wanita keraton. Siapapun yang ingin melakukan 'gerak naik ke atas', menyamai para perempuan keraton, bisa melakukannya dengan mengkonsumsi kedua produk ini. Hasil yang dijanjikan adalah tampilan kulit kuning langsung yang menjadikan mereka seakan meninggalkan strata sosial lama (orang biasa, kulit sawo matang). Mereka digoda untuk menjadi sama dengan para perempuan keraton: sama dalam penampakan kulit. Dalam jangka waktu tertentu, kedua label ini menjadi konsumsi kalangan atas masyarakat Indonesia.

Di strata lebih bawah (baca: harga lebih murah), terdapat pula industri kosmetik berlabel Viva yang diam-diam juga banyak digemari. Viva sebenarnya muncul sebelum Mustika Ratu dan Sari Ayu. Viva didirikan oleh pengusaha Cina yang mengusung kosmetik herbal Cina. Karena tidak memiliki legitimasi ilmu keraton, opini kosmetik daerah tropis dilekatkan pada produk ini. Ia pun mendasarkan legitimasi pada riset medis (Tri Marhaeni Pudji Astuti, 2007). Jenis kosmetik ini menjanjikan perbedaan lain. Tidak perlu menjadi kuning langsung seperti para perempuan keraton. Hal yang penting adalah menjaga kesehatan kulit dengan kosmetik yang tepat untuk daerah tropis. Daerah tropis mendapat pajanan sinar matahari jauh lebih besar dibanding daerah lain manapun di dunia. Kosmetik ini

mengklaim memiliki keunggulan riset medis; meneliti secara khusus karakter kulit daerah tropis dan menciptakan kosmetika sesuai dengan kebutuhan itu. Pembeneran medis itu mengklaim memiliki penjelasan lebih rasional tentang manfaat bahan-bahan alam, ketimbang mengikuti tradisi keraton yang belum teruji pasti.

Belakangan kosmetik-kosmetik seperti Mustika Ratu, Ratu Ayu dan Sari Ayu juga memanfaatkan pembeneran medis. Mereka meyakinkan para konsumen bahwa ternyata bahan-bahan alami yang lama dipakai para leluhur itu terbukti secara medis bermanfaat bagi tubuh. Banyak iklan-iklan di tahun 1980-an yang memperkenalkan produknya dengan kalimat ‘riset membuktikan...’ untuk menunjukkan betapa produk mereka memiliki pembeneran medis yang akurat.

Tak ketinggalan, pembeneran agama pun muncul. Wardah dan Zahra contohnya. Produk-produk ini menawarkan diri sebagai penjaga konsumennya dari perbuatan dosa mengkonsumsi zat-zat yang terlarang oleh agama. Pembeneran ini dikuatkan dengan pemakaian model-model gadis berkerudung dalam iklan-iklannya. Agar lebih sempurna, pembeneran medis juga disertakan di dalamnya. Bahwa selain kosmetik tersebut tidak menggunakan bahan haram, juga sehat secara medis.

Produk-produk bias Barat yang mengidealisasikan kecantikan kulit putih tak luput turut mewarnai arena permainan ini. Pada perkembangannya, perusahaan kosmetik lokal tidak berdaya dengan bombardir produk luar yang lebih berkiblat pada idealisme kecantikan Barat. Mereka pun terseret dalam pembentukan opini yang sama: “putih itu cantik!” Legitimasi ilmu kecantikan keraton terdiskreditkan oleh citra-citra natural, efisien, modern, hasil riset medis dan seterusnya.

Meskipun sudah memperbaiki citra dengan memasukkan juga alibi medis, produk-produk lokal terperangkap juga ke dalam lautan komoditi yang menjajakan ‘putih itu cantik.’ Perang distingsi tidak lagi berlangsung antara kulit kuning langsung/halus (keraton), sehat (medis), halal (agama) dan putih (Barat). Kini semuanya menawarkan pencapaian kulit putih. Distingsi-distingsi yang ditawarkan antara lain adalah memutihkan dalam jangka 7 hari, memutihkan secara alami, memutihkan tanpa *mercury*, memutihkan tanpa *hydrocinon* dan sebagainya.

Distingsi-distingsi juga diciptakan dalam rangka pelipat-gandaan bentuk-bentuk komoditas. Komodifikasi berlangsung berulang kali dengan pelekatan opini-opini yang selalu mengalami koreksi, penambahan atau pengurangan terus-menerus demi terciptanya komoditas baru. Cuci muka misalnya. Cuci muka hanya dengan air atau sabun biasa, berbeda dengan yang menggunakan sabun muka. Sabun muka menjadi kebutuhan karena sebuah opini baru bahwa karakter kotoran muka berbeda dengan kotoran tubuh (opini kesehatan); karenanya butuh sabun khusus muka (opini pasar). Sabun muka bukan hanya membersihkan muka, tapi membuat muka lebih segar, bersinar dan menarik (opini kecantikan).

Selanjutnya, opini itu mengalami penambahan, pengurangan atau koreksi terus menerus untuk menciptakan komoditi-komoditi baru. Sabun muka hanya sanggup membersihkan kotoran-kotoran dari luar seperti debu dan asap kendaraan. Ada kotoran dari dalam tubuh yang tidak sanggup dibersihkan oleh sabun muka. Kotoran ini berbentuk lemak yang menyebabkan tampilan kulit mengkilat dan mengganggu penampilan. *Cleanser* dan penyegar diperlukan untuk jenis kotoran ini. *Cleanser* membersihkan kotoran dari dalam tubuh yang tak bisa dibersihkan oleh sabun muka. Sementara penyegar membersihkan sisa-sisa *cleanser* yang tak terbawa kapas atau spon pembersih.

Sel-sel kulit muka mengalami pergantian secara periodik dan sel kulit lama mati menjadi kotoran tersendiri menyumbat aliran pori-pori kulit bagian dalam. Kotoran ini tidak bisa hilang hanya dengan sabun muka atau pun *cleanser*. Muncul *peeling* dan masker sebagai kebutuhan baru. *Peeling* membersihkan sel-sel kulit mati dengan cara menggosok-gosokkannya di permukaan kulit luar. Masker berperan menutup kembali dan mengencangkan pori-pori kulit setelah dibersihkan dengan *peeling*. Dan kini banyak bermunculan krem perawatan yang mengaku memiliki daya membersihkan kulit dari dalam yang tidak bisa diatasi dengan *peeling* dan masker. Begitu seterusnya.

Distingsi-distingsi Salon Kecantikan Salon-salon kecantikan mengkomodifikasikan ritual dan opini-opini kecantikan itu dengan cara yang lain. Melampaui industri kosmetik, distingsi yang ditawarkan adalah kemungkinan orang biasa diladeni seperti para priyayi (orang keraton

dan atau orang kaya). Salon menjual hasrat menjadi priyayi dengan salah satu citranya, melakukan perawatan tubuh diladeni oleh para pelayan ditempat yang bersih dan terawat. Para konsumen akan disuguhi segala kenyamanan layanan seolah ia seorang priyayi yang memiliki pelayan-pelayan setia.

Pergi ke salon jelas memberikan kesan yang berbeda dengan sekedar mengkonsumsi produk kosmetik di rumah. Di salon setiap orang mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kulitnya, dengan sentuhan tangan *beautician* (tenaga profesional kecantikan). *Beautician* melampaui dayang-dayang keraton yang hanya mendapatkan ilmu turun-temurun dari tradisi keraton (citra profesional). Profesi *beautician* hanya bisa diraih dengan disiplin sekolah yang ketat, mulai dari SMKK (Sekolah Menengah Kejuruan Kecantikan), Diploma Kecantikan ataupun kursus-kursus kecantikan.

Ketrampilan mereka bukan hanya soal ramuan-ramuan tradisional bocoran keraton, tetapi juga ilmu kecantikan modern yang di dalamnya ada legitimasi dari ilmu kedokteran, farmasi dan biologi sekaligus (citra intelek). Pada titik ini, salon juga menyajikan hasrat masyarakat biasa untuk mendekonstruksi posisi priyayi. Priyayi membiarkan tubuhnya dirawat oleh pelayan yang mengikuti tradisi leluhur dengan buta. Orang yang pergi ke salon lebih 'intelek' karena memilih orang yang profesional dibidangnya untuk perawatan tubuhnya.

Salon kecantikan menyajikan semua jenis komoditi industri kosmetik ke dalam satu paket komoditas. Semuanya itu sebenarnya sudah disajikan oleh industri kosmetik/kecantikan dalam berbagai ragam bentuknya. Komoditas andalan salon kecantikan antara lain adalah *facial* (cuci muka), *creambath* (keramas), mandi lulur, mandi susu, mandi rempah, masker tubuh (*body mask*), pijat muka, pijat tubuh dst. *Facial* bisa dikatakan sebagai 'cuci muka plus.' Wajah bukan hanya dibersihkan memakai *cleanser & toner*, tetapi juga dilakukan pemijatan muka, pemencetan jerawat atau komedo dan pemakaian masker.

Lulur juga begitu, melampaui mandi di rumah dengan sabun mandi dan *body lotion*. Tubuh dibersihkan dengan produk-produk *peeling*. *Peeling* membersihkan kotoran tubuh halus yang tidak mampu dirontokkan oleh

sabun mandi. Tubuh juga dipijat untuk melancarkan peredaran darah. Komoditi bentuk lain adalah *body spa*. *Body spa* menggabungkan *body scrub (peeling)*, masker tubuh dan pijat dalam satu paket layanan.

Dulu pijat hanya dikenal sebagai teknik pengenduran urat saraf untuk menghilangkan kecapaian atau penyakit-penyakit tertentu. Kini, ia juga diasosiasikan dengan kecantikan. Bentuknya pun beragam, yang paling populer adalah pijat refleksi dan totok. *Body spa* bukan pijat biasa, tetapi mengendurkan urat syaraf agar rileks yang digabung dengan *scrub* dan masker tubuh. Prosedur ini dimaksudkan untuk membersihkan, mengencangkan dan mencerahkan tampilan kulit. Perbedaan jenis pijat, bahan *scrub* dan masker yang dipakai untuk spa juga membentuk multiplikasi jenis-jenis spa, seperti Spa Coklat, Spa Aromatic, Spa Kendedes dan Dewi Sri (Sari Ayu), Spa *Green Tea*, Spa *Whitening* dan seterusnya.

Di salon, bahan-bahan yang digunakan juga tidak melulu mengandalkan warisan ilmu kecantikan keraton yang telah dibocorkan itu. Salon-salon juga banyak menggunakan produk-produk kosmetik lain seperti *la Tulipe*, *Ultima*, *Revlon*, *Soso* dst. Produk-produk modern ini memasukkan distingsi sentuhan medis, teknologi tinggi, efisien, modern dan sebagainya. Setiap salon kecantikan membuat distingsi untuk membedakan dirinya dengan salon lain. Sebagai contoh 2 salon kelas atas Yogyakarta, yaitu 'Martha Tilaar Salon Day Spa' dan 'Lelli Dewi Pengudi Saliro/House of Beauty'. Salon yang sama-sama mendaku sebagai salon natural saja, saling mengklaim berbeda.

Martha Tilaar terletak di Jl. Cendrawasih, Demangan, Yogyakarta, sekitar 200 meter dari Natasha Skin Care. Ia menggunakan produk kosmetik sendiri berlabel 'Sari Ayu'. Martha Tilaar yang masih berada dalam satu payung produksi. Produk ini sudah memiliki ijin edar jauh lebih luas ketimbang produk-produk klinik kecantikan yang ijin edarnya terbatas. Salon ini menyajikan berbagai tradisi ritual tubuh keraton ke dalam bentuk-bentuk layanan salon. Sebagian besar layanan yang disajikan adalah beberapa ritual tubuh yang dulu hanya bisa dinikmati oleh para putri keraton seperti mandi bunga, mandi lulur, mandi rempah, lulur malih warni, ratus sampai dengan *kerok*.

Dengan ikon Martha Tilaar yang memang berdarah keraton, Martha

Tilaar menyajikan cita rasa perempuan keraton. Memasuki salon ini, akan terasa sekali citra rasa keraton Jawa. Interior didominasi ukiran Jawa dengan harum bunga mawar segar berbaur dengan wangi aromatik. Alunan gending-gending Jawa mengalun pelan. Para *beautician* berseragam batik hijau sebagaimana sering terlihat pada pegawai *counter-counter* Sari Ayu di supermarket/mall. Ramuan-ramuan tradisional seperti rempah-rempah atau bunga-bunga ditata rapi di beberapa sudut ruangan.

Tetapi bukan berarti modus layanan menggunakan bahan-bahan kimia modern tidak disajikan. *Creambath* Makarizo dan Wella atau pengecatan rambut warna warni yang disajikan jelas tidak konsisten dengan identitas yang didaku. Termasuk berseberangan dengan identitas natural adalah *waxing*, bukan hanya memangkas alis yang sudah menjadi tradisi lama para perempuan keraton, tetapi juga pencabutan bulu ketiak, kaki tangan, kemaluan (*bikini area*) dan pembersihan seluruh bulu badan. Lelli Dewi terletak di Jl. Sagan Kidul No. 10, Yogyakarta, belakang Galeria Mall. Lelli Dewi juga memproduksi krim perawatan sendiri. Bahan alamiah dijadikan alasan tidak memakai jasa konsultan dokter, sebagaimana disampaikan oleh seorang *beautician*-nya:

“O di sini memang nggak pakai dokter mbak, soalnya pakainya kan bahan alami mbak, bukan yang berbahaya, jadi cocok untuk semua jenis kulit. Buktinya banyak yang sudah pakai dan cocok. Contohnya krem malam, bedanya hanya yang hasilnya cepat itu pakai yang bahannya apel itu kulitnya mengelupas, kalau yang bukan apel itu tidak mengelupas, tapi hasilnya lama”.

Tidak adanya dokter sebagai konsultan dan pengawas produk, agaknya bukan hal yang terlalu dipermasalahkan para konsumen salon ini. Ketika saya mencoba ingin membeli produk di salon ini, seorang *beautician* mengatakan bahwa produk sedang kosong. Biasanya para konsumen pesan dulu melalui telepon beberapa hari sebelumnya agar tidak kehabisan. Perawatan tradisional yang diusung Lelli Dewi berbeda dengan yang disajikan Martha Tilaar. Martha Tilaar lebih menghadirkan suasana dan ritual tubuh keraton Jawa ke dalam sebuah salon. Lelli Dewi lebih menekankan pijat totok kecantikan. Totok melampaui pijat biasa,

karena pijat totok yang disajikan di Lelli Dewi adalah pijat khusus untuk kecantikan. Khususnya *facial* di Lelli Dewi, muka konsumen tidak akan dibubuhi berbagai krem seperti di salon-salon lain, 80% prosedur *facial* adalah pijat. Setelah dilakukan pemijatan lama, langsung dilakukan pemencetan jerawat dan masker.

Pijat totok menjadi komoditi andalan yang dikemas dalam bentuk *facial*, *creambath* dan lulur. Berbagai layanan itu muncul dalam multiplikasi komoditi, seperti lulur kuning, lulur putih, *facial*, *creambath*, ratus, dan seterusnya. Walaupun sebagian besar layanan yang disajikan di Lellidewi sama dengan yang disajikan Martha Tilaar, tetapi harga untuk jenis layanan yang sama ternyata lebih mahal di Martha Tilaar. Tampaknya nama Martha Tilaar yang sudah menjadi ikon kosmetika tradisional Indonesia memiliki harga tersendiri.

Distingsi-distingsi Klinik Kecantikan Klinik kecantikan sebenarnya menawarkan layanan dengan manfaat yang sama dengan industri kosmetik dan salon-salon kecantikan. Namun klinik kecantikan memiliki sekumpulan distingsi baru yang membuat berbagai bentuk komoditas industri kosmetik dan salon kecantikan itu terdiskualifikasi dengan sendirinya. Distingsi baru itu terpusat pada hadirnya dokter dan diterapkan disiplin klinis dalam paket layanannya. Di klinik kecantikan, konsultasi dokter tampak nyata menjadi bagian dari prosedur pelayanan para konsumen.

Kewajiban menggunakan konsultasi dokter ini sebenarnya semata karena alasan medis. Menurut salah satu ahli dermatology Fakultas Kedokteran UGM, Kristina Etnawati, kewajiban ini disebabkan beberapa krim perawatan yang dijual di klinik kecantikan menggunakan bahan berkategori obat. Daya invansinya bahan berkategori obat lebih dalam ketimbang bahan kosmetik yang di jual bebas dan digunakan di salon-salon kecantikan. Efek samping yang mungkin timbul dari bahan obat lebih besar dari bahan kosmetik. Obat tidak dirancang untuk dikonsumsi secara permanen dalam jangka waktu lama. Sedangkan kosmetik diperbolehkan dijual bebas di pasaran karena memang dirancang hanya untuk bekerja di lapisan luar kulit dan bisa digunakan dalam jangka waktu lama.

Fungsi dokter di klinik kecantikan sebenarnya untuk memberikan konsultasi medis detail atas penggunaan obat dalam perawatan kecantikan

ini. Prosedur konsultasi wajib untuk mengantisipasi dan meminimalisir berbagai dampak buruk jika krem perawatan digunakan tanpa petunjuk dokter. Dokter wajib menjelaskan sedetail mungkin prosedur pemakaian hingga berbagai kemungkinan dampak yang mungkin saja timbul dari pemakaian obat ini. Namun kehadiran dokter dan prosedur klinis menjadi distingsi yang mendiskualifikasikan bisnis-bisnis kecantikan sebelumnya. Perbedaan prosedur klinik kecantikan dengan salon kecantikan bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.2: Perbandingan Komodifikasi Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan

SALON KECANTIKAN	SKIN CARE
Ditangani oleh <i>beautician</i> dan staf	Ditangani dokter, <i>beautician</i> dan staf
Prosedur penjual-pembeli	Memiliki produk racikan sendiri dengan ijin Departemen Kesehatan
Memakai bahan alami atau produk pasaran	Memiliki produk racikan sendiri dengan ijin Departemen Kesehatan
<i>Treatmen</i> dari luar kulit	<i>Treatment</i> dari luar dan dalam
Problem jerawat, flek, kulit kusam	Plus kantong mata, keriput, kutil, tanda lahir, pori-pori membesar, pipi tembem, kegemukan, warna kulit dst
Dekoratif	“Alami”

Perbedaan pertama terletak pada hadirnya dokter dalam paket layanan klinik kecantikan. Industri kosmetik dan salon sebenarnya juga sudah menggunakan legitimasi medis. Produk-produk kosmetik baik yang dijual di pasaran ataupun yang digunakan di salon-salon kecantikan banyak mencantumkan tulisan ‘hasil riset medis’ atau ‘terdaftar di POM RI.’ Paling tidak dengan cara-cara itu ingin ditekankan bahwa produk-produk yang dijual aman secara medis. Di klinik kecantikan dokter hadir, ada secara fisik dihadapan konsumen, konsumen bisa berkonsultasi langsung. Profesionalitas dokter jelas melampaui para *beautician* yang sudah terlebih dulu menandai citra profesional di salon-salon kecantikan. Para *beautician*, mendapatkan predikatnya hanya dari sekolah setingkat

SMKK (sekolah Menengah Kejuruan Kecantikan, kursus-kursus atau D3 Kecantikan. Sedang gelar dokter jelas didapat melalui prosedur sekolah yang jauh lebih lama dan lebih rumit dari sekedar profesi beautician.

Hadirnya dokter sebagai bagian dari prosedur layanan menimbulkan kesan seolah-olah apa yang disajikan di klinik kecantikan lebih aman secara medis. Pengetahuan konsumen tentang tubuhnya melalui indranya, hanyalah referensi kecil bagi sang dokter untuk mendiagnosa penyakit konsumen. Referensi utamanya adalah ilmu pengetahuan kedokteran yang didapat dari prosedur sekolah yang ketat. Dokter mampu mengenali permasalahan kecantikan kulit wajah dan tubuh jauh lebih detail dibanding apa yang dirasakan konsumen. Termasuk dalam paket kekuasaan dokter adalah penguasaan terhadap teknologi penunjangnya yang memungkinkannya mengamati dan menganalisa problema tubuh yang diwacanakan. Dokter dan kecanggihan teknologi dermatologi estetik mampu menjangkau permasalahan yang lebih rumit; seperti kantung mata, pipi tembem, bopeng selulit, pori-pori membesar, bulu badan, tanda lahir, tumor jinak (kutil), perut buncit, lengan atau paha besar dan seterusnya. Salon kecantikan hanya mampu menangani problem-problem kecantikan klasik seperti jerawat, kulit kusam dan flek dengan perawatan dari luar kulit.

Masuknya dokter dalam praktik ini tidak meniadakan berbagai bangunan pengetahuan pada praktik sebelumnya. Seluruh pekerjaan teknis kecuali injeksi dan pemakaian teknologi canggih; masih dikerjakan oleh para *beautician* berkualitas sama seperti para karyawan salon kecantikan. Dokter hanya menggenapi praktik-praktik itu dengan pengetahuan medis. Namun kehadiran dokter di klinik kecantikan juga merubah secara keseluruhan prosedur layanan.

Di salon kecantikan yang berlaku adalah modus layanan penjual-pembeli, konsumen datang memilih menu layanan yang disajikan dan para *beautician* langsung melayaninya. Di klinik kecantikan yang berlaku adalah modus disiplin klinis (hubungan dokter-pasien). Keputusan tentang layanan seperti apa yang tepat, produk apa yang harus diberikan dan bagaimana detail disiplin perawatan sehari-hari sepenuhnya berada dalam keputusan para dokter. Pegunjung klinik kecantikan tidak bisa serta merta

memilih satu layanan sesuai dengan keinginannya.

Distingsi klinik kecantikan yang lain terletak pada klaim hasil akhir yang dicapai. Istilah dekoratif diberikan oleh hasil capaian salon kecantikan yang hanya mampu menangani problem kecantikan agar ketika didandani (dengan kosmetik) hasilnya maksimal. Artinya, salon kecantikan hanya mampu merawat wajah agar lebih mudah didandani (didekorasi). Dikotomi ‘dekoratif-alami’ membedakan hasil perawatan salon kecantikan dengan perawatan di klinik kecantikan.

Masalah flek misalnya, ditangani dari luar dengan menggunakan produk-produk krim (tradisional atau pun modern) dan *facial*. Selebihnya, jika flek masih ada akan ditutupi dengan *foundation* (alas bedak) sebelum memakai bedak. Hidung kurang mancung, pipi tembem atau rahang lebar diatasi dengan teknik *make-up*. *Beautician* mendekorasi bentuk-bentuk yang tidak ideal dengan tipuan warna-warna *make-up* mulai dari *foundation*, *blush on*, bedak, *eye shadow*, sampai dengan maskara dan pensil alis.

Industri kosmetik dan salon kecantikan menyajikan teknik-teknik dekorasi wajah agar dalam kesempatan-kesempatan tertentu (pesta, seminar dan lain-lain) wajah tampil sempurna. Industri kosmetik mengajari para konsumennya mendekorasi bentuk wajah agar tampak ideal. Cara-cara ini dianggap oleh dokter sebagai cara yang “tidak sehat”. Menutupi flek dengan *foundation* dan bedak akan menyumbat pori-pori dan tidak menyehatkan kulit. Cara yang lebih sehat adalah menghilangkan flek secara permanen dengan prosedur medis yang benar. Bebas flek bukan berarti menipiskan flek dan kemudian ditutupi dengan teknik *make-up* yang sempurna. Bebas flek, artinya menghilangkan flek itu sebersih-bersihnya dengan penanganan medis murni ditunjang teknologi dermatologi canggih.

Ditunjang teknologi medis menyajikan teknik mengatasi flek dari dalam ataupun dari luar kulit. Mulai dari *chemical peeling*, microdemabrasi, tindakan laser hingga krem yang harus dipakai di rumah. *Chemical peeling* adalah teknik membersihkan kulit, melampaui *facial* yang biasa disajikan di salon-salon, membersihkan kotoran-kotoran penyumbat pori-pori yang tidak sanggup dibersihkan dengan *facial-facial* biasa (*physical peeling*) andalan salon-salon kecantikan.

Bahan kimia dioleskan ke wajah untuk menghilangkan sel-sel kulit mati, meningkatkan produksi kolagen dan meningkatkan peremajaan kulit. Cara ini dianggap jauh lebih efektif dibanding *physical peeling* yang hanya berfungsi menghilangkan sel-sel kulit mati dengan cara paksa. Bahan-bahan yang digunakan untuk *chemical peeling* beragam, mulai dari Alpha Hidroxy Acid Peel (AHA), Salicylic Acid Peel, Jessner Peel, Phenol Peel dsb. Alpha Hidroxy Acid juga masih beragam jenisnya seperti Glycolic Acid, Lactic Acid citric Acid dan Malic Acid. Zat-zat ini bisa digunakan sendiri-sendiri atau pun diracik bersama-sama (Fredri Setiawan, 2008). Bahan-bahan itu mampu dengan sendirinya merontokkan kotoran yang menyumbat pori-pori kulit tanpa ada gesekan fisik yang merusak kulit (tidak digosok-gosokkan).

Microdermabrasi juga merupakan tindakan *peeling*, bedanya *peeling* ini dilakukan secara mekanis dengan teknologi canggih *microdermabrasion* (MCD). Alat ini bisa dikatakan sebagai ‘mesin amplas’ wajah yang dirancang untuk mengatasi problem flek, bopeng, dan permukaan kulit kasar. *Peeling* biasa yang hanya dilakukan dengan menggunakan tangan atau *fremator* (mesin perata *peeling*) yang hanya menjangkau kotoran permukaan kulit paling luar. Mikrodermabrasi melakukan tindakan pengamplasan dengan daya jangkau lebih dalam dari *physical peeling*.

Mesotherapy memberikan jenis perawatan yang lain lagi. Dengan bantuan teknologi *mesogun*, zat-zat tertentu (vitamin, ekstrak tumbuhan dan sebagainya) ditembakkan ke jaringan mesodermis (bawah kulit), memberi vitamin tepat pada tempat yang dibutuhkan (LBC, 2008). Tidak seperti *facial* dimana vitamin-vitamin hanya menyentuh permukaan kulit luar, *mesotherapy* menyuntikkan zat-zat itu ke bawah permukaan kulit. Pada kasus flek misalnya, obat langsung disuntikan ke lapisan kulit dermis (dalam) sehingga diharapkan mampu memberi vitamin tepat pada sasaran kulit yang mengalami pigmentasi. Harapannya dengan cara ini flek memudar dengan sendirinya.

Kecuali klinik kecantikan yang mengaku natural; *chemical peel*, microdermabrasi dan *mesotherapy* menjadi bagian menu pokok di semua klinik kecantikan di Yogyakarta. Layanan-layanan itu tampil dengan nama-nama yang berbeda sesuai dengan kemampuan akses teknologi

yang ada pada masing-masing klinik kecantikan. Hasil yang dicapai dari klinik kecantikan bukan menutupi flek, keriput atau kulit kusam untuk penampilan acara-acara khusus, tetapi menghasilkan kulit bersih tanpa noda, kerutan dan kusam setiap hari. Muka tidak perlu memakai serangkaian produk *make-up* yang tebal dan menyumbat pori-pori (tidak sehat), akan tetapi cukup memakai *sun cream* atau pelindung dari sinar UV dan bedak tidak berwarna untuk menyegarkan kulit wajah.

Bedak tidak berwarna adalah produk khas klinik kecantikan. Jenis bedak ini tidak menutupi lapisan kulit tetapi hanya sekedar menyegarkan kulit. Inilah salah satu titik perbedaan perawatan yang dekoratif dan medis. Perawatan medis mampu menghasilkan tampilan kulit bersih halus tampak alami tanpa bantuan *make-up* dekoratif. Pusat tawaran klinik kecantikan adalah menghasilkan kulit “cantik yang sehat”. Cantik yang sehat bukan menutupi kekurang-sempurnaan tampilan kulit dengan *make-up* dekoratif, tetapi merawat dengan teknologi medis dan farmasi untuk menghasilkan kulit tanpa noda, tanpa kerut, tanpa pori-pori lebar, tanpa kantong mata, tanpa pipi tembem dan seterusnya.

Cantik yang dianggap sehat adalah yang tampak cantik alami, kelihatan tanpa *make-up* tebal. Pencapaiannya jauh lebih rumit ketimbang kecantikan dekoratif hasil capaian salon-salon kecantikan. Konsep baru ‘cantik yang sehat’ dengan hasil capaian penampakan yang tampak alami otomatis mendiskualifikasi hasil capaian salon kecantikan. Distingsi baru klinik kecantikan menjadikan praktek salon kecantikan tampak sebagai kurang profesional, tidak melek medis dan kuno.

Tidak ada hal yang benar-benar baru yang membedakan praktek bisnis klinik kecantikan dengan praktek-praktek industri kecantikan yang ada sebelumnya. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan atas idealisme-idealisme kecantikan yang ingin diwujudkan dari penggunaan prosedur klinis dalam bisnis kecantikan. Dari sisi nilai gunanya, klinik kecantikan menyajikan manfaat yang sama dengan industri kosmetik dan salon kecantikan. Bedanya klinik kecantikan menggunakan dokter dan penampakan prosedur klinis dalam layanannya. Perbedaan penampakan prosedur layanan inilah yang membuat klinik kecantikan menjadi tampak lebih melek medis dibanding produk-produk industri kecantikan yang ada sebelumnya.

Tidak ada satupun klinik kecantikan yang sungguh-sungguh mempraktekkan klaim-klaim keunggulannya. Ia hanya digunakan untuk menunjukkan distingsi-distingsi untuk memenangkan pasar. Kunci sukses klinik kecantikan lebih terletak pada kepiawaian pemiliknya dalam merangkai distingsi untuk menonjolkan klaim keunggulannya. Karena posedur ini pada saat yang sama juga merupakan teknik untuk mendiskualifikasikan para pesaingnya. Siapa yang paling cerdas dalam meramu dan menyajikan distingsi yang khas, dialah pemenangnya.

Kaidah-kaidah disiplin klinis bukanlah hal yang pertama-tama menentukan permainan bisnis ini. Ada begitu banyak hal di luar logika-logika disiplin klinis turut menentukan jalannya permainan bisnis ini. Penjelasan medis sangat tidak mencukupi untuk menjelaskan bagaimana bisnis ini sukses merekrut jutaan *member* masyarakat Indonesia dengan identitas yang beragam. Penjelasan kultural lebih memadai untuk menjelaskan fenomena ini, di mana aspek-aspek medis hanya menjadi salah satu aspek kultural yang menyokong keseluruhan permainan ini. Telaah atas kajian-kajian ilmu sosial terdahulu tentang bagaimana tubuh dan kecantikan akan membuka wawasan lebih luas dalam menentukan arah penelitian ini. Ia juga sekaligus bisa menuntun arah penelitian ini pada fokus yang lebih spesifik.

Kesimpulan

Skin Care yang kemudian diterjemahkan sebagai ‘Klinik Kecantikan’ itu bukanlah aplikasi murni dari praktik kedokteran klinis ke dalam praktik perawatan kecantikan. Istilah ‘klinik’ yang digunakan bukanlah sebuah jaminan bahwa di dalamnya adalah sebuah praktik yang benar-benar memegang teguh kaidah-kaidah disiplin medis yang menjamin kesehatan para konsumennya. ‘Klinik Kecantikan’ adalah sebuah praktik komodifikasi yang menggunakan penanda-penanda disiplin dari praktik disiplin klinis ke dalam praktik komoditas perawatan kecantikan. ‘Klinik,’ dokter, ‘obat,’ ‘resep dokter,’ ‘perawatan,’ ‘konsultasi dokter,’ dan sederet istilah-istilah dari disiplin klinis yang digunakan sebagai penanda untuk membangun distingsi baru yang membedakan bisnis klinik kecantikan dari komoditas perawatan kecantikan yang ada sebelumnya.

Daftar Pustaka

Baudrillard, J., *For A Critique of The Political Economy of The Sign*, Telos Press, 1998.

Bourdieu, P., *Distinction, A Social Critic of The Judgment of Taste*, Routledge, 1979.

Chambers, I, *Popular Culture: The Metropolitan Experience*, London: Methuen, 1986.

Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, Hutchinson and Co Publisher Ltd, 1994.

Pilliang, Yasraf Amir, "Masih Adakah 'Aura' wanita dalam 'euphoria' Media?", dalam Idi Subandi Ibrahim (ed), *Wanita dan Media*, PT Rosda Karya, Bandung, 1998.

Primadiati, Rachmi, *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*, PT Gramedia, Jakarta, 2001.

Synot, A *The Body Social, Symbolism, Self and Society*, Routledge, 1993.

Wolf, Naomi, *The Beauty Myth, How Images of Beauty are Used to Against Woman*, Parnennial, New York, 2002.

Yulianto, Vissia Ita, *Pesona "Barat", Analisa Kritis Historis tentang Kesadaran Warna Kulit di Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Jurnal:

Murlianti, S, "Cycles of Beauty Culture: Etnography of Beauty Clinics Commodification," *International Journal Indonesian Society and Culture 'Komunitas'*, Vol 6, No. 2, 2014.

Majalah:

Dwianasari, Lieza, "Menghilangkan Bopeng Akibat Cacar Air", *Majalah Natasha*, Edisi: Januari-Februari 2008.

Hidayat, Taufik, "Perang Saudara di Bisnis Klinik Perawatan Kecantikan",

www.swa.co.id/swamajalah/artikellain/, Rabu, 20 Desember, 2006.

Jatmiko, Tri, "Menghilangkan Kerut di Sekitar Mata", Majalah Natasha, Edisi: Maret-April, 2008.

Rani, "Fredy Setyawan dan Onny Tantri Bianti, "Bersatunya Doa, Cinta dan keluarga". Majalah Nataha, Edisi: Januari Februari, 2008.

Santoesa, Erita, "Aura Kecantikan Wanita Jawa, Perpaduan Pancara Lahir dan Batin", Majalah Natasha, Edisi: November-Desember, 2008.

_____, "No Care, No Beauty. Grand Opening Natasha Solo Square", Majalah Natasha, Ed: Januari-Februari 2007.

Windarto, A, "Mardeka Ataoe Tjantik!", <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0608/31/jogja/28161.htm>, Kamis, 31 Agustus, 2006.

_____, "Kecantikan Sejati Berasal dari Pikiran yang Jernih", Majalah Natasha, Ed: Mei-Juni, 2008.

"Layanan Jasa Menakar Harga", warta ekonomi.com, senin, 17 April 2006 09:10 WIB.

Krisdayanti, "Rahasia Cantiknya Melakukan Face Lift Tanpa Operasi", Tabloid Kecantikan, 14-27 Mei 2007.

Internet:

Fauzijah, Ami, "Skin Care", www.natasha-konsumen.com, 27 Maret 2008.

KOMPETENSI WANITA DALAM BERBAHASA: Antara Mitos dan Realita

Sumarni

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

e-mail: ninimarni@gmail.com

Pendahuluan

Perbedaan gender merupakan sebuah topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Topik-topik pembicaraan yang diangkat adalah bukan pada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan semata akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah perbedaan peran masing-masing. Sebagaimana kita ketahui secara kodrati, lahiriah laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan akan tetapi peran yang dimainkan dalam kehidupan sesungguhnya, terkadang mengharuskan kita keluar dari peran tersebut. Hal inilah yang menjadi topik-topik menarik untuk dijadikan bahan penelitian dimana sejumlah peneliti kerap menghubungkan isu ini dalam penelitiannya di berbagai aspek kehidupan manusia. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran pada banyak hal, salah satu yang menarik diantaranya adalah jika dihubungkan dengan kompetensi berbahasa dan strategi yang dipakai untuk mencapai kompetensi tersebut.

Terdapat justifikasi di pemikiran massif masyarakat bahwa kemampuan linguistik wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Pemikiran

ini cukup dipahami mengingat peran yang amat kompleks harus dimainkan oleh makhluk yang bernama perempuan. Pemikiran ini secara umum dominansi wanita dalam berbicara memang terlihat. Bagaimana peran seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu dari sejumlah anak berikut aturan norma-norma yang mengikat mengakibatkan dominansi berbicara tersebut terjadi. Apalagi peran tersebut tidak sesederhana yang kita pikirkan dimana sejak dahulu peran ibu bekerja masih terjadi dan malah makin menunjukkan eksistensi yang amat positif bagi negara atas peran ibu bekerja ini. Malah makin menuntut perempuan untuk vokal dalam berbicara. Maka, wajar saja stigma tersebut tercetuskan. Benarkah stereotip ini? Berikut gambaran-gambaran fenomena yang ada berdasarkan penelitian penulis dan hasil review dari kumpulan artikel.

Fakta Kemampuan Wanita dalam Berbahasa

Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa wanita mempunyai kemampuan linguistik lebih dibandingkan dengan pria ternyata tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan penelitian penulis (Sumarni, 2018) dengan mengambil sampel pada 100 mahasiswa laki-laki dan perempuan pada mata kuliah bahasa Inggris selama satu semester dapat simpulan bahwa, ada titik tertentu, wanita bisa lebih unggul, yaitu dari perolehan score test tertulis berbahasa. Keunggulan ini terdapat pada kemampuan mahasiswa perempuan dalam menyelesaikan soal-soal tertulis. Secara signifikan nilai mereka mengungguli nilai mahasiswa laki-laki. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan dalam implementasi berbahasa dalam bentuk produksi bahasa secara lisan. Mahasiswa pria mengungguli mahasiswa wanita. Kebanyakan mahasiswa laki-laki memiliki tingkat kecepatan dalam berujar lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa perempuan.

Jika ditelisik strategi belajar, wanita mampu menggunakan strategi yang lebih bervariasi mengungguli strategi yang mahasiswa pria gunakan. Akan tetapi, hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan lisan, dimana kemampuan laki-laki dan wanita hampir sama, bahkan cenderung, mahasiswa laki-laki lebih berkompeten. Temuan ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh bahwa ada apa dengan perbedaan gender ini.

Dalam penelitian lain ditemukan meskipun ada perbedaan atas kemampuan linguistik wanita dan pria, akan tetapi sesungguhnya produksi kata-kata yang dihasilkan cenderung sama. Hal ini disebabkan beberapa hal, (Deborah James, 1993; Campbell Leaper, 2004; Leaper, 2007; James Pennebaker, 2007) dalam Prasetyo (2012)), mengangkat fakta-fakta bahwa anak perempuan memang lebih banyak berbicara dibanding anak laki-laki tetapi dengan jumlah kata yang efektif yang hampir sama banyak kemudian laki-laki dewasa lebih banyak bicara dibandingkan dengan perempuan dewasa, namun lagi-lagi dengan jumlah kata yang efektif yang hampir sama banyaknya.

Temuan berikutnya adalah laki-laki dewasa lebih banyak menggunakan kata-kata atau berbicara secara asertif, sedangkan perempuan dewasa lebih banyak berbicara secara afirmatif. Temuan Leaper tersebut mendukung analisis yang dilakukan oleh Deborah James, seorang pakar linguistik menemukan bahwa hanya ada dua penelitian yang menyatakan bahwa perempuan berbicara lebih banyak dari laki-laki. Sebanyak 34 penelitian menyatakan sebaliknya pada beberapa kondisi. Namun, dikarenakan adanya perbedaan cara dan kondisi penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan, perbandingan secara langsung terhadap hasil penelitian sulit untuk dilakukan.

Lebih lanjut berdasarkan laporan James Pennebaker pada tahun 2007, yang melakukan rekaman terhadap percakapan harian 396 orang mahasiswa yang terdiri dari 210 perempuan dan 186 laki-laki di Texas Arizona dan Meksiko. Hasilnya menyatakan bahwa rata-rata perempuan dan laki-laki menggunakan jumlah kata yang sama setiap harinya. Rata-rata kaum hawa mengeluarkan sebanyak 16.215 kata per hari sedangkan kaum adam menggunakan rata-rata 15.669 kata setiap hari. Tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok seperti angka 20.000 kata dibanding 7.000 kata yang dikutip secara masif oleh media, konselor pernikahan dan buku-buku *self-help* tentang relasi antar gender. Dari jumlah kata yang dikeluarkan antara kedua gender, berdasarkan penelitian diatas, dapat dikatakan, jika dipertemukan kualitas kata kedua gender, berada dalam posisi sama.

Hal menarik lain yang juga dapat dipetik dari penelitian Pennebaker

adalah perempuan memiliki kecenderungan untuk membicarakan orang lain dan laki-laki lebih memilih untuk banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya konkret. Temuan ini memperjelas gambaran yang ada tentang bagaimana wanita berujar dalam intensitas yang banyak akan tetapi kurang berkualitas dalam isi pembicaraan tersebut. Temuan ini sekaligus menunjukkan bukti empiris sebagaimana kepercayaan masyarakat bahwa perempuan lebih suka bergosip dibandingkan laki-laki!

Berdasarkan ulasan diatas dapat dikatakan bahwa persoalan kemampuan linguistik wanita tidak dapat diragukan lagi. Dengan bakat lahiriah yang dimiliki, volume otak yang besar serta kodrati peran yang diterima di masyarakat tidak lantas menjadikan simpulan mengikat bahwa wanita lebih berkompeten dalam berbicara. Akan tetapi hal ini terkadang terpatahkan oleh karena produksi kata-kata berkualitas yang dihasilkan sama antara pria dan wanita, berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada, sehingga mematahkan stereotip yang berkembang.

Melejitkan Kemampuan Berbahasa pada Wanita

Adanya “pelabelan” di masyarakat bahwa wanita suka gosip yang dikuatkan dengan temuan penelitian Pennebaker penting untuk ditelusuri. Label ini mungkin mempengaruhi pemahaman wanita dan akhirnya menggerakkan wanita untuk lebih hati-hati, lebih menimbang-nimbang apa yang mereka ingin katakan supaya kesannya lebih berkualitas serta lebih mengatur ragam bahasa yang ingin dikatakannya. Hal senada dikatakan dalam sebuah penelitian bahwakarena posisi seperti itu, wanita berusaha keras dengan segala cara untuk meningkatkan dirinya sederajat dengan laki-laki dan salah satu cara yang paling efektif ialah dengan memakai bahasa ragam baku sebaik-baiknya (Prasetyo, 2012).

Usaha keras tersebut terlihat dari cara wanita menyusun kata demi kata, ujaran demi ujaran secara teratur hingga akhirnya menimbulkan kesan membosankan. Wacana yang dituangkan dalam bahasa yang paling komunikatif pun tetap terpengaruh pada penggunaan ragam bahasa yang cenderung monoton karena ujaran yang terlontarkan penuh dengan perencanaan. Penggunaan gerak tubuh yang terkadang sulit terkontrol akhirnya turut terbentuk secara kaku demi menegakkan wibawa itu

hingga akhirnya kesan memaksa dan tidak natural yang justru nampak mendominasi suasana yang terbentuk.

Mengapa dipilih ragam baku? Karena ragam baku mempunyai konotasi terpelajar, berstatus, berkualitas, kompeten, independent dan kuat. Berdasarkan ciri-ciri itu, Elyan meneliti tutur wanita ketika memakai ragam baku yang disebut RP (*Received Pronunciation*), lafal yang berterima, suatu lafal yang paling bergengsi di Inggris (Sumarsono, 2002:99).

Ulasan lain yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana lingkungan sangat mempengaruhi kemampuan berbahasa, baik secara internal maupun eksternal. Keterkaitan hubungan moral secara emosional antar orang sekeliling menjadi bagian yang tak terpisahkan dari terbentuknya kesanggupan seseorang dalam bercakap-cakap (Radwan, 2011). Selain itu yang tidak kalah penting adalah faktor internal yang bersumber dari kemampuan bawaan seseorang secara lahiriah yang dibarengi dengan kuat lemahnya motivasi yang dimiliki oleh seseorang serta memiliki riwayat psikologi yang mendukung. Faktor internal ini tidak bisa matang dan sangat berpengaruh pada faktor eksternal.

Wanita (dalam hal ini memiliki kemampuan lahiriah yang lebih, karena volume otak lebih besar dibandingkan dengan pria) tentu berkompeten untuk “berkata-kata”. Produksi kalimat demi kalimat yang penuh dengan makna atau justru dengan maksa ambigu, tercetus dengan sendirinya seiring suasana hati saat itu. Akan tetapi dengan motivasi yang kurang serta latar belakang psikologis seperti kecemasan yang berlebihan, bisa menjadi penghambat besar dalam berbahasa (Kumaravadivelu, 2006).

Ketika kondisi demikian dipertemukan dengan lingkungan sekitar, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Satu contoh lingkungan eksternal terkecil adalah keluarga. Penempatan norma-norma keluarga yang kaku dan memosisikan wanita sebagai “kelas kedua” akan menghambat kemampuan berbahasa seseorang. Begitu pula sebaliknya jika norma keluarga yang “easy going”, demokrat dan luwes, kompeten si wanita tersebut akan terbantuan. Keluarga satu sama lain saling mendukung dan secara otomatis akan menyemangati wanita dalam berkomunikasi.

Dalam studi etnografi komunikasi, seperti yang diulas oleh seorang

peneliti, halnya dengan lingkungan eksternal yang lebih luas, yaitu masyarakat, apa yang bisa diupayakan, adalah sekali lagi berpulang kepada bagaimana masyarakat penutur bisa mengayomi (Daroe I, 2017). Untuk itu, dalam dimensi penelitian, unit-unit sosial dapat diseleksi pada tingkat yang berbeda. Setiap masyarakat dari masyarakat yang kompleks dapat dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar atau terbagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, misalnya, kelompok masyarakat dalam satu rukun tetangga (RT), satu sekolah, satu pabrik, atau ‘masyarakat’ waria, dan sebagainya. Dengan demikian, kompleksitas masyarakat membawa konsekuensi bahwa seseorang memungkinkan menggeluti beberapa profesi dalam kesehariannya. Hal ini menjadikan seseorang dapat menjadi masyarakat tutur yang berbeda-beda. Hubungan antar anggota dalam masyarakat tutur tidak semata dicirikan oleh kesamaan bentuk bahasa yang digunakan tetapi ditentukan pula oleh pandangan atau persepsi mereka terhadap bentuk bahasa yang digunakan, baik oleh anggota maupun masyarakat lain. Dengan demikian, menimbulkan sikap dan penilaian terhadap masyarakat tutur yang berkomunikasi,

Norma masyarakat yang berlaku adalah hasil dari kesepakatan bersama yang harus dibudayakan jika mengandung nilai-nilai positif. Norma wanita sebagai kelas kedua yang berlaku di sebuah komunitas tertentu harus diadaptasi dengan baik oleh wanita dengan latar belakang apapun, dielaborasi dengan bijak tanpa meninggalkan batas-batas kesopanan. Seperti yang sudah dikatakan dalam sebuah penelitian (Daroe I, 2017), mengatakan bahwa dalam berkomunikasi akan diatur oleh kaidah pertuturan. Kaidah pertuturan ini sangat didasarkan oleh kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat tutur, misalnya kebiasaan menyela tidak berlaku pada masyarakat tutur di Jawa, khususnya pada anak-anak kepada orang tua. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat tutur Barat, yang dengan asas demokrasi, anakanak diberi kebebasan untuk berpendapat dan berdebat dengan orang tua. Mereka pun menginterpretasikan kondisi ini dengan suatu kewajaran justru dianggap sebagai proses belajar berargumen. Sebaliknya, pada orang tua di Indonesia, anak yang membatah, menyangkal, atau menolak diinterpretasikan sebagai anak yang

tidak patuh. Maka jika memiliki keluarga yang solid, masalah-masalah seperti ini tentu bukan menjadi penghalang besar seorang wanita untuk berinteraksi di masyarakat dengan menggunakan bahasa apapun untuk berkomunikasi. Dengan demikian, potensi wanita dalam berbahasa yang sudah diberikan secara lahiriah dipadukan dengan motivasi yang kuat dan dukungan lingkungan secara eksternal seperti keluarga dan masyarakat akan melejitkan kompetensi wanita dalam berbahasa.

Kesimpulan

Wanita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, merupakan makhluk yang dikaruniai dengan kemampuan beradaptasi. Ulasan-ulasan yang sudah dipaparkan memperlihatkan gambaran bagaimana wanita sesungguhnya dalam hal kemampuan berbahasa dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan sekian banyak kelemahan. Semoga dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan kepribadian wanita untuk menunjang kinerja wanita di semua sektor kehidupan.

Daftar Pustaka

Daroe I., "Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan dalam Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutar Perempuan Jawa," *Seminar Nasional Prasasti*, Malang, 2017.

Kumaravadivelu, B., *Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2006.

Praseto Adi Wisnu Wibowo, "Bahasa dan Gender", *Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2012. <https://doi.org/10.33633/lite.v8i1.1105>

Leonie Agustina & Abdul Chaer, *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Radwan, A. A., "Effects of L2 Proficiency and Gender on Choice of Language Learning Strategies by University Students Majoring in English", *Asian EFL Journal*, Volume 13 Issue 1, 2011.

Ronald Wardhaugh, *An Introduction to Sociolinguistics*, London: Basil Blackwell, 2010.

Sumarni, Noor Rachmawaty, Gender Differences in Language Learning Strategies, *Ethical Lingua*, ISSN 2540-9190, 2018.

Sumarni, Investigating Students' Strategies in Language Learning for Students' Speaking Performance. ISOLEC, Malang, 2019.

Sumarsono dan Paina Partana, *Sosiolinguistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. <https://kumparan.com/lampu-edison/benarkah-perempuan-lebih-banyak-bicara-daripada-laki-laki-1547733238553071185/full>.

BAB III

PENDAYAGUNAAN PEREMPUAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MEDIA DIGITAL: Sebuah Paradigma Komunikasi

Rina Juwita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
e-mail: rinajuwita1704@gmail.com

Pendahuluan

Pembahasan tentang pemberdayaan perempuan terinspirasi dari berbagai gerakan perempuan sejak akhir tahun 1960-an sampai dengan saat ini, yang meliputi berbagai konsep, pendekatan, dan praktik dalam berbagai disiplin keilmuan; baik itu kajian antropologi, sosiologi, pembangunan sosial hingga kajian feminis. Namun demikian, sejak tahun 1990-an, istilah ‘pemberdayaan’ sendiri mengalami transformasi sebagaimana sejumlah lembaga internasional telah melegitimasinya sebagai kebijakan atau agenda utama tetapi dalam konteks tertentu mengabaikan makna dan nilai konseptual yang sebenarnya (Batliwala, 2007).

Dalam dunia akademik, sejumlah ilmuwan bersikeras menyatakan bahwa perlu kiranya memperlakukan upaya pemberdayaan perempuan sebagai suatu konsep dan kemudian mengeksplorasinya lebih jauh dari dasar-dasar teoritisnya (Batliwala, 2007; Kuswantidkk, 2020). Secara khusus, istilah ‘pemberdayaan perempuan’ sendiri telah menjadi isu penting dalam kajian keilmuan sosial kontemporer, setidaknya sejak gelombang kedua gerakan feminis di dunia. Artikel ini pun tidak lepas dari

pengaruh teori sosial politik feminis yang telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengungkap landasan teoritis tentang pemberdayaan perempuan dengan menekankan pada proses dan bukan sekedar produk akhirnya saja (Allen, 2005; Carr, 2003; Simpson, 2002). Selain itu, sejumlah ilmuwan feminis juga menyorot lebih jauh peran konstitutif komunikasi dalam proses pemberdayaan dimana ‘dialog’ (Jozanc, 2011; Young, 1994; Yuval-Davis, 1994), ‘solidaritas’ (Loncarevic, 2009; Yuval-Davis, 1994), ‘pengakuan’ (Nillson, 2008), atau ‘partisipasi’ (Fraser, 2009; Philips, 2002) dianggap sebagai hal yang sangat penting.

Dasar dari pembahasan ini adalah kelompok ilmuwan komunikasi pembangunan yang mengedepankan gagasan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah suatu proses komunikatif (Papa dkk, 2000). Dan, ketika pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan semakin intensif, internet secara bersamaan juga muncul, berkembang, dan menyebar di seluruh bagian dunia. Catatan khusus yang kemudian memunculkan pertanyaan penting apakah infrastruktur komunikasi baru yang diusung oleh internet ini memberikan peluang nyata bagi praktik pemberdayaan perempuan. Salah satu tren kekinian yang menyertai keterkaitan antara media sosial dan pemberdayaan perempuan adalah makin banyaknya para penulis perempuan di ranah *offline* dan *online* yang menandai karakteristik komunikatif media internet yang memberikan warna tersendiri bagi gerakan sosial politik perempuan (Baer, 2016; Boizot, 2019). Salah satu isu yang menonjol adalah terkait dengan praktik partisipasi, dan telaah bagaimana perempuan berpartisipasi dalam ruang digital, serta bagaimana mereka mengkritisi struktur kekuasaan melalui praktik partisipatif *online* (Kuswanti, 2020; de Souza, 2019). Dalam diskursus ini, partisipasi dimaknai tidak sekedar terlibat dalam aktivitas *daring* seperti *logging*, mengklik, menulis, berkomentar, atau berjejaring semata karena dianggap bukan sebagai bagian dari praktik memberdayakan. Namun meliputi praktik partisipatif unik perempuan, dalam konteks ‘*a bodily reaction to flows of information*’ dan ‘*a positioning of subjectivity in an experiential relationship*’ dalam istilah Levina (dalam Megarry 2020, hal. 279), yang merupakan hal mendasar dalam konsep pemberdayaan perempuan di dunia digital.

Namun demikian, tampaknya tidak ada kerangka analitis yang bisa membantu kita menghubungkan karakteristik komunikatif internet dengan pemahaman pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses komunikatif. Oleh karena itu untuk kemudian memahami pembahasan ini, perlu kiranya untuk menempatkan komunikasi sebagai inti pembahasan dalam rangka mengkonseptualisasikan proses pemberdayaan perempuan. Artikel ini akan dimulai dengan membahas bahwa pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan konsep yang bersifat multi-disiplin, dan kemudian mengacu pada interpretasi feminis terkait kekuasaan (yang merupakan konsep inti dari pemberdayaan) untuk bisa melabuhkan argumen yang tepat terkait topik pembahasan. Terkait dengan konteks media digital, kepustakaan yang ada telah dengan baik mendokumentasikan bahwa perempuan memiliki peluang yang luar biasa untuk mempraktikkan berbagai bentuk komunikasi partisipatif horizontal untuk menjalankan kekuasaan dalam lingkungan kehidupan keseharian mereka. Hal ini menjadi latar untuk membangun hubungan teoritis antara media digital dan pemberdayaan perempuan. Peran organisasi perempuan di Indonesia dalam proses pemberdayaan tersebut juga akan dibahas untuk menjelaskan nilai yang terkandung dalam kerangka pikir tersebut.

Teori Kekuasaan dan Karakter Komunikatif Pemberdayaan Perempuan

Sebagai konsep dasar yang melandasi tulisan ini, bukanlah hal yang mengejutkan bahwa pembahasan teoritis yang ada terkait pemberdayaan perempuan sangat menekankan pada pentingnya gagasan kekuasaan. Sebagaimana yang dinyatakan Simpson (2002), bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa mengembangkan aspek sosial politik pemberdayaan tanpa memahami bagaimana kekuasaan tersebut diorganisir dan dijalankan. Dalam konteks ini, kritik ilmuwan feminis mengenai kekuasaan menawarkan gagasan penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif terkait pemberdayaan perempuan.

Model tiga kekuasaan yang diusung oleh Allen (1998), memberikan gagasan tambahan penting lainnya terhadap topik ini sebagaimana ia memiliki pandangan multi-dimensi terkait kekuasaan yang bias membantu memahami proses dinamis pemberdayaan perempuan. Model kekuasaan

yang ditekankan oleh Allen sangat bersifat integratif, meskipun setiap model membahas fokus yang berbeda-beda satu sama lain.

Model pertama, yakni '*power over*' (kuasa atas sesuatu) menawarkan gagasan mendasar yang berguna untuk memahami apa yang dimaksud sebenarnya dengan pemberdayaan perempuan. Dari sudut pandang model yang ditawarkan oleh Allen (1998) *power over* merupakan suatu praktik kekuasaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan baik itu yang dilakukan secara tidak sengaja, maupun juga praktik yang dilakukan secara sengaja. Hal ini dikarenakan apa pun niat mereka, para laki-laki tersebut masih bertindak dalam serangkaian hubungan kekuasaan kultural, institusional, dan struktural yang kerap merugikan kaum perempuan. Hal yang mendasari pemaknaan '*power over*' ini adalah pengakuan terkait eksistensi patriarki dan desakan untuk mengakhiri dominasi laki-laki terhadap perempuan sebagai titik awal praktik pemberdayaan perempuan. Dengan kata lain, istilah *power over* ini dalam kata lain dimaknai sebagai praktik yang memotivasi para perempuan untuk menginisiasi proses pemberdayaan mereka sendiri sebagai individu. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan sistem sosial disusun dimana aturan, norma, keyakinan, dan praktik sosial ditentukan oleh kelompok-kelompok dominan laki-laki yang kemudian mengarah pada praktik patriarki yang sangat berpengaruh dalam realita sosial (Fraser, 2012). Sehingga, dalam dunia yang didominasi oleh para laki-laki, perempuan acap kali diacuhkan tidak hanya dalam partisipasi sosial politik saja, tetapi juga pengalaman, nilai, dan kepentingan mereka seringkali diabaikan (Reilly, 2009; Philips, 2002).

Akan tetapi, model '*power over*' ini memberikan pandangan hanya dari satu dimensi saja terkait gagasan pemberdayaan perempuan, karena model ini membawa konotasi dominasi dan kontrol maskulin (Allen, 2005). Faktanya, banyak ilmuwan feminis meskipun dari sudut pandang teoritis yang berbeda, menaruh perhatian serius dalam topik ini dan mengajukan gagasan alternatif terkait kekuasaan untuk melengkapi '*power over*', yaitu model kekuasaan yang kedua. Dibandingkan dengan '*power over*', praktik '*power to*' (kekuasaan untuk) menekankan pada elemen positif kekuasaan, alih-alih melihat kekuasaan sebagai kekuatan yang bersifat negatif dalam

hubungannya dengan represi, larangan, atau paksaan. Dalam hal ini, kekuasaan dianggap sebagai kapasitas yang bisa mendorong perempuan sebagai aktor individual untuk meraih tujuan mereka tetapi tidak dengan mengorbankan orang lain (Allen, 1998; 2005). Oleh karenanya, praktik pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan perwujudan potensi perempuan untuk melakukan berbagai tindakan guna mencapai serangkaian tujuan dalam hidup mereka.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa '*power to*' perlu dipertimbangkan sebagai respons terhadap '*power over*'. Dengan kata lain, '*power to*' tidak diletakan dalam ruang hampa, tetapi dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap '*power over*'. Oleh karena itu, resistensi yang dimiliki perempuan terletak pada kemampuan mereka untuk mencapai berbagai tujuan yang berfungsi untuk menumbangkan dominasi (Allen, 1998). Dalam formulasi ini, model '*power to*' dan '*power over*' berada pada hubungan yang bersifat dialektis. Dimana perempuan digambarkan sebagai pihak yang didominasi, tetapi juga diberdayakan pada saat yang bersamaan dalam konteks norma, institusi, dan sebagainya (Allen, 1998).

Padahal, pemberdayaan perempuan lebih dari sekedar masalah perseorangan atau individual, karena kekuasaan kolektif jauh lebih besar dari pada upaya perempuan perseorangan semata (Collins, 2000; Phillips, 2002; Young, 1994). Dalam hal ini, para peneliti kajian perempuan mengadopsi pendekatan baru, yakni model ketiga '*power with*' (kekuasaan dengan) untuk menjelaskan aspek kolektif dari kekuasaan. Karena konsep '*power with*' dianggap mengisyaratkan perlunya terbentuknya kolektifitas. Oleh karena itu, konsep '*power with*' mengisyaratkan perlu dibentuknya kolektifitas dalam proses pemberdayaan. Dengan cara ini konsep '*power with*' bisa dipahami sebagai kemampuan kolektif untuk bertindak bersama-sama demi mencapai tujuan bersama untuk merekonstruksi sistem dominasi (Allen, 1998). Dalam perspektif ini kemudian, pemberdayaan perempuan perlu diatur berdasarkan tujuan bersama demi untuk mengatasi berbagai masalah sosial terkait dengan ketidaksetaraan gender.

Lagi-lagi, serupa dengan konsep '*power to*', konsep '*power with*' atau kekuasaan dengan juga dilandasi oleh penolakan terhadap praktik '*power over*'. Contoh konkrit praktik ini adalah gerakan perempuan

yang mempertanyakan dominasi laki-laki dengan menekankan perlunya membawa perempuan dalam proses pengambilan keputusan bersama (Young, 1994; Yuval-Davis, 1994). Sebagaimana Allen (1998) menjelaskan bahwa untuk merekonstruksi hubungan sistematis yang terjadi antara dominasi dan opresi maka perlu adanya tindakan atau perjuangan yang bersifat kolektif. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa esensi dari konsep '*power with*' adalah perlunya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada model 'bekerja bersama' dan bukan hanya bersandar pada tindakan yang bersifat *top-down* demi tercapainya perubahan sosial. Sehingga, bagi para pemerhati perempuan, praktik ini seharusnya merupakan suatu bentuk koalisi politik yang melibatkan perempuan dalam proses negosiasi, bekerja bersama, kolaborasi, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan Bersama (Yuval-Davis, 1994).

Konsepsi mengenai kekuasaan yang dibahas sebagaimana di atas berfungsi sebagai titik awal yang sangat penting sebagai dasar bagi praktik pemberdayaan, sebagaimana yang disebutkan juga sebelumnya bahwa kekuasaan merupakan akar konsep dari pemberdayaan. Kekuasaan sendiri, berdasarkan sintesis dari Allen merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan pengembangan kapasitas perempuan untuk menjalankan praktik '*power to*' dan '*power with*' untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terkait dengan cara-cara yang dilakukan oleh laki-laki dalam mempraktikkan kekuasaannya terhadap perempuan. Ketiga hubungan kekuasaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidaklah dapat dipisahkan satu dengan lain, tetapi sebaliknya ketiga model ini perlu dilihat sebagai model bersama dari struktur patriarki yang dialami oleh perempuan.

Pada faktanya, model kekuasaan yang telah disebutkan menunjukkan adanya karakter komunikatif pemberdayaan perempuan yang membutuhkan adanya proses perubahan. Konon katanya, dalam proses merekonstruksi struktural terkait gender, komunikasi aktor perempuan sangatlah dibutuhkan untuk mengakui status sub-ordinatnya, meningkatkan kesadaran, mengekspresikan sudut pandangnya, membuat keputusan, berpartisipasi dalam berbagai tindakan, membangun solidaritas, dan mengorganisir tindakan kolektif. Dengan demikian, pada

akhirnya yang menjadi dasar dari proses pemberdayaan perempuan adalah proses komunikasi dimana aktor individu ataupun kelompok mampu menghasilkan *sense* terkait praktik '*power to*' dan '*power with*' untuk mengubah ketidaksetaraan gender dimana laki-laki kerap menggunakan praktik '*power over* terhadap perempuan.

Selain dari pada itu, penggunaan media digital secara intens untuk perubahan sosial politik perempuan pada masa kini menjadikan komunikasi sebagai praktik yang sentral, dimana komunikasi menjadi poin penting untuk mengawali eksplorasi hubungan antara pemberdayaan perempuan dan kehadiran internet sebagai bagian dari teknologi komunikasi dan informasi baru. Hal inilah yang mendasari tulisan ini untuk mengeksplorasi bagaimana kapasitas komunikasi internet sebagai bagian dari praktik komunikatif yang menggarisbawahi proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini.

Pemberdayaan Perempuan sebagai Suatu Proses Komunikatif dan Peran Komunikasi Digital

Bagian pembahasan ini akan mengeksplorasi tiga aspek khusus terkait bagaimana tindakan komunikatif yang diusung oleh para ilmuwan kritis membentuk proses pemberdayaan, yakni terkait aspek pengembangan kesadaran perempuan, konstruksi identitas publik, dan pengorganisasian tindakan kolektif, serta bagaimana kemudian peran keterlibatan komunikasi digital dalam proses tersebut.

Mengembangkan Kesadaran Perempuan melalui Tindakan Komunikatif untuk Mampu Bersuara

Pembahasan sebelumnya terkait pemberdayaan perempuan menekankan pada pentingnya meningkatkan kesadaran sebagai titik awal proses tersebut. Maka penjelasan yang logis terkait hal ini berhubungan dengan fakta bahwa konsep pemberdayaan berakar dari Teori Kesadaran yang diusung oleh Paulo Freire yang berasal dari disiplin ilmu Pendidikan. Terkait dengan konteks perempuan, maka teori kesadaran ini menunjukkan bahwa perempuan mampu menghubungkan pengalaman mereka terkait opresi yang terjadi dengan pengalaman yang dialami oleh perempuan

lain, dan oleh sebab itu kemudian melihat adanya dimensi politik dari pengalaman pribadi yang mereka alami (Carr, 2003).

Berdasarkan atas logika ini, maka tindakan komunikatif untuk perempuan mampu bersuara memainkan peranan penting dalam proses ‘penyadaran’ ini bagi para aktor perempuan. Dalam sudut pandang pemberdayaan perempuan, suara dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara atau tindakan berbeda yang bias dilakukan oleh perempuan untuk mencari, baik itu secara individu maupun kolektif untuk mewujudkan adanya perubahan dalam kehidupan maupun hubungan yang mereka jalani (Kabeer, 2010). Dengan demikian, kapasitas perempuan untuk mampu bersuara berhubungan erat dengan proses komunikasi dimana mereka bisa menarasikan cerita pribadi mereka, dan mengekspresikan hal-hal yang menjadi keprihatinan mereka.

Dalam hal ini, internet dianggap sebagai media yang bisa menawarkan bauran elemen komunikatif (misalnya, profil, postingan, komentar, *bookmark*, atau tautan) yang memungkinkan setiap orang menjadi *story-teller* sesuai dengan hak yang mereka miliki. Kegiatan ini, dimasa sekarang ini, diistilah Gregory dan Pennock (2012) sebagai praktik ‘*digital storytelling*’ (pendongeng digital). Berdasarkan hal ini kita bias melihat bagaimana praktik mendongeng digital ini bisa menjadi sarana bagi banyak perempuan untuk menyebarkan secara lebih luas kapasitas untuk membangun ruang refleksi baik itu yang berasal dari dirinya sendiri atau pun orang lain (Gregory & Pennock, 2012). Hal ini juga menunjukkan bahwa seseorang bisa melakukan perenungan untuk dirinya sendiri melalui proses mendongeng digital di internet.

Salah satu aspek penting dari dongeng digital terkait dengan perempuan adalah mengenai bagaimana penggambaran kisah personal mereka dalam kehidupan nyata. Munculnya *hashtag* terkait isu perempuan di *Twitter* seperti #YesAllWomen, #notbuyingit, #standwithwendy, dan #everydaysexism (Keningar, 2015) dapat dikatakan sebagai salah satu dari sekian contoh yang bisa menggambarkan bagaimana media digital membantu para perempuan menjadi agen sosial, dan mungkin agen politik melalui postingan terkait cerita nyata kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu *output* dari proses pemberdayaan perempuan jika

menilik dari apa yang pernah disampaikan oleh Doring (2009). Hal ini kemudian mengarahkan kita pada peluang yang dimiliki internet sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Dalam hal ini, pengekspresian diri meliputi proses di mana perempuan mendapatkan tempat agar pandangan mereka didengarkan, dan agar bisa mencapai suatu perubahan meskipun bersifat personal. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Stowel (2013) bahwa pengekspresian diri berhubungan dengan keinginan untuk mengontrol upaya pemberdayaan diri seseorang, keinginan yang kuat mencapai otonomi, dan keperluan mempertanyakan otoritas yang ada. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa kemampuan ekspresif media digital bisa diadopsi oleh perempuan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendemonstrasikan keyakinan dan nilai-nilai personal, serta merekonstruksi *stereotype* perempuan (Chen, 2015; Manosevitch&Tzuk, 2017).

Gagasan mengenai 'suara' lebih lanjut berhubungan erat dengan konsep dialog (*dialogue*) yang dimiliki oleh Habermas (1981). Dengan mengacu pada berbagai perspektif lainnya dalam kajian komunikasi, Harlow (2012) mengidentifikasi dialog sebagai suatu bentuk khusus dari upaya pembangunan hubungan dan kolaborasi yang bersifat timbal balik. Hal ini juga disinggung dalam kajian komunikasi pembangunan yang menyatakan bahwa dialog merupakan jalan menuju proses refleksi diri, proses pengetahuan diri, dan pembebasan dari keyakinan yang selama ini bersifat melemahkan, serta sebagai jalan untuk pembelajaran bersama, menerima perbedaan, kepercayaan, dan pemahaman (Papa dkk, 2000). Selain itu, jika kita menelaah konsep dialog dari sudut pandang perempuan, maka bentuk komunikasi ini menghindari proses persuasi yang kerap diasosiasikan dengan upaya patriarkis untuk mendominasi dan melakukan kontrol terhadap sesuatu (Dolata, 2015). Hal serupa juga digunakan oleh Yuval-Davis (1994) untuk menempatkan dialog sebagai pusat dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan. Bagi Yuval-Davis, khususnya mereka yang dianggap lemah, akan terlibat dalam dialog dimana satu sama lain akan saling memaknai dan memahami status subordinasi mereka dan melihat kemungkinan untuk menciptakan aliansi yang kemudian dianggap mampu untuk membawa perubahan sosial.

Hal yang mendasari proses ini adalah perlunya ruang komunikasi yang bersifat partisipatif, dialogis, dan bersifat horizontal dimana semua perempuan yang dianggap ‘tidak berdaya’ dalam suatu kelompok bisa melakukan percakapan satu sama lain secara bebas untuk membangun kesadaran kolektif. Dalam hal ini, internet dianggap memberikan wadah bagi para partisipan yang berusaha terlibat dalam dialog yang bersifat partisipatif, yang pada gilirannya bisa memfasilitasi terbangunnya hubungan, aliansi, dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Hal ini terutama terlihat dalam penggunaan fitur ‘komentar’ yang ada di media sosial. Dalam penelitiannya, Schandorf (2019) menemukan bahwa internet bisa membantu perempuan untuk membangun hubungan sosial yang berpusat pada dirinya sendiri yang berfungsi sebagai generator yang mampu membangun rasa pemberdayaan tersebut.

Identitas Publik dan Konsep Pemberdayaan Sosial

Pembahasan yang disampaikan sebelumnya mengantarkan kita pada praktik komunikasi bermedia menjadikan perempuan lebih peduli terhadap posisi sub-ordinat mereka dan kemudian membentuk kesadaran kolektif yang kemudian semakin memperkuat pentingnya upaya pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini, penting kiranya untuk dicatat bahwa proses tersebut muncul dalam konteks hubungan sosial. Dengan demikian, maka proses pemberdayaan perempuan ini juga meliputi pembentukan identitas publik dimana semua aktor baik itu individual maupun kelompok dapat menghasilkan dampak sebagaimana yang diinginkan pada diri orang lain (Buckingham, 2008; Islam, 2014). Hal ini berkaitan erat dengan cara bagaimana perempuan selama ini menggambarkan subyektif diri mereka melalui praktik sosial dalam suatu kerangka kultural. Selain itu, meskipun norma budaya mengubah interaksi sosial mereka, tetapi hal tersebut tidak akan menentukan siapa diri mereka. Namun sebaliknya perempuan secara individual tidak hanya mengadopsi tetapi melampaui peran dan norma gender dalam mengelola citra diri yang diberikan oleh partisipan lainnya dalam proses interaksi yang terjadi, yang kemudian berkontribusi pada pengembangan identitas kreatif dan reflektifnya (Wehrle & Fasbender, 2018).

Berkaitan dengan ruang *online*, arsitektur terbuka internet dianggap mampu menyediakan *platform* komunikasi baru yang luar biasa bagi

pengungkapan personal diri. Bagi perempuan, internet dianggap sebagai sumber daya manipulatif yang memungkinkan mereka berpikir dengan cara baru mengenai identitas mereka. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti tentang bagaimana cara perempuan menggunakan media *online* sebagai suatu taman bermain untuk bereksperimen dengan identitas gender yang berbeda, terlepas dari keberadaan tubuh fisik mereka (lihat Danet, 2020; Saunders, 2012; van Kokswijk, 2007). Namun sebaliknya, sejumlah penelitian lainnya lebih menekankan pada pembahasan mengenai bagaimana perwujudan pengalaman keseharian perempuan terkait tampilan *online* gender mereka (Madya, 2018; Tsatsou, 2011). Atau, pembahasan lain terkait topik ini menyajikan pendekatan yang lebih umum dimana perempuan dijelaskan bisa menampilkan identitas gender dan seksual mereka dalam lingkup *online*, baik itu secara bebas maupun dibatasi oleh peraturan *platform online* (Ciruci, 2018; Garcia, 2020).

Dengan kata lain, dalam lingkungan *online*, masyarakat, terutama mereka yang termarginalisasi selama ini, menyadari pentingnya citra diri *online* karena peluang besar yang memungkinkan diri mereka menjadi 'terlihat' oleh orang lain. Bagi orang-orang tersebut, penampilan identitas dan praktik *code-switching* adalah hal penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan dalam hidup (Flores dkk, 2018). Hal ini kemudian mengarahkan kita pada pemikiran bahwa internet merupakan sumber kekuatan baru bagi perempuan untuk bisa menggunakan kendali atas identitas diri mereka, yang kemudian menghantarkan pada gagasan terkait kapasitas komunikasi internet bagi pemberdayaan perempuan.

Selain dari itu, sejumlah ilmuwan telah mencatatkan kemampuan media digital untuk kampanye diri dan manajemen reputasi personal serta potensinya bagi kehadiran dan popularitas publik (Kleppinger & Cain, 2015). Hal ini juga didukung oleh sejumlah data empiris yang berkaitan dengan perempuan, dimana promosi diri merupakan aspek penting bagi para aktor perempuan untuk memenuhi kebutuhan dan interaksi sosial mereka dengan dunia luar (Duffy & Hund, 2019; Mavroudis & Milne, 2016). Pada gilirannya, pengalaman yang diintegrasikan dalam ruang publik dan upaya memenuhi kepuasan perempuan tersebut berkaitan erat dengan

perasaan perempuan terkait dengan kompetensi, kepercayaan diri, dan ketegasan, yang kemudian diterjemahkan dalam rasa pemberdayaan.

Dinamika Baru Konsep ‘*Power With*’ bagi Aksi Kolektif Perempuan

Mekanisme yang mungkin mendasari keterkaitan antara internet dan pemberdayaan perempuan yang dibahas sejauh ini menguraikan kerangka analitis yang membantu kita memahami konsep ‘*power to*’ bagi pemberdayaan perempuan melalui komunikasi digital. Meskipun demikian, kemampuan komunikatif internet memberikan otonomi yang besar bagi para perempuan yang dimasa sekarang ini bisa terlibat aktif dalam berbagai kegiatan untuk mengekspresikan keprihatinan mereka dan menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya. Dengan kata lain, faset individual ini hanya dapat menampilkan sebagian gambar dari proses pemberdayaan perempuan, karena untuk bias benar-benar menjadi terberdayakan maka dibutuhkan lebih dari sekedar peningkatan dalam arti sempit. Pembahasan selanjutnya akan coba mendiskusikan lebih dari sekedar pengalaman yang dialami oleh perempuan terkait upaya pemberdayaan secara individual, dan akan menelaah berbagai peluang sosial politik kolektif yang bisa didapatkan dari potensi komunikatif internet. Berbagai tulisan terkait peran komunikasi digital dalam tindakan komunikatif sangatlah relevan dalam memahami tulisan ini lebih lanjut sebagaimana hal ini dapat membantu kita memahami mekanisme komunikatif yang mendasari pengembangan istilah ‘*bekerja bersama-sama*’, yang merupakan media penting dalam sistem patriarkis masyarakat kita.

Telah banyak dibahas sebelumnya bahwa tindakan kolektif dalam lingkungan komunikasi saat ini ditandai oleh adanya keberagaman, desentralisasi, fluiditas, dan keterbukaan dalam aktivitas komunikasi (Cammaerts & Mansell, 2020; Reilly, 2009). Sinergi ini juga menandai dunia baru gerakan dan aktivisme perempuan, yang merupakan aspek menonjol dari konsep ‘*power with*’ sebagaimana kehadiran internet membuat banyak hal lebih mudah dilakukan bagi perempuan untuk secara aktif terlibat dalam aktivitas politik mikro dan informal yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat (Baer, 2016). Semua kasus ini menunjukkan bahwa kehadiran media digital telah membuka wadah diskursif bagi para

perempuan untuk mendapatkan pemahaman bersama terkait permasalahan yang mereka hadapi, yang pada gilirannya dapat membantu membentuk aliansi, koalisi, dan jejaring berdasarkan masalah bersama yang dihasilkan dari dialog dan pertukaran pengetahuan yang terjadi di ruang *online*.

Dalam lingkungan digital, aspek perubahan yang mungkin paling mencolok terjadi adalah kemunculan berbagai bentuk kelompok yang memfasilitasi terjadinya praktik kolaboratif, aliansi, dan koalisi perempuan. Pada awal mulanya, internet membantu berbagai kelompok-kelompok perempuan untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan isu-isu perempuan dan gender dengan tokoh-tokoh yang secara fundamental merefleksikan kapabilitas mereka dalam mengelola permasalahan dan cara mereka mengkampanyekan agenda politik perempuan (D'Urso, 13/052019). Dalam hal ini, kelompok-kelompok perempuan memainkan peran yang krusial dalam mengkonstruksi isu yang kemudian mengarah pada pembentukan identitas yang kuat bagi para konstituen gerakan itu sendiri (Dolata & Schrape, 2016).

Kemudian selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut menjadi aktor penting untuk membujuk calon partisipan potensial untuk bergabung, bekerja dan mengelola serta mengkoordinasikan kontribusi dan sumber daya yang mereka miliki (Theocharis, Vitoratou dan Sajuria, 2017). Dengan cara ini, kelompok-kelompok perempuan dapat menggunakan internet untuk memfasilitasi proses interaksi dengan individu lainnya, guna membangun konsolidasi secara kolektif. Hal ini dikarenakan agar dapat menggoyang struktur dominasi laki-laki, organisasi perempuan tidak hanya dituntut memiliki kerangka pikir yang kuat tetapi juga partisipan yang terlibat didalamnya mampu membangun gagasan mereka sendiri. Dengan demikian, satu proses penting bagi organisasi perempuan adalah adanya proses pembelajaran yang diperoleh dari persepsi, opini, dan pendapat para anggotanya terkait agenda bersama, sehingga baik itu organisasi maupun individu memiliki gagasan yang lebih jelas mengenai apa sebenarnya yang ingin mereka raih (Papa dkk, 2000). Dengan demikian, melalui internet, organisasi perempuan bias secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan nilai dan alasan terkait dengan isu-isu gender untuk memandu para partisipan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Selain itu, internet juga memungkinkan para partisipan untuk mengambil bagian dalam berbagai tindakan atau peristiwa secara virtual, seperti misalnya petisi, meme, atau praktik satir politis yang dilakukan secara *online* (Earl dkk, 2014). Strategi online tersebut, menurut Earl dkk (2014) sangatlah cocok terutama bagi mereka yang berada dalam konteks lingkungan otoritarian, sebagaimana hal tersebut sangatlah sulit untuk dikontrol oleh penguasa dan juga hanya memerlukan biaya minimal dari pada melakukan protes di jalanan. Berdasarkan logika ini, maka internet dapat dikatakan menawarkan peluang bagi kelompok-kelompok perempuan untuk bisa melakukan mobilisasi partisipan secara cepat dan murah untuk bisa memiliki kesempatan mengekspresikan keprihatinan mereka, dan tentunya juga dianggap sebagai cara yang efisien untuk melepaskan diri dari kemungkinan sensor yang bisa saja dikeluarkan oleh penguasa.

Akhirnya, keterjangkauan koneksi internet memungkinkan kelompok-kelompok perempuan untuk membentuk koalisi dan aliansi antar organisasi untuk bisa mengejar tujuan-tujuan politik dan sosialnya (Boizot, 2019). Dalam proses ini, aktor organisasi dianggap bisa membentuk dua jenis jejaring, yakni 'jejaring *hyperlink*' dan jejaringstruktur' (Ackland dan O'Neil, 2011). Dimana dalam jejaring *hyperlink* kelompok-kelompok perempuan dapat dengan mudah menggunakan *hyperlink* untuk bisa terhubung satu dengan lain tanpa harus melakukan pertukaran gagasan, sumber daya, dan informasi. Dalam konteks ini, *hyperlink* hanyalah merupakan strategi umum untuk memberikan sinyal kepada siapa saja yang berjuang untuk tujuan yang sama. Namun sebaliknya, konsep jejaring struktur merupakan penggunaan bersama dari komponen-komponen struktur tertentu (Ackland dan O'Neil, 2011) yang menghubungkan berbagai organisasi ke dalam jaringan.

Komunikasi Digital dan Proses Politik Pemberdayaan Perempuan

Lalu, bagaimana caranya kita bisa memahami keterkaitan antara media digital dan pemberdayaan perempuan dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya? Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok-kelompok perempuan dalam konteks Indonesia akan dianalisis sebagai contoh untuk mengilustrasikan bagaimana mereka menggunakan internet

untuk mempersuasi publik untuk mau bergabung bersama, melakukan negosiasi, mengkonstruksi isu bersama, dan berkolaborasi dengan berbagai aliansinya untuk memperoleh apa yang disebut dengan kekuatan kolektif.

Organisasi perempuan dalam hal ini dipilih karena tujuan bersama yang mereka miliki, yakni kesetaraan gender atau bahkan perubahan status quo perempuan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga perbedaan yang mereka miliki dalam tujuan, sumberdaya, serta taktik kampanye. Selain itu, jenis organisasi ini dipilih berdasarkan hubungan yang mereka miliki dengan pemerintah dan struktur organisasi yang dimiliki; yakni 'lembaga pemerintah', 'lembaga swadaya masyarakat', 'pusat studi berbasis perguruan tinggi', dan 'komunitas online'. Kelompok-kelompok tersebut berfungsi untuk membentuk tujuan dan prioritas aktor politik kelompok perempuan dalam kaitannya dengan isu-isu perempuan di Indonesia, termasuk permasalahan kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, reformasi hukum, pemberdayaan perempuan, kemiskinan perempuan, dan kesetaraan upah para pekerja perempuan.

Fungsi Informasi Organisasi bagi Proyeksi Identitas

Sejak awal, kelompok-kelompok perempuan menunjukkan keinginan mereka untuk bias mengejar ketertinggalannya terkait dengan perkembangan teknologi informasi karena ketakutan akan menjadi semakin tersisih sebagaimana banyak diantara mereka sudah berada pada posisi yang terpinggirkan dalam struktur masyarakat Indonesia. Dari kacamata mereka, menunjukkan bahwa mereka hadir secara *online* sepertinya merupakan 'pilihan' untuk bisa menarik perhatian publik lebih luas. Melalui penggunaan platform *online*, para aktor kelompok-kelompok perempuan tersebut memiliki kesempatan untuk menyajikan informasi mengenai diri mereka dan memberikan penekanan terkait identitas yang mereka miliki. Namun demikian, mengingat perbedaan bentuk organisasi yang diteliti ini, maka tujuan yang mendasari organisasi ini pun tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai representasi dari 'lembaga pemerintah' yang kerap menggunakan internet sebagai alat pemasaran dalam praktik *public relations* mereka. Tujuan dari konten *online* mereka

adalah untuk mempresentasikan pencapaian atas kerja-kerja mereka, ‘menyenandungkan puja puji pemerintah berkuasa’. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan kiranya jika proses membangun keterlibatan atau pertukaran gagasan dengan para audiensnya bukanlah fokus utama dari praktik penggunaan media *online* mereka.

Hal ini bertolak belakang dengan lembaga swadaya masyarakat perempuan, meskipun aktor yang satu ini juga sangat bergantung pada penggunaan internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Namun motivasi yang mendasari hal tersebut adalah ‘agar suara mereka terdengar oleh publik’. Namun karena keterbatasan otoritas yang dimiliki, kelompok ini biasanya tidak punya cukup sumber daya untuk mengembangkan *platform online* mereka menjadi ruang publik yang banyak dirujuk. Bahkan terkadang, beberapa kelompok ini perlu memperhalus konten *online* mereka, sebagaimana tujuan organisasional mereka adalah mengkampanyekan reformasi hukum yang kemudian kerap menjadi target sasaran pengawasan sejumlah pihak. Bahkan tidak jarang LSM harus berkompetisi dengan situs-situs komersial raksasa agar bisa didengar, yang artinya hal ini juga berlaku pada kelompok-komunitas gerakan sosial *online*. Oleh karena itu, meskipun LSM dan komunitas *online* bisa menunjukkan keinginan mereka untuk menarik dukungan publik, tetapi kurangnya sumber daya dan posisi marjinal mereka membatasi kemampuan mereka dalam bergerak.

Diseminasi Informasi dan Peningkatan Kesadaran Isu Gender

Pada saat yang bersamaan, bagi kelompok-kelompok perempuan, platform online digunakan untuk membentuk persepsi audiens mengenai gagasan, keyakinan, dan nilai terkait isu-isu gender dan difungsikan sebagai salah satu media penting untuk membangun kesadaran perempuan terkait status subordinat yang mereka miliki. Kelompok-kelompok perempuan tersebut kerap kali melakukan pembaharuan postingan berita, me-retweet informasi tersebut, memberikan komentar, dan membagikan artikel terkait untuk meningkatkan visibilitas berbagai permasalahan terkait perempuan kepada para audiensnya. Isu-isu tersebut antara lain mengenai pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesetaraan

gender di Indonesia, yang ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan negara melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Namun demikian, berbagai aktor baik itu individual maupun kelompok memahami hal ini dengan perspektif yang juga berbeda-beda. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, fokus utamanya adalah pada aspek kebijakan yang bertugas menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan perempuan, seperti misalnya hak personal (terkait jaminan pribadi), hak legal (jaminan perlindungan hukum), dan hak ekonomi sosial dan budaya. Namun sekali lagi, hal ini bisa dimaknai sebagai suatu strategi alternatif untuk menampilkan capaian-capaian pemerintah dalam mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam kasus LSM, informasi yang lebih banyak diberikan adalah terkait dengan isu-isu spesifik dan penanganan permasalahan yang dialami oleh berbagai kelompok perempuan di Indonesia. Hal-hal yang mereka bahas umumnya terkait dengan penanganan kasus kekerasan domestik, hak-hak perempuan marjinal, pelecehan seksual di tempat kerja atau lembaga pendidikan, kesetaraan upah, serta representasi gender stereotyping di media. Motivasi yang mungkin mendasari hal tersebut diasumsikan karena berbagai situasi tersebut sangatlah dekat dengan kehidupan dan keadaan sehari-hari perempuan di Indonesia, terutama sejak digaungkannya reformasi di akhir tahun 1990an. Sehingga, meskipun berbagai LSM tersebut kerap mempublikasikan beraneka informasi terkait isu-isu perempuan di platform online mereka, mereka masih tetap taat mengikuti aturan structural dalam upaya mendorong perempuan mendapatkan kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka sendiri. Dengan kata lain, gagasan, ide, dan keyakinan yang disebarikan melalui internet masih tetap dalam kerangka kerja otoritas penguasa.

Sedangkan pusat-pusat studi perempuan yang berbasis di lembaga pendidikan dan komunitas online dalam konteks ini, lebih banyak bergulat merekonstruksi kembali wacana public terkait dengan gender. Seperti misalnya, aktor-aktor kelompok dari pusat studi perempuan (gender) lebih banyak menggunakan platform online mereka sebagai ruang kuliah

umum untuk menyebarkan pengetahuan yang dianggap benar terkait isu-isu perempuan. Selain hal-hal terkait hak perempuan, komunitas online juga merupakan aktor yang kerap melakukan mobilisasi partisipan untuk memperdebatkan isu tentang hak perempuan dan feminisme.

Kolektivisme dan Internet

Selain dari pada hal-hal yang dibahas sebelumnya, kelompok-kelompok perempuan juga menggunakan *platform online* untuk memfasilitasi komunikasi dengan para pendukung individualnya, meskipun tanpa dibarengi dengan terciptanya rasa kolektivisme diantara mereka. Secara parsial, internet memang memungkinkan kemudahan membangun afiliasi antara kelompok dan individu perempuan yang tersebar secara geografis. Dimana dalam hal ini, sejumlah kelompok-kelompok perempuan memberikan akses yang cukup mudah untuk mendorong masyarakat bergabung dengan kelompok mereka, seperti misalnya dengan menjadi pelanggan email atau atau pengikut akun sosial media mereka di internet.

Selain menggunakan *platform media online* sebagai salah satu cara orang-orang yang berpikiran serupa untuk membentuk sebuah kelompok, kelompok-kelompok perempuan tersebut juga menyadari bahwa internet juga menawarkan peluang untuk membangun interaksi dengan publik secara luas untuk meneguhkan rasa kebersamaan (kolektivitas). Namun demikian, tidak semua kelompok perempuan ini menggunakan fitur interaktif di situs jejaring sosial mereka. Penulis berasumsi bahwa kemudian hal ini dilakukan karena fitur tersebut memungkinkan adanya komentar yang bersifat publik yang bisa dilihat oleh semua orang. Jika kemudian muncul komentator yang pesannya berisi pesan yang menantang pihak-pihak tertentu, bisa jadi akan membuat grup yang mereka miliki beresiko untuk diblokir karena bagaimana pun admin yang menangani hal tersebut tidak sepenuhnya bisa mengontrol apa yang publik ingin sampaikan terlebih mengingat sejumlah peristiwa kerap disangkut pautkan dengan UU ITE yang disinyalir banyak pihak bersifat multi-tafsir (Astuti, 20/03/2019; Erdianto, 05/08/2019) Apalagi dengan kecepatan internet di negara ini yang kemudian bisa menimbulkan polemik tersendiri jika ada konten-konten tertentu yang kemudian membutuhkan respon

yang cepat dan tepat dan rentan menimbulkan mis-interpretasi.

Namun demikian, tetap tidak bisa diindahkan bahwa internet memang memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan ikatan yang kuat antara kelompok-kelompok perempuan dan juga dengan pendukungnya. Bahkan kemudian sejumlah kelompok yang awalnya terbangun melalui bantuan media sosial bergeser ke platform komunikasi yang lebih bersifat khusus (misalnya; *whatsapp group* atau *telegram group*) untuk tetap mempertahankan keterlibatan partisipan melalui interaksi timbal balik yang lebih intens diantara mereka yang terkadang kemudian juga disertai dengan model komunikasi tatap muka langsung (*face-to-face communication*).

Internet dan Ruang Baru Kampanye Sosial Politik Perempuan

Berkaitan dengan praktik kampanye, jelas kiranya bahwa kelompok-kelompok perempuan, selain tentunya dari lembaga pemerintah, masih mempraktikkan aktivitas *online* yang bersifat konservatif dalam platform *online* mereka untuk melakukan mobilisasi massa agar mau turut serta dalam aktivitas yang mereka lakukan. Alasan mengapa jenis komunikasi ini disebut sebagai konservatif adalah karena kegiatan yang disajikan secara *online* lebih banyak mengarah pada kegiatan kuliah umum, seminar, foto/lukisan, pengabdian masyarakat, atau kegiatan-kegiatan pelatihan.

Dengan kata lain, dalam ruang publik *online* dalam hal ini, masih minim dijumpai adanya kelompok-kelompok sosial perempuan yang secara terang-terangan menunjukkan elemen-elemen ‘protes’ atau ‘radikal’ atas isu-isu tertentu. Namun demikian, tetap penting untuk dicatat bahwa bukan berarti elemen vokal perempuan tersebut tidak terjadi dalam aksi *offline* mereka meskipun konten komunikasi *online* mereka cenderung bersifat konservatif. Asumsi ini muncul karena tidak jarang kita masih bisa menemukan sejumlah kampanye petisi elektronik yang mengungkapkan kekhawatiran para kelompok perempuan tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa LSM perempuan yang beberapa kali menggunakan *platform online* dalam menyebarkan informasi terkait aktivitas negosiasi *offline* mereka yang bertujuan untuk menunjukkan upaya yang mereka lakukan terkait isu-isu tertentu.

Pada akhirnya, meskipun internet memberikan kelonggaran terkait kendala jarak geografis khususnya di negara kepulauan Indonesia ini untuk memfasitasi hubungan antar organisasi yang berjuang untuk tujuan yang sama, tetapi tidak banyak kelompok-kelompok perempuan benar-benar menginvestasikan sumber dayanya untuk menggunakan *platform online* sebagai basis untuk membangun aliansi. Sebaliknya, mayoritas kelompok yang ada masih sangat mengandalkan kontak personal atau tatap muka secara langsung untuk membangun, menjaga, dan atau mengukuhkan hubungan antar organisasinya. Namun demikian, perlu tetap diperhatikan bahwa *hyperlink* memang bisa memberikan peluang baru bagi para kelompok pro perempuan untuk bisa terhubung satu sama lain, dan untuk membentuk *circle* berbagi informasi diantara mereka sendiri. Sebuah aktifitas yang kiranya bisa membentuk hubungan antar organisasi virtual, yang tentunya bisa menjadi solusi efektif apalagi dalam situasi seperti pandemi seperti pada saat ini. Meskipun demikian, faktanya tetap menunjukkan bahwa rasa kolektifitas semacam itu (terlepas dari apakah hal tersebut bersifat virtual atau pun nyata) masih tetap bukan merupakan hal yang penting dalam kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kiranya masih memerlukan proses yang panjang agar kelompok-kelompok perempuan ini bisa menyatukan suara secara solid agar bisa menggemakan suara sosial politiknya lebih nyaring dan membawa perubahan sosial yang signifikan kedepannya.

Kesimpulan

Kelompok-kelompok perempuan, meskipun dengan posisi dan prioritas tujuan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, sudah memiliki kesadaran bahwa internet merupakan salah satu media yang bias menunjang kesuksesan mereka dalam proses pemberdayaan perempuan di negeri ini. Meskipun demikian, internet masih belum digunakan secara maksimal sebagai sarana yang efektif dalam berinteraksi guna membantu membangun kolektivisme diantara mereka. Hal ini dikarenakan, kelompok-kelompok perempuan ini masih menganggap *platform online* yang mereka miliki hanya sebatas sebagai alat yang hemat biaya untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka semata. Alih-alih

menggunakan internet, masih banyak kelompok-kelompok perempuan ini lebih mengandalkan komunikasi tatap muka untuk membentuk aliansi antar organisasi. Maka dapat dikatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh internet sebagai pembentuk koalisi sosial politik sebagaimana yang dinyatakan oleh Yuval-Davis (1994) untuk membawa perubahan dalam struktur kekuasaan yang ada, kiranya masih memerlukan proses pembelajaran yang panjang. Namun krisis yang dialami akibat Pandemi Covid-19 saat ini kiranya bisa menjadi pendorong pergeseran pola pikir ini setelah belajar dari proses adaptasi kebiasaan baru yang tidak sebentar ini.

Oleh karena itu, internet dianggap mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi praktik-praktik baru dalam kajian perempuan, tetapi masih belum bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk benar-benar bisa memberdayakan perempuan tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa penelitian terkait media digital dan pemberdayaan perempuan juga sangat terkait erat dengan konteks dimana ia dilakukan. Seperti di Indonesia, objektif perwujudan praktik pemberdayaan perempuan juga sangat dipengaruhi oleh kontrol negara sebagai penguasa. Dimana faktor kontekstual ini bisa jadi akan mendorong atau bahkan menahan kelompok-kelompok perempuan memiliki kesadaran dan pemahaman terkait peluang yang ditawarkan oleh internet untuk bisa meningkatkan visibilitas organisasinya, meningkatkan kesadaran publik terkait isu-isu gender, membangun rasa kolektifitas, dan jejaring antar organisasi. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa mengeksplorasi hubungan antara pemberdayaan perempuan dan keberadaan media digital menghasilkan gambaran yang cukup kompleks tetapi memerlukan kajian lanjutan untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif kedepannya.

Daftar Pustaka

Ackland, R. & O'Neil, M., "Online Collective Identity: The Case of The Environmental Movement", *Soc Networks*, 33, 177–190, 2011.

Allen A, "Rethinking Power", *Hypatia* 13(1), 21–40, 1998. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1998.tb01350.x>

Allen, A., "Developmental Systems Theory", *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*, 20 (1), 21-53. Doi: 10.2979/HYP.2005.20.21, 2005.

Astuti, N., "Dinilai Banyak Pasal Multitafsir, Pakar Minta UU ITE Direvisi", *Detiknews*, 20/03/2019. Diakses pada 7 Desember 2020 di <https://news.detik.com/berita/d-4476330/dinilai-banyak-pasal-multitafsir-pakar-minta-uu-ite-direvisi>

Baer, H., "Redoing Feminism: Digital Activism, Body Politics, and Neoliberalism", *Fem Media Study*, 16 (1), 17-34, 2016. Doi: <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1093070>

Batliwala, S., "Taking The Power out of Empowerment: An Experiential Account", *Development in Practice*, 17(4/5), 557-565, 2007. Diakses pada 4 Desember 2020, <http://www.jstor.org/stable/25548253>

Boizot, J., "Feminism and Media, Opportunities and Limitations of Digital Practices. *Tesis di Program Media and Communication Studies Malmö University*, 2019. Diakses pada 6 Desember 2020 di <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1483333/FULLTEXT01.pdf>

Buckingham, D., "Introducing Identity, *Youth, Identity, and Digital Media*", Editor: David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 1–24, 2008. Doi: 10.1162/dmal.9780262524834.001

Cammaerts, B. & Mansell, R., "Digital Platform Policy and Regulation: Toward a Radical Democratic Turn", *International Journal of Communication*, 14, 135-154, 2020.

Carr, E.S., "Rethinking Empowerment Theory Using a Feminist Lens: The Importance of Process", *Affilia*, 19(1), 8-20, 2020. Doi: 10.1177/0886109902239092

Chen, G., "Why Do Women Bloggers Use Social Media? Recreation and Information Motivations Outweigh Engagement Motivations", *New Media & Society*, 17(1), 24-40, 2015. Doi: 10.1177/1461444813504269

Ciruci, A., "A New Women's Work: Digital Interaction, Gender, and Social

Network Sites”, *International Journal of Communication*, 12, 2948-2970, 2018.
Collins, P.H., *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and The Politics of Empowerment*, (2nd Ed.). Routledge, New York, 2020.

D’Urso, J., “Five New Things About Online Campaigning”, *BBC News*, (13/05/2019). Diakses pada 7 Desember 2020 di <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-48137861>

Danet, B., *Cyberpl@y: Communicating Online*, Routledge, New York, 2020.

De Souza, N.M., “Gender in the Globa South: A Complex and Contradictory Agenda”, *Contex to Internacional*, 41 (2), 2019. Doi: <https://doi.org/10.1590/s0102-8529.20194102000001>

Dolata, U. & Schrape, J., “Masses, Crowds, Communities, Movements: Collective Action in The Internet Age”, *Social Movement Studies*, 15(1), 1-18, 2016. Doi:10.1080/14742837.2015.1055722

Doring, N., “The Internet’s Impact on Sexuality: A Critical Review of 15 Years of Research”, *Computers in Human Behavior*, 25, 1089-1101, 2009. Doi: 10.1016/j.chb.2009.04.003

Duffy, B. & Hund, E., “Gendered Visibility on Social Media: Navigating Instagram’s Authenticity Bind”, *International Journal of Communication*, 13, 4983-5002, 2019.

Earl, J., Hunt, J., Garrett, R.K., & Aysenur, D., *New Technologies and Social Movements*, Diani, M. (Editor), *The Oxford Handbook of Social Movements*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Erdianto, K., “ICJR Minta Pasal Multitafsir dan Berpotensi Over Kriminalisasi di UU ITE Dihapus”, *Kompas.com*, (05/08/2019). Diakses pada 7 Desember 2020 di <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/05/09314481/icjr-minta-pasal-multitafsir-dan-berpotensi-overkriminalisasi-di-uu-ite>

Flores, P., Gomez, N., Roa, A. & Whitson, R., “Reviving Feminism Through Social Media: From the Classroom to Online and Offline Public Spaces”, *Gender and Education*, 32(53), 1-16, 2018. Doi: 10.1080/09540253.2018.1513454

Fraser, N., "Feminism, Capitalism, and the Cunning of History", *New Left Review*, Maret April, 97-117, 2012.

Garcia, A., *New Forms of Self-Narration: Young Women, Life Writing and Human Rights*, Palgrave Macmillan, Charm-Switzerland, 2020.

Gregory, D. & Pennock, B., "Digital Storytelling as a Genre of Mediatized Self-Representations: An Introduction", *Digital Education Review*, 22, 2020. Diakses pada 6 Desember 2020 di <https://core.ac.uk/download/pdf/39131149.pdf>

Habermas, J., *Teori Tindakan Komunikasi*, Jakarta, Kreasi Wacana, 1981.

Harlow, S., "Social Change and Social Media: Latin American Activists' Use of Digital Tools in the Face of Digital Divide", *2012 Congress of the Latin American Studies Association*, San Fransisco-California, 23-26 Mei. Diakses pada 6 Desember 2020 di <https://www.arifyildirim.com/ilt510/summer.harlow.pdf>

Islam, G., "Social Identity Theory", *Encyclopedia of Critical Psychology*, Editor: Teo, T. Springer-Verlag, Paris, 1781-1783, 2014.

Jozanc, N., "Feminism and Democracy: Are there Women Behind Women Representatives?", *Svremene TEME*, 4 (1), 2011.

Kabeer, N., "Women's Empowerment, Development Interventions and the Management of Information Flows", *IDS Bull*, 41(6), 105–113, 2010. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.17595436.2010.00188.x>

Keningar, I., "Fenomena Gerakan Feminisme di Media Sosial", *Liputan6.com*, (25/02/2015). Diakses pada 6 Desember 2020 di <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2180102/fenomena-gerakan-feminisme-di-media-sosial>

Kleppinger, C. & Cain, J., "Personal Digital Branding as Professional Asset in the Digital Age", *American Journal of Pharmaceutical Education*, 79(6), 2015. Doi: 10.5688/ajpe79679

Kuswanti, A., Saleh, A., Hubeis, A. & Puspitawati, H., "Effects of Communication and Characteristics in Pekka Groups on the Economics Empowerment of Members", *Jurnal The Messenger*, 12 (2), 2020. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v12i2.2389>

Loncarevic, K., "Feminist Epistemology and Foucault", 2009, *Tesis di Program in Women's and Gender Studies- The State University of Jersey*. Diakses pada 5 Desember 2020.

Madya, S., "The Presentation of Gender Identity on Female Travel Blogs", *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 2018. Doi:<https://doi.org/10.22515/bg.v3i1.1269>

Manosevitch, I. & Tzu, Y., "Blogging, Craft Culture, and Women Empowerment", *Media & Communication Studies*, 3, 2017. Diakses pada 6 Desember 2020 di <https://pustaka-sarawak.com/eknowbase/attachments/1585641016.pdf>

Mavroudis, J. & Milne, E., "Researching Microcelebrity: Methods, Access and Labour", *First Monday*, 21(7), 2016. Doi: <https://dx.doi.org/10.5210/fm.v21i7.6401>

Megarry, J., *The Limitations of Social Media Feminism: No Space of Our Own*, Palgrave MacMillan, Cham-Switzerland, 2020.

Nillson, M., "Rethinking Redistribution and Recognition: Class, Identity, and the Condition for Radical Politics in the 'Postsocialist' Age", *Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry*, 2 (1), 31-44, 2008.

Papa, M., Singhal, A., Ghanekar, D. & Papa, W., "Organizing for Social Change Through Cooperative Action: The (Dis)Empowering Dimensions of Women's Communication", *Communication Theory*, 10 (1), 90-123, 2000. Doi: 10.1111/j.1468-2885.2000.tb00181.x

Phillips, A., *Democracy and Difference*, Blackwell Publisher, Oxford, 2002.

Reilly, N., "Cosmopolitan Feminism and Human Rights", *Hypatia*, 22(4), 180-198, 2009. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2007.tb01327.x>

Saunders, R., "Ethnopolitics in Cyberspace: The Internet, Minority Nationalism, and the Web of Identity", *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 12(2), 410-412, 2012.

Schandorf, M., *Communication as Gesture: Media(tion), Meaning, & Movement*, Emerald Publishing, Bingley-UK, 2019.

Simpson, A., "Book Review: Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness,

and the Politics of Empowerment; Shadow Boxing: Representations of Black Feminist Politics”, *Signs Journal of Women in Culture and Society*, 27 (4), 1183-1186, 2002. Doi: 10.1086/339651

Stowel, J., “Book Review: A Private Sphere: Democracy in A Digital Age”, *Platform: Journal of Media and Communication*, 5(1), 147-149, 2013.

Theocharis, Y., Vitoratou, S. & Sajuria, J., “Civil Society in Times of Crisis: Understanding Collective Action Dynamics in Digitally-Enabled Volunteer Networks”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, 22, 248-265. Doi: 10.1111/jcc4.12194, 2017.

Tsatsou, P., “Gender and Sexuality in the Internet Era”, *The Handbook of Gender, Sex, and Media*, Ross, K. (Editor), 516-543, 2011. Doi: 10.1002/9781118114254.ch31

Van Kokswijk, J., *Digital Ego: Social and Legal Aspects of Virtual Identity*, Eburon Academic Publishers, Eindhoven, 2007.

Wehrle, K. & Fasbender, U., “Self-Concept”, *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, Springer, 2018. Doi: 10.1007/978-3-319-28099-8_2001-1

Young, I., “Punishment, Treatment, Empowerment: Three Approaches to Policy for Pregnant Addicts”, *Feminist Studies*, 20 (1), 32-57, 1994. Doi: <http://www.jstor.org/stable/3178429>

Yuval-Davis, N., “Women, Ethnicity and Empowerment”, *Feminism & Psychology*, 4 (1), 1994. Doi: 10.1177/0959353594041010

PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Fajar Apriyani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
e-mail: fajaryani.fisip@gmail.com

Pendahuluan

Sepanjang sejarah, perempuan memimpikan mendapat hak dan kesempatan yang sama untuk dapat berkiprah di bidang politik sebagaimana halnya laki-laki. Arena politik memang menjadi saksi terjadinya maskulinitas peran publik. Maloutas (2006) menyatakan bahwa pada dasarnya, demokrasi berkarakter maskulin. Oleh karena itu, demokrasi substansial sebagai suatu proyek sosial tidak bisa berdampingan dengan sistem relasi gender yang tumbuh di tengah masyarakat karena pada dasarnya relasi itu bersifat dikotomis dan secara tegas membatasi kategori sosial antara status superior dan inferior.

Di Indonesia, setelah Reformasi 1998 ruang demokrasi pun terbuka. Politik yang awalnya bersifat otoriter kemudian membuka ruang bagi semua orang, termasuk bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Gerakan perempuan dimulai pada tahun 2004 dimana perempuan memutuskan untuk bergerak dan terlibat dalam politik. Perempuan memutuskan untuk harus hadir dan memanfaatkan ruang politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan perempuan.

Berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang politik, Wijaksana (2004) menyatakan bahwa gerakan perempuan sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan hak-hak politik perempuan yang erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Gerakan perempuan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai.

Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, *sharing*, dalam prinsip kesetaraan dan keadilan (Wijaksana, 2004).

Budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan, masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi politik perempuan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah usaha strategis dengan cara memasuki wilayah pengambilan kebijakan yang bersahabat dengan perempuan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah perempuan harus masuk dalam tataran kekuasaan dan legislasi atau dengan memperkuat kontrol dan akses perempuan di wilayah tersebut.

Penyebabnya adalah kekuasaan dan legislasi merupakan aspek yang sangat menonjol dalam menentukan corak ideologi masyarakat dan pengaturan sumber daya pembangunan. Apabila keadilan pengaturan sumber daya bagi laki-laki dan perempuan secara adil memang diinginkan, maka satu-satunya jalan adalah terlibat langsung dalam setiap tahapan pengaturan tersebut (Wijaksana, 2004).

Di Indonesia, kesenjangan gender dalam politik masih menjadi tantangan hingga kini yang disebabkan dari masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional serta internasional. Langkah pertama diawali dengan ratifikasi konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Piagam PBB ini meyakini

HAM dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian ratifikasi BDPA (*Beijing Declaration and Platform for Action*). Pada perkembangan berikutnya terbit Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Namun nyatanya, pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index (GDI)* Indonesia masih berada pada angka 93,22 dimana angka tersebut masih berada di bawah IPG dunia yang berada di angka 94,12 (*Human Development Report 2017* dalam Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019). Dengan nilai IPG masih berada di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pembangunan perempuan. Walaupun untuk capaian IPG Indonesia, perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Pada tahun 2017, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Latvia dengan nilai sebesar 102,97 dimana Latvia adalah satu dari enam negara di dunia yang telah sepenuhnya menjamin kesetaraan hukum antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan dan bisnis.

Sedangkan untuk kawasan ASEAN, IPG Indonesia tahun 2017 berada pada peringkat ke sembilan dari sepuluh negara dan merupakan satu dari tiga negara ASEAN yang IPG-nya berada dibawah rata-rata dunia (*Human Development Report 2017* dalam Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Negara ASEAN dengan IPG tertinggi pada tahun 2017 adalah Vietnam dengan nilai sebesar 100,53 dan terendah adalah Kamboja dengan nilai sebesar 91,44.

Kemudian secara nasional, capaian IPG Indonesia tahun 2018 justru menurun dari IPG tahun 2017 dimana masih terdapat 19 provinsi yang berada di bawah IPG nasional yang nilainya mencapai 90,99 (*Human Development Report 2017* dalam Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019).

Sementara menilik dari data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

untuk dapat lebih fokus mengetahui kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi, diketahui pada tahun 2018 IDG Indonesia mengalami kenaikan pada persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Namun, pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen masih tetap seperti capaian tahun 2017. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan memang menjadi salah satu prioritas isu dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dicanangkan oleh pemerintah.

Walaupun demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melaporkan bahwa kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global masih membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini masih dilaporkan memiliki capaian yang lebih rendah dibanding laki-laki serta masih mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak dari budaya patriarki (Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019). Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif pun diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia (BPS, 2018).

Kehadiran Gerakan Perempuan untuk Kesetaraan Gender dalam Politik

Kesetaraan gender berarti tidak ada diskriminasi dalam berbagai bidang, sehingga kaum perempuan dapat melibatkan diri secara totalitas dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun bidang lain seumpamanya Rasyidin dan Aruni (2016). Namun, fakta menunjukkan bahwa selama ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih rendah. Padahal telah tertuang dalam salah satu dokumen penting nasional tentang kesetaraan gender, yaitu Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 45-51 mengenai hak wanita yang diantaranya adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Mengapa perempuan perlu terlibat dalam politik? Rasyidin dan Aruni (2016) menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dan politik

dan publik merupakan salah satu *pre-existing conditions* bagi demokrasi. Soetjipto (2019) bahkan menyatakan bahwa perlu dilakukan sejumlah intervensi untuk memastikan perempuan masuk dalam institusi legislatif agar arah kebijakan sensitif dan responsif terhadap isu-isu perempuan. Dimana selama ini perempuan tereksklusi dalam politik yang merupakan monopoli laki-laki, sehingga absennya agenda politik perempuan dalam banyak kebijakan sangat tinggi.

Untuk memastikan perempuan berada dalam arena politik, tentu ada prosedur yang harus ditempuh, yaitu Pemilu sebagai sarana lahirnya para wakil rakyat yang akan membuat kebijakan publik. Politik yang selama ini dimonopoli oleh laki-laki, tidak menjadikan hal itu mudah. Budaya patriarki di Indonesia telah sekian lama melanggengkan gagasan bahwa perempuan berada di ranah domestik, sedangkan laki-laki berada di wilayah publik, termasuk politik. Soetjipto (2019) menyatakan begitu pula Orde Baru yang sudah sedemikian rupa melemahkan dan mendomestifikasi gerakan perempuan. Maka, gerakan perempuan hadir dengan kesadaran bahwa penting agar perempuan terlibat dalam politik.

Perjuangan gerakan perempuan mendorong lahirnya Pasal 65 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang kuota 30%. Undang-undang ini merupakan landasan normatif yang pertama memuat ketentuan mengenai kuota. Undang-undang ini menghimbau agar perempuan masuk pada semua tingkatan. Walaupun isu kuota 30% pertama kali sebenarnya diberlakukan pada Pemilu 1998, pada saat itu hampir semua parpol tidak mempunyai calon legislatif (*caleg*) perempuan, karena politik dikonstruksi oleh masyarakat yang laki-laki saja. Pada saat itu tidak banyak perempuan yang berani terjun ke dunia politik (Partini, 2014).

Kuota 30% bagi perempuan di parlemen dalam Pemilihan Umum 2004 menjadi sangat penting dalam rangka tindakan afirmatif (*affirmative action*) dalam rangka memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berkiperah dalam bidang politik. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa dengan maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan merupakan cara agar kepentingan perempuan dapat terwakili. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam pengambilan

kebijakan diyakini akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih dari korupsi (Venny, 2004).

Sudah saatnya perspektif gender dianggap penting untuk masuk pada segala lini kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Dimana hal tersebut selama ini belum sempat dilakukan tak lain adalah karena kehidupan sosio-politik Indonesia hanya dilihat dari 'kacamata' laki-laki. Sementara kaum perempuan sendiri kian terpinggirkan dan dianggap tidak layak memasuki bidang politik.

Kuota 30% bagi perempuan sebagai Tindakan Khusus Sementara (TKS) mensyaratkan partai politik menyadari alasan kemunculan TKS, karena secara kultural perempuan memang lebih belakangan terjun ke politik. Perempuan menghadapi berbagai kendala sehingga memang perlu diperlakukan secara khusus. Soetjipto (2019) menyatakan bahwa ide awal TKS sesungguhnya adalah manifestasi subversi gerakan perempuan. TKS adalah tentang bagaimana caranya perempuan masuk dalam arena politik, padahal kita tahu perempuan tidak punya pengalaman politik ataupun organisasi. Setelah Tindakan Khusus Sementara (TKS) diberlakukan, memang ada peningkatan kuantitas anggota legislatif perempuan. Tetapi secara substantif, gagasan kuota ini mengandung problem.

Pengalaman Gerakan Perempuan dalam Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004 tindakan afirmasi dilakukan melalui penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut dalam Pemilu. Parpol berusaha memenuhi kuota 30%. Tetapi, para caleg perempuan yang diusung ditempatkan pada nomor urut besar, sehingga peluang untuk meraih kemenangan sangat kecil. Parpol yang telah memasang nama caleg perempuan beranggapan telah melaksanakan Pasal 65 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003. Dengan memasang nama caleg perempuan, parpol juga beranggapan akan dapat menarik simpati calon pemilih perempuan dan calon pemilih laki-laki yang perhatian dengan perjuangan perempuan.

Hasil Pemilu 2004 menunjukkan jumlah anggota legislatif meningkat dari 9% (di Pemilu 1999) menjadi 11,82%, dimana dari 550 anggota DPR-RI, 61 diantaranya adalah perempuan. Sistem Pemilu saat itu adalah

proporsional dengan daftar calon terbuka menggunakan nomor urut dan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Kemudian, gerakan perempuan melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak efektif, karena aturan tersebut hanya menghadirkan perempuan di hilir, tidak di partai sehingga dirasa perlu ada intervensi di hulu pada partai politik. Sehingga tidak hanya Undang-undang Pemilu yang harus berubah, tetapi juga Undang-undang Partai Politik. Dimana dalam pendirian, kepengurusan, internal demokrasi, pengambilan keputusan, pencalonan, promosi dan dalam semua tingkatan partai politik harus ada perempuan. Sejak Pemilu 2004 maka Undang-undang Pemilu dan Partai Politik telah mengalami perubahan dua kali. Dalam dua kali revisi kebijakan afirmasi semakin mapan dan pelaksanaannya semakin tegas.

Pengalaman Gerakan Perempuan dalam Pemilu 2009

Menjelang Pemilu 2009, pemerintah menerbitkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 *tentang* Pemilihan Umum. Pada tahun 2009 kuota 30% tetap dipertahankan dalam Undang-undang Pemilu, tetapi bahasanya bukan lagi menghimbau, melainkan mengharuskan ada perempuan dalam kepengurusan partai, sehingga sifatnya lebih keras karena mewajibkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengadopsi sistem *zipper*, yaitu pengaturan dalam urutan caleg perempuan dimana setiap tiga kandidat setidaknya ada satu kandidat perempuan. Artinya, jika suatu partai mendapat suara dan caleg perempuan berada di nomor urut atas, maka peluang keterpilihannya menjadi lebih besar.

Selanjutnya, Undang-undang tersebut diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa dalam hal parpol yang tidak dapat memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka parpol yang bersangkutan wajib menyampaikan alasan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang telah mengatur teknis pencalonan. Dalam Pemilu 2009, dari 48 parpol terseleksi sebanyak 38 parpol yang dapat bertarung di arena perpolitikan saat itu.

Namun kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan

putusan yang mengubah penentuan calon terpilih bukan berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak. Sistem Pemilu tahun 2009 itu kemudian menghasilkan kenaikan jumlah perempuan di DPR, yaitu dari 11,82% menjadi 17,86% dimana dari 560 anggota DPR RI 100 orang adalah perempuan. Perdana (2014) menyatakan bahwa angka tersebut adalah sebuah konsekuensi dari usaha gerakan perempuan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR yang dilakukan sejak tahun 2002.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 kuota perempuan di legislatif telah direvisi. Kuota 30% dan sistem *zipper* menunjukkan kebijakan afirmatif mulai mengacu pada *feminist standpoint* dimana telah ada kesadaran dan pengakuan bahwa perempuan adalah heterogen. Perempuan yang beridentitas marginal paling tidak telah mendapat jalan untuk terakomodasi dari pemenuhan kuota dan penempatan mereka pada nomor urut atas dari parpolnya. Sasaran TKS sesungguhnya pada perempuan yang berkarakteristik marginal, minoritas dan selama ini mengalami diskriminasi dalam kancah politik. Namun, Haryono (2014) menyatakan bahwa hasil Pemilu 2009 menunjukkan 42% dari perempuan yang berada di parlemen berasal dari dinasti politik. Hal ini berarti parpol-parpol tidak melakukan apapun dalam pendidikan politik. Parpol asal merekrut entah istri, anak, keponakan ataupun saudara, yang penting berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, praktek dinasti politik yang terjadi tidak memberi dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, anggota parlemen hasil Pemilu 2009 juga terdiri dari kelompok figur populer hingga mencapai 25%.

Walaupun hasil Pemilu 2009 menunjukkan adanya kenaikan persentase, hasil penelitian Partini (2012) juga menyatakan bahwa penempatan caleg perempuan yang dilakukan parpol hanya sebagai basis moral saja agar parpolnya memenuhi kriteria kepesertaan dalam Pemilu. Konsep *motherhood* menjadi wajah lain dari bangunan ideologi dominan sebagai konsep politik-budaya yang membatasi peran dan kedudukan perempuan yang menghambat dalam perjuangan politik itu sendiri. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa parpol mengakui bahwa kandidat perempuan tidak memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh parpol. Perempuan kurang siap menjadi kandidat dalam mengikuti serangkaian tes dan persyaratan, selain juga karena adanya rasa takut akan resiko yang diterima saat terlibat dalam kegiatan politik yang membahayakan jiwanya. Hambatan lainnya adalah tidak menyatunya wacana dengan tindakan nyata dalam mempersiapkan caleg perempuan. Caleg perempuan hanya menjadi hiasan dan formalitas agar parpolnya dinilai telah adil gender. Dalam hal ini, penempatan caleg perempuan pada parpol hanya sebagai alat legitimasi (*vote getter*). Perempuan pun tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan di partai, termasuk dalam hal penempatan caleg.

Penerapan Tindakan Khusus Sementara (TKS) tentang kuota yang merupakan ide afirmasi sesungguhnya dikemukakan oleh Soetjipto (2019) adalah tuntutan gerakan perempuan untuk menyertakan perempuan sebagai minoritas dalam masyarakat supaya terlibat di dalam politik, tetapi ide itu justru dibajak oleh politik oligarkhi, dinasti, politik uang dan korupsi. Wajah perempuan yang terpilih trennya menjadi bersifat homogen seperti mereka adalah tokoh populer, penguasa atau keluarga pejabat. Padahal gagasan afirmasi seharusnya adalah perlawanan terhadap ketidakadilan. Kuota 30% dimaknai dengan sekedar perempuan. Sementara identitas marginal, kelompok terdiskriminasi, tertinggal dan minoritas sebagai hal pokok yang mau diperjuangkan, malah diabaikan.

Gagasan afirmatif yang semangatnya adalah mendorong keterwakilan perempuan telah dimaknai secara berbeda oleh partai. Partai adalah penjaga gerbang, sumber rekrutmen, penentu Pemilu, dan lain-lain. Namun, penelitian Adelina & Soetjipto (2014) menunjukkan bahwa perempuan dalam kepengurusan partai memang telah mengejar angka 30%, tetapi hanya mengejar ditingkat pusat, dan tidak dari tingkat bawah. Padahal untuk mendorong perubahan atau politik perempuan dibutuhkan keterlibatan dari tingkat paling bawah hingga atas. Dalam strategi partai, perempuan memang sudah ada dalam kepengurusan, tetapi tidak pada posisi-posisi strategis seperti Sekretaris, Bendahara, Kepala Cabang, dan lain-lain. Perempuan hanya menumpuk di sayap perempuan. Begitu juga dalam program dan visi misi, agenda perempuan tidak ada di dalamnya. Temuannya adalah semua partai tidak punya *mainstreaming* gender

dimana ketika partai memiliki program, ada perspektif gender yang telah masuk di dalamnya.

Jadi, hambatan terbesar bagi perempuan masuk politik adalah hambatan kultural. Dimana jika perempuan menunggu perubahan budaya politik secara evolusioner dari bawah, tentu akan butuh waktu yang sangat lama dan panjang, sehingga kemudian gerakan perempuan menyasar perubahan langsung ditingkat struktural.

Pengalaman Gerakan Perempuan dalam Pemilu 2014

Untuk menciptakan perubahan budaya politik yang selama ini patriarki kepada perempuan, maka gerakan perempuan melakukan intervensi dari atas atau dari struktur, mengintervensi melalui regulasi dengan harapan terjadi perubahan pada struktur sehingga akan menghasilkan perubahan kultural secara cepat. Gagasan kuota sesungguhnya bertujuan pada perubahan yang cepat, namun faktanya meskipun perubahan regulasi sudah terjadi, perubahan institusi atau keptaiaan masih sulit untuk diwujudkan.

Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu ketiga setelah kebijakan afirmatif diundangkan, dimana wacana keterwakilan perempuan tidak lagi mendebatkan apakah perempuan mampu atau tidak menjadi politisi, perlu atau tidakkah caleg perempuan atau apakah terdapat cukup perempuan yang dapat direkrut oleh parpol untuk menjadi caleg. Wacana yang berkembang jelang pelaksanaan pemilu tahun 2014 saat itu adalah mengenai isu perilaku politisi perempuan yang berada di lembaga-lembaga politik formal dan yang dicalonkan oleh parpolnya untuk duduk di lembaga legislatif selama lima tahun ke depan.

Realita menunjukkan keterwakilan politik perempuan kental diwarnai dengan fenomena perilaku korup politisi perempuan, perempuan selebriti sebagai bakal caleg, hingga anggota-anggota keluarga elit partai sebagai caleg sekaligus duduk dalam kepengurusan parpol (Soesono, 2019). Kedua Undang-undang dalam pemilu 2009 mengalami revisi menjadi Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011 *tentang* Partai Politik. Ketentuan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik

ditingkat pusat maupun daerah dan ketentuan sistem *zipper* hampir tidak berubah dan justru memperoleh penguatan dalam pelaksanaannya dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 khususnya Pasal 27 Ayat 2 (b) mengenai pemberlakuan sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Pemilu di tahun 2014 menghasilkan jumlah perempuan yang terpilih turun dari 17,86% pada tahun 2009 menjadi 17,32% pada tahun 2014. Dari 560 orang anggota DPR RI, 97 orang diantaranya adalah perempuan. Padahal hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dalam Soeseno (2014) menemukan bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan yang disyaratkan dalam Undang-undang Pemilu dan Parpol telah memaksa parpol-parpol untuk merekrut sebagian terbesar caleg-caleg perempuan dari luar partai. Hanya sekitar 747 orang dari sekitar 2.465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya sebanyak 1.718 orang bukan kader partai. Mereka direkrut dan bisa menjadi caleg hanya karena mereka perempuan. Hal ini disebut esensi perpolitikan identitas.

Haryono (2014) menyatakan figur-figur anggota parlemen hasil Pemilu 2014 masih dihiasi dengan figur-figur dari dinasti politik juga orang-orang populer termasuk selebriti sebagaimana hasil Pemilu 2009. Realita ini menunjukkan bahwa parpol masih saja mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan suara dengan cara-cara yang mengindikasikan ketidakmatangan parpol apalagi dalam hal kepedulian terhadap kebutuhan perempuan. Sistem pendidikan kader yang baik belum dimiliki parpol. Di sisi lain, sistem demokrasi Indonesia masih sangat mengandalkan strategi pemasaran produk, bukan memasarkan program ataupun memasarkan visi.

Hasil Pemilu 2014 yang memperlihatkan gambaran yang campur aduk tentang kemajuan tingkat keterwakilan perempuan dalam cabang-cabang kekuasaan legislatif juga eksekutif di Indonesia, menunjukkan pada Pemilu 2014 tidak terlalu banyak perubahan pada pemaknaan terhadap kebijakan afirmatif, termasuk juga di dalam implementasinya. Soetjipto (2019) mengatakan bahwa adopsi kuota gender dan *mainstreaming* gender tidak salah, tetapi untuk menjawab persoalan perempuan dalam politik hingga hari ini, ternyata kebijakan itu saja tidak cukup.

Pengalaman Gerakan Perempuan dalam Pemilu 2019

Sementara di tahun 2019, Indonesia menerapkan Pemilu serentak keterwakilan perempuan di DPR RI adalah yang tertinggi sepanjang Pemilu pasca-reformasi, yaitu 20,52%. Dari 560 orang anggota DPR RI, 120 orang diantaranya adalah perempuan. Pencapaian itu tidak lepas dari pemberlakuan aturan bahwa parpol yang daftar Pemilu wajib minimal 30% perempuan di dalam kepengurusan. Lalu, minimal 30% caleg perempuan dalam setiap daerah pemilihan (dapil) dan minimal satu calon perempuan di setiap tiga calon, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU saat itu bisa memaksa partai untuk memasukkan perempuan dalam pengurus dan mencalonkan perempuan sekurang-kurangnya 30% di semua dapil dan tingkatan. Jika tidak, maka partai akan didiskualifikasi. Walaupun di sisi naratif, diskursusnya tidak terisi.

Meskipun naik, jumlah perolehan kursi yang sekarang masih belum mencapai 30%. Keberhasilan perjuangan keterwakilan perempuan baru sebatas pemenuhan kuota pada proses pencalonan saja dan perjuangan itu belum berhasil menjamin hasil dengan kehadiran 30% perempuan pada lembaga parlemen Indonesia. Selama kuota 30% tidak terpenuhi, maka tidak ada efek signifikan dari keterwakilan perempuan pada kesejahteraan perempuan. Sebab representasi perempuan dalam sistem politik merupakan salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi.

Perempuan dalam Politik Sepanjang Era Reformasi di Indonesia

Selama ini, parlemen di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, walaupun upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik telah dilakukan ditingkat struktural dengan mengintervensi melalui regulasi. Meski belum mampu memenuhi *critical mass* 30% kuota perempuan, tren keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa terdapat optimisme dalam perjuangan gerakan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dibidang politik. Hal inipun berpotensi untuk dapat terus ditingkatkan.

Tabel 1. Jumlah Anggota DPR RI Menurut Jenis Kelamin pada
1999 – 2019.

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Perempuan
1999	456	44	500	8,80
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86
2014	463	97	560	17,32
2019	455	120	575	20,87

Sumber: www.kpu.go.id.

Tidak hanya ditingkat pusat, ketimpangan posisi anggota parlemen laki-laki dan perempuan juga terjadi ditingkat provinsi. Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019 melaporkan sebanyak 22 provinsi memiliki persentase perempuan di parlemen kurang dari 20%, bahkan empat diantaranya kurang dari 10%. Meski demikian, sudah terdapat satu provinsi dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen di atas 30%, yaitu Sulawesi Utara. Kemudian, terdapat tiga provinsi dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen yang lebih dari 25% yaitu Gorontalo, Riau dan Maluku.

Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan dalam politik. Pertama masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Kedua, masalah belum adanya *platform* partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Parpol memiliki peran yang cukup besar dalam hal pencalonan perempuan terkait dengan kebijakan internal parpol dalam proses seleksi pemilihan bakal calon. Misalnya bagaimana parpol menempatkan perempuan di dapil-dapil yang potensial. Maka setinggi apapun harapan dari perjuangan gerakan perempuan, nampaknya akan menjadi mustahil bila partai politik tidak memiliki komitmen akan kesungguhan menominasikan caleg perempuan.

Tentang rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh anggota legislatif perempuan adalah

dengan membuktikan sumbangsih signifikan mereka dalam semua proses politik yang berlangsung di parlemen. Sudah cukup banyak legislator perempuan yang dikenal publik, hanya saja sejauh waktu yang berproses kehadiran politisi perempuan di parlemen belum memperlihatkan warna politik yang berbeda. Sejah ini politisi perempuan yang sudah berkuprah belum berhasil menunjukkan perubahan warna politik karena kehadiran mereka. Peneliti dari Formappi, Lucius Karus (Bramasta dalam <https://www.kompas.com>) menyatakan bahwa politisi perempuan di parlemen, belum juga terlihat menjadi saluran aspirasi kelompok perempuan pada umumnya. Mereka jarang muncul sebagai inisiator dan juga konseptor pada isu-isu utama yang berkaitan langsung dengan perempuan. Politisi perempuan parlemen masih cenderung terjebak pada pola permainan politik yang dikendalikan laki-laki.

Berikutnya tentang *platform* partai politik untuk mengusung caleg perempuan. Bicara keterwakilan perempuan mestinya dialihkan pada soal kualitas politisi perempuan. Jangan partai politik hanya berkuat pada soal standar 30% tetapi tidak menyiapkan figur perempuan berkualitas untuk menunjukkan semangat kesetaraan sekaligus memperlihatkan keutamaan perempuan yang dapat menjadi sumber gerakan perubahan parlemen. Faktor kualitas personal caleg perempuan menjadi penting karena disaat yang bersamaan, parlemen masih dikuasai oleh partai politik yang oligarkhinya begitu kental. Tanpa kualitas personal yang unggul, caleg perempuan akan ikut larut dan bahkan rentan menjadi alat kekuasaan untuk melakukan penyimpangan kekuasaan. Selain memenuhi minimal 30% keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen memberi dampak yang signifikan.

Penelitian Halimatusa'diyah (2019) menyatakan ada tiga alasan mengapa tidak ada efek signifikan dari keterwakilan perempuan terhadap kebijakan yang mendukung perempuan. *Pertama*, angka keterwakilan perempuan di parlemen tingkat kabupaten dan kota di Indonesia, masih rendah dan terdapat ketimpangan antar daerah. *Kedua*, perempuan di parlemen seringkali tidak berada di posisi strategis sebagai penentu kebijakan. Misalnya, studi yang dilakukan Puskapol UI menunjukkan

bahwa sekitar 40% anggota parlemen perempuan tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Wajar bila sangat sulit bagi perempuan dapat terlibat dalam penentuan anggaran yang pro-perempuan dan anak. Ketidakterlibatan ini tidak selalu terkait dengan kualitas anggota perempuan, tapi karena kuatnya budaya patriarki. Perempuan juga sangat jarang ditemukan di Badan Legislasi hingga tidak banyak berkiper dalam proses pembuatan kebijakan terkait kesejahteraan perempuan dan anak. *Ketiga*, secara personal, kualitas caleg yang terpilih juga berpengaruh terhadap kinerja mereka. Banyak caleg perempuan yang terpilih adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekuasaan rujukan (*reference power*) dengan elit politik, atau mereka yang sukses karena modal finansial dan popularitas semata. Rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan tentu saja sangat berpengaruh terhadap rendahnya dampak keterwakilan perempuan bagi perbaikan kebijakan sosial terutama yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Apa yang Harus Perempuan Lakukan?

Dalam feminisme, politik tidak netral gender, tetapi realitas menunjukkan bahwa dominasi politik oleh salah satu kelompok dapat diinterpretasikan sebagai sebuah entitas yang berjenis kelamin (Partini, 2014). Kehadiran perempuan dalam proses politik cukup mengejutkan bagi laki-laki karena pesaing yang harus dikalahkan oleh laki-laki dalam arena pertarungan politik menjadi semakin beragam dan semakin banyak jumlahnya. Hingga kini, identitas politik kekuasaan mulai dari pusat sampai tingkat desa (RT, RW, dusun) memang masih dikonstruksikan berjenis kelamin laki-laki.

Tidak hanya bagi laki-laki, kehadiran perempuan dalam kancah politik bahkan masih seringkali direspon secara negatif bahkan oleh perempuan sendiri. Partini (2014) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah terlanjur bias dalam menafsirkan identitas politik berdasarkan tafsir pengetahuan dan politik yang dominan. Budaya patriarki seringkali dituding sebagai penyebab kegagalan perempuan dalam politik. Sehingga budaya perlu didefinisikan untuk mengikis diskriminasi yang terus terjadi.

Berkaitan dengan budaya patriarki, Hendrarti (2013) menyatakan perempuan pun umumnya terdorong untuk meyakini bahwa politik begitu rumit baginya untuk dipahami dan politik yang terbaik diperuntukkan bagi laki-laki. Secara sosial, masyarakat menganggap bahwa domain privat untuk perempuan dan domain publik/politik adalah bagi laki-laki. Maka, ketidakadilan struktural dalam jerat ideologi patriarki telah menempatkan perempuan pada realitas dibidang politik yang tidak memihak sebab perempuan terstigmatisasi tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dengan laki-laki di kancah politik. Budaya politik Indonesia hingga kini masih belum kondusif bagi perempuan.

Bagaimana merubah budaya tersebut? Perempuan yang berada di dalam pusaran budaya itu perlu menjadikan dirinya berdaya secara individu (*human capital*), secara sosial (*social capital*) maupun secara ekonomi (*economic capital*). Melalui tiga modal itulah perempuan-perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh parpolnya memiliki kekuatan untuk mewujudkan cita-cita gerakan perempuan untuk politik.

Untuk meningkatkan *human capital*, pendidikan politik menjadi satu pilihan yang penting bagi perempuan agar tidak buta politik. Dengan kapasitas yang mumpuni dalam pengetahuan politik, perempuan akan menguatkan kualitasnya untuk tidak menjadi sasaran eksploitasi oleh parpol yang hanya menempatkan perempuan sebagai alat legitimasi (*vote getter*) semata. Parpol sebagai sarana rekrutmen caleg harus benar-benar menjadi hulu dari segala tindakan afirmatif dengan melakukan rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, promosi dan ‘mendistribusikan’ caleg perempuannya ke parlemen. Caleg-caleg perempuan itu harus yang memiliki keterampilan berpolitik yang khas untuk sensitif dan peduli pada kebijakan-kebijakan yang responsif gender.

Social capital dan *economic capital* yang terbangun dengan baik, akan menciptakan kemapanan pada diri individu perempuan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai caleg yang dapat memperoleh kepercayaan masyarakat pemilih bahwa ia memiliki kapasitas yang menonjol, disamping memiliki *human capital* yang unggul. Selama ini, akibat status sosial ekonomi di dalam masyarakat, perempuan memiliki akses terhadap sumber dana yang terbatas pula. Anggota legislatif

perempuan yang diinginkan adalah perempuan secara ideologis, yaitu perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional unggul serta memiliki visi dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan.

Arena pertarungan demokrasi selalu berubah dan tidak pernah pasti, sehingga memungkinkan perempuan untuk kalah dan dikalahkan. Tantangan terwujudnya politik perempuan hingga hari ini seharusnya tidak hanya soal angka, bukan hanya tentang kuota atau jumlah perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik. Sebab kuota merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap parpol untuk memberikan kesempatan bagi keterwakilan perempuan di dalam aktivitas politik.

Tantangan perjuangan gerakan perempuan lebih serius dan lebih penting pada perihal memastikan bahwa anggota legislatif memiliki kesadaran dan keberpihakan pada kepentingan perempuan dalam negara yang demokratis. *Critical question*-nya adalah apa yang hendak diperjuangkan ketika perempuan hadir di parlemen dan institusi publik? Apakah perempuan di parlemen akan secara otomatis mewakili kepentingan perempuan?

Soetjipto (2019) menyatakan bahwa keterwakilan perempuan harus dimaknai secara berbeda, politik representasi perempuan bukan hanya tentang kuota jumlah saja, tetapi memiliki esensi dari kuota gender, yaitu perlawanan melawan patriarki dan subordinasi. Phillips dalam Squires (2012) menyatakan bahwa selama perwakilan responsif terhadap kepentingan yang diwakili, maka identitas perwakilan bukanlah sebuah masalah. Namun di sisi lain, *politics of presence* juga terkait dengan identitas perwakilan yang signifikan, salah satunya adalah identitas gender yang merupakan bagian penting dalam konsep keterwakilan itu sendiri.

Berkaitan dengan relasi gender dan interpretasi kategori sosial tersebut, peran gender dalam konflik dapat dianalisis dari tingkat individu, interaksi maupun masyarakat. Di dalam tiga tingkat analisis tersebut terdapat dua paradigma gender. Paradigma yang pertama adalah paradigma esensialis yang mengasumsikan adanya dunia perempuan yang terpisah, dimana perempuan pada dasarnya berbeda dengan laki-

laki sehingga mengalami realitas yang juga berbeda. Perspektif esensialis berfokus pada atribut kepedulian, kerjasama dan kedamaian. Beberapa dari studi esensialis berfokus pada kemampuan keibuan perempuan sebagai pembentuk peran perempuan sebagai penjaga dan pencipta kedamaian. Sedangkan paradigma lain menyangkal hal tersebut dimana feminisme *post-modern* berfokus pada pertukaran antara konstruksi sosial individu dan konstitusi individu itu sendiri. Dengan berfokus pada bahasa, simbol, wacana alternatif dan makna, feminisme *post-modern* mempelajari bagaimana kekuatan sosial dijalankan dan bagaimana relasi sosial gender, kelas dan ras dapat diubah. Namun paradigma ini tidak mengesampingkan kekhususan pengalaman perempuan dimana dibawah patriarki perempuan memiliki akses yang memang berbeda dari laki-laki ke bidang diskusif (Birkhoff).

Maka, konstruksi biologis dan sosial perempuan yang berbeda itulah yang menjadi poin penting mengapa perempuan harus terwakili dalam ranah politik. Perempuan memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, sehingga laki-laki tidak dapat mewakili kepentingan perempuan akan hal itu. Dalam hal ini, Rasyidin dan Aruni (2016) menyebutnya sebagai pentingnya kombinasi *politics of presence* dan *politics of ideas* oleh perempuan dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang responsif gender.

Namun demikian, *citizen control* dalam hal ini juga mempunyai peran besar dalam sebuah pembangunan politik untuk kesetaraan gender (Arnstein dalam Cornwall, 2011). Proses dan dinamika partisipasi dalam konteks *citizen control* tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus melibatkan orang lain dalam sebuah jaringan kerjasama, dengan tema dan tujuan untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. *Citizen control* merupakan tindakan sosial dengan mengandalkan adanya pilihan rasional yang implementasinya harus mengikutsertakan jaringan sosial (*networking*). Maka perjuangan gerakan perempuan untuk kesetaraan gender dalam bidang politik juga memerlukan dukungan anggota DPR RI perempuan untuk gigih memperjuangkan kepentingan dan ekspektasi politik perempuan dalam rangka pencapaian hak-hak

perempuan. Memperjuangkan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pun masih diperlukan, yang tidak hanya mengandalkan sekedar komitmen parpol. Parpol harus memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui upaya peningkatan kualitas perempuan-perempuan di parpol dan memberi mereka kesempatan untuk belajar berpolitik praktis melalui pemberian tanggungjawab di posisi-posisi strategis pada parpol.

Kesimpulan

Demokratisasi di Indonesia pasca reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Politik merupakan salah satu ruang representasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik. Selama 20 tahun berproses, jumlah perempuan di legislatif khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada Pemilu 1999 menjadi 20,52% pada Pemilu 2019. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yaitu jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik. Selain itu, naiknya jumlah keterwakilan politik perempuan di legislatif tidak secara langsung berkontribusi positif terhadap peningkatan produk legislasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Padahal, representasi politik perempuan di legislatif seharusnya bukan sekedar peningkatan kehadiran perempuan secara fisik, melainkan harus pula bermakna pada hadirnya representasi kepentingan perempuan secara substantif.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Dalam persoalan politik perempuan masih selalu termarginalkan, hanya diposisikan sebagai obyek para politisi maupun parpol sebagai arena untuk panen suara demi kemenangannya. Anggota legislatif perempuan belum menjadi pembuat kebijakan, sehingga mereka tidak bisa melakukan kontrol apalagi mengambil keputusan meskipun atas nama mereka sendiri.

Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen. Proses perjuangan untuk mencapai tujuan tidak bersifat tunggal dan mandiri, tetapi memiliki nilai kebersamaan. Demokrasi sejatinya bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dan sebagai sebuah ide harus terus diperjuangkan secara berkelanjutan. Perjuangan gerakan representasi politik perempuan Indonesia ke depan masih memerlukan dorongan dari berbagai pihak; Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan serta akademisi, parpol yang memiliki kesadaran untuk memperkuat representasi politik perempuan; untuk mempertahankan dan memperkuat Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Adelina, Shelly & Soetjipto, Ani, “Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender”, *Jurnal Perempuan* 81, Vol.19 No.2, Mei 2014: 47-71. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2018*. BPS, Jakarta, 2018.

Birkhoff, Juliana. *Gender, Conflict and Conflict Resolution*. Diunduh dari <https://www.mediate.com/articles/birkhoff.cfm>. pada 1/12/2020.

Bramasta, Dandy Bayu, “Jumlah Anggota DPR Perempuan Meningkat, Diimbangi Dengan Kualitas?”, 2019. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/160400165/jumlah-anggota-dpr-perempuan-meningkat-diimbangi-dengan-kualitas-?page=all> pada 5/12/2020.

Cornwall, Andrea, *The Participation Reader*, Zed Books, London, 2011.

Halimatusa'diyah, Iim, “Semakin Banyak Perempuan di DPR, tapi Riset Ungkap Kehadiran Mereka Mungkin Tidak Signifikan, 2019.” Diakses dari <https://theconversation.com/semakin-banyak-perempuan-di-dpr-tapi-riset-ungkap-kehadiran-mereka-mungkin-tidak-signifikan-125013>.

Haryono, Elisabeth Anita Dhewy, “Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?”, *Jurnal Perempuan* 81, Vol.19 No.2, Mei 2014: 141-154. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014.

Hendrarti, Dwi Windyastuti Budi, “Perempuan Menuju Kursi Parlemen 2014: Membangun Asertivitas Perempuan pada Kekuasaan Politik”, *Jurnal Perempuan* 79, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2013.

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Maloutas, Maro Pantelidou, “The Gender of Democracy: Citizenship and Gendered Subjectivity”, *Politics and Gender*, 3(01): 135-137, 2006. DOI: 10.1017/S1743923X07212012. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/231780442_The_Gender_of_Democracy_Citizenship_and_Gendered_Subjectivity_By_Maro_Pantelidou_Maloutas.

Partini, “Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi FISIPOL UGM*, Vol.1: 39-51, Jurusan Sosiologi Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012.

Partini, “Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia”, *Jurnal Perempuan* 81, Vol.19 No.2, Mei 2014: 29-45. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perdana, Aditya, Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi &

Rekomendasi Politik, *Jurnal Perempuan* 81, Vol.19 No.2, Mei 2019: 73-93. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2019.

Rasyidin & Aruni, Fidhia, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.

Soeseno, Nuri, "Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif", *Jurnal Perempuan* 81, Vol.19 No.2, Mei 2019: 95-124. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta, 2019.

Soetjipto, Ani, "Dibutuhkan Pemaknaan Baru Representasi Perempuan", *Jurnal Perempuan* 101, Vol.24 No.2, Mei 2019: 147-159, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2019.

Squires, J., *Feminism and Democracy, The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology*, Wiley-Blackwell, United Kingdom, 2012.

Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019, "Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019", *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Jakarta, 2019.

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Venny, Adriana, "Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk?", *Jurnal*

Perempuan 34: 4-5, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.

Wijaksana, MB., “Perempuan dan Politik: Ketika yang Personal adalah Konstitusional”, *Jurnal Perempuan 34: 83-97*, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta, 2004.

GURU BERSAYAP (SALING BERDAYA, ADAPTIF, DAN PROGRESIF): Sebuah Pendekatan dalam Menggugat Ketimpangan Gender di Sekolah

Andi Wahyu Irawan

Prodi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Mulawarman e-mail:
andiwahyuirawan@fkip.unmul.ac.id.com

Pendahuluan

Sekolah merupakan arena sosial yang ditandai dengan hubungan interaksionalisme yang saling mempengaruhi identitas. Dengan demikian, sekolah tidak lepas dari upaya intimidasi identitas kelompok tertentu untuk saling membangun diskriminasi di dalamnya sebagai bentuk superioritas kelompok mayoritas. Tindakan ini bisa berupa pemihakan kepada kelompok mayoritas, pengajaran di kelas yang bias, hingga kurangnya akses pendidikan pada kelompok yang rentan. Dumas (2014), seorang professor dari University of California Berkeley, Graduate School of Education, dalam artikelnya yang berjudul *Losing an Arm: Schooling as a Site of Black Suffering*, mencatat bahwa sekolah adalah tempat yang sangat berbahaya bagi siswa kulit hitam.

Dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), termaktub pengakuan adanya dimensi gender dalam perlindungan hak anak, yaitu perlunya perlindungan terhadap kerentanan perempuan sebagai kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi.

Selain itu, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) juga mempertegas perlunya perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam pemenuhan hak anak dengan mengusung rumusan prinsip utama dalam melindungi anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak.

Budaya patriarki yang masih langgeng di sekolah dinilai sebagai salah satu faktor diskriminasi terhadap siswa perempuan sebagai bagian dari kelompok yang selama ini dianggap kelompok minoritas dan rentan. Akses yang terbatas pada siswa perempuan untuk tampil di sektor publik membuat mereka kurang mendapatkan posisi strategis di sekolah. Dalam pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ketua kelas misalnya, masih didominasi oleh siswa laki-laki, sedangkan untuk posisi sekretaris atau bendahara, biasanya diamanahkan kepada siswa perempuan. Padahal beberapa sekolah memiliki populasi siswa perempuan yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Selain itu, kapasitas siswa perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, tidak bisa dipandang sebelah mata.

Buku-buku teks pelajaran juga terkadang bias gender. Misalnya, pelajaran Bahasa Indonesia yang memberikan contoh Ani pergi ke pasar dan Budi bermain robot-robotan, dinilai sarat dengan bias gender karena lebih cenderung pada laki-laki yang identik dengan maskulinitas, dan sebaliknya, perempuan feminin. Doktrin 'laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan perempuan tidak bisa jadi pemimpin' dijadikan sebagai legalitas untuk mempertahankan *status quo* laki-laki.

Pada aspek pembelajaran, siswa perempuan memiliki waktu belajar yang lebih sedikit dibandingkan dengan siswa laki-laki. Hal ini karena pada saat di rumah, perempuan harus menyelesaikan pekerjaan di sektor domestik. Budaya patriarki yang masih kuat di dalam keluarga membuat anak perempuan harus berlutut dengan pekerjaan dapur, mencuci, dan pekerjaan domestik lainnya bahkan tak jarang dilarang keluar rumah. Berbeda dengan anak laki-laki yang diberikan keleluasaan untuk keluar bermain. Praktik yang diskriminatif ini tentu membuat waktu belajar siswa perempuan menjadi berkurang.

Pemilihan karir yang dipilih oleh siswa pun sering kali bias gender.

Stereotype pekerjaan yang berhubungan dengan maskulinitas dipandang sebagai pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki. Sebaliknya pekerjaan yang berhubungan dengan feminitas dikerjakan oleh perempuan. *Stereotype* ini juga berlaku di sekolah, terutama ketika pemilihan jurusan dan memilih program studi untuk lanjut di perguruan tinggi atau dalam membimbing siswa memilih pekerjaan. Kajian Dilard (1985) misalnya, memberikan penjelasan tegas mengenai adanya ketimpangan gender yang terjadi dalam pemilihan karir siswa di sekolah, yaitu:

1. Siswa perempuan lebih memilih lapangan kerja yang tidak menuntut penguasaan teknologi tinggi;
2. Siswa laki-laki lebih tertarik pada lapangan kerja ilmiah dan berada di kawasan publik;
3. Siswa perempuan menghindari lapangan kerja yang didominasi laki-laki, sebaliknya siswa laki-laki cenderung menghindari pekerjaan yang didominasi perempuan.

Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya *stereotype* yang masih melekat di sekolah. *Stereotype* inilah yang kemudian bisa berujung pada sulitnya akses bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta menurunnya rasa percaya diri perempuan terhadap kemampuan dirinya. Tidak hanya sampai disitu. Praktik diskriminatif sering pula terjadi pada siswa perempuan yang memutuskan untuk memilih jurusan teknik, olahraga, atau jurusan lain yang cenderung maskulin. Praktek ini dijabarkan oleh Hadiarni (2009), bahwa arah pilihan studi siswa dipengaruhi oleh anggapan masyarakat, yaitu fakultas teknik, komputer, industri, olahraga, merupakan jurusan yang seharusnya dipilih oleh laki-laki. Sedangkan perempuan seharusnya memilih fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau fakultas ilmu sosial. Dengan demikian, praktik ini semakin melanggengkan budaya patriarki di sekolah.

Tidak hanya pada saat sekolah, diskriminasi gender dalam pendidikan terus berlanjut setelah lulus dan mempengaruhi proses seseorang memasuki dunia kerja tren-jaringan, norma gender, dan persepsi orang tua berbeda berdasarkan jenis kelamin seseorang. Sebuah studi oleh Munsch (2013) dilakukan untuk memahami bagaimana gender mempengaruhi jejaring kerja. Melalui penelitian ekstensif, hasilnya menjelaskan sejumlah

variasi baik dalam pelaksanaan jaringan maupun tingkat keberhasilannya antara laki-laki dan perempuan. Pertama, orang lebih cenderung mencari pekerjaan melalui kontak sesama jenis (sekitar 65%), yang sebagian besar ditemukan melalui fungsi sosial yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Norma gender mempengaruhi proses jaringan ini juga. Pekerjaan tertentu umumnya dianggap hanya cocok untuk satu jenis kelamin. Misalnya, hanya 9% perawat adalah laki-laki, sementara hanya 4% perempuan yang bekerja di departemen kepolisian setempat.

Penelitian diatas menunjukkan norma gender memengaruhi bagaimana keputusan dibuat mengenai siapa yang akan dijaring dan siapa yang akan dipekerjakan. Orang lebih cenderung membantu seseorang jika mereka merasa cocok untuk pekerjaan tertentu. Gender sering dianggap sebagai salah satu dari banyak indikator tingkat kapabilitas individu. Hal ini dapat mengarahkan kontak untuk membantu laki-laki daripada perempuan untuk karir yang dianggap lebih maskulin.

Namun sebuah riset menunjukkan bahwa meskipun anak perempuan melakukan pekerjaan domestik, mereka justru mampu melampaui laki-laki. Riset yang dilakukan oleh Diprete & Bachmann (2013) menunjukkan bahwa siswa perempuan sering memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Siswa perempuan dinilai memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi untuk bersekolah. Sayangnya dalam riset ini juga disebutkan bahwa ketimpangan gender pada anak perempuan semakin besar seiring dengan tingginya tingkat pendidikan. Padahal diawal sudah disebutkan bahwa siswa perempuan memiliki ketertarikan yang lebih tinggi untuk bersekolah dibandingkan dengan siswa laki-laki.

Riset lain juga dilakukan oleh Davies (2005). Ia menemukan bahwa rata-rata siswa perempuan lebih termotivasi daripada siswa laki-laki untuk berprestasi di sekolah, setidaknya selama di sekolah dasar. Ketika mencapai sekolah menengah, beberapa siswa perempuan mencoba untuk menurunkan kemampuan akademis mereka sendiri untuk membuat diri mereka lebih disukai. Riset tersebut sebenarnya mempertegas bahwa perempuan memiliki potensi untuk berkembang. Namun kenyatannya, ketimpangan gender yang selama ini terjadi di sekolah, tidak lepas dari kepentingan kelompok mayoritas untuk menguasai sektor publik.

Penguasaan ini dinilai sebagai bentuk dari relasi kuasa laki-laki yang menguat sehingga membuat mereka menjadi mudah bertahan dibidang strategis di sekolah. Akibatnya, perempuan yang memiliki akses terbatas dan dibatasi, menjadi tidak percaya diri. Potensi yang seharusnya diaktualkan di sekolah ternyata perlahan-lahan menghilang. Untuk tampil menjadi sosok pemimpin, mereka harus meruntuhkan tembok patriarki yang selama ini berdiri kokoh di sekolah.

Pembahasan

Guru dan Bias Gender

Guru tidak hanya mengurus aspek kognisi siswa, tetapi aspek psikologi juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran karena terjadi interaksi secara psikologis. Telah lama ahli psikologi mengajukan pertanyaan bagaimana perbedaan gender muncul. Para ahli sepakat bahwa faktor biologi dan pengasuhan (lingkungan) bertindak bersama secara timbal balik secara kausal dan interaktif untuk menghasilkan perbedaan gender (Blakemore, et al., 2009).

Pengalaman yang diberikan kepada anak perempuan dan laki-laki di sekolah diketahui mempengaruhi diferensiasi gender baik secara langsung, dengan memberikan praktik dan penguatan keterampilan yang berbeda (Leaper, et al, 2011) dan secara tidak langsung, dengan memberikan masukan yang mengarahkan anak-anak untuk secara aktif mensosialisasikan diri mereka sendiri di sepanjang jalur yang dibedakan berdasarkan gender (Liben, 2006).

Sekolah mempengaruhi diferensiasi gender melalui dua sumber utama; guru dan teman sebaya. Guru dan teman sebaya secara langsung memengaruhi diferensiasi gender dengan memberi anak laki-laki dan perempuan kesempatan belajar dan umpan balik yang berbeda. Guru dan teman sebaya juga menjadi sumber pembelajaran tentang gender. Guru menyajikan materi kurikuler yang berisi perilaku stereotip gender, dan teman sebaya menunjukkan sikap dan perilaku stereotip gender. Anak-anak menginternalisasi stereotip dan prasangka gender, yang pada gilirannya memandu preferensi dan perilaku mereka sendiri (Blakemore, et al, 2009).

Guru sering kali bermaksud untuk berinteraksi dengan kedua jenis kelamin secara setara, dan sering kali berhasil melakukannya. Namun, penelitian telah menemukan bahwa mereka terkadang menanggapi siswa laki-laki dan perempuan secara berbeda tanpa menyadarinya. Tiga jenis perbedaan, yaitu; jumlah keseluruhan perhatian yang diberikan pada setiap jenis kelamin; visibilitas atau 'publisitas' percakapan; dan jenis perilaku yang mendorong guru untuk mendukung atau mengkritik siswa.

Secara umum, guru berinteraksi dengan siswa laki-laki lebih sering daripada dengan siswa perempuan dengan selisih 10 sampai 30 persen, tergantung pada tingkat kelas siswa dan kepribadian guru (Measor & Sykes, 1992). Satu kemungkinan alasan untuk perbedaan tersebut terkait dengan ketegasan yang lebih besar dari anak laki-laki yang telah saya catat; jika anak laki-laki berbicara lebih sering dalam diskusi atau di waktu lain, maka seorang guru "dipaksa" untuk lebih memperhatikan mereka.

Kemungkinan lain adalah beberapa guru merasa bahwa anak laki-laki sangat rentan terhadap kerusakan, sehingga guru dapat berinteraksi dengan mereka lebih sering untuk membuat mereka tetap fokus pada tugas yang ada (Erden Wolfgang, 2004). Kemungkinan lain adalah anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, dapat berinteraksi dalam lebih banyak ragam gaya dan situasi sehingga ada peluang yang lebih besar untuk berinteraksi dengan mereka. Kemungkinan terakhir ini sebagian didukung oleh perbedaan gender lainnya dalam interaksi kelas, jumlah pembicaraan publik *versus* pribadi.

Guru Bersayap

Falsafah dari guru bersayap adalah guru turut serta dalam membantu siswa untuk terbang menuju potensinya yang lebih baik. Guru bersayap juga selaras dengan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif melalui berbagai program Merdeka Belajar. Guru bersayap merupakan singkatan dari guru yang saling berdaya, adaptif, dan progresif. Pada intinya, tiga hal ini yang perlu dilakukan oleh guru dalam menggugat ketimpangan gender di sekolah.

Ketimpangan gender di sekolah tidak akan pernah selesai jika

tidak ada keterlibatan guru di dalamnya. Solusi terhadap persoalan tentang kebijakan afirmatif pemerintah atau sekolah dalam memberikan akses pendidikan kepada semua kalangan adalah persoalan yang bisa dinomor-duakan. Dalam riset simultan yang dilakukan oleh Cimpian (2018) menunjukkan bahwa kebijakan sekolah atau pemerintah dalam mengurangi ketimpangan gender di sekolah dinilai tidak cukup sehingga perlu ada guru di semua tingkatan pendidikan yang memiliki kesadaran atas bias dan *stereotype* dalam diri mereka untuk bisa membantu siswa dalam mengakses berbagai macam kemungkinan.

Dengan demikian, guru memiliki peran yang strategis dalam membantu siswa untuk bisa keluar dari budaya patriarki. Saling berdaya, menjadi upaya guru untuk sama-sama saling berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah yang inklusi, yaitu sekolah yang berdiri diatas semua kalangan, tanpa membedakan latar belakang identitas. Sekolah yang kemudian akan melahirkan siswa yang memiliki bekal sosial dalam memahami realita. Sehingga siswa tidak lagi menjadi objek atas realita, tetapi menjadi subjek.

Keterlibatan guru untuk bersama-sama saling memberdayakan siswa laki-laki dan perempuan sesuai dengan potensi dan kemampuannya merupakan langkah yang bijak untuk menggugat ketimpangan gender yang selama ini terjadi. Penggunaan kata saling berdaya, merupakan antitesa dari tindakan diskriminatif yang selama ini terjadi di sekolah yang membuat kelompok minoritas menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaannya itu membuat mereka sulit untuk mengembangkan potensinya. Pada gilirannya, alih-alih mengembangkan potensi, yang terjadi justru tindakan menghilangkan bakat. Tindakan ini terindikasi dengan adanya upaya diskriminasi yang membuat siswa perempuan menjadi tidak percaya diri dengan kemampuannya, hingga berdampak terhadap aktualisasi potensinya di masa depan, hingga perlahan-lahan bakatnya menjadi menghilang.

Guru adaptif lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena guru harus berusaha keras untuk mengajar sesuai dengan kurikulum, iklim sekolah, dan perkembangan teknologi. Ini sulit dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin. Guru perlu memahami bahwa setiap anak itu unik, sehingga

guru tidak bisa menggunakan satu ukuran untuk semua siswa. Guru harus paham bahwa setiap siswa memiliki pengetahuan, latar belakang, sistem kepercayaan, dan latar belakang keluarga yang berbeda. Guru adaptif sejatinya adalah guru yang selalu mau untuk belajar. Guru perlu memiliki pemahaman atas konsep, dan berusaha untuk belajar dengan tujuan dalam konteks. Guru adaptif harus pula memahami kemampuan konektivitas, yaitu menghubungkan konteks kurikulum, kondisi sosial budaya sekolah, dan perkembangan teknologi. Ketiga hal ini yang perlu menjadi perhatian guru untuk menjadi guru adaptif.

Ketika terbentuk guru yang adaptif, maka, praktek budaya patriarki di sekolah bisa dikurangi. Asumsinya, guru adaptif akan berusaha untuk terus-menerus belajar, melakukan pendekatan kepada siswa sesuai dengan keunikannya, memberikan penjelasan yang tidak bias gender, dan memiliki keterampilan dalam membantu siswa untuk mengembangkan potensinya. Ketika menjadi guru yang progresif, maka guru perlu kritis dalam merespon kondisi dan situasi dalam dunia pendidikan, serta terbuka dengan berbagai macam kemungkinan. Guru progresif membuka peluang perubahan dalam iklim pendidikan. Siswa perempuan yang misalnya memilih ekstra kurikuler olah raga, harus mampu dipahami sebagai bagian dari pilihan hidupnya. Ketika *stereotype* bahwa perempuan sebaiknya memilih sesuatu yang sifatnya feminin, maka disaat itu pula terjadi bias.

Freire, tokoh pendidikan dari Brazil, memandang bahwa pendidikan (dan juga guru) yang progresif adalah guru yang secara konsisten menemukan dan terus mencari cara-cara yang memudahkan peserta didik melihat objek yang harus diketahui dan akhirnya dipelajari, sebagai sebuah masalah. Bukan guru yang mengungkung kreativitas peserta didik dengan mempraktikkan model pendidikan 'gaya bank' yang membatasi tugas peserta didik sekadar menerima, mencatat, dan menyimpan. Sejalan dengan Freire, John Dewey memandang bahwa guru progresif berarti guru berjuang mendidik agar siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang selalu berkembang mengikuti zaman yang semakin dinamis, dan juga mengajarkan siswa terhadap permasalahan nyata di sekitarnya, sehingga siswa tidak terperangkap dalam pemikiran yang kolot.

Selain guru mata pelajaran yang fokus dalam mengembangkan

aspek kognisi, konselor sekolah (guru bimbingan konseling) yang mengurus persoalan non-kognisi siswa, termasuk membimbing siswa untuk mendapatkan informasi gender yang adil, memiliki peran strategis dalam mewujudkan sekolah inklusif, yaitu sekolah yang adil untuk semua kalangan. Ini berarti tugas konselor cukup berat dalam membantu siswa perempuan untuk bisa percaya diri terhadap kemampuannya. Memberikan layanan informasi mengenai peran sosial laki-laki dan perempuan serta mengakomodasi penghargaan diri terhadap perempuan dan laki-laki, dan mengupayakan kegiatan yang berkeadilan gender. Dengan demikian, mewujudkan sekolah inklusif yang adil gender melalui gerakan guru bersayap (saling berdaya, adaptif, dan progresif), merupakan suatu upaya bersama-sama untuk membantu siswa mengoptimalkan potensinya. Itu sebabnya, pekerjaan guru tidak akan mencapai kata akhir.

Kesimpulan

Masa depan siswa perempuan terancam jika terus-menerus dibiarkan menjadi objek dari tindakan diskriminasi di sekolah demi kepentingan laki-laki. Jika budaya patriarki telah tertanam kuat di lingkungan sekolah, tentu akan menjadi ancaman bagi kelangsungan pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Penting untuk memberikan keadilan di sekolah karena kapasitas masa dewasa ditentukan dari masa kanak-kanak. Sehingga perlu ada upaya untuk mendorong keadilan gender, menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan memperkuat representasi perempuan yang dilakukan mulai dari institusi sekolah dan guru, turut serta bertanggung jawab dalam mewujudkan ini. Oleh karena itu, Guru Bersayap (Saling Berdaya, Adaptif, dan Progresif), menjadi upaya untuk mengugat ketimpangan gender di sekolah.

Daftar Pustaka

Blakemore JEO, Berenbaum, SA, Liben LS., *Gender Development*, New York: Taylor & Francis, 2009.

Cimpian, J., “How Our Education System Undermines Gender Equity and Why Culture Change-not Policy-may be the Solution”, 2018. <https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2018/04/23/how-our-education-system-undermines-gender-equity/>. Diakses pada 19 Desember 2020.

Davies, J., “Expressions of Gender: An analysis of Pupils’ Gendered Discourse Styles in Small Group Classroom Discussions”, *Discourse and Society*, 14(2), 115–132, 2005.

DiPrete, T. A. & Buchmann, C., *The rise of Women: The Growing Gender Gap in Education and What it Means for American Schools*, New York: Russell Sage Foundation, 2013.

Dillard, J. M., *Life Long Career Planning*, Ohio: A Bell & Howell Company, 1985.

Duma, M.J., “Losing an Arm: Schooling as a Site of Black Suffering”, *Race Ethnicity and Education*, Vol. 17, No. 1, 1–29, 2014.

Erden, F. & Wolfgang, C., “An Exploration of the Differences in Teachers’ Beliefs Related to Discipline when Dealing with Male and Female Students”, *Early Child Development and Care*, 174 (1), 3–11, 2004.

Hadiarni dan Irman, *Konseling karir*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2009.

Leaper C, Bigler RS, “Gender. In Underwood MK, Rosen LH”, *Social Development: Relationships In Infancy, Childhood, And Adolescence*, New York: Guildford Press, 2011.

Liben LS, Bigler RS., “The Developmental Course of Gender Differentiation: Conceptualizing, Measuring, and Evaluating Constructs and Pathways”, *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 67 (2):vii-147, 2002.

Measor, L. & Sykes, P., *Gender and Schools*, New York: Cassell, 1992.

Munsch, Christin, *Women’s Jobs, Men’s Jobs: Why Networking Can Lead Women to*, The Clayman Institute for Gender Research, 2013.

KADER KESEHATAN: Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat

Riza Hayati Ifroh

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman Samarinda
e-mail: rizahayatiifroh@fkm.unmul.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan kesehatan masyarakat menjadi salah satu tuntutan kualitas kehidupan masyarakat dimasa globalisasi yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan negara di dunia diuraikan dalam indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (SDGs) atau dikenal sebagai tujuan global merupakan seperangkat tujuan dalam kesepakatan universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi semua yang membuat tatanan kehidupan di bumi menjadi layak huni, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran, sekarang dan di masa depan (Morton, Pencheon, dan Squiers, 2017). Salah satu tantangan yang muncul pada negara berkembang salah satunya di Indonesia, yaitu masih terdapat permasalahan akses terhadap pelayanan kesehatan, ketidaktercapaian *universal health coverage*, kesenjangan fasilitas kesehatan yang belum merata di seluruh daerah dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan multifaktor salah satunya aksesibilitas dan kapabilitas yang belum memadai di daerah-daerah yang masih terkendala

kondisi geografis dan ketidakberdayaan masyarakat (Ishartono dan Raharjo 2016; McBride, Hawkes, dan Buse, 2019).

Upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk menjadi bagian dalam pembangunan kesehatan menjadi penting serta keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi dalam penyebarluasan atmosfer sadar kesehatan dan literasi kesehatan masyarakat yang lebih tinggi, mandiri dan berdaya guna (Philips dan Pittman, 2009). Proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berdasarkan landasan pengertian dari berbagai sumber mengacu pada keterikatan antar sosial pada suatu lokasi dan geografis yang sama. Hubungan sosial tersebut terjalin guna membentuk suatu komunikasi dan interaksi sebagai upaya masyarakat dalam mengatasi masalah dengan berbasis pengambilan keputusan kelompok secara bersama-sama (Jansen 2017; Pamungkas et al., 2015; Phillips dan Pittman 2009). Selanjutnya dijelaskan bahwa konsep-konsep pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berfokus pada proses mengarahkan dan mengajarkan orang lain bagaimana cara bekerjasama untuk memecahkan masalah, tindakan yang perlu diambil, pengambilan keputusan masyarakat lokal serta upaya untuk menghasilkan tempat tinggal atau hidup yang lebih baik sebagai contoh untuk mengubah situasi kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri (McBride et al., 2019; Phillips dan Pittman, 2009).

Salah satu bentuk upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditingkat lokal dan bersumber daya dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di Indonesia adalah keberadaan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Posyandu sendiri menurut (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2019; Kementerian Kesehatan RI, 2012) adalah suatu unit kesehatan di tingkat masyarakat yang dikelola secara mandiri dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di wilayahnya sendiri agar dapat memudahkan masyarakat mendapatkan serta mengakses pelayanan kesehatan dasar, contohnya kesehatan ibu dan anak, penggunaan alat kontrasepsi dan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita dan anak usia sekolah.

Upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader sebagai penggerak masyarakat untuk mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengkampanyekan upaya-upaya kesehatan dengan memanfaatkan potensi di wilayahnya (Ipa et al., 2018; Kurniawansyah S. I., Sopyan I., 2018; Lubis dan Santi, 2020; Tumbelaka et al., 2018). Peran kader posyandu sangat besar pada lingkungan sosial, hal ini karena selain sebagai pemberi layanan informasi kesehatan bagi masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu, memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat untuk mendukung prioritas program pemerintah untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, serta menjembatani hubungan antara masyarakat dengan tenaga kesehatan melalui pendekatan-pendekatan komunikasi berbudaya lokal, sehingga kader posyandu tidak hanya menjadi pelopor kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mendukung penyehatan masyarakat yang lebih menyeluruh baik pada kelompok mayoritas maupun minoritas contohnya lansia, ibu hamil, dan lain-lain (Ips et al., 2015).

Kader posyandu sebagai kader kesehatan masyarakat dapat menentukan keberhasilan pemanfaatan layanan kesehatan serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat di tingkat lokal, sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai (Hanan, 2012). Kader kesehatan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan yang mayoritas adalah kaum perempuan memiliki peran penting dalam upaya penyehatan masyarakat. Pemberdayaan perempuan menurut (Mainuddin et al., 2015) dianggap sebagai tujuan kebijakan publik yang penting dan esensial. Perempuan yang diberdayakan secara ekonomi dan sosial dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan memiliki daya tawar yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pembahasan

Literasi dan Kesehatan

Literasi atau melek huruf menurut (UNESCO, 2017) merupakan sebuah komponen kunci dari pembelajaran orang dewasa pendidikan.

Situasi ini melibatkan pembelajaran tahap lanjut dan tingkat kemahiran yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pembelajaran seumur hidup dan berpartisipasi penuh dan terlibat dalam suatu kelompok, komunitas, tempat kerja dan masyarakat yang lebih luas. Menurut (Trends et al., 2020; Watkins dan Xie, 2014; Winkelman et al., 2016) literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis, mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan dan menghitung, menggunakan bahan cetak, tertulis maupun digital, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Pemahaman ini melampaui definisi sebelumnya bahwa literasi fungsional, yaitu kemampuan membaca terapan, menulis dan berhitung, untuk mengenali melek huruf sebagai multi-modal dan terlibat dengan kompleksitas lisan, visual dan praktik digital.

Melek huruf dipahami sebagai proses pembelajaran manusia yang membutuhkan tempatkan mengeksplorasi kemampuan kognisi baik di dalam diri maupun di luar seseorang hingga menghasilkan suatu keterampilan literasi. Menurut (Watkins & Xie, 2014) keterampilan literasi juga erat kaitannya dengan suatu gagasan literasi, yaitu suatu bentuk ide atau kreativitas kognisi seseorang untuk menguraikan makna pesan dan informasi. Gagasan literasi ini dapat tertanam dalam praktek sosial dan budaya dan sebagai suatu proses keberlanjutan antara literasi dan oralitas seseorang. (Ehrhardt et al., 2009; Kar, Pascual, dan Chickering, 1999) menguraikan bahwa konsep keterampilan literasi dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat baik pada aspek kesejahteraan, sosial dan kesehatan.

Konseptualisasi kesehatan dalam pembahasan ini tidak hanya tentang proses bagaimana mencegah dan mengobati penyakit tetapi juga tentang mendukung dan menciptakan kondisi kesejahteraan dan kesetaraan di lingkungan masyarakat serta memiliki implikasi khusus untuk peran profesional kesehatan dan para pendidik generasi suatu bangsa (United Nation, 2016). Dewasa ini, telah terjadi pergeseran upaya promosi dan pendidikan kesehatan melalui pendekatan multidisiplin kesehatan, hal ini ditandai dengan deklarasi yang diuraikan oleh badan kesehatan dunia atau WHO *dalam* Piagam Ottawa pada tahun 1986. Pada sisi lain,

pendidikan kesehatan seringkali difokuskan pada sasaran individu dan pemenuhan kebutuhannya terkait dengan pelayanan kesehatan (Borma et al., 2015). Keterkaitan antara peran literasi kesehatan dan kesehatan dapat dilihat pada proses promosi kesehatan yang melibatkan komunitas yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan langsung menangani faktor penentu sosial kesehatan (Hakkak et al., 2019). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan tentu membutuhkan peran yang besar dari kemampuan masyarakat untuk menyerap informasi dan literatur yang diberikan serta bagaimana masyarakat itu sendiri dapat menyimpulkan informasi yang diterima hingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan yang ditemui dalam proses penyampaian pesan kesehatan adalah apabila masyarakat tersebut tidak dapat menganalisa dan memproses informasi secara tepat guna dan sesuai (Barnes et al., 2019; UNESCO, 2017).

Literasi Kesehatan: Perspektif Baru dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat

Tingginya arus globalisasi dan tuntutan kualitas kesehatan saat ini menuntut masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai kesehatan pada kelompok-kelompok rentan contohnya ibu hamil, bayi, balita, lansia dan kelompok lainnya (Hakkak et al., 2019), selain itu juga mengenai upaya promotif dan preventif pada penyakit menular dan tidak menular lainnya (Budhatoki et al., 2017). Kondisi saat ini mempengaruhi kecepatan masyarakat dalam mengakses dan mentransferkan informasi kesehatan hingga terkadang menyebabkan kesalahan persepsi dan tersebarnya berita dan hoax kesehatan yang tidak valid (Paakkari dan Okan, 2020). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Hakkak et al., 2019; Sak, Rothenfluh, dan Schulz, 2017) bahwa kemampuan personal yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat adalah kepemilikan kompetensi keaksaraan untuk memilah keragaman dan fleksibilitas bahan bacaan melalui media sosial, cetak maupun melalui petugas kesehatan. (UNESCO, 2017) menguraikan lebih lanjut bahwa literasi kesehatan sebagai salah satu bentuk paradigma baru pemberdayaan masyarakat adalah sejauh mana kapasitas individu

atau masyarakat itu sendiri untuk memperoleh, memahami dan memproses dasar informasi dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk keputusan kesehatan yang tepat serta tidak hanya mengacu pada kemampuan membaca dan interpretasi umum. Hal inilah yang dapat berdampak pada dorongan masyarakat untuk menerima atau menolak suatu masalah kesehatan. Melalui upaya gerakan masyarakat yang sadar akan kesehatan tentu akan mempermudah para tenaga kesehatan untuk mendistribusikan dan melaksanakan program kesehatan guna meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakat.

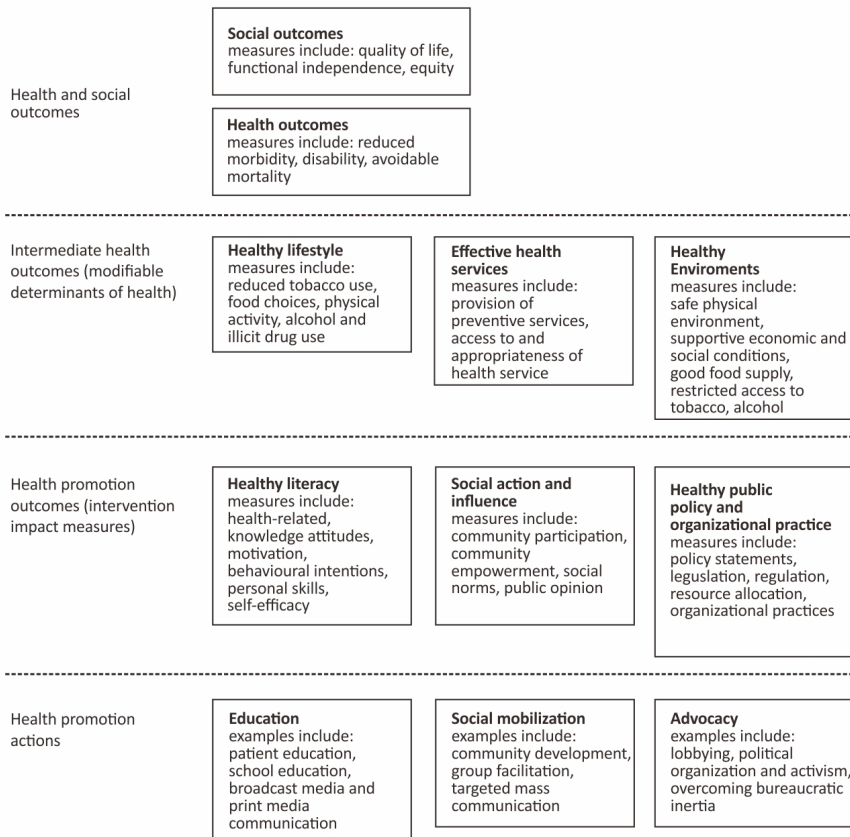
Bukti lain yang menunjukkan bahwa terdapat keeratan hubungan antara kesehatan dan keterampilan literasi berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Hakkak et al., 2019; Porteous, Sheldrick, dan Stewart, 2002) adalah kemampuan literasi secara statistik sebagai prediktor kuat atas kesehatan seseorang selain ditinjau dari aspek pendapatan, usia, tingkat pendidikan dan kolaborasi faktor sosial dan individu lainnya seperti budaya, bahasa, dan profil atau riwayat sakit seseorang. Hal yang menjadi keterbatasan pada kondisi ini adalah banyak masyarakat yang menderita sakit parah, memiliki pemahaman yang salah tentang penyakit, pengobatan dan obat yang diresepkan. Banyak informasi kesehatan dan pendidikan pasien ditulis dalam teks yang tidak dapat dimengerti oleh banyak orang dengan level pendidikan rendah. Tenaga kesehatan contohnya dokter percaya bahwa pasien mampu membaca dan memahami semua pedoman atau petunjuk kesehatan yang diberikan, keyakinan yang tidak berdasar inilah yang terkadang menyebabkan banyak masyarakat yang semakin sakit dan tidak mengalami kesembuhan yang optimal.

Komunitas menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan kesehatan masyarakatnya sendiri sangat perlu diberdayakan untuk terlibat dalam menemu-kenali kebutuhan kesehatan, cara meningkatkan pengetahuan tentang sistem kesehatan berbasis budaya dan sumber daya lokal, serta memungkinkan seseorang mengakses layanan kesehatan sebagai hak dasar hidup layak. Melalui pemahaman holistik yang dimiliki oleh masyarakat tentang literasi kesehatan kelompok dan individu dapat menyediakan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan intervensi untuk meningkatkan luaran kesehatan dan mengurangi ketidaksetaraan pada

pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat (Budhatoki et al., 2017; McBride et al., 2019). Sejak tahun 1998, berbagai jenis literasi kesehatan telah terdefiniskan sebagai suatu jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pengetahuan kesehatan (United Nation, 2016). Terdapat tiga jenis literasi kesehatan yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan kesehatan masyarakat menurut (Nutbeam, 2000), yaitu;

1. Literasi kesehatan fungsional, adalah kemampuan dasar dalam membaca dan menulis sehingga memungkinkan pemahaman dan penggunaan informasi kesehatan
2. Literasi kesehatan komunikatif atau interaktif, adalah keterampilan kognitif dan literasi tingkat lanjut untuk berinteraksi dengan penyedia atau penyelenggara layanan kesehatan masyarakat serta kemampuan untuk menadsirkan dan menerapkan informasi untuk mengubah keadaan atau situasi kesehatan baik secara individu maupun komunitasnya.
3. Literasi kesehatan kritis, adalah tingkat kognitif taraf lanjut yang lebih maju, serta keterampilan untuk menganalisa informasi secara kritis dan lebih mendalam untuk mengarahkan kendali yang lebih besar atas hidup seseorang atau masyarakat yang lebih luas.

Asumsi dalam model Nutbeam adalah bahwa keterampilan lanjutan yang terkait dengan 'literasi kesehatan kritis' mengarah pada pemberdayaan dan keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan (Nutbeam 2000: UNESCO, 2017; United Nation, 2016). Adapun gambar model Nutbeam diuraikan sebagai berikut;



Gambar 1. Model luaran kesehatan melalui peran literasi kesehatan dan promosi kesehatan (Nutbeam 2000; United nation, 2016)

Literasi kesehatan juga telah dikonseptualisasikan berdasarkan jenisnya pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri, berbagai model literasi kesehatan yang disajikan secara multi-dimensi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi melampaui literasi sebagai keterampilan untuk hanya memecahkan kode pesan atau informasi kesehatan baik cetak maupun digital serta bagaimana masyarakat mempraktikkan perilaku sehat dan secara terus menerus mengkomunikasikan kepada lingkungan sosial mereka (Ejaz dan Ittefaq, 2020). Paradigma baru dimana literasi kesehatan dikonseptualisasikan

dalam istilah pemberdayaan, seperti dalam definisi ini oleh Kickbusch, dkk (2005) dalam (United Nation, 2016) bahwa strategi pemberdayaan yang kritis meningkatkan kendali orang atas kesehatan mereka, kemampuan mereka untuk mencari informasi dan kemampuannya untuk mengambil tanggung jawab atas diri mereka dan lingkungan sosialnya. WHO (2013) dalam (United Nation, 2016) membangun ide-ide ini dimana pemberdayaan pribadi dan individu, untuk memeriksa dimensi kelembagaan ‘melek kesehatan’, khususnya dalam mengembangkan kebutuhan akan urgensi keterlibatan banyak pemangku kepentingan baik di daerah maupun regional dalam kaitannya berbagi kepentingan politik, sehingga diperlukan suatu gerakan masif agar atmosfer kesehatan dapat tercipta dari lingkup terkecil, yaitu keluarga hingga lingkungan sosial masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan sebagai Kader Kesehatan Masyarakat guna Meningkatkan Literasi Kesehatan Masyarakat

Pemberdayaan perempuan terlalu sering dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan program pembangunan khususnya dalam konteks peningkatan status kesehatan dan pendidikan (Tumbelaka et al., 2018; WHO, 2015). Konseptualisasi pemberdayaan sebagai bagian dari perjalanan pembangunan. (Cornwall, 2015) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses, bukan keadaan tetap, status atau titik akhir maupun target akhir dalam suatu program. Gagasan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu bentuk inovasi pemberdayaan sudah terbangun sejak lama khususnya di Indonesia, sebagai contoh upaya pemberdayaan perempuan bidang kesehatan yang dilakukan (Susanti Pudji Hastuti, 2018) dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu, bayi dan balita serta lansia di Jawa Tengah melalui pendidikan kesehatan berkelanjutan. Berdasarkan implementasi pemberdayaan yang dilakukan melalui optimalisasi posyandu balita dan posyandu lansia, perempuan dapat menjadi motor penggerak masyarakat melalui gaya komunikasi dan hubungan interaksi personal yang mengutamakan aspek kekeluargaan dan bahasa masyarakat lokal.

Peranan perempuan sebagai kunci dalam penggerakan masyarakat juga diuraikan pada hasil studi yang dilakukan oleh (Kurniawansyah S. I.,

Sopyan I., 2018; Lubis dan Santi, 2020; Sukma, Ramlan, dan Makhrajani Majid, 2019) bahwa melalui partisipasi dan keterlibatan perempuan sebagai kader kesehatan dapat meningkatkan gairah dan respon masyarakat dalam meningkatkan kesehatan keluarga. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh perempuan selain melalui komunikasi dan gaya bahasa, mereka dapat membentuk pola pengetahuan baru berdasarkan informasi yang diberikan kepada mereka dan menterjemahkan menjadi bahasa pesan yang dapat lebih diterima oleh masyarakat di lingkungannya hingga dapat mengarah pada upaya perubahan perilaku masyarakat apabila program pelibatan kelompok perempuan dilaksanakan secara kontinyu.

Ditinjau dari aspek komunikasi dan kebahasaan yang dibutuhkan oleh masyarakat menurut (Jansen, 2017) adalah untuk memicu reaksi komunikasi yang lebih aktif, diperlukan pihak komunikator yang dapat membangun interaksi diskusi antar personal dengan mengkombinasikan keterampilan komunikasi aktif, budaya atau ciri komunitas yang melekat serta nilai-nilai kekeluargaan yang melekat pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hal tersebut kelompok kader perempuan memiliki nilai optimal dalam pengembangan kemampuan literasi dan penerjemahan pesan kesehatan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Hal ini didukung dengan pendapat (Cornwall, 2015) bahwa pemberdayaan merupakan suatu seni dan keterampilan yang sangat kompleks khususnya berkaitan dengan kemampuan negosiasi antar kelompok dan masyarakat. Perspektif multi-dimensi yang lebih luas tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dapat membantu kita untuk mengidentifikasi intervensi pembangunan yang direncanakan baik yang sudah maupun belum terealisasi ditingkat global dan lokal.

Menurut (Mainuddin et al., 2015) berdasarkan studi yang dilakukan di Bangladesh, menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesehatan masyarakat harus didampingi dengan pemenuhan kapasitas pengetahuan dan tingkat pendidikan. Secara statistik, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi memiliki peluang berdaya secara kemasyarakatan yang juga tinggi, sehingga pendidikan dan pengetahuan berbanding lurus dengan

praktik pemberdayaan masyarakat dimana seluruh kapasitas tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan literasi kesehatan perempuan. (Alishah et al., 2019) dalam studi yang dilakukan mengenai peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan kesehatan, menguraikan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat karena mereka merupakan setengah dari angkatan kerja masyarakat. Pemberdayaan perempuan adalah tujuan pembangunan milenium yang dianggap sebagai proses dinamis, multidimensi, dan kritis dalam dunia modern baik dalam lingkungan sosialnya.

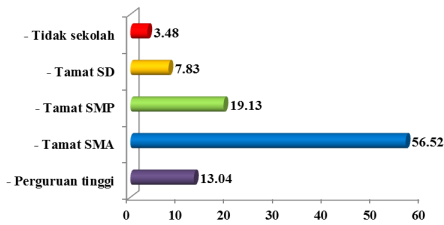
Perempuan dan kesehatan menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena peran perempuan sebagai pendorong dan evaluator dalam membentuk keluarga yang sehat serta menciptakan generasi yang kuat dan sehat (Cornish et al., 2019). Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh (Cislaghi et al., 2019; Shannon et al., 2019) bahwa untuk terlaksananya peran yang optimum dalam lingkungan tersebut, perlu adanya suatu intervensi berupa kelas pendidikan pada kelompok perempuan sebagai bentuk penyediaan ruang dimana kapasitas keterampilan individu dapat tumbuh. Perempuan perlu mengasah keterampilan literasi dan negosiasi berpendapat agar mereka lebih terampil dalam menyebarkan informasi baik ditingkat terkecil, yaitu keluarga hingga lingkungan sosialnya. Peran perempuan sebagai kader kesehatan atau kader posyandu menurut (Agustin, Muchsin, dan Roni Pindahanto Widodo, 2019), yaitu seorang motor penggerak yang termasuk dalam bagian masyarakat, melakukan sosialisasi dengan menjangkau seluruh ibu, anak dan lansia melalui penyebaran informasi kesehatan mengenai imunisasi, pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat, serta pemeriksaan kesehatan menjadi langkah preventif masyarakat mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berdasarkan hal tersebut, maka tingkat literasi kesehatan kader menjadi hal yang sangat penting guna menyampaikan informasi yang benar dengan metode dan teknik penyampaian yang juga tepat. Berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan kader dalam menyehatkan masyarakat berbasis studi yang dilakukan oleh penulis.

Peningkatan Kapasitas Penggunaan Media Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) oleh Kader Kesehatan Posyandu di Kalimantan Timur.

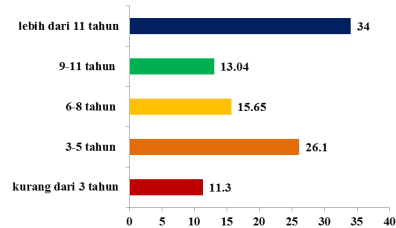
Hasil studi dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Ke-7 dengan tema “Promosi Kesehatan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, (Jakarta, 12-16 September, 2017) dengan judul “*Bagaimana Kabar Kader Posyandu?*”, oleh Riza Hayati Ifroh¹, Edy Gunawan,² Nur Rohmah,³ (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2018).

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia terdiri dari 10 wilayah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sebesar 3.426.638 jiwa (BPS Kalimantan Timur, 2020). Adapun jumlah posyandu yang tercatat berjumlah 4.192 unit dan terdiri dari kader penggerak masyarakat untuk hidup bersih sehat. Jumlah kader dan posyandu yang besar tersebut menjadi urgensi dilakukannya studi mengenai kebutuhan kader posyandu serta pengalaman partisipasi dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan literasi kesehatan. Studi ini bermanfaat sebagai salah satu rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis peningkatan kapasitas dan peran kader dalam menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat di Kalimantan Timur.

Studi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatoris berbasis *survey*. Pengumpulan data menggunakan instrument, yaitu angket dan dilakukan dengan teknik *self-administered*. Jumlah kader yang berpartisipasi pada studi ini berjumlah 115 kader posyandu yang berasal dari kab/kota di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan, Berau, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Panajam Paser Utara, Paser dan Samarinda. Teknik penentuan jumlah subjek penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*, yaitu *convenience sampling*. Adapun uraian hasil studi digambarkan secara deskriptif sebagai berikut;

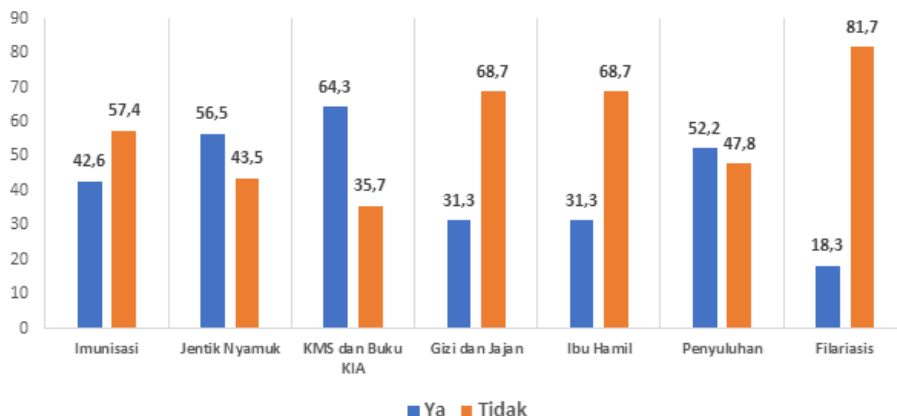


Gambar 2. Persentase tingkat pendidikan kader kesehatan



Gambar 3. Persentase lama menjadi kader kesehatan (dalam tahun)

Berdasarkan gambar di atas, 56.52% kader kesehatan menamatkan pendidikan SMA sebagai pendidikan terakhir, sehingga lebih dari sebagian kader tersebut memiliki kemampuan membaca dan menulis atau menurut (Nutbeam, 2020) termasuk dalam kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi kesehatan fungsional. (Duryatmo et al., 2019) pendidikan yang dimiliki oleh kader kesehatan dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku pola hidup sehat, motivasi dan sikap dalam lingkungannya. Berdasarkan uraian gambar 3, yaitu durasi menjadi kader diketahui bahwa sebanyak 34% kader telah selama lebih dari 11 bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah tempat tinggalnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin lama kader maka kemampuan dan pengalamannya dalam menjalankan posyandu atau unit kesehatan masyarakat yang lebih banyak sehingga proses transfer informasi dan pengalaman pada kader yang lebih muda menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut (Porteous et al., 2002) proses belajar pada kelompok masyarakat juga mengacu pada proses penyerapan ilmu pengetahuan dan wawasan pengalaman guna meningkatkan literasi dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan studi yang dilakukan, uraian mengenai pelatihan dan peningkatan kapasitas informasi yang pernah diikuti oleh kader diuraikan pada gambar berikut;



Gambar 4. Persentase pengalaman keikutsertaan dalam pelatihan kesehatan 3-5 tahun terakhir

Perlu diketahui, pelatihan pengisian kartu menuju sehat (KMS) dan pengisian buku kesehatan ibu dan anak memiliki persentase tertinggi, yaitu 64.3%. Berdasarkan uraian di atas juga diketahui bahwa hanya sebanyak 52.2% kader yang pernah mengikuti pelatihan teknik penyuluhan sebesar dan sebesar 47.8% tidak pernah mengikuti pelatihan komunikasi. Diharapkan melalui keikutsertaan kader dalam pelatihan-pelatihan bertema kesehatan tersebut dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan kader sehingga informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat di lingkungan sosial kader memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi. Salah satu bentuk upaya pengabdian dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan penulis guna membantu peningkatan keterampilan komunikasi dan literasi kesehatan pada kader kesehatan di wilayah Kota Samarinda, maka dilaksanakan kegiatan kader berdaya.

Program pemberdayaan kader kesehatan atau kader posyandu ini merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat guna mendukung program Kementerian Kesehatan “GERMAS” (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Program kader berdaya merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada kader posyandu balita di Kota Samarinda dengan pelaksanaannya adalah civitas akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman. Secara garis besar pelaksanaan

kegiatan ini atas kolaborasi antara tenaga pengajar, yaitu dosen dan mahasiswa dalam memberikan pelatihan teknik komunikasi kepada kader posyandu di Samarinda. Metode pendidikan kelompok yang digunakan, yaitu kombinasi antara diskusi dan praktik dengan bantuan media berupa lembar balik. Salah satu alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan edukasi teknik komunikasi kepada kader adalah data penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Bagaimana Kabar Kader Posyandu Saat Ini?” (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2018) mendapatkan hasil bahwa masih terdapat 68.7% kader yang tidak pernah mengikuti pelatihan bidang kesehatan dan masih belum dapat menjelaskan informasi kesehatan kepada masyarakat dengan baik dan benar, sehingga pelatihan teknik komunikasi perlu diadakan dan menjadi salah satu kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pada kegiatan kader berdaya ini, jumlah posyandu yang terlibat adalah sebanyak tiga posyandu di Kota Samarinda, yaitu Posyandu Kemuning; 1) Posyandu Seroja II; 2) dan, Posyandu Danau Teratai; 3) Kegiatan ini dihadiri oleh kader posyandu Danau Teratai, pelatihan ini juga mengundang perwakilan kader dari posyandu-posyandu lain di wilayah kerja Puskesmas Remaja sehingga informasi yang disampaikan diharapkan dapat disebarakan kepada seluruh kader di wilayah tersebut. Posyandu-posyandu yang terlibat, yaitu; Posyandu Kenanga, Posyandu Merpati Putih, Posyandu Cempaka Putih, Posyandu Tantina, dan Posyandu Lestari.



Gambar 5. Contoh pelatihan komunikasi di Posyandu Seroja II



Gambar 6. Praktek penggunaan media KIE oleh Kader Posyandu Seroja II

Kegiatan pelatihan komunikasi kader dilakukan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab dan simulasi atau *role play*. Kader posyandu yang mayoritas adalah kelompok ibu rumah tangga dan berperan sebagai kader kesehatan di wilayah RT maupun kelurahan tempat tinggal mereka diperkenalkan dengan berbagai bentuk dan jenis media edukasi kesehatan contohnya; lembar balik, *spinner wheels*, poster, leaflet, papan *rating scale*, dan lain-lain. Para kader juga memiliki pengalaman untuk menguraikan dan mempraktekkan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau ibu-ibu yang berkunjung ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, menimbang bayi atau balita, pelayanan KB dan lain sebagainya.



Gambar 7. Praktik penyuluhan kader Posyandu Danau Teratai



Gambar 8. Praktek penggunaan media KIE oleh Kader Posyandu Kemuning

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh para kader, terlihat bahwa bentuk komunikasi yang mengedepankan rasa kekeluargaan dan bahasa yang nyaman dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hutagaol dan Agustin, 2012; Prasanti dan Fuady, 2018) bahwa media komunikasi menjadi salah satu poin yang menarik dalam penyampaian pesan kesehatan, dikarenakan masyarakat lebih cenderung mengamati pesan kesehatan yang diberikan secara visual agar menarik dan dapat dipahami dengan mudah.

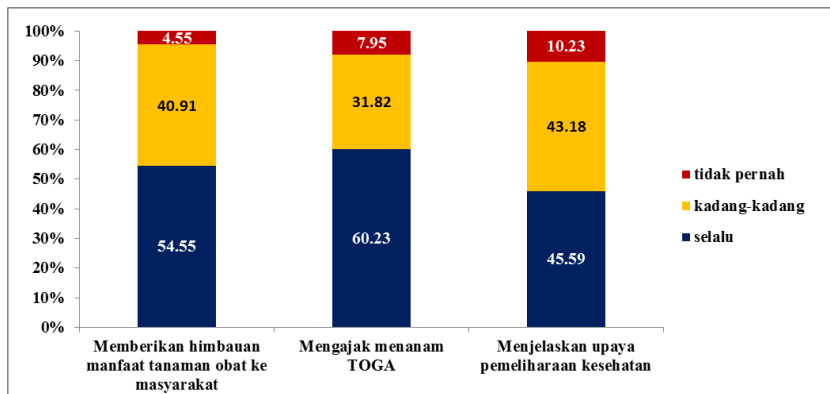
Pada akhirnya, kegiatan ini telah terlaksana sebagai wujud partisipasi dalam proses pembangunan kesehatan secara berkelanjutan dan melibatkan kelompok perempuan atau ibu rumah tangga yang menjadi bagian dari kader kesehatan masyarakat untuk semakin terampil dalam

menyebarkan informasi kesehatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun manfaat dari kegiatan kader berdaya ini yang dirasakan oleh kader adalah para kader kesehatan dapat menyegarkan kembali informasi-informasi kesehatan terbaru dengan saling bertukar pikiran dengan civitas akademik maupun mahasiswa kesehatan masyarakat, sehingga upaya peningkatan kapasitas, kompetensi dan literasi kesehatan kader dapat terwujud.

Peran Kader Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga

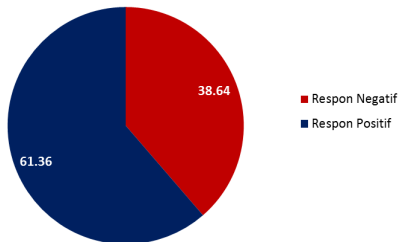
Hasil studi dipresentasikan dalam *Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020*, (Palembang 20 Oktober, 2020) dengan judul “Peran Kader Posyandu dalam Praktek Pemanfaatan dan Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di masa pandemi COVID-19” oleh Riza Hayati.I, (Pusat Unggulan Riset Pengembangan Laha Suboptimal (PUR-PLSO Universitas Sriwijaya, 2020).

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bentuk strategi dalam menekan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Samarinda. Upaya yang dapat dilakukan melalui pelibatan kelompok masyarakat penggerak, yaitu kader posyandu sebagai kader kesehatan di wilayah kelurahan di Kota Samarinda. Di masa pandemi saat ini, pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) menjadi alternatif guna meningkatkan imunitas tubuh dan kesehatan seseorang. Salah satu tujuan pelaksanaan studi ini, yaitu mengidentifikasi bagaimana upaya sosialisasi manfaat TOGA kepada masyarakat. Melalui teknik pengambilan sampel secara *puposive sampling* dengan jumlah sampel 88 orang kader posyandu di wilayah Kota Samarinda dan berbasis *self administered survey*, data gambaran pola komunikasi didapatkan uraian mengenai intensitas dalam memberikan himbauan, ajakan dan penjelasan mengenai manfaat tanaman obat obat keluarga.

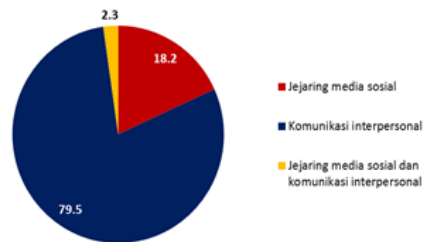


Gambar 9. Persentase intensitas penyebarluasan informasi mengenai manfaat tanaman obat keluarga

Pada gambar grafik di atas, diketahui bahwa lebih dari sebagian kader posyandu atau kader kesehatan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menanam dan memanfaatkan tanaman obat keluarga, yaitu sebesar 54.55%. Selain itu sebanyak 60.23% kader selalu mengajak tetangga, kerabat dan warga di sekitar lingkungan tempat tinggal untuk menanam tanaman obat keluarga. Sebanyak 45.59% kader yang dapat menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan melalui pembuatan ramuan tanaman obat keluarga guna pemeliharaan kesehatan. Hasil studi ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Hutagaol dan Agustin, 2012; Wardhani, 2006) bahwa pola komunikasi para kader dapat terbangun atas dasar pengetahuan dan praktik pengalaman pribadi yang kemudian ditransferkan kepada orang-orang sekitar sebagai bentuk upaya memberikan pengaruh positif dan nilai terhadap status kesehatan masyarakatnya. Berdasarkan studi yang juga telah dilakukan, didapatkan gambaran respon masyarakat saat menerima informasi dan penyebarluasan literasi manfaat tanaman obat keluarga oleh para kader tersebut.



Gambar 10. Respon masyarakat berdasarkan persepsi kader



Gambar 11. Saluran penyebarluasan informasi kesehatan para kader

Berdasarkan gambar 10 dan gambar 11 di atas, diketahui bahwa menurut persepsi kader sebanyak 61.36% menganggap respon masyarakat setelah diberikan sosialisasi tanaman obat keluarga mengarah pada respon yang positif. Masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan tanaman obat dan berencana membuat pekarangan rumah yang dihiasi dengan tanaman hias dan tanaman obat. Pola komunikasi yang terjalin antara kader dan masyarakat sebanyak 79.5% dilakukan secara langsung atau komunikasi interpersonal. Para kader menggunakan kesempatan waktu berkumpul saat sebelum pandemi COVID-19 untuk bercengkrama dan bersilaturahmi sembari mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat mengenai upaya penyehatan keluarga.

Situasi tersebut menjadikan kebutuhan keterampilan teknik komunikasi oleh kader sebagai hal yang penting. Ditambah lagi situasi pandemi saat ini yang menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas berkumpul dan berkerumun. Pemanfaatan media komunikasi yang efektif, sesuai dan terjangkau menjadi salah satu solusi bagi peningkatan peran kader dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat berbasis kearifan lokal masyarakat sekitar. Peran komunikasi ritual antar keluarga atau kelompok masyarakat dapat berperan besar dalam proses pewarisan dan penyebarluasan kearifan lokal. Contohnya penggunaan tumbuhan obat, teknik pengolahan, penentuan dosis tanaman

guna tetap menjaga kesehatan khususnya di masa pandemi COVID-19 serta pelibatan sektor terkait contohnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, akademisi dan lainnya. Dibutuhkan pula peran kader sebagai bagian dari masyarakat mengajak pola hidup sehat secara persuasif dan menggabungkan pengalaman, literasi kesehatan dan adaptasi sosialisasi dengan masyarakat lokal yang ditunjang dengan sarana prasarana komunikasi serta perhatian dari lembaga lintas sektor yang menaungi kinerja pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah Tim Penggerak PKK.

Kesimpulan

Perempuan dan kesehatan menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena peran perempuan sebagai pendorong dan evaluator dalam membentuk keluarga yang sehat serta menciptakan generasi yang kuat dan sehat. Peran perempuan sebagai kader kesehatan dapat menjadi agen penggerak perubahan perilaku masyarakat baik di tingkat rumah tangga maupun lingkungan sosialnya, sehingga kader kesehatan perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen di masyarakat guna dapat mengimplementasikan pengalaman, tingkat literasi kesehatan, kemampuan komunikasi berbasis adaptasi lokal secara optimum. Peningkatan kapasitas, kompetensi, keterampilan, penghargaan, dan motivasi perlu dilakukan guna menyongsong kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis, dimana literasi kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan berwawasan kesehatan.

Daftar Pustaka

Agustin, Nikmatul laily, Slamet Muchsin, dan Roni Pindahanto Widodo, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Pkk Dalam Menangani," *Jurnal Respon Publik*. 13(2):33-38, 2019.

Alishah, Arezo, Jila ganji, Rezaali Mohammadpour, Zahra Kiani, and Zohreh Shahhosseini, "Women's Reproductive Empowerment: A Comparative Study if

Urban Rural Females in Iran”, *International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences*, 7(3):294-300, 2019.

Alishah, Arezo, Jila Ganji, Rezaali Mohammadpour, Zahra Kiani, and Zohreh Shahhosseini, “Women’s Reproductive Empowerment: A Comparative Study of Urban and Rural Females in Iran”, *International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences*, 7(3):294–300, 2019.

Barnes, Larisa A. J., Lesley Barclay, Kirsten Mc Caffery, and Parisa Aslani, “Women’s Health Literacy and the Complex Decision-Making Process to Use Complementary Medicine Products in Pregnancy and Lactation,” *Health Expectations*, 22(5):1013–1027, 2019.

Boerma, Ties, Caolin Mathers, Carla AbouZahr, Somnath Chattergi, Daniel Hogan, and Gretchen Stevens, *Health in 2015: From MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals*. Geneva, Switzerland, 2015.

BPS Kalimantan Timur, *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020*, Samarinda, Kalimantan Timur, 2020.

Budhathoki, Shyam Sundar, Paras K. Pokharel, Suvajee Good, Sajani Limbu, Meika Bhattachan, and Richard H. Osborne, “The Potential of Health Literacy to Address the Health Related UN Sustainable Development Goal 3 (SDG3) in Nepal: A Rapid Review,” *BMC Health Services Research*, 17(1):1–13, 2017.

Cislaghi, Beniamino, Elaine K. Denny, Mady Cissé, Penda Gueye, Binita Shrestha, Prabin Nanicha Shrestha, Gemma Ferguson, Claire Hughes, and Cari Jo Clark, “Changing Social Norms: The Importance of ‘Organized Diffusion’ for Scaling Up Community Health Promotion and Women Empowerment Interventions,” *Prevention Science*, 20(6):936–946, 2019.

Cornish, Hilary, Helen Walls, Rachel Ndirangu, Nanlop Ogbureke, Osman M. Bah, Joanna Favour Tom-Kargbo, Mattia Dimoh, and Meghna Ranganathan, “Women’s Economic Empowerment and Health Related Decision-Making in Rural Sierra Leone,” *Culture, Health and Sexuality*, 1058, 2019.

Cornwall, Andrea, *Womens Empowerment : What Works and Why ? WIDER Working Paper 2014 / 104 Womens Empowerment: What Works and Why ? Andrea Cornwall, 2015.*

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, "Prosiding Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Ke-7," Pp. 1–506 in *Promosi Kesehatan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan, 2018.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, "Panduan Orientasi Kader Posyandu," Pp. 1–79, Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan, 2019.

Duryatmo, Sardi, Sarwititi Sarwoprasodjo, Djuara P. Lubis, and Didik Suhartijo, "Local Wisdom: A Sociology of Communication Analysis in West Manggarai," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2):136–42, 2019.

Ehrhardt, Anke, Sharif Sawires, Terry McGovern, Dean Peacock, and Mark Weston, "Gender, Empowerment, and Health: What Is It? How Does It Work?," *J Acquir Immune Defic Syndr*, 23(1):1–7, 2009.

Ejaz, Waqas, and Muhammad Ittefaq, "Data for Understanding Trust in Varied Information Sources, Use of News Media, and Perception of Misinformation Regarding COVID-19 in Pakistan," *Data in Brief*, 32:106091, 2020.

Hakkak, Hamidreza Mohaddes, Hamid Joveini, Rezvan Rajabzadeh, Davood Robatsarpooshi, Neda Ahmadzadeh Tori, Mehdi Haresabadi, and Seyed Hamid Hosseini, "Health Literacy Level and Related Factors among Pregnant Women Referring to Bojnord Health Centers in 2017," *International Journal of Pharmaceutical Research*, 11(1):152–158, 2019.

Hanan, Umni, "Pengalaman Kader Kesehatan dalam Promosi Kesehatan tentang Asi Eksklusif Di Posyandu Flamboyan II Kelurahan Rempoa Kotamadya Tangerang Selatan," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.

Hutagaol, Evi Ester, dan Helfi Agustin, "Komunikasi Interpersonal Petugas Kesehatan dalam Muara Siberut Kabupaten Mentawai," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2):104–112, 2012.

Ipa, Agustina, Ridho Pratama, Zulfikar, dan Husniah, "Penguatan Kemitraan Dengan Kader Kesehatan Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Program Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Wilayah Desa Binaan," *Media Implementasi Riset Kesehatan*, 1(1):25–28, 2018.

Ishartono, and Santoso Tri Raharjo, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN," *Social Work Jurnal* 6(April):154–272, 2016.

Jansen, Carel, "Developing Persuasive Health Campaign Messages," *Information Design: Research and Practice*, 681–96, 2017.

Kar, Snehendu B., Catherine A. Pascual, and Kirstin L. Chickering, "Empowerment of Women for Health Promotion: A Meta Analysis," *Social Science & Medicine*, 49, 1999.

Kementerian Kesehatan RI., *Ayo Ke Posyandu Setiap Bulan*, 0 Ed. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan, 2012.

Kurniawansyah S. I., Sopyan I., Mita R. S., "Pemberdayaan Kader PKK dalam Usaha Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jatinangor," *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 7(4):265–268, 2018.

Lubis, Halinda Sari, dan Devi Nuraini Santi, "Cadre Posyandu Empowerment and Apparatus Village in Monitoring Status Nutrition, Food Provision of Additional Pregnant Women and Children to Prevent Stunting," *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1):33–39, 2020.

Mainuddin, Ara Hausne Begum, Lal B. Rawal, Anwar Islam, and Islam. Shariful, "Women Empowerment and Its Relation with Health Seeking Behavior in Bangladesh," *Journal of Family and Reproductive Health*, 9(2005):1–46, 2015.

McBride, Bronwyn, Sarah Hawkes, and Kent Buse, "Soft Power and Global Health: The Sustainable Development Goals (SDGs) Era Health Agendas of the G7, G20 and BRICS," *BMC Public Health*, 19(1):1–14, 2019.

Morton, Stephen, David Pencheon, and Neil Squires, "Sustainable Development Goals (SDGs), and Their Implementation," *British Medical Bulletin*, 124(1):81–90, 2017.

Nutbeam, D., "Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21st Century," *Health Promotion International*, 15(3):259–267, 2000.

Paakkari, Leena, and Orkan Okan, "Comment COVID-19 : Health Literacy Is an Underestimated Problem," *The Lancet Public Health*, 5(5):e249–e250, 2020.

Pamungkas, Sigit, Amiruddin Saleh, Pudji Muljono, Kampus Dramaga, Empowerment Post, Posdaya Cadre, and Bogor Regency, "Hubungan Aktivitas Komunikasi Dengan Tingkat Keberdayaan Kader Posdaya Di Kota Dan Kabupaten Bogor The Relationship Between Communication Activities and Level of Empowerment of Family," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 1–9, 2015.

Phillips, Rhonda, and Robert H. Pittman, *An Introduction to Community Development*. 3rd ed. New York, USA: Routledge Taylor & Francais Group, 2009.

Porteous, Nancy, Barbara Sheldrick, and Paula Stewart, "Introducing Program Teams to Logic Models: Facilitating the Learning Process," *Canadian Journal of Program Evaluation*, 17(3):113–142, 2002.

Prasanti, Ditha, dan Ikhsan Fuady, "Pemanfaatan Media Komunikasi Dalam Penyebaran Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat," *Reformasi* 8(1):8–14, 2018.

Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya, Palembang, "Komoditas Sumber Pangan Untuk Meningkatkan Kesehatan Di Era Pandemi COVID-19." Pp. 1–149 in *Buku Panduan dan Abstrak Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020*, edited by S. Herlinda, T. W. Agustini, L. E. Radiati, F. Gustiar, Tanbiyaskur, and D. Yonarta. Palembang, Indonesia: Universitas Sriwijaya, 2020.

Report, Situation, "Coronavirus Disease", August, 2020.

Sak, Gabriele, Fabia Rothenfluh, and Peter J. Schulz, "Assessing the Predictive Power of Psychological Empowerment and Health Literacy for Older Patients' Participation in Health Care: A Cross-Sectional Population-Based Study," *BMC Geriatrics*, 17(1):1–15, 2017.

Shannon, Geordan, Melanie Jansen, Kate Williams, Carlos Cáceres, Angelica Motta, Aloyce Odhiambo, Alie Eleveld, and Jenevieve Mannell, "Gender Equality in Science, Medicine, and Global Health: Where Are We at and Why Does It Matter?" *The Lancet*, 393(10171):560–569, 2019.

Sukma, Ramlan, dan Makhrajani Majid, “Peran Kader Dalam Pemanfaatan Apotek Hidup Di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(2):195–204, 2019.

Susanti Pudji Hastuti, Jodelin Muninggar & Emy Wuryani, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Kesehatan Masyarakat Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah,” 0(0):368–375, 2018.

Ruiz-Roso, María Belén et al. “Covid-19 Confinement and Changes of Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil,” *Nutrients* vol. 12,6 1807. 17 Jun. 2020, doi:10.3390/nu12061807.

Tumbelaka, Patricia, Ralalicia Limato, Sudirman Nasir, Din Syafruddin, Hermen Ormel, and Rukhsana Ahmed, “Analysis of Indonesia’s Community Health Volunteers (Kader) as Maternal Health Promoters in the Community Integrated Health Service (Posyandu) Following Health Promotion Training,” *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 5(3):856–863, 2018.

UNESCO, “Literacy Rates Continue to Rise from One Generation to the Next,” *Unesco*, 2016(45):5, 2017.

United Nation, *Promoting Health and Literacy for Women ’ s Empowerment*, 2016.

Wardhani, Andy Corry, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Komunikasi Penyuluhan Pertanian,” *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2):269–280, 2006.

Watkins, Ivan, and Bo Xie, “EHealth Literacy Interventions for Older Adults: A Systematic Review of the Literature Corresponding Author”, (16) 1-12, 2014.

WHO, “100 Core Health Indicators,” (1779):1–136, 2015.

Winkelman, Tyler N. A., Martina T. Caldwell, Brandon Bertram, and Matthew M. Davis, “Promoting Health Literacy for Children and Adolescents,” *Pediatrics*, 138(6), 2016.

BAB IV

KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

ISU KEAMANAN DALAM KASUS *COMFORT WOMEN* JEPANG: Pendekatan Tradisional dan Non-Tradisional

Uni W. Sagena¹, Ishaq Rahman², Mohd Dino Khairri Shariffuddin³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

³Pusat Pengajian Antara Bangsa & Asian Institute of International Affairs and Diplomacy, Universiti Utara Malaysia
e-mail: unisku@unmul.ac.id

Pendahuluan

Dalam sejarah kawasan Asia, Jepang dikenal sebagai bangsa imperialis yang telah meninggalkan sejarah buruk dan kelam bagi negara-negara yang pernah dijajahnya. Salah satu warisan perang Jepang yang menimbulkan trauma sangat mendalam adalah kasus perbudakan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap wanita-wanita di wilayah jajahannya selama periode perang Asia-Pasifik tahun 1931-1945. Sistem perbudakan seksual ini diciptakan oleh imperialis Jepang untuk melayani kebutuhan seksual para tentaranya dengan cara mengumpulkan wanita-wanita pemuas seksual yang dikenal dengan sebutan *comfort women* atau dalam Bahasa Jepang, *jugun-ianfu*. Kedua istilah ini akan digunakan secara bergantian dalam artikel ini yang merujuk pada objek yang sama.

Para wanita ini dikumpulkan dalam sebuah stasiun yang disebut *comfort station* yang sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis tentara Jepang. Tujuan utamanya adalah untuk memberi semangat dan semacam “oase” bagi pasukan tentara Jepang selama agresi militernya di Asia. Agresi itu menerapkan doktrin yang disebut *hakko-*

ichi-u, yang berarti “dunia merupakan satu kesatuan keluarga” dengan Nippon (Jepang) sebagai kepala keluarga yang datang untuk melindungi keluarganya (bangsa Asia). Doktrin “Nippon Pelindung Asia” ini menjadi semboyan atau propaganda perang Jepang yang bertujuan agar bangsa-bangsa Asia bersatu bersama Jepang untuk menentang imperialisme negara-negara Barat yang telah lebih dulu menduduki koloni-koloninya di Kawasan Asia.

Definisi *jugun-ianfu* atau *comfort women* adalah para wanita, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, yang dipaksa melayani kebutuhan seksual bangsa Jepang untuk mencapai tujuan utama, yaitu memenangkan peperangan (Juningsih *dalam* Savitri, 2010). Dalam kajian tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa berdasarkan definisi tersebut, *jugun-ianfu* merupakan suatu kejahatan perang yang melanggar hukum internasional tentang protokol perang, yaitu tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada wanita di wilayah jajahannya, baik secara fisik maupun psikologis. Para wanita ini adalah korban kejahatan, sedangkan Jepang adalah pelaku kejahatan. Pendudukan adalah suatu kondisi yang menyebabkan terwujudnya sistem *jugun-ianfu* itu.

Dalam riset Ariana (2021:1) disebutkan bahwa menurut Hirofumi Hayashi, seorang profesor di Universitas Kanto Gakuin, para wanita yang diambil untuk menjadi *comfort women* itu berasal dari Malaysia, Indonesia, Taiwan, Tiongkok, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Myanmar, Vietnam, India. Menurut perkiraan para peneliti, total wanita yang menjadi *comfort women* sekitar 80.000-200.000 orang. Di atas 80% merupakan wanita Korea Selatan, sementara sisanya berasal dari negara-negara jajahan lainnya. Wanita-wanita tersebut berusia 11 sampai 28 tahun, mayoritas berusia 14-19 tahun (Hayanto dan Bahri, 2016:5). Isu-isu mengenai wanita korban perang Jepang ini dimunculkan kepermukaan oleh sekelompok aktivis pembela hak sipil Korea Selatan yang menuntut hak dan keadilan bagi para wanita tersebut. Mereka berdemo setiap hari Rabu di depan kantor kedutaan besar Jepang di Korea Selatan menuntut permintaan maaf secara resmi kepada para korban yang belum diberikan hak-hak rehabilitasinya. Pada tahun 2013, Perdana Menteri Shinzo Abe menolak meminta maaf dan menyatakan bahwa tidak ada bukti kejahatan perang

tersebut dilakukan oleh tentara Jepang. Protes keras yang dilayangkan, khususnya oleh pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok, menunjukkan bahwa trauma atas sejarah buruk kasus *comfort women* ini adalah isu serius dalam hubungan bilateral mereka sehingga sering menjadi batu sandungan yang mengganjal kerjasama dan hubungan diplomatik Jepang di Asia, termasuk di Asia Tenggara di mana Indonesia berada. Beberapa kajian menyatakan bahwa semasa penjajahan Jepang, *Tenno* (kaisar) memerintahkan pembangunan *comfort station* di beberapa titik militer seperti di Borneo, Jawa, Manado, Pulau Buru, Timor Leste, dan Papua.

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mengaplikasikan pendekatan keamanan tradisional maupun keamanan non-tradisional dalam kasus *comfort women* yang dilakukan oleh Jepang di negara-negara jajahannya. Periode pembahasannya meliputi masa Perang Dunia II hingga periode kontemporer ketika korban dan keluarganya, serta para aktivis menggugat sejarah kelam itu dan menuntut pertanggung-jawaban pemerintah Jepang. Rentang periode tersebut membutuhkan pendekatan yang luas sesuai dengan konteks dan isunya. Karena itu, pembahasan tentang hal tersebut akan diawali dengan penjelasan konseptual keamanan tradisional dan non-tradisional yang akan dielaborasi dalam kasus *comfort women* ini. Ringkasnya, artikel ini merumuskan bahwa kasus *comfort women* Jepang merupakan isu yang terus berlanjut (*on going issues*) yang sifatnya kompleks dan cakupannya luas. Selain itu, di era kontemporer ini, kasus ini masih terus menghantui hubungan bilateral Jepang dengan negara-negara yang pernah dijajahnya. Artikel ini hanya memilah aspek-aspek tertentu saja yang relevan untuk menunjukkan korelasinya dengan pendekatan konseptual yang digunakan.

Pembahasan

***Comfort Women* sebagai Isu Keamanan Tradisional**

Dalam studi keamanan internasional, terdapat dua pendekatan utama yang disebut dengan pendekatan keamanan tradisional (TS/*Traditional Security Approach*) dan keamanan non-tradisional (NTS/*Non-Traditional Approach*). Kedua pendekatan ini sesungguhnya seringkali saling beririsan dan berkaitan satu sama lain, atau merupakan turunan

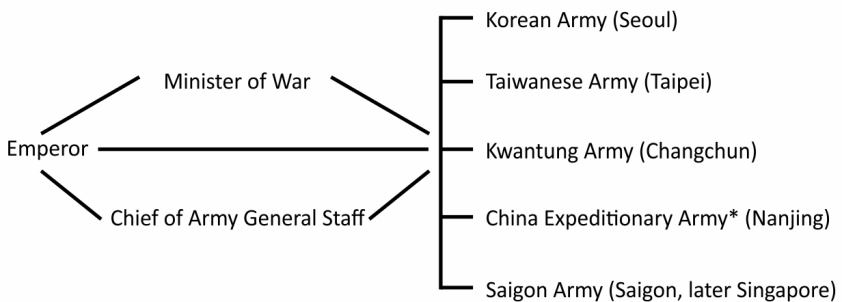
dari pendekatan sebelumnya. Dalam studi-studi keamanan (*security studies*), pendekatan dominan atau *mainstream* adalah *TS/traditional security* yang disebut juga dengan pendekatan militeristik mengikut pandangan realisme. Pendekatan ini populer di era Perang Dunia dan Perang Dingin, yang digunakan secara terbatas dan didefenisikan secara sempit, sebagaimana yang didefenisikan oleh Stephen M. Walt (1991), “security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force”. Singkatnya, pendekatan ini menitik beratkan pada keamanan nasional negara (*state*) sebagai aktor utama dalam perilakunya menghadapi ancaman atau ketidakamanan yang bersifat fisik-militeristik dari luar negara (Sagena, 2013:73).

Untuk penggunaan pendekatan keamanan tradisional dalam kasus *comfort women*, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: *pertama*, aktor utamanya adalah Jepang sebagai negara yang telah melakukan penjajahan dan agresi kepada negara-negara Asia yang disebut di atas. Dalam pandangan kriminologi perang (Savitri, 2010:289), kejahatan adalah pelanggaran hukum sehingga pelaku kejahatan adalah negara sebagai subjek yang melanggar hukum. Jepang telah meratifikasi Hague Convention tahun 1907 yang memuat ketentuan-ketentuan perlindungan orang-orang sipil di wilayah pendudukan pada tahun 1912 sehingga Jepang sudah terikat dengan konvensi tersebut ketika melakukan praktik *comfort women* di Indonesia. Kaisar Meiji mengeluarkan *Imperial Rescript Armed Forced*, yaitu sebuah pernyataan bahwa hormatilah perintah dari atasanmu sebagai perintah bersama. Seorang prajurit harus melakukan perintah atasannya tanpa harus menggunakan alasan moral atau alasan yang rasional (Hicks, 1994: 256). Ditemukannya beberapa dokumen resmi Jepang yang menyertakan *ian-jo* sebagai bagian dari sistem militer adalah sebuah bukti bahwa kaisar mengetahui adanya pembangunan *ian-jo* atau *comfort station* tersebut. Terdapat sedikitnya 127 dari 131 dokumen mengenai *jugun-ianfu*, 4 diantaranya menyebutkan adanya keterlibatan militer Jepang dengan praktek *jugunianfu* di Indonesia. Dokumen tersebut memuat laporan mengenai tata cara pengelolaan pelacuran, gaji, dan pengelolaan makanan di tempat tersebut. Dokumen resmi Jepang yang menyertakan *ian-jo* atau *comfort station* sebagai

bagian dari sistem militer adalah sebuah bukti bahwa kaisar mengetahui adanya pembangunan tersebut (Savitri, 2010:289).

Munculnya kecurigaan bahwa sistem *comfort women* tersebut sengaja diinisiasi dan “disponsori” oleh Negara juga didasari oleh adanya dokumen lain yang mengatakan bahwa Kementerian Perang (*Minister of War*) mengusulkan sistem *comfort women* sebagai cara paling efektif untuk mempertahankan disiplin militer tentara Jepang. Kementerian ini dicurigai terlibat langsung dalam mengantar para wanita ke zona perang, karena sangat tidak mungkin para wanita ini diantar menggunakan kapal tanpa izin dari Kementerian Perang. Keterlibatan *Tenno* (Kaisar), Kementerian Perang dan struktur-struktur di bawahnya dalam kasus *jugunianfu* ditampilkan oleh Yoshiyuki Tanaka dalam bukunya yang berjudul *Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II*. Gambar di bawah ini (Ariana, 2021:30) menunjukkan struktur komando dimana posisi *Tenno* Jepang berada di puncak dan sebagai pusat dalam organisasi sistem *comfort women*. Sistem komando selanjutnya adalah Kementerian Perang dan Kepala Staf Umum Tentara, selanjutnya diturunkan kepada kepala staf tentara masing-masing di wilayah kependudukan di Korea, Singapura, Nanjing, Changchun.

Gambar 1. Struktur organisasi sistem *comfort women*



Sumber: Toshiyuki Tanaka, *Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II*, 2002

Aspek *kedua* adalah instrumen militer dalam agresi Jepang pada Perang Dunia tersebut dengan mengirim pasukan tentara dan

perlengkapan perang lainnya dengan menggunakan cara koersif atau *hard power*. *Comfort women* mengandung unsur paksaan dan kekerasan fisik karena merupakan bagian dari sistem militer yang diperintahkan oleh *Tenno* sebagai pimpinan tertinggi negara itu. Pemerintah Jepang yang militeristik dan agresif diyakini telah sengaja memfasilitasi *comfort station* tersebut untuk menjaga semangat juang para tentaranya sebelum terjun ke medan perang. Jepang menggunakan paksaan dan ancaman secara fisik terhadap wanita-wanita *comfort women* tersebut dan disebar di beberapa lokasi.

Dalam laporan Kimbara Setsuzd dirincikan bahwa Jepang memiliki total 400 *comfort station* yang tersebar di beberapa tempat, yaitu 100 di Cina Utara, 140 di Cina Tengah, 40 di Cina Selatan, 100 di Asia Tenggara, 10 di Pasifik Barat Daya, 10 di Sakhalin Selatan. Laporan lain yang disampaikan oleh Kim Il Yon, seorang peneliti asal Korea, memperkirakan sekitar 80% - 90% dari semua wanita *jugun-ianfu* berasal dari Korea, dengan total 170.000 hingga 200.000 (Ariana, 2021:43). Adapun perkiraan tentang persebaran *comfort women* di Asia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perkiraan jumlah wanita *comfort women* dari negara-negara Asia

No.	Negara	Perkiraan Jumlah
1.	Korea Selatan ⁴¹	170.000-200.000
2.	Cina ⁴²	200.000
3.	Indonesia ⁴³	200-400
4.	Taiwan ⁴⁴	2.000
5.	Filipina ⁴⁵	1.000

Sumber: dikutip Ariana (2021:38) dari berbagai sumber

Metode perekrutan para wanita ini menggunakan dua cara: 1) melalui paksaan fisik dan tekanan ekonomi; dan 2) melalui cara persuasif atau *soft power* (bagian ini akan dibahas pada bagian lain). Metode perekrutan dengan tekanan ekonomi menggunakan cara penipuan. Beberapa agen disebar untuk mencari dan membeli wanita muda sebanyak

mungkin. Mereka mensasar wanita berpendidikan rendah, bahkan yang tidak berpendidikan sama sekali agar mudah ditipu dan dimanfaatkan, juga mensasar wanita miskin yang terlilit hutang sehingga dengan mudah membeli mereka yang berujung menjadi seorang wanita penghibur dan budak seks para tentara Jepang. Bagi wanita yang menolak dan berusaha kabur, akan dihukum dengan kekerasan, siksaan, serta paksaan menjadi *comfort women*. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengalami cacat, bahkan meninggal dunia. Bagi yang masih hidup, terpaksa menyimpan trauma masa lalu yang getir.

Kasus *comfort women* ini sebenarnya memiliki versi lain dan berbeda bagi pihak Jepang. Ada versi yang menyatakan bahwa mereka adalah pekerja seks komersial yang bekerja secara suka rela karena diganjar dengan penghasilan, bukan sebagai budak seks (nadesiko-action.org, 2015). Demikian pula dengan status tentara Jepang selama masa perang Pasifik yang dianggap sebagai pahlawan dan patriot yang dibuatkan kuil khusus sebagai bentuk penghormatan negara. Justru di situlah yang sering menjadi pemicu konflik dan protes-protes bagi Tiongkok dan Korea Selatan karena bagi mereka, kasus *comfort women* ini adalah fakta dan mereka merupakan korban kejahatan tentara Jepang.

Aspek *ketiga*, isu *comfort women* dewasa ini disinyalir tetap memiliki dimensi geopolitik. Kuatnya tekanan dan tuntutan pertanggungjawaban ganti rugi secara ekonomi dan moral dari Korea dan Tiongkok terhadap pemerintah Jepang telah menimbulkan kecurigaan adanya maksud dan tujuan tertentu di balik itu, yaitu:

1. Melemahkan posisi Jepang secara ekonomi dan diplomatik melalui ganti rugi dan sanksi pelanggaran HAM internasional
2. Mengisolir Jepang dari pergaulan komunitas internasional, khususnya bagi negara-negara Asia; dan,
3. Melemahkan aliansi keamanan tradisional antara Jepang dengan sekutu kuatnya, Amerika Serikat.

Melalui scenario tersebut, tanpa bantuan militer Amerika Serikat, Jepang akan menjadi lemah dan kehilangan sekutu tempatnya bergantung selama ini. Situasi itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi rivalnya seperti Tiongkok yang memiliki sengketa maritim dengan Jepang, yaitu

Pulau Senkaku dan Pulau Okinawa yang selama ini turut diklaim oleh Tiongkok. Persaingan dan perimbangan kekuatan antar negara ini tidak hanya secara militer tetapi juga secara ekonomi yang semakin tajam dengan bangkitnya kekuatan Tiongkok yang mengalami *booming* ekonomi dewasa ini.

***Comfort Women* dalam Pendekatan Keamanan Non-tradisional**

Dalam perkembangan konseptualnya, pendekatan keamanan tradisional (TS) diatas telah mengalami perluasan makna seiring perkembangan konteksnya. Pasca Perang Dingin, bermunculan lah aktor-aktor baru yang dibawa oleh globalisasi seiring dengan meluasnya isu-isu global baru sehingga mendorong perubahan perspektif dan pendekatan keamanan yang lebih luas. Berakhirnya Perang Dingin juga menimbulkan perdebatan dalam studi keamanan internasional yang terbagi menjadi tiga aliran, yaitu aliran *tradisionalist*, aliran *wideners*, dan aliran *critical security studies*. Ketiga aliran memiliki agenda keamanan dengan titik tekannya masing-masing (Buzan, 1997).

Dalam artikel ini, aliran kedua dan ketiga tersebut dikategorikan sebagai pendekatan non-tradisional karena tidak hanya fokus pada aspek-aspek yang bersifat militeristik atau fisik saja dengan negara sebagai aktor utamanya, tetapi juga berkembang menjadi aspek non-militer. Karena itu, secara umum disebut pendekatan keamanan non-tradisional atau *non-traditional security* (NTS). Aspek non-militer yang dimaksud mencakup instrumen *soft power* yang meliputi aspek sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, diplomasi dengan menitikberatkan “*people-centered approach*” atau mengutamakan kepentingan dan keamanan individu (serta kelompok masyarakat).

Pergeseran fokus isu keamanan yang awalnya hanya melindungi kedaulatan negara dari ancaman militer, menjadi melindungi individu-individu dari berbagai ancaman dalam kehidupan mereka. Pergeseran objek rujukan (*referent object*) yang menghadapi ancaman tersebut semakin luas, bahkan dapat saja berasal dari tekanan dan paksaan dari negara terhadap rakyat mereka sendiri (Coates, 2014). Dalam pandangan Buzan, objek-objek rujukan tersebut sifatnya luas karena dapat dari pihak

mana saja yang harus bertahan hidup sehingga perlu untuk diselamatkan dari berbagai ancaman yang ada (Buzan, Wæver, Jaap de Wilde, 1998). Wanita *comfort women* dan negara sebagai objek rujukan keamanan dalam pengertian tersebut juga dapat dibaca melalui kacamata keamanan non-tradisional yang dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, penggunaan instrumen *soft power* dalam rekrutmen wanita-wanita di negara jajahan Jepang. Selain cara *hard power* diatas, para agen juga melakukan pendekatan persuasif secara sosial dan budaya. Pendekatan persuasif itu digunakan sebagai upaya hegemoni budaya Jepang yang masuk secara halus dan tanda disadari oleh kelompok dan individu sasarannya (Savitri, 2010). Para wanita ini didoktrin untuk “berkontribusi” dalam perjuangan Jepang melepaskan bangsa Asia dari jajahan Barat ketika itu, baik dengan cara mendukung untuk merawat yang luka, membantu di dapur umum untuk tentara, maupun untuk memberikan hiburan. Secara halus, wanita-wanita ini juga diubah untuk berpakaian dan berperilaku seperti perempuan Jepang. Modus penipuan ini dilakukan atas wanita-wanita di Taiwan dan Korea, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Negara-negara ini semakin miskin karena Jepang mengambil sumber bahan makanan mereka. Akibatnya, para wanita sudah bekerja sejak di usia yang sangat muda untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk merekrut mereka agar mau menjadi seorang wanita penghibur. Mereka ditipu dengan cara dijanjikan untuk diberikan sebuah pekerjaan yang bagus seperti menjadi pelayan atau juru ketik, dan akan diberikan gaji yang cukup besar. Akhirnya banyak wanita muda yang tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh para perekrut ini. Menurut *The Southeast Asia Translation and Interrogation 2 Center (SEATIC) Psychological Warfare Interrogation Buletin No.2*, dalam kasus *comfort women* di Burma ketika itu, pengelola *comfort station* di Burma membeli para wanita muda dari Korea seharga 300-1000 yen. Harga ini tergantung dari penampilan, karakter, dan usia dari wanita tersebut (Ariani, 2021:28).

Aspek *kedua* dapat dilihat pada dampak kasus ini terhadap keamanan para wanita sebagai manusia yang bermartabat. Konsep non-

tradisional yang dapat digunakan untuk membaca kondisi ini adalah *human security* (keamanan manusia). Fokus utama konsep ini adalah melihat permasalahan manusia pada level individu dan kelompok atau komunitas dan bagaimana cara mencapai keamanan dan kebutuhan vital mereka. Konsep ini melihat keamanan individu sebagai indikator utama keamanan nasional dan global, sehingga tujuan utamanya adalah melindungi individu dan kelompok manusia dari berbagai ancaman, gangguan, ketidakamanan, rasa takut, dan resiko-resiko keamanan lainnya. Cakupan konsep ini sesungguhnya cukup luas, salah satunya adalah menekankan pada hak-hak dasar individu (*basic individual rights*) yang harus diperjuangkan dan dipromosikan oleh komunitas internasional (Hampson, 2008:230). Adapun konsep yang umumnya digunakan oleh pengkaji studi keamanan internasional adalah konsep dari UNDP (*United Nations Development Report* 1994) yang membagi keamanan manusia dalam tujuh kategori utama, yaitu:

1. Keamanan pangan (*food security*)
2. Keamanan politik (*political security*)
3. Keamanan kesehatan (*health security*)
4. Keamanan lingkungan hidup (*environmental security*)
5. Keamanan ekonomi (*economic security*)
6. Keamanan personal (*personal security*)
7. Keamanan komunitas (*community security*)

Secara prinsip, kebutuhan keamanan manusia tersebut diatas membutuhkan peran negara untuk menjamin keamanan rakyatnya. Dalam kasus *comfort women*, rasa tidak aman (*insecurity issues*) itu muncul karena lemahnya peran negara sehingga sifat ancamannya multidimensi dan saling berkaitan. Kasus *comfort women* setidaknya dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori isu, yaitu: keamanan kesehatan (*health security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan politik (*political security*), keamanan personal (*personal security*), dan keamanan komunitas (*community security*).

Sebagai individu-individu, para wanita-wanita tersebut kebanyakan berpendidikan rendah, bahkan banyak juga yang sama sekali tidak berpendidikan, sehingga mereka tidak mengenal baca-tulis. Faktor tersebut

juga yang memudahkan para ‘perekrut’nya, karena mereka yang tidak bias baca tulis, biasanya tidak sering melawan karena takut salah dan hanya bias menurut. Selain itu kebanyakan juga para *jugun-ianfu* ini merupakan perempuan dari desa yang miskin. Ada pula yang masih gadis, bersuami, berumur, bahkan masih belia sekalipun (Hartono, Juliantoro, 1997). Kemiskinan yang mereka alami mengakibatkan kelaparan sehingga membuat para wanita ini mudah jatuh dalam perangkap penipuan, paksaan, dan diperjual-belikan selama periode *comfort women* itu.

Dalam isu kesehatan pula, kondisi mereka sangat buruk selama tinggal di *comfort station*, baik secara fisik pun psikologis karena dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Satu wanita dipaksa melayani hingga puluhan tentara. Banyak diantara mereka yang berusaha melawan, melarikan diri, namun gagal. Akhirnya banyak yang bunuh diri, cacat, atau meninggal dunia di stasiun tersebut. Pada tahap ini, keamanan personal dan komunitas para wanita ini benar-benar tidak dapat terlindungi.

Selain itu, keamanan politik (*political security*) dari pemerintah pula tidak mereka dapatkan karena status negaranya sebagai jajahan Jepang. Bahkan pemerintah berada dalam tekanan dan ancaman politik sehingga tidak dapat melindungi para wanita ini, terkadang malah menjadi bagian dari proses rekrutmen *comfort women* tersebut. Contohnya di Indonesia, pihak Jepang bisa saja melakukan penculikan secara masal, namun mereka memilih untuk merekrut perempuan Indonesia melalui kebijakan pemerintah dan merangkul pemerintah Indonesia. Semua itu merupakan bagian dari proses hegemoni budaya yang diterapkan Jepang sehingga terdapat perempuan yang akhirnya menerima kondisi tersebut dan berusaha menjadi *jugun-ianfu* yang baik dengan tetap melayani dan tidak memberikan perlawanan (Savitri, 2010).

Aspek *ketiga*, yang merupakan sisi lain dari kasus ini dapat dilihat dari instrumen *soft power* dalam upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di era sekarang, pemerintah maupun kelompok aktivis pembela hak-hak *comfort women* menempuh jalur negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan sosial-politik para korban. Contohnya, masyarakat di Korea Selatan melakukan protes dan demonstrasi di jalan dan depan kedutaan Jepang. Mereka juga membuat patung wanita sebagai

simbol *jugun-ianfu* yang digunakan untuk menuntut permintaan maaf dan ganti rugi rehabilitasi dari pemerintah Jepang. Pemerintah Tiongkok dan Korea Selatan menuntut tanggung jawab pemerintah Jepang yang secara jelas telah melakukan perekrutan secara paksa para wanita di negara tersebut hingga menjadi *comfort women*.

Kesaksian tentang itu pertama kali dikemukakan oleh Kim Hak-Sun dalam sebuah konferensi pers tahun 1991 hingga mengejutkan dunia. Kesaksian itu diperkuat dengan penemuan dokumen-dokumen oleh Yoshiaki Yoshimi, seorang professor dari Chuo University. Tuntutan pertanggung jawaban dari Tiongkok dan Korea tersebut seringkali muncul dalam hubungan bilateral mereka dengan Jepang sehingga memperkeruh hubungan mereka. Kedua negara ini mengecam usaha Jepang yang melakukan revisi buku sejarah atas peristiwa tersebut yang diajarkan di sekolah-sekolah Jepang. Gerakan ini dilakukan oleh kaum ultra-nasionalis Jepang dan disebut dengan istilah *historical revisionism* (Hayanto dan Bahri, 2019:2).

Gerakan ini melakukan interpretasi berbeda dengan sudut pandang yang berpihak pada Jepang, yaitu dengan memberikan justifikasi atas agresi Jepang tersebut dengan memunculkan imej tentara Jepang sebagai pahlawan perang. Imej ini tentu berbeda dalam pandangan korban *comfort women* yang melihat para tentara tersebut adalah penjahat perang. Perbedaan persepsi dan versi tersebut membuat hubungan Jepang dengan bekas jajahannya tersebut sering diwarnai dengan ketegangan akibat besarnya dampak psikologis dan traumatis bagi korban dan keluarganya. Kasus ini menambah panjang daftar isu keamanan Jepang yang seringkali memicu ketegangan dan konflik, termasuk dengan Tiongkok, sehingga hubungan mereka sering diistilahkan “hot and cold relationship” (Sagena, Moorthy, 2012). Walaupun masa peperangan Jepang dengan negara-negara ini telah lama berakhir dan telah terjadi normalisasi hubungan luar negeri, namun kasus tersebut masih menghantui negara-negara bekas jajahannya.

Kesimpulan

Kasus *comfort women* atau *jugunianfu* yang terjadi di masa

pendudukan Jepang di Asia merupakan isu sejarah lama namun masih menjadi problem dewasa ini. Sekalipun periode perang fisik telah selesai, namun efeknya masih dirasakan hingga dewasa ini berupa beban psikologis dan trauma perang yang masih menghantui korban-korbannya di negara-negara tersebut, seperti di Korea, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Berbagai isu dalam kasus tersebut menunjukkan aspeknya yang multidimensi dan saling berkaitan, bukan hanya melibatkan negara tetapi juga terutama individu-individu. Terdapat pula perbedaan persepsi dan versi, yaitu dalam pandangan negara-negara jajahannya, Jepang merupakan negara pelaku kejahatan perang yang telah menciptakan sistem brutal tersebut. Sedangkan bagi Jepang sendiri, para tentara itu adalah pahlawan Perang Dunia II yang dihormati hingga dibuatkan kuil khususnya itu Yasukuni Shrine. Kasus ini dapat didiskusikan dengan menggunakan dan mengelaborasi pendekatan keamanan tradisional (TS) dan non-tradisional (NTS) karena merupakan isu yang terus berlanjut (*on going issues*) yang kompleks, yang konteks serta cakupannya cukup luas. Di era kontemporer ini, kasus ini masih menghantui hubungan bilateral Jepang dengan negara-negara yang pernah dijajahnya sehingga kasus ini cukup penting untuk didiskusikan atau diteliti, dengan perpektif atau pendekatan konseptual yang berbeda pula.

Daftar Pustaka

Ariani, Maretiana Dwi, "Upaya Korea Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Kasus *Jugun-Ianfu* Tahun 1993-2019", *Skripsi*, FISIP Unmul, Samarinda 2021.

Buzan, Barry, "Rethinking Security After the Cold War", *Journal of Cooperation and Conflict*, London: Sage publication. Vol. 32(1): 5-28, 1997.

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers, 1998.

Coates, Veronica Kate, "A Critical Analysis of Walt's Concept of Security",

2014. Diakses dari [https://www.e-ir.info/2014/10/09/a-critical-analysis-of-walts-concept-of-security/Comfort Women Not Sex Slaves](https://www.e-ir.info/2014/10/09/a-critical-analysis-of-walts-concept-of-security/Comfort%20Women%20Not%20Sex%20Slaves) in http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2015/08/Comfort-Women-Not-Sex-Slaves_FINAL_annex.pdf

Hampson, Fen Osler, "Human Security", dalam *Security Studies: An Introduction*, Paul D. Williams (ed.), London-New York: Routledge, 2008.

Hartono, A. Budi, Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, dalam <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/jugun-ianfu-bagian-i/full>

Haryanto, Nadya Nabila, dan M. Mosaddeq Bahri, "Historical Revisionism dalam Isu Comfort Women sebagai Penghambat dalam Hubungan Jepang-Korea Selatan", *Skripsi*, FEB UI, Jakarta, 2016. Diakses dalam <http://lontar.ui.ac.id>, 22 Maret 2021.

Hicks, George, *The Comfort Women*, New York: W.W. Norton & Company, Ltd, 1997.

Sagena, Uni W, Ravichandran Moorthy, "Keamanan Energi dan Hubungan Kerjasama Cina-Jepang", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM*, Vol 16, No 2, 2012. Diakses dalam <https://doi.org/10.22146/jsp.10899>

Sagena, Uni W, "Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor", *Jurnal Interdependen*, Thn.1,Vo;1, Januari-April 2013.

Savitri, Dewi, "Kejahatan Perang oleh Jepang (Studi Kasus terhadap *Jugun-ianfu* sebagai Hegemoni Kebudayaan di Indonesia periode 1942-1945)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No, III Desember, 2010.

Walt, Stephen M., "The Renaissance of Security Studies", *International Studies Quarterly* 35, no. 2 (June 1, 1991): doi:10.2307/2600471.

STRATEGI KOPING PEREMPUAN PENYITAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diah Rahayu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
e-mail: rahayudiah77@gmail.com

Pendahuluan

Berbicara mengenai rumah tangga tak dapat dipisahkan dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP.) Nomor 21 Tahun 1994 (BKKBN, 1996). Dalam PP tersebut mengatur sembilan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga, antara lain fungsi; (a) Keagamaan, (b) Sosial, (c) Budaya, (d) Cinta kasih, (e) Perlindungan, (f) Reproduksi, (g) Sosialisasi dan pendidikan, (h) Ekonomi, dan (l) Pembinaan lingkungan. Perlu digarisbawahi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah perlindungan. Perlindungan dimaknai sebagai tempat berlindung dari segala hal yang dianggap mengancam kondisi rumah tangga. Namun, kenyataannya fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan banyak dikhianati oleh anggota keluarga itu sendiri.

Fenomena tingginya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga membuktikan adanya pengkhianatan fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan. Kekerasan merupakan penganiayaan baik secara fisik, psikis maupun seksual juga penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan secara massal seperti peperangan dan kekerasan personal seperti kasus

kekerasan dalam rumah tangga.

WHO menyatakan bahwa kekerasan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang kemungkinan mengakibatkan penganiayaan fisik, seksual, atau psikologis atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan publik atau kehidupan pribadi. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga contohnya pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan di rumah tangga, kekerasan terkait mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin dan tradisi lainnya. Selain itu praktik yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-suami istri dan kekerasan terkait dengan eksploitasi; kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di masyarakat umum termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan seksual dan intimidasi ditempat kerja di institusi pendidikan dan di tempat lain yang dijalankan secara terkoordinasi pada wanita seperti pelacuran paksa dan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dimaafkan oleh negara dimanapun (WHO, 2016).

Lembar catatan tahunan KOMNAS Perempuan tahun 2019 menunjukkan fakta kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kriteria WHO terus terjadi dan mengalami peningkatan jumlah kasus hingga 6% dibanding tahun sebelumnya. Catatan tahunan komisi nasional perempuan membagi kekerasan pada tiga ranah; *pertama*, ranah personal/privat jika pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. *Kedua*, ranah publik/komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. *Ketiga*, ranah negara jika pelaku kekerasan adalah aparaturnya negara dalam kapasitas tugas. Termasuk dalam kasus diranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut (Komnas Perempuan, 2020).

Kekerasan pada ranah personal atau domestik merupakan

kasus berulang setiap tahun yang paling sering terjadi atau memiliki angka tertinggi. Ini membuktikan bahwa fungsi keluarga dalam rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Mengapa hal ini terjadi? Summers dan Hoffman (2002) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab KDRT dari berbagai negara. Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap negara berbeda dalam memahami faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Negara Inggris dan Wales terdapat faktor ketidaksetaraan gender, pengucilan sosial, kemiskinan, adanya latar belakang sebagai kriminal dan pernah mengalami pelecehan saat usia anak merupakan faktor pencetus kekerasan. Selain itu faktor budaya yang menganut patriarki (didominasi laki-laki) dan perempuan memiliki status lebih rendah juga dianggap penyumbang faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadi masalah di Italia yang disertai pandangan bahwa agama menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi dan terisolasi sehingga dipandang sebagai penyakit sosial. Wanita yang dipukuli akan didorong untuk kembali kepada pasangan mereka yang kejam untuk melestarikan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga diabaikan dan bahkan dianggap “normal”.

Sebagian besar warga negara Australia melihat kekerasan dalam rumah tangga berakar pada sifat agresif laki-laki. Namun sebagian lagi melihat hal tersebut sebagai perilaku yang dipelajari. Faktor KDRT di Jamaika dianggap berasal dari kurangnya pendidikan, kemiskinan yang parah, penyalahgunaan narkoba, dan mitologi seputar peran tradisional laki-laki. Sementara Rusia, Jerman, dan Slovenia adanya perubahan politik diidentifikasi sebagai faktor penyumbang lain.

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lain, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terjadi karena adanya relasi kuasa yang menganggap bahwa peran satu anggota keluarga lebih tinggi dan berkuasa terhadap anggota lainnya dimaknai berhak untuk melakukan apapun atau memperlakukan anggota keluarga lainnya sesuai keinginannya. Budaya patriarki disinyalir sebagai salah satu yang mempengaruhi terjadinya kondisi ini. Hal ini diperkuat

dengan banyaknya data korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dibandingkan laki-laki.

Perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan dapat berakibat pada kondisi trauma. Kekerasan yang dialami oleh anak dalam rumah tangga dapat dipersepsikan sebagai pengkhianatan dan selanjutnya berkontribusi pada kesukaran dalam pemulihan dan berdampak trauma (Moroz, 2005). Trauma psikologis dapat terjadi akibat satu kejadian traumatis (akut) atau akibat paparan berulang (kronis) terhadap stres yang luar biasa (Terr, 1992 dalam Moroz, 2005). Hal ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kekerasan secara berulang akan berdampak trauma yang lebih mendalam.

Pada korban kekerasan yang mempersepsikan dirinya mengalami suatu tekanan hidup dan mengalami trauma maka secara alamiah akan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi tekanan tersebut. Upaya yang dilakukan ini dikenal dengan istilah koping atau strategi koping. Koping dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh latar belakang pemicu tekanan yang dialami. Koping akan mengarahkan untuk memperoleh makna baru dalam memecahkan atau memperbaiki situasi akibat trauma. Park (Werdel & Wicks, 2012) dalam penelitiannya menyoroti peran dari dua strategi, yaitu *problem focused coping* dan *emotional focused coping* pada individu setelah mengalami peristiwa stres.

Proses strategi koping mengarah pada proses penilaian terhadap makna dari peristiwa traumatik yang dialami oleh individu. Strategi koping yang berfokus pada problem atau *problem focused coping* lebih menekankan pada upaya-upaya individu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau menghilangkan sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Berbeda dengan strategi koping yang berfokus pada emosi atau *emotional focused coping* yang mengarah pada proses untuk menekan emosi kita agar dapat menerima peristiwa yang terjadi.

Peristiwa kekerasan yang dialami perempuan merupakan tekanan atau peristiwa hidup yang dapat berakibat pada tingkat stres dan trauma. Hal ini mendorong individu untuk melakukan upaya-upaya dalam

mengatasi hal tersebut. Masing-masing individu berproses untuk memilih strategi koping yang dianggap paling memungkinkan untuk dilakukan. Individu akan memilih strategi berdasarkan sistem yang sebelumnya telah ada termasuk kepercayaan religiusnya (Harrison *dalam* Wong & Wong, 2006).

Tulisan ini memberi gambaran terkait strategi koping apa yang dipilih oleh perempuan yang mengalami kasus kekerasan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Strategi Koping Berfokus Emosi sebagai Pilihan Upaya Menghadapi Tekanan Akibat Kekerasan

Tulisan ini berbasis pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020) mengenai bagaimana perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mampu untuk bangkit paska mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kekerasan domestik dengan korban tertinggi adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan data-data yang dihimpun oleh KOMNAS perempuan dan anak. Secara sekilas telah dijelaskan di latar belakang mengapa anak dan perempuan rentan terhadap kasus kekerasan. Salah satunya adalah adanya legitimasi kekerasan dalam keluarga yang bervariasi berdasarkan posisi status dalam keluarga.

Pada masyarakat patriarki, kekerasan pria terhadap istri dan anak-anak dilegitimasi oleh adat dan hukum (Vangelisti, 2004). Tantangan hukum dan politik untuk kekerasan terhadap istri dan anak-anak dimulai di Amerika Serikat dan Inggris selama abad ke-19. Sebuah gerakan global melawan kekerasan keluarga dilakukan pada akhir abad ke-20. Namun, sifat anggota keluarga yang tertutup cenderung menghambat upaya intervensi. Sebagian besar kekerasan dalam keluarga tidak disadari oleh mereka yang melakukan kontak dengan para korbannya.

Segala bentuk kekerasan dapat menimbulkan trauma pada korban baik kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual. Kondisi trauma menggiring individu secara kognitif mempertanyakan mengapa hal ini dapat terjadi pada dirinya. Kemudian diikuti dengan perenungan

yang seiring berjalannya waktu secara progresif dapat berubah menjadi perenungan yang menekankan pada kesadaran, kesengajaan dan bersifat reflektif (Tedeschi dkk., 2008). Proses perenungan tidak terjadi begitu saja tetapi dipengaruhi banyak faktor, antara lain optimisme, dukungan sosial dan strategi koping.

Strategi koping merupakan upaya yang dilakukan individu dalam menekan kondisi akibat stres. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2020) pada mahasiswa perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa strategi koping yang dominan digunakan oleh individu korban KDRT adalah *emotional focused coping* atau koping berfokus pada emosi. Strategi koping merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh korban kekerasan dengan cara individu berupaya mengalihkan permasalahan yang dihadapi dengan kegiatan yang berhubungan pada kegiatan peribadatan atau keagamaan atau *religious*. Istilah ini biasa dikenal dengan *prayer fuction* sebagai koping yang lebih mendekatkan diri, pasrah dan menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan yang memiliki kekuatan melebihi apapun dan siapapun. Harris dkk., (2010) mengkaji dalam penelitiannya menjelaskan bahwa doa berfungsi mencapai ketenangan dan agar dapat fokus kearah positif. Kondisi individu yang mengalami kekerasan interpersonal lebih efektif dengan strategi ini dibandingkan yang non personal. Efektif atau tidaknya dilihat dari kemampuan individu untuk bangkit atau tumbuh paska mengalami kasusu kekerasan. Salah satu contoh trauma interpersonal adalah kekerasan yang dialami secara personal seperti KDRT dan non personal contohnya kekerasan masal, misalnya peperangan.

Hal ini menguatkan bahwa terdapat kekuatan besar diluar diri manusia merupakan keyakinan untuk mampu bangkit dari keterpurukan. Komitmen dan partisipasi keagamaan dalam kegiatan keagamaan berkorelasi positif dengan kemampuan individu untuk tumbuh atau bangkit paska mengalami trauma (Shaw, Joseph, & Linley, 2005). Penelitian yang dilakukan pada korban penyiksaan terhadap muslim di Palestina menemukan bahwa orang-orang muslim yang selamat dari penyiksaan lebih banyak melibatkan diri dalam praktik keagamaan yang dapat meningkatkan keimanan mereka (misalnya lebih sering menghadiri

masjid). Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan individu untuk mengatasi trauma akibat kekerasan dan memiliki pertumbuhan yang signifikan paska trauma (Kira dkk., 2013).

Selain religiusitas atau pendekatan secara agama strategi koping yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami trauma akibat kekerasan adalah *positif reframing*, yaitu Individu cenderung melepaskan emosi yang dirasakan atau individu mengatur emosi yang berkaitan dengan stres yang dialami. Kecenderungan ini sering disebut dengan penilaian kembali secara positif. Perempuan yang mengalami KDRT untuk mampu bangkit dan kuat paska trauma yang dialami membutuhkan kemampuan proses perenungan secara sadar untuk mendapatkan makna positif terhadap kondisi yang dialami. Secara keseluruhan upaya ini merupakan strategi koping dengan pendekatan emosional. Meskipun beberapa teori menyatakan *emotional focused coping* merupakan strategi koping yang tidak efektif tetapi beberapa penelitian justru sebaliknya.

Strategi koping yang ketiga yang digunakan adalah *use of emotional support* atau mencari dukungan emosional. Perempuan korban kekerasan sangat membutuhkan dukungan emosional agar mampu mengatasi tekanan yang dialami. Dukungan emosional merupakan salah satu strategi koping yang berfokus pada emosi. Dukungan emosional merupakan ekspresi yang menunjukkan kepedulian, perhatian, cinta dan minat seseorang terhadap orang lain yang mengalami masa-masa sulit (Cutrona & Russell dalam Burlison, 2003). Perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama usia anak dan remaja sangat membutuhkan orang lain untuk membantu rasa takut dan kesal yang dia alami seperti keinginan untuk didengarkan, berempati, melegitimasi dan mengeksplorasi apa yang mereka rasakan.

Strategi Koping sebagai Jembatan antara Optimisme dengan Kemampuan Korban KDRT untuk Bangkit dari Trauma

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diusia anak atau remaja akan merasakan tekanan yang melampaui batas kemampuan dan diluar kendali. Penyebabnya adalah pada usia anak atau remaja masih sangat ketergantungan baik secara ekonomi maupun secara dukungan

sosial dengan orang tua. Oleh sebab itu individu akan melakukan proses kopingdimana individu akan memilih strategi berdasarkan sistem yang sebelumnya telah ada (Harisson dalam Wong & Wong, 2006). Individu yang optimis umumnya memiliki ekspektasi positif untuk masa depan, tidak akan terfokus pada kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini menjadikan individu-individu yang optimis memiliki penyesuaian psikologis yang lebih baik terhadap stress maupun peristiwa traumatis yang dialami (Dougall, Hyman, Hayward, McFeeley, & Baum, 2001 *dalam* Nes & Segerstrom, 2006).

Hal ini didukung oleh model transaksional milik Lazarus dan Folkman (Weiss & Berger, 2008). Lazarus berpendapat bahwa stres terdiri dari tiga proses. Proses pertama, yaitu penilaian primer, merupakan prosesdimana individu berusaha memahami ancaman yang terjadi pada dirinya. Proses kedua, yaitu penilaian sekunder, individu diingatkan untuk melakukan respons terhadap potensi ancaman. Proses ketiga adalah koping yaitu proses mengeksekusi respons tersebut (Carver dkk., 1989).

Berdasarkan proses tersebut maka kedudukan optimisme sebagai upaya penilai positif terhadap peristiwa traumatik sangat dibutuhkan. Pada prosesnya individu yang optimis akan berusaha memahami ancaman dari peristiwa yang terjadi. Pemahaman terhadap ancaman mendorong individu untuk mencari cara mengatasi ancaman tersebut. Individu yang optimis tidak mudah menyerah terhadap keadaan berbeda dengan individu yang pesimis (Nes & Segerstrom, 2006). Oleh sebab itu individu yang optimis cenderung mampu mencari upaya mengatasi masalah secara efektif. Asumsi utama model transaksional milik Lazarus adalah bagaimana individu menilai suatu peristiwa sehingga dapat mempengaruhi potensinya. Potensi ini berguna untuk membangkitkan reaksi negatif atau positif serta membentuk strategi koping untuk mengatasi permasalahan akibat peristiwa yang terjadi. Jika individu menghadapi peristiwa yang menegangkan, maka secara kognitif akan mengevaluasi arti atau makna dari peristiwa yang terjadi (Lazarus, 1993).

Proses kognitif merupakan proses yang dilakukan oleh individu agar mampu menerima dan berdamai dengan peristiwa trauma yang dialaminya. Individu yang mengalami peristiwa traumatik awalnya akan mengalami

kesedihan dan goncangan sehingga memengaruhi proses kognitif dan emosi yang terdistorsi. Untuk mengatasi distorsi individu akan melakukan perenungan guna mencari makna dari peristiwa yang dialaminya. Individu yang dapat memaknai secara cepat dan sadar akan lebih mudah untuk mengambil langkah atau upaya untuk mampu berdamai dengan keadaan.

Hubungan antara optimisme dan strategi koping dengan peristiwa kehidupan traumatis berfokus pada bagaimana cara yang lebih baik bagi optimis untuk mengelola peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Optimisme ditemukan secara positif terkait dengan langkah-langkah dalam menentukan koping. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020) perempuan yang mengalami KDRT ketika usia anak, seiring berjalannya waktu memiliki optimisme yang tinggi. Optimisme yang membawa individu untuk mencari upaya dalam proses penyelesaian masalahnya (Carver dkk, 2010). Selain itu, SolbergNes dan Segerstrom (2006) mengemukakan optimisme lebih terkait dengan *coping* yang berfokus pada masalah daripada koping yang berfokus pada emosi.

Orang yang optimis dapat mengatasi peristiwa yang dapat dikontrol dan tidak terkontrol dengan baik karena mereka menggunakan strategi koping secara tepat. Taylor dan rekan-rekannya (Colak, Akturk, & Bozo, 2012) menyatakan, jika *coping* yang berfokus pada masalah tidak dimungkinkan, individu yang optimis akan memilih strategi *coping* yang berfokus pada emosi adaptif. Pada penelitian yang telah dilakukan, *sampel* penelitian memiliki optimisme yang tinggi dan cenderung menggunakan koping yang berfokus pada emosi. Kondisi tersebut terjadi karena pada kasus KDRT subjek yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang tuanya cenderung menekan emosinya dan berusaha menghindari permasalahan yang ada serta menyeimbangkan afeksinya daripada mengatasi masalahnya secara langsung. Mengatasi masalahnya secara langsung berarti menekan pelaku kekerasan untuk tidak melakukan kekerasan. Secara teori kekerasan dilakukan salah satunya karena adanya perbedaan kekuasaan atau adanya individu yang berkuasa atas individu yang lain. Jika dilihat dari konteks KDRT yang dialami oleh sampel penelitian ini yang memungkinkan adalah emosional fokus koping. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa optimis memiliki kapasitas untuk

memahami aspek yang dapat dikendalikan dari peristiwa traumatis yang dirasakan sebagai hal yang tidak dapat dikendalikan.

Kesimpulan

Strategi koping atau usaha yang dilakukan oleh perempuan penyintas KDRT (khususnya mahasiswa di Samarinda yang pernah mengalami KDRT ketika kecil maupun remaja), lebih memilih menggunakan strategi koping yang berfokus pada emosi. Strategi koping ini lebih menekankan meningkatkan religiusitas, menggunakan *reframing positif* dan mencari dukungan emosional. Hal ini dilakukan karena pada kasus KDRT yang dialami terdapat dominasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagai korban. Strategi koping berfokus emosi dianggap strategi yang lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh korban. Optimisme dan dukungan sosial dari orang lain diluar lingkaran keluarga yang melakukan KDRT sangat dibutuhkan. Optimisme memungkinkan korban untuk memilih strategi koping yang lebih positif dan lebih efektif untuk membantu menghadapi permasalahan yang dialami. Dukungan sosial dari orang-orang terdekat akan menguatkan keyakinan dirinya terhadap strategi koping yang dipilih agar mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Daftar Pustaka

Burleson, B. R., The experience and effects of emotional support: What the study of cultural and gender differences can tell us about close relationships, emotion, and interpersonal communication, 10 July, 2002.

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C., "Optimism. *Clinical Psychology*", *Review*, 30(7), 879–889. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.006>, 2010.

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K., "Assessing coping strategies: A theoretically based approach", *Journal of Personality and Social Psychology*, 56(2), 267–283. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.2.267>, 1989.

Colak, C. B., Akturk, E. G., & Bozo, O., “Mediating Role of Coping in the Dispositional Optimism–Posttraumatic Growth Relation in Breast Cancer Patients”. *Journal of Psychology*, *146*(5), 471–483, 2012. <https://doi.org/10.1080/00223980.2012.654520>

Folkman, S., “Personal control and stress and coping processes: a theoretical analysis”, *Journal of Personality and Social Psychology*, *46*(4), 839–852, 1984. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.4.839>

Harris, J. I., Erbes, C. R., Engdahl, B. E., Tedeschi, R. G., Olson, R. H., Marie, A., Mcmahill, J., “Coping Functions of Prayer and Posttraumatic Growth”, *The International Journal for the Psychology of Religion*, *20*, 26–38, 2010. <https://doi.org/10.1080/10508610903418103>

Kira, I. A., Aboumediene, S., Ashby, J. S., Odenat, L., Mohanesh, J., & Alamia, H., “The Dynamics of Posttraumatic Growth Across Different Trauma Types in a Palestinian Sample”, *Jamal Mohanesh & Hala Alamia Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping*, *18*(2), 120–139, 2013. <https://doi.org/10.1080/15325024.2012.679129>

Komnas Perempuan, “Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”, Jakarta, 2020.

Lazarus, R. S., “Coping Theory and Research : Past, Present, and Future”, *247*, 234–247, 1993.

Moroz, K. J., “The Effects of Psychological Trauma on Children and Adolescents, Report Prepared for the Vermont Agency of Human Services Department of Health Division of Mental Health Child, Adolescent and Family Unit”, Nes, L. S., & Segerstrom, S. C., “Dispositional Optimism and Coping: A Meta-Analytic Review”, *Personal and Social Psychology Review*, *10*(214), 235–251, 2006. <https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1003>

Shaw, A., Joseph, S., & Linley, P. A., “Religion, spirituality, and posttraumatic growth: a systematic review”, *Mental Health, Religion & Culture*, *8*(1), 1–11, 2005. <https://doi.org/10.1080/1367467032000157981>

Summers, R. W., & Hoffman, A. M., “Domestic Violence: a global view”, *Organization*, 2002.

Tedeschi, R. G., Calhaoun, L. G., & Park, C. L., *Posttraumatic Growth : Positive change in the Aftermath of Crisis*. New Jersey: Taylor & Fancis Group, 2008.

Vangelisti, A. L., *Handbook of Family Communication*. (L. Bathgate, Ed.), London: Lawrwnce Erlbaum Associates, 2004.

Weiss, T., & Berger, R., *Trauma, Recovery and Growth. Positive Psychological Perspectives or Posttraumatic Stress*, 2008.

WHO, "Violence against women Definition and scope of the problem", *World Report on Violence and Health, 2016*.

Wong, P., & Wong, L., *Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping*, Canada: Springer Science, 2006.

STRES KERJA PADA PEKERJA PEREMPUAN DI REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dina Lusiana Setyowati, Rahman Baidawi, Reny Noviasty
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman
e-mail: dinalusiana@fkm.unmul.ac.id

Pendahuluan

Menurut *International Labour Organization* (ILO) perempuan memiliki perandominan dalam merawat keluarga sehingga total beban kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini terjadi karena semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan penting, maka semakin banyak perempuan yang bekerja pada tingkat stres kerja tinggi. Selain stres kerja terjadi juga ketidakadilan dan diskriminasi dari posisi yang lebih senior pada pekerja perempuan (ILO, 2016).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada pekerja Perempuan tahun 2019 sebesar 48,7 Juta atau 39 persen dari seluruh angkatan kerja. Menurut (KPPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beberapa lapangan pekerjaan yang diminati oleh perempuan, yaitu jasa pendidikan, bidang perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan pekerjaan pada pekerja perempuan bidang kependidikan dan kejuruan terlihat sangat dominan. Besarnya perempuan tamatan perguruan

tinggi yang bekerja pada bidang kependidikan dan keguruan sebanyak 25,63% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2016).

Menurut Ananda (2016) banyak hal yang melatarbelakangi perempuan memilih untuk bekerja, yaitu dari motif ekonomi, ingin membina karir, dan kesadaran bahwa pembangunan memerlukan tenaga kerja baik pria maupun perempuan. Dengan peran ganda, yaitu sebagai pekerja perempuan dan peran di rumah tangga, maka perempuan dapat mengalami stres. Teori ini juga sesuai dengan penelitian Sumarna, dkk (2015) pekerja perempuan lebih banyak mengalami stres dibandingkan pekerja pria. Hal ini akan terjadi pada perempuan karena muncul perubahan tingkat emosional secara umum sebagai akibat sampingan dari keadaan dan perubahan biologis serta karena perempuan memiliki emosi yang lebih meledak-ledak daripada laki-laki.

Penelitian Safitri L dan Izhar M Fihir (2015) pada karyawan pusat administrasi Universitas Indonesia yang melibatkan 100 responden yang bekerja di PAUI menunjukkan bahwa 28 % responden mengalami stres berat, 31 % stres sedang dan 41 % stres ringan. Faktor konten pekerjaan yang berhubungan dengan stres kerja karyawan adalah beban kerja, sedangkan secara signifikan faktor konteks pekerjaan yang berhubungan dengan stres kerja karyawan adalah hubungan interpersonal, tidak ada hubungan antara stres kerja dengan faktor konteks pekerjaan lain yang diteliti, yaitu lingkungan fisik kerja, gaji dan pengembangan karir. Beberapa hasil penelitian, di antaranya Jumilah (2015) pada pekerja perempuan di PT. Pelita Tomangmas Karanganyar menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara konflik peran dengan terjadinya stres kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Karima (2014) menyatakan bahwa ada hubungan antara ketaksaan peran dengan stres kerja. Penelitian oleh Saraswati (2017) ditemukan bahwa hubungan interpersonal dan dukungan sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stres kerja pada tenaga kerja. Penelitian Nurazizah (2017) menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tanggung jawab dengan terjadinya stres kerja.

Pekerja perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman dipilih

sebagai subyek penelitian karena memiliki risiko yang sama untuk mengalami stres kerja. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres kerja pada pekerja perempuan yang terdiri dari konflik peran, ketaksaan peran, hubungan interpersonal, beban kerja, tanggung jawab, aktivitas diluar pekerjaan, serta dukungan sosial.

Tinjauan pustaka

Definisi Perempuan Bekerja

Menurut Subandi (1998) *dalam* Herlambang (2013), perempuan bekerja adalah seorang perempuan yang melakukan aktivitas formal maupun non formal di tempat kerja yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Chusniah (2010) *dalam* Herlambang (2013) memaparkan bahwa perempuan bekerja merupakan seorang perempuan yang memiliki aktivitas di luar rumah misalnya guru, pedagang, buruh pabrik dan lainnya serta melakukan sebuah kegiatan yang menguras tenaga dan kemampuannya dalam melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan yang ingin diraihinya. Semua perempuan bekerja harus mempersiapkan diri menghadapi konflik, karena dimana pun mereka melakukan pekerjaannya, memungkinkan munculnya sutau konflik. Konflik berpotensi terjadi di suatu organisasi dapat bersifat organisasional maupun individual.

Perempuan Bekerja dan Permasalahannya

Peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. Hubeis (1985) *dalam* Suarmini mengatakan, perempuan memegang peranan strategis, yakni sebagai pekerja rumah tangga (mengatur rumah, membesarkan dan mengasuh anak), berperan sebagai pekerja transisi (bekerja dalam bidang usaha keluarga) dan sebagai pekerja diluar rumah tangga sebagai perempuan karir. Sesungguhnya perempuan memiliki potensi luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Mendidik generasi penerus bangsa sebagai pemberi pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sehingga perempuan perlu memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dibidang

teknologi informasi dan komunikasi agar dalam menjalankan perannya tersebut bisa optimal. Hal ini berdampak pada lahirnya generasi penerus bangsa yang cerdas dan memiliki hati nurani (Ni Wayan Suarmini, 2018).

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perempuan antara lain, seperti upah (gaji) yang tidak sebanding dengan gaji laki-laki. Walaupun besarnya upah pokok pegawai laki-laki dan perempuan sama, akan tetapi tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan diberikan antara pegawai perempuan dan laki-laki berbeda. Seorang pegawai perempuan yang memiliki status menikah atau lajang tetap dianggap berstatus lajang. Sehingga seorang pegawai perempuan yang telah menikah, hanya mendapat tunjangan untuk dirinya sendiri tanpa mendapatkan tambahan tunjangan untuk suami atau anaknya (Deka, 2009) *dalam* Herlambang (2013). Deka menambahkan bahwa perempuan yang bekerja masih memperoleh upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan mendominasi jenis pekerjaan dengan upah rendah dan kurang terlindungi serta mayoritas pekerjaan di sektor informal bersifat tidak tetap dan tanpa upah.

Permasalahan selanjutnya adalah perkembangan karir perempuan dibandingkan dengan laki-laki pada sektor publik menghadapi kendala lebih besar untuk melakukan mobilitas vertikal (kenaikan pangkat, posisi, jabatan) karena melekatnya ideologi *partriarkis* yang dominan. Selain itu peran-peran ganda seorang perempuan masa sekarang, selain mempunyai tanggung jawab di rumah sebagai seorang istri atau ibu, juga di luar rumah sebagai perempuan karir. Jika kedua peran tersebut tidak dapat berjalan dengan seimbang, maka dapat memungkinkan terciptanya kehidupan yang tidak harmonis. Pencapaian peran yang tidak seimbang dapat menimbulkan konflik peran ganda, yang pada akhirnya dapat memicu stres kerja pada perempuan yang bekerja (Rini, 2002) *dalam* Herlambang (2013).

Menurut Ananda (2016) salah satu motif seorang perempuan bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan. Aktivitas fisik dan mental bagi pekerja perempuan juga dapat menyebabkan kelelahan, baik kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Kelelahan mental yang berkepanjangan akibat beban pekerjaannya tentu berdampak pada aspek psikologi dimana

pekerja perempuan mudah mengalami cemas, stres dan bahkan sampai tingkat depresi. Pekerja perempuan juga rentan terhadap paparan bahaya lainnya yang ada di tempat kerja seperti bahaya faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi dan faktor ergonomi. Faktor bahaya fisik bisa berupa paparan kebisingan, pencahayaan, dan iklim kerja panas. Faktor bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi ini bisa menyebabkan beban tambahan akibat lingkungan kerja sehingga pekerja perempuan akan merasa bebannya bertambah akibat paparan bahaya ini.

Perlindungan Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Peraturan itu berupa Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Pasal 1 angka 2*, yaitu pengertian tenaga kerja; “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. *Pasal 5*, bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. *Pasal 6*, bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. *Pasal 67-101*, meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. *Pasal 76*, yaitu; (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00; (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00; (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib; a) memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara

pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. *Pasal 86*; (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Moral dan kesusilaan,

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi kesehatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3; (3) Upaya K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja /buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Pekerja Perempuan dan Stres Kerja *Pengertian Stres Kerja*

Menurut Robbins (2003) stres kerja adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya suatu individu menghadapi peluang, kendala (*constraints*) atau tuntutan (*demands*) yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya atau hasilnya diperselisihkan sebagai tidak pasti dan penting. Menurut Hasibuan (2003) stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang yang timbul akibat kepuasan kerja yang tidak terwujud dari pekerjaannya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi dan proses berpikir yang diakibatkan oleh adanya kesempatan atau peluang, tuntutan dan kendala atau hambatan di dalam pekerjaannya.

Indikator Stres Kerja

Robbins (2008) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator pengukur stres kerja, antara lain; 1. Tuntutan tugas, merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang, seperti kondisi kerja, tata kerja letak fisik; 2. Tuntutan peran, berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam suatu organisasi; 3. Tuntutan antar pribadi, merupakan tekanan yang diciptakan oleh pegawai lain; 4. Struktur organisasi, merupakan gambaran instansi yang diwarnai dengan struktur organisasi yang tidak jelas, kurangnya kejelasan mengenai jabatan, peran, wewenang,

dan tanggung jawab; 5. Kepemimpinan organisasi memberikan gaya manajemen pada organisasi beberapa pihak di dalamnya dapat membuat iklim organisasi yang melibatkan ketegangan, ketakutan dan kecemasan.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan Laili (2015), wanita karir yang menikah cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karir lajang. Perempuan karir yang menikah mempunyai tanggung jawab keluarga (suami dan anak), begitu juga perempuan karir lajang mempunyai tanggung jawab berbeda dari perempuan karir yang menikah. Perempuan menikah lebih banyak mengalami konflik antara keluarga dan pekerjaan, dibandingkan dengan perempuan lajang, hal ini dapat menyebabkan stres khususnya bagi buruh perempuan. Perempuan menikah yang bekerja menghadapi lebih banyak persoalan terkait dengan peran yang dihadapi, yaitu sebagai istri, ibu, pengurus rumah tangga dan seorang pekerja. Hal inilah yang menyebabkan stres bagi buruh perempuan (Greenhaus and Beutell, 2018).

Hasil penelitian Lady, dkk (2017) pada pegawai BPBD Kota Cilegon, bahwa dari 19 responden yang diteliti diketahui pegawai yang mengalami stres kerja sebanyak 9 orang, dan tidak stres 10 orang. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin, umur, jumlah anak, masa kerja, kebisingan, suhu, ventilasi, ketidakpastian pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan lain dan aktivitas luar pekerjaan dengan stres kerja. Penyebab stres kerja pada pegawai adalah tipe kepribadian, penilaian diri, pencahayaan, ketaksaan peran, konflik interpersonal, kurangnya kontrol, kurangnya kesempatan kerja, jumlah beban kerja, variasi beban kerja, kemampuan yang tidak digunakan, tuntutan mental dan dukungan sosial dengan stres kerja.

Herlambang (2013) menyatakan dampak yang ditimbulkan akibat dari stres kerja dapat berpengaruh terhadap organisasi atau instansi maupun individu itu sendiri. Dampak stres kerja terhadap organisasi diantaranya, yaitu terjadi hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja, kenormalan aktivitas kerja terganggu, menurunnya tingkat produktivitas kerja, menurunnya pemasukan dan keuntungan

perusahaan, terjadinya kerugian finansial yang dialami perusahaan karena tidak seimbang antara produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya serta banyaknya pegawai yang mangkir kerja atau pun pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu baik karena kelambanan maupun karena banyaknya kesalahan berulang. Dampak stres terhadap individu diantaranya adalah timbulnya berbagai permasalahan yang berhubungan kesehatan, psikologis, dan interaksi sosial.

Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta yang ada di lapangan sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Jika ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada pegawai perempuan yang diukur pada saat yang bersamaan.

Subjek Penelitian yang diteliti adalah pegawai perempuan yang bekerja di Rektorat Universitas Mulawarman. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai perempuan yang bekerja di Rektorat Universitas Mulawarman dengan jumlah pegawai perempuan secara keseluruhan adalah sebanyak 62 orang baik pegawai PNS maupun non PNS. Teknik *sampling* yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*, yaitu penentuan *sampel* dengan menggunakan semua populasi dijadikan sampel penelitian. Jumlah *sampel* yang digunakan dalam penelitian ini adalah total dari seluruh populasi pegawai perempuan yang bekerja di Rekotrat Universitas Mulawarman, yaitu sebanyak 62 orang.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu instrumen *NIOSH Generic Job Stress Questionnaire* yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pemilihan kuesioner ini karena memiliki variabel stres kerja yang lengkap untuk diukur meliputi variabel stres maupun variabel indikator stres. Daftar pertanyaan yang terdapat

di dalam kuesioner tersebut terdiri dari variabel penyebab dan indikator stres kerja berupa perubahan psikologis dan fisiologis. Indikator stres tersebut berupa perubahan perilaku tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan tidak sesuai untuk mengukur stres pada responden di Indonesia. Setiap item kuesioner menggunakan skala penilaian yang berbeda-beda yang menggunakan 5 skala likert dan ada juga yang menggunakan 7 skala likert. Analisis bivariat menggunakan uji *spearman rank* dengan tingkat signifikan 95 %.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan tentang data-data hasil penelitian, analisis data dan pembahasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Data-data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dan dilakukan pembahasan hingga diperoleh sebuah kesimpulan.

Karakteristik pada penelitian ini meliputi; jenis kelamin, umur, status pernikahan, status kepegawaian, lama bekerja di rektorat, dan lama kerja sesuai bidangnya yang sekarang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran karakteristik pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Perempuan Rektorat Universitas Mulawarman Berdasarkan Karakteristik Responden 2019

No	Variabel	Karakteristik	Frekuensi (n=62)	Persentase %
1.	Stres Kerja	Tinggi	4	6,5
		Sedang	37	59,7
		Rendah	21	33,9
2.	Jenis Kelamin	Perempuan	62	100
3.	Umur	20-29 tahun	16	25,8
		30-39 tahun	28	45,2
		40-49 tahun	11	17,7
		50-59 tahun	7	11,3

4.	Status Pernikahan	Belum Menikah	16	25,8
		Menikah	45	72,6
		Cerai Mati	1	1,6
5.	Status Kepegawaian	PNS	30	48,4
		Non PNS	32	51,6
6.	Lama Bekerja di Rektorat	0-10 tahun	42	67,7
		10-20 tahun	10	16,1
		21-30 tahun	9	14,5
		31-40 tahun	1	1,6
7.	Lama Bekerja di Bidanganya	0-10 tahun	46	74,2
		10-20 tahun	12	19,4
		21-30 tahun	3	4,8
		31-40 tahun	1	1,6

Berdasarkan distribusi frekuensi (59,7%) responden mengalami gejala stres sedang, dan (6,5%) responden mengalami gejala stres tinggi. Responden menyatakan perubahan fisiologis, seperti wajah terasa panas dan berkeringat banyak meskipun tidak bekerja dan cuaca tidak panas, mulut terasa kering, otot kaku dan tegang, merasa sakit, kram atau *migraine* di kepala, tangan gemetar, sesak nafas, sakit perut saat gugup, kehilangan nafsu makan, dan gangguan tidur malam hari serta perubahan psikologis, sulit berkonsentrasi, tertekan atau depresi, merasa ketakutan, gelisah ketika tidur, mudah menangis, merasa sedih, dan sulit mengalihkan perhatian.

Usia mayoritas responden antara 30-39 tahun sebanyak (45,2%), status pernikahan mayoritas responden, yaitu menikah sebanyak (72,6%), status kepegawaian responden, yaitu mayoritas pegawai Non PNS sebanyak (51,6%), lama kerja responden mayoritas antara 0-10 tahun sebanyak (67%), dan lama bekerja sesuai dengan bidangnya sekarang, yaitu 0-10 tahun sebanyak (74,2%). Hasil analisis univariat variable konflik peran, ketaksaan peran, hubungan interpersonal, beban kerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan lain. Aktivitas diluar pekerjaan, dukungan sosial sebagai berikut;

Tabel 2. Hasil Analisis Univariat Pegawai Perempuan Rektorat Universitas Mulawarman

Variabel	Frekuensi	Persentase (%)
Konflik Peran		
Ada konflik peran	18	29
Tidak ada konflik peran	44	71
Ketaksaan Peran		
Terjadi ketidakpahaman terhadap pekerjaan	36	58,1
Paham terhadap pekerjaan yang dilakukan	26	41,9
Hubungan Interpersonal		
Komunikasi terjalin dengan baik	62	100
Beban Kerja		
Beban kerja yang banyak	43	69,4
Beban kerja yang tidak banyak	19	30,6
Tanggung jawab terhadap pekerjaan lain		
ada tanggung jawab terhadap pekerjaan lain	32	51,6
tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan lain	30	48,4
Altivitas diluar pekerjaan		
Ada aktivitas diluar pekerjaan	61	98,6
Tidak ada aktivitas diluar pekerjaan	1	1,6
Dukungan Sosial		
Hubungan sosial terjalin dengan baik	58	93,5
Hubungan sosial tidak terjalin dengan baik	4	6,5
Total	62	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 29% responden mengalami konflik peran, responden menyatakan harus menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang berbeda, mendapatkan tugas tanpa adanya bantuan padahal membutuhkan bantuan, harus melanggar peraturan atau kebijakan untuk menyelesaikan tugas. Sebanyak 58,1% responden tidak paham terhadap pekerjaan yang dilakukan, responden menyatakan cara menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat diterima orang lain, menerima tugas tanpa sumber daya dan material yang cukup untuk

menyelesaikannya serta mengerjakan hal yang tidak penting.

Responden memiliki hubungan interpersonal baik sebanyak 100%. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan setuju yang diberikan responden tentang kerukunan antar pegawai, rasa kebersamaan, dan kerjasama antar pegawai. Sebanyak 69,4% responden memiliki beban kerja yang banyak. Responden menyatakan beban kerja seperti banyaknya beban kerja yang memperlambat, banyaknya waktu yang digunakan untuk berpikir dan merenung, banyaknya beban kerja dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Responden yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan lain sebanyak 51,6%. Responden menyatakan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan lain, seperti besarnya tanggung jawab terhadap masa depan orang lain, tanggung jawab terhadap keamanan kerja orang lain, tanggung jawab terhadap moral orang lain serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kehidupan orang lain.

Responden sebanyak 98,6% menyatakan memiliki aktivitas diluar pekerjaan. Responden menyatakan memiliki pekerjaan lain, memiliki anak di rumah serta tanggung jawab utama dalam mengurus anak, memiliki tanggung jawab membersihkan rumah, memiliki tanggung jawab merawat orang lansia atau cacat fisik, sedang sekolah atau mengambil kursus untuk mendapatkan gelar dan mengikuti organisasi.

Responden menyatakan memiliki dukungan sosial menganggap hubungan sosial terjalin dengan baik sebanyak 93,5%. Responden menyatakan memiliki dukungan social, seperti keberadaan atasan dan rekan kerja membuat pekerjaan lebih mudah, berdiskusi dengan atasan dan rekan kerja mengenai pekerjaan, atasan dan rekan kerja membantu ketika terjadi kesulitan saat bekerja. Hasil analisis bivariate dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Bivariat

Variabel	p
Konflik Peran	0,006*
Ketaksaan Peran	0,594*
Hubungan Interpersonal	0,010*
Beban Kerja	0,033*
Tanggungjawab terhadap pekerjaan	0,927
Aktivitas diluar pekerjaan	0,224
Dukungan Sosial	0,022*

Terdapat hubungan antara konflik peran dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman. Tidak terdapat hubungan antara ketaksaan peran dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman. Terdapat hubungan antara hubungan interpersonal dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman. Terdapat hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman. Tidak terdapat hubungan antara tanggung jawab terhadap pekerjaan lain dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman. Tidak terdapat hubungan antara aktivitas diluar pekerjaan dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman. Terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman.

Stres Kerja pada Pegawai Perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman

Penelitian ini menggunakan instrument pengukuran stres kerja dari *NIOSH Generic Job Stress Questionnaire* yang mengukur tingkat stres kerja berdasarkan gejala perubahan fisiologis dan psikologis dengan kategori gejala stres kerja tinggi, stres kerja sedang, dan stres kerja ringan. Pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman pada kegiatan administratif, seperti administrasi rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan lainnya yang bekerja dari hari Senin sampai Jum'at dimulai dari pukul 08:00 sampai pukul 16:00 atau 8 jam perhari.

Stres kerja merujuk pada kondisi dari suatu pekerjaan yang menjadi

ancaman pada individu itu sendiri. Stres kerja dapat terjadi karena ketidakharmonisan individu dengan lingkungan kerja maupun tuntutan pekerjaan yang tidak bisa diimbangi oleh individu tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut stres kerja dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu respon yang diantaranya terjadi perubahan fisiologis dan psikologis yang mengakibatkan munculnya penyakit. Stres kerja dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik yang berasal dari personal seseorang maupun karena faktor pekerjaan atau organisasi. Selain itu juga terdapat kejadian diluar pekerjaan yang mempengaruhi stres kerja tersebut.

Stres tidak hanya memberikan dampak yang tidak baik untuk individu maupun organisasi, namun stres juga memiliki fungsi diantaranya untuk jiwa, yaitu merupakan alat utama untuk memperkuat jiwa, tanpa stres seseorang tidak dapat meningkatkan kesadaran dan mengetahui ketidakmampuan yang dimiliki seseorang. Selain itu fungsi stres bagi tubuh secara garis besar adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan melindungi tubuh dari bahaya yang mengancam. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh memberikan respon yang dalam batas tertentu akan berakibat baik, namun jika berlebihan akan berdampak buruk (Donsu, 2017).

Stres apabila tidak segera diberikan penanganan maka dapat menimbulkan efek yang buruk seperti gejala-gejala yang sebelumnya telah dialami akan menimbulkan gangguan pada tubuh berupa penyakit. Oleh karena itu adanya manajemen stres sesuai dengan masalah yang menjadi pemicu terjadinya stres. Manajemen stres bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi jangka panjang atau stres kronis. Stres tidak selalu bisa dicegah karena selalu akan menjumpai situasi-situasi yang tidak terduga yang secara tidak langsung akan menjadi pembangkit dari stres. Sehingga hal yang perlu diusahakan adalah mempertahankan stres yang positif atau *eustress*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif (bersifat membangun).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stres kerja pada seseorang dapat dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat

Universitas Mulawarman, yaitu konflik peran, hubungan interpersonal, beban kerja, dukungan sosial, ketaksaan peran, tanggung jawab terhadap pekerjaan lain dan aktivitas diluar pekerjaan.

Hubungan Konflik peran dengan stress kerja

Konflik peran diartikan sebagai keadaan dimana seorang individu memiliki peran yang berbeda dalam waktu yang sama (Indrawan, 2015). Konflik peran timbul ketika pekerja mengalami adanya pertentangan tugas yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang dimiliki, tugas yang harus dilakukan yang menurut pekerja bukan merupakan bagian dari pekerjaannya, tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya, serta bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu melakukan tugas pekerjaannya (Munandar, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara konflik peran dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jumilah (2015) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara konflik peran dengan stres kerja. Peningkatan komunikasi dengan pegawai dapat mengurangi ketidakpastian yang menyebabkan terjadinya konflik peran dimana semakin banyak informasi yang diberikan mengenai tuntutan, tantangan serta kesempatan kerja maka dapat mengurangi konflik peran yang terjadi (Singh, 2014).

Hubungan Ketaksaan Peran dengan Stres Kerja

Ketaksaan peran berhubungan dengan ketidakjelasan dalam memberikan tugas pada pekerja atau pegawai, sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya frustrasi serta sulitnya pekerja mencapai kepuasan dalam bekerja. Ketaksaan peran dirasakan jika seorang pekerja tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti merealisasikan harapan yang berkaitan dengan peran tertentu. Informasi yang tidak jelas mengenai harapan yang harus dipenuhi membuat pekerja harus menjalankan peran yang beragam. Ketidakjelasan pekerja terhadap peran yang harus dijalankan menimbulkan stres di tempat kerja (Munandar, 2014). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara ketaksaan peran dengan stres kerja pada pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman sesuai dengan penelitian Yasa (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara ketaksaan peran dengan stres kerja. Tidak adanya hubungan ketaksaan peran dengan stres kerja dapat dilihat dari karakteristik responden, dimana sebagian besar pegawai sudah cukup lama bekerja (lebih dari 5 tahun: Yasa, 2017) menyatakan bahwa responden yang telah lama bekerja memiliki pengalaman, sudah terbiasa dengan tekanan kerja dan sudah terbiasa dengan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing sehingga ambiguitas pekerja tidak akan berpengaruh terhadap stres. Penelitian Karima (2014) menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara ketaksaan peran dengan stres kerja dapat dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menurut Munandar (2014) salah satu yang menyebabkan ketaksaan peran adalah kurangnya informasi yang didapat oleh pegawai atau pekerja untuk dapat melaksanakan tugasnya. Pencegahan ketaksaan peran dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi yang efektif (Singh, 2014). Komunikasi efektif dapat dilakukan antara atasan dan bawahan (atasan dengan bawahan) ketika *meeting* setiap departemen dilakukan atau setiap *briefing* yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Melalui hal tersebut, pegawai atau pekerja dapat menyampaikan hambatan yang dirasakan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan dan atasan dapat menyampaikan peran dan tanggung jawab pegawai secara jelas sehingga pegawai atau pekerja dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya serta dapat membantu pegawai dalam mengatasi hambatan yang dirasakan khususnya ketaksaan peran atau ambiguitas peran.

Hubungan Interpersonal dengan Stres Kerja

Hubungan interpersonal merupakan cara berkomunikasi seseorang dimana terjadi suatu proses terdapat pesan yang disampaikan dengan cara menyampaikan pesan yang dapat diterima oleh si penerima pesan. Hubungan interpersonal yang semakin baik berpengaruh baik pula terhadap individu. Namun hubungan interpersonal yang tidak baik pada suatu organisasi akan menimbulkan terjadinya suatu perselisihan atau

konflik pada pekerja, jika hal ini tidak segera diperbaiki maka akan memicu terjadinya kondisi yang akan menyebabkan terjadinya stres kerja dan menurunnya kinerja pekerja (Asrifah, 2015). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Saraswati (2017) yang menemukan hubungan interpersonal memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stres kerja pada tenaga kerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suparwati (2015) bahwa apabila hubungan interpersonal dilakukan sesuai dengan standar maka akan muncul hubungan yang harmonis, kemudian munculnya rasa saling menghormati dan saling *support* antara rekan kerja dan akan terjalinnya kerja sama dalam suatu lingkungan kerja serta motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik. Manajemen stres dengan mempertahankan hubungan interpersonal yang sudah baik dan memperbaiki hubungan interpersonal yang masih kurang. Hal ini juga dikemukakan Ratnaningrum (2012) bahwa manajemen tingkat stres yang efektif dapat mempertahankan rasa nyaman dan tenang dalam hubungan di lingkungan kerja sehingga beberapa urusan atau masalah akan diterima sebagai tantangan bukan ancaman. Pekerja harus mampu beradaptasi dengan hubungan interpersonal yang ada untuk meminimalisir terjadinya stres kerja.

Hubungan Beban Kerja dengan Stress Kerja

Beban kerja merupakan lama seseorang melakukan aktivitas pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kerja yang bersangkutan tanpa menunjukkan tanda kelelahan (Hariyono, 2014). Jumlah beban kerja merupakan suatu kondisi dimana pekerja memiliki sejumlah pekerjaan yang banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas sehingga pekerja memiliki ketidakmampuan untuk menangani beban kerja yang dihadapinya (Rahim, 2013). Penelitian Lady (2017) menyatakan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja. Dalam penelitian lain yang dilakukan Hoshino (2016) juga menyatakan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan terjadinya depresi dan stres kerja pada pekerja perempuan Jepang. Tingginya jumlah beban kerja yang dirasakan oleh pegawai atau pekerja, dapat terjadi karena merasa tidak mampu mengerjakan beban kerja yang terlalu banyak dan bervariasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian Soegiono (2014) yang menyatakan bahwa tuntutan tugas yang banyak dan beragam berdampak pada stres kerja. Barkhuizen (2015) menyatakan bahwa beban kerja yang berlebih namun tidak sesuai dengan jumlah waktu kerja yang tersedia dapat menjadi pemicu terjadinya stres kerja. Adanya jumlah beban kerja yang tinggi yang dirasakan oleh pegawai atau pekerja secara teoritis dapat mengganggu kesehatan pada pegawai atau pekerja. Molloy (2013), menyatakan tuntutan dan beban kerja yang berlebih dapat memicu munculnya stres di tempat kerja.

Tanggung jawab dalam pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab terhadap benda dan tanggung jawab terhadap orang lain. Memegang tanggung jawab terhadap orang lain secara signifikan dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner dibandingkan dengan memegang tanggung jawab terhadap benda. Semakin tua dan tinggi tanggung jawab maka semakin besar juga peluang terkena jantung koroner (Cooper, 2013). Penelitian Karima (2014) bahwa tidak ada hubungan signifikan antara tanggung jawab terhadap pekerjaan lain dengan stres kerja. Aldwin (2014) menjelaskan bahwa tanggung jawab biasanya beriringan dengan kemampuan pegawai atau pekerja dalam mengontrol pekerjaannya. Tanggung jawab yang tinggi apabila disertai dengan kemampuan mengontrol dengan baik, maka akan mampu menurunkan stres kerja. Langkah pencegahan tetap dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stres kerja apabila terjadinya peningkatan variabel ini ditempat kerja. Langkah yang dilakukan adalah mendesain ulang pekerjaan. Desain ulang pekerjaan dilakukan untuk menyesuaikan antara pekerjaan serta tanggung jawab yang harus dilakukan pegawai atau pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Karima, 2014). Selain itu dapat pula dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab pekerjaan kepada pegawai yang memiliki pekerjaan lebih sedikit guna mencegah terjadinya penumpukan tanggung jawab pada pekerjaan tertentu.

Hubungan Aktivitas diluar Pekerjaan dengan Stres Kerja

Aktivitas diluar pekerjaan adalah suatu aktivitas yang tidak berada dalam lingkungan pekerjaan, namun dapat mempengaruhi stres kerja

yang terjadi (Hurrell & Mc Laney (1988) dalam Rachman (2017)). Penelitian Karima (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara aktivitas diluar pekerjaan dengan stres kerja. Walaupun hampir semua pegawai perempuan di Rektorat Universitas Mulawarman memiliki aktivitas diluar pekerjaan seperti memiliki tanggung jawab dalam merawat anak, mengurus rumah, merawat keluarga yang sedang sakit serta aktif berorganisasi namun selama itu dikelola dan dikerjakan dengan baik dan benar maka tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. Aktivitas diluar pekerjaan diatas merupakan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh perempuan. Tuntutan diluar pekerjaan dapat berasal dari keluarga maupun tuntutan seseorang terhadap dirinya sendiri. Sama halnya seperti stres kerja dapat mempengaruhi kehidupan keluarga, maka tuntutan diluar pekerjaan juga dapat mempengaruhi kehidupan di lingkungan kerja, apabila dapat dikelola dan dimanajemen dengan baik maka tidak menimbulkan stres kerja (Nelson & Quick, 2013).

Hubungan Dukungan Sosial dengan Stres Kerja

Dukungan sosial merupakan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi stres kerja seseorang (Hurrell & Mc Laney (1988) dalam Rachman (2017)). Dukungan sosial yang baik berdampak positif bagi kesehatan pekerja. Hal ini karena lingkungan kerja yang baik dapat mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan stres. Selain itu, apabila dalam lingkungan kerja banyak terdapat sumber stres, dukungan sosial dapat menjadi penahan dampak negatif sumber stres di lingkungan tersebut (Koradecka, 2012). Hodson (2015), Jonshon (2014) mengemukakan bahwa dukungan sosial secara umum meningkatkan produktivitas kerja melalui peningkatan motivasi, dan kepuasan kerja. Selain itu dapat pula meningkatkan kesejahteraan psikologi, serta kesehatan fisik. Dukungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan seseorang dengan melindunginya dari dampak negatif akibat stres kerja yang tinggi serta membantu seseorang mengatasi keadaan stres yang dialami (Rout, 2015). Penelitian Dodiansyah (2013) menyatakan terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan stres kerja pada karyawan Solo Pos. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ambarwati (2014) juga menyatakan terdapat

hubungan antara dukungan sosial dengan stres kerja. Rahmawati (2014) mengemukakan bahwa dukungan yang diberikan terdiri dari dukungan penghargaan kepada pekerja yang bertujuan untuk mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Selain itu dapat pula berupa dukungan informatif seperti pemberian nasehat, saran penjelasan dan umpan balik yang bertujuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Kesimpulan

Pekerja perempuan memiliki risiko mengalami stres kerja akibat pekerjaannya. Faktor penyebab stress kerja pada perempuan bekerja yaitu antara konflik peran hubungan interpersonal, beban kerja, dukungan sosial sementara ketaksamaan peran, tanggung jawab terhadap pekerjaan lain dan aktivitas diluar pekerjaan tidak berhubungan dengan stres kerja. Oleh karena itu, pekerja perempuan harus mendapat perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan dirinya saat bekerja, agar terhindar dari bahaya, baik bahaya fisik maupun psikologisnya agar pekerja perempuan tetap sehat, selamat dan produktif serta tidak mengalami stres kerja. Pekerja perempuan sehat, selamat, produktif sehingga melahirkan keluarga yang sehat dan bahagia.

Daftar Pustaka

ILO, *Work Stress in The Context of Transition*, Budapest: ILO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2016. Bab III, "Akses terhadap Pasar Tenaga Kerja", 23-50.

<http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/81468-buku-statistik-gender-tematik-2016-page-36-65.pdf>

Ananda, M. R., "Self Esteem antara Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dengan yang Tidak Bekerja", *Jurnal Online Psikologi*, Vol. 01 No. 01, Thn. 2013.

Sumarna, D. P., Naiem, M. F., & Russeng, S. S., *Determinan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Karyawan Percetakan di Kota Makassar*, 1–15, 2015.

Herlambang, Bayu Pradana, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja pada Perempuan Berkerja di Wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan", Jakarta. *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah, 2013. Diakses pada tanggal 8 April 2019.

Ni Wayan Suarmini, S., "Perempuan, Peluang dan Tantangan Peran, *Prosiding Semateksos 3 Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018.

UU No 13 Tahun 2003 *tentang* Ketenagakerjaan

Robbins, *Organizational Behavior and Self Assessment Library*, Jakarta: Prenhallindo, 2003.

Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (edisi revisi), Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Laili, N., *Perbedaan Tingkat Stres Kerja antara Perempuan Karir Lajang dan Perempuan Karir Menikah di BANK BTN Perempuan Karir Lajang dan Perempuan Karir Menikah di BANK BTN*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J., "Sources of Conflict between Work and Family Roles Linked References are Available On JSTOR for This Article: Sources of Conflict between Work and Family Roles1", *Management*, 10(1), 76–88, 2018.

Lady, L., Wahyu, S., & Ade, M., *Analisis Tingkat Stres Kerja dan Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja pada Pegawai BPBD Kota Cilegon*, Cilegon: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

Safitri, L., & Izhar, M., F., *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja pada Karyawan Pusat Administrasi Universitas Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, 2015.

Jumilah, S. M., *Hubungan antara Konflik Peran Ganda dengan Stres Kerja pada Pekerja Perempuan di PT. Pelita Tomangmas Karangayar*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Karima, A., “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja pada Pekerja di PT. X”, Jakarta, 2014, *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah. Diakses pada tanggal 11 April 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id>

Saraswati, M., “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja pada Teknisi Pesawat Terbang Unit Base Maintenance di PT. X”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017. Diakses pada tanggal 11 April 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id>

Nurazizah, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap Kelas III RS. X. Jakarta, 2017, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Diakses pada tanggal 11 April 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id>

Donsu, Jelita, *Psikologi Keperawatan*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2017.

Indrawan, R., *Pengaruh Konflik Peran terhadap Stres Kerja dengan Ketidakpastian dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Munandar, Ashar, *Psikologi Industri dan Organisasi*, Penerbit Universitas Indonesia, 2014.

Singh, H., *Organizational Behaviour*, Neekuni Print Procces, India, 2014.

Yasa, I. W. M., *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Pegawai melalui Mediasi Stres Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bali*, Bali: Universitas Udayana, 2017. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2019.

Asrifah, “Pengaruh Human Relationship terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 2, 2015. Diakses pada tanggal 10 April 2019. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index>.

Suparwati, R & Kurniawati, “Hubungan Interpersonal dengan Tingkat Stres Kerja Perawat di Ruang Inap Dewasa RSUD Muhammadiyah Bantul”, *Naskah Publikasi*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiah: Yogyakarta, 2015. Diakses pada tanggal 1 September 2019.

Rantaningrum, Cilik, “Tingkat Stres Perawat di Ruang Psikiatri Intensif Rumah Sakit Dr. H. Marzoeqi Mahdir Bogor”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2012.

Hariyono, W., Suryani, D., Wulandari, Y., “Hubungan antara Beban Kerja, Stres Kerja dan Tingkat Konflik dengan Kelelahan Kerja Perawat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI Kota Yogyakarta”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2014.

Rahim, M. A., *Managing Conflic in Organization*, Transaction Publishers, United States of America, 2013.

Honsino, A., Amano, S., Suzuki, K., “Relationship between Depression and Stress Factors in Housework and Paid Work among Japanese Women”, *Hongkong Juornal of Occupational Therapy*, 27: 35-41, 2016.

Soegiono, P., *Pengaruh Kepemimpinan, Tuntutan Tugas, dan Karir Stagnan terhadap Stres Kerja dan Dampaknya bagi Komitmen Organisasi dan Organization Citizenship Behavior Karyawan PT. Alfa Retailindo Surabaya*, 2014.

Barkhuizen, N., “Occupational Stress of Academic Staff in South African Higher Education Institutions”, *South African Journal of Psychology*, 38: 321-336, 2015.

Molloy, Andrea, *Succes: Sukses bukan Mimpi*, Raih Asa Sukses, Depok, 2013.

Cooper, C. L., *From Stres to Wellbeing*, Palgrave Macmillan, New York, 2013.
Aldwin, C. M., *Stress, Coping, and Depeloument: An Integrative Persepective*, The Guilford Press, United States of America, 2014.

Rachman, Satrio Budi Prakosa, *Faktor Determinan terhadap Stres Kerja pada Pekerja Bagian Produksi PT. Indogravure*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Nelson, D., Quick, J., *Organizational Behavior: Science, The Real World and You, Cengange Learning*, United States of America, 2013.

Koradecka, D., *Handbook of Occupational Safety and Health*, CRC Press. USA, 2012.

Hodson, R., "Group Relations at Work Splidarity, Conflict, and Relations with Management Work and Occupation", *Journal of Applied Psychology*, 24: 426-452, 2015.

Rout, U. R., Rout, J. K., *Stress Management for Primary Health Care Professional*, Kluwer Academic: United States of America, 2015.

Dodiansyah, Khafidh Athma, *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Stres Kerja pada Karyawan Solo Pos*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Ambarwati, D., *Pengaruh Beban Kerja terhadap Stres Perawat IGD dengan Dukungan Sosial sebagai Variabel Moderating (Studi pada RSUP Dr. Kariadi Semarang)*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2014.

Rahmawati, O., *Hubungan Dukungan Pemimpin dengan Motivasi Kerja Perawat untuk Melanjutkan Pendidikan Keperawatan di Puskesmas Wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember*, Universitas Muhammadiyah Jember, 2014.

OBESITAS DAN KESEHATAN REPRODUKSI WANITA

Danial

Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman
e-mail: fkunmuldani67@gmail.com

Pendahuluan

Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang bertanggungjawab terhadap meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas (Aslan, Karadag and Bakan, 2019). Obesitas berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner (Tchernof and Despres, 2013). Secara spesifik pada wanita, obesitas juga berperan penting dalam gangguan reproduksi. Beberapa masalah yang terkait misalnya anovulasi, gangguan menstruasi, infertilitas, keguguran, dan kehamilan (Kurachi et al, 2005; Dag and Dilbaz, 2015). Dan juga berbagai bentuk keganasan, terutama *endometrium* (Passarello et al, 2019), dan payudara, (Dag and Dilbaz, 2015). Bahkan Sekitar 3,4 juta orang dewasa meninggal setiap tahun karena masalah kesehatan yang berhubungan dengan obesitas dan kelebihan berat badan (Marie et al, 2014). Obesitas tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, akan tetapi juga berbagai masalah lainnya seperti masalah sosial, psikologis dan ekonomi (Gurkas et al, 2014).

Tinjauan Pustaka

Tipe Obesitas

Obesitas dan kelebihan berat badan terjadi karena penumpukan lemak yang tidak normal dan berlebihan yang akan berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berdasarkan distribusi lemaknya, obesitas diklasifikasikan sebagai; 1) obesitas sentral atau abdominal atau obesitas bentuk apel atau tipe android; 2) *obesitas peripheral* atau *gluteal* atau obesitas bentuk *peer* atau *tipe gynoid*. Terkadang istilah obesitas dibagi menjadi obesitas umum, yang dinilai dengan indeks massa tubuh (IMT) dan obesitas sentral yang dinilai dengan lingkar pinggang (LP). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO), jika $IMT \geq 25 \text{ kg/m}^2$, dianggap *overweight*, sedangkan jika $IMT \geq 30 \text{ kg/m}^2$, dianggap obesitas. Demikian juga dengan LP $>88 \text{ cm}$ pada wanita dan $>102 \text{ cm}$ pada laki-laki dianggap obesitas sentral (Kulie et al, 2011). Akan tetapi penentuan klasifikasi obesitas berdasarkan IMT dan LP bervariasi berdasarkan etnis dan ras. Indonesia sendiri mengadopsi kriteria dari *Asia Pacific Standard for Obesity* (2000), yakni $23-24,9 \text{ kg/m}^2$ termasuk *over weight* dan $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ untuk obesitas dan $>90 \text{ cm for men and } >80 \text{ cm}$ dikategorikan obesitas sentral (Tabel 1).

Obesitas sentral atau abdominal disebut lebih berisiko dan dihubungkan dengan comorbiditas dan mortalitas (Tchernof and Despres, 2013). Obesitas *peripheral* secara umum berhubungan dengan perlemakan *subcutaneous* sementara obesitas *abdominal* lebih merujuk kepada perlemakan organ *visceral* (Labib, 2004).

Tabel 1. Klasifikasi obesitas berdasarkan IMT dan LP menurut WHO dan *Asia-Pacific Standar for Obesity*.

	WHO ($IMT=\text{kg/m}^2$)	Asia-Pacifik ($IMT=\text{kg/m}^2$)	WHO (LP=cm)	Asia-Pacifik (LP=cm)
overweight	25-29,9	23-24,9		
obesitas	≥ 30	≥ 25	>102 (pria) dan >88 (wanita)	>90 (pria) dan >80 (wanita)

Prevalensi dan Faktor Risiko Obesitas

Pada tahun 2013, diperkirakan sepertiga populasi dewasa dari penduduk bumi mengalami *over weight* atau obesitas dan diprediksi akan tetap meningkat di masa yang akan datang, khususnya pada negara-negara berkembang (Hruby and Hu, 2014). Sedangkan angka yang dirilis oleh WHO menunjukkan pada tahun 2016 lebih dari 1,9 milyar orang dewasa ≥ 18 tahun mengalami *over weight* dan lebih 650 juta diantaranya tergolong obesitas. Atau terdapat 39% orang dewasa ≥ 18 tahun mengalami (39% pria dan 40% wanita) mengalami *over weight*. Dan, secara keseluruhan 13% penduduk dewasa (11% pria dan 15% wanita mengalami obesitas (WHO, 2020). WHO juga mencatat 60% wanita di Amerika Serikat mengalami *over weight* dan pada banyak negara di Eropa, 30% wanita tergolong obesitas. Di beberapa negara di Asia, seperti di Arab Saudi obesitas sentral lebih banyak terjadi pada pria dibanding wanita, (Al Hazza et al, 2014). Di China obesitas umum lebih tinggi pada pria dibanding wanita. Akan tetapi untuk obesitas sentral, prevalensi lebih tinggi pada wanita (Wang et al, 2012).

Di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2007 prevalensi obesitas (berdasarkan IMT) 23,1% dan obesitas sentral (berdasarkan LP) 28%, dimana prevalensi pada wanita lebih tinggi pada kedua jenis obesitas ini, yaitu 28,6% dan 41,9%. Berdasarkan gender, prevalensi obesitas pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni 28,6% dan 16,%. Sedangkan obesitas sentral 41,9% dan 12,1% (Harbuwono et al, 2018).

Berbagai faktor risiko yang dikaitkan dengan berkembangnya obesitas. Secara umum berhubungan dengan faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik termasuk di dalamnya yang mengatur pola nafsu makan, aktifitas fisik, *metabolic rate*, perkembangan sel adiposa, hormonal dan faktor psikologis (Herrera and Lindgren, 2010). Demikian juga faktor lingkungan, yang meliputi pola makan berlebih dan kurangnya aktifitas fisik (Giskes et al, 2011; Qi and Cho, 2008).

Pengukuran Obesitas

Mengukur obesitas atau perlemakan tubuh secara langsung tidaklah mudah. Berbagai metode standar berbasis laboratorium yang biasa digunakan diantaranya: *Underwater Weighing*, *Dual-Energy X-ray*

absorptiometry (DEXA), Computerized Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) (Han and Lean, 2001). Akan tetapi penggunaan alat tersebut memerlukan tenaga terlatih, mahal dan tidak mudah didapatkan. Oleh karena itu, pengukuran perlemakan tubuh atau obesitas dilakukan dengan pendekatan atau pengukuran Antropometri. Selain biaya murah, cara ini juga mudah dan cepat dilakukan sehingga bisa diterapkan untuk skrining pada komunitas.

Berbagai jenis pengukuran antropometri yang lazim digunakan adalah; Indeks Massa Tubuh (IMT), yang merupakan pembagian berat badan (kg) terhadap tinggi badan (m)² (WHO, 1988); Lingkar Pinggang (SIGN, 1996; NIH, 1998), Tebal Lipatan Kulit (Han and Lean, 1994), Ratio Lingkar Pinggang terhadap Lingkar Panggul (Ashwell, Cole, Dixon, 1985); Ratio Lingkar Pinggang terhadap Lingkar Paha (Seidell et al, 1985); Diameter Sagital Abdomen (Kahn and Williamson, 1993)

Berat badan (BB) ditimbang dengan timbangan digital dengan skala terdekat 0,1 kg. Subjek diizinkan untuk memakai pakaian minimal, sepatu dan jaket dilepas. Tinggi Badan (TB) diukur dengan stadiometer dengan satuan terdekat 1 mm. Subyek berdiri tegap tanpa menggunakan alas kaki dan menghadap ke depan. Pengukuran berat dan tinggi badan digunakan untuk menghitung IMT, yang digunakan untuk menilai status gizi, kelebihan berat badan dan obesitas.

Lingkar pinggang LP) diukur dengan menggunakan pita dengan satuan terdekat 1 mm, dalam posisi berdiri dengan jarak antara kaki sekitar 20-30 cm. Pita dilingkarkan di pertengahan antara tepi rusuk bawah dan tepi atas tulang pinggul dengan pakaian tipis serta diukur pada akhir ekspirasi. Pengukuran Lingkar Panggul dilakukan dengan menggunakan pita baja horizontal dengan satuan terdekat 1 mm. Lingkar panggul maksimal diukur berdasarkan bagian terluas dari kedua *trochanter* pada posisi horizontal dengan jarak antar kaki 20-30 cm. Lingkar paha diukur pada tingkat lipatan gluteal (bokong) diukur dengan rileks. Tebal lipatan kulit diukur dengan menggunakan *caliper*.

Patofisiologi

Walaupun keterkaitan antara obesitas dengan dampak negatifnya

terhadap kesehatan reproduksi sudah lama diketahui, namun bagaimana mekanisme obesitas mempengaruhi sistem reproduksi masih menjadi perdebatan dan hingga saat ini masih terus didalami (Jungheim et al, 2012).

Mekanisme obesitas mempengaruhi sistem reproduksi sangat kompleks dan multi-faktorial. Beberapa mekanisme terlibat dalam hubungan gangguan kesuburan dan obesitas seperti resistensi insulin peningkatan kadar leptin dan hiperandrogenemia. Hormon seks pengikat globulin (SHBG), hormon pertumbuhan (GH), dan protein pengikat faktor pertumbuhan seperti insulin (IGFBP) menurun. Akibatnya terjadi gangguan neuroregulasi pada sumbu hipotalamus-hipofisis-gonad (HPG), yang pada akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi ovulasi dan kesehatan reproduksi (Dag and Dilbaz, 2015).

Hiperinsulinemia dan resistensi insulin adalah penyebab mendasar yang menyebabkan perubahan pada steroidogenesis. Insulin memiliki berbagai efek pada steroidogenesis, yaitu dengan merangsang produksi estrogen, androgen, dan progesteron ovarium secara *in vitro* (Rojas et al, 2014) Insulin juga berperan penting dalam mekanisme hiperandrogenemia. Insulin menurunkan produksi IGFBP-1 di hati dan membuat faktor pertumbuhan mirip insulin-1 (IGF-1) lebih efektif. Produksi androgen meningkat dari sel interstitial dan stroma teka dengan aksi IGF 1 (Giudice, 1992). Insulin menurunkan produksi SHBG dari hati dan sebagai akibatnya, kadar androgen serum meningkat pada wanita obesitas (Diamanti-Kandarakis and Dunaif, 1996). Hiperinsulinemia dan hiperandrogenemia secara umum mengubah fungsi ovarium pada wanita obesitas yang menyebabkan anovulasi, walaupun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami.

Mekanisme lain yang menjelaskan keterkaitan obesitas dengan gangguan reproduksi adalah Jaringan adiposa dan adipokin. Adipokin yang diproduksi oleh sel adiposa putih memiliki peran penting dalam regulasi dari sejumlah proses fisiologis seperti reproduksi, respon imun, dan metabolisme glukosa dan lipid. Perubahan kadar pada adipokin (tabel 2) seperti leptin, adiponektin, resistin, visfatin, omentin, dan ghrelin, bisa menyebabkan peradangan dan sinyal sel abnormal dan dengan demikian

bisa menyebabkan kerusakan metabolisme dan fungsi sel (Jungheim, 2012). Demikian pula dengan kelebihan atau kekurangan adiposa putih akan berefek pada gangguan pematangan seksual, gangguan pubertas, dan gangguan kesuburan (Mircea et al, 2007).

Tabel 2. Efek adipokin pada sistem reproduksi

Adipokin	Level pada obesitas	Efek pada sistem reproduksi
Leptin	Meningkat	Menghambat steroidogenesis ovarium yang di induksi insulin, menghambat Luteinizing Hormon, menstimulasi produksi estradiol oleh sel granulosa
Adiponectin	Menurun	Meningkatkan kadar insulin plasma
Resistin	Meningkat	Menyebabkan resistensi insulin
Visfatin	Meningkat	Meningkatkan sensitifitas insulin
Omentin	Menurun	Meningkatkan sensitifitas insulin
Chemerin	Meningkat	Merangsang steroidogenesis follicular

Leptin menghambat *steroidogenesis ovarium* yang diinduksi insulin dengan bekerja pada reseptor sel teka dan granulosa. Leptin juga menghambat produksi estradiol yang distimulasi LH oleh sel-sel *granulosa*. Efek lain dari leptin pada fungsi reproduksi adalah regulasi pembelahan dan perkembangan awal embrio. Ini mungkin menjelaskan hasil reproduksi yang buruk pada wanita gemuk (Moschos et al, 2002).

Adiponektin adalah sintesis protein bersirkulasi yang paling umum yang diukur oleh jaringan adiposa. Pada wanita gemuk terjadi penurunan kadar adiponektin (Metwally et al, 2007). *Adiponektin* merangsang penyerapan glukosa di hati dan otot dan menurunkan *glukoneogenesis* hati yang berakibat pada terganggunya sensitivitas insulin, kadar insulin plasma meningkat yang menyebabkan *hiperandrogenemia* (Dag and Bilbaz) 2015.

Mekanisme adipokin lain pada fungsi reproduksi seperti resistin,

visfatin, dan ghrelin belum sepenuhnya dipahami. Akan tetapi, hampir semua adipokin tampaknya memiliki efek pada reproduksi melalui mekanisme resistensi insulin (Dag and Bilbaz, 2015).

Obesitas pada Wanita Menopause

Pada wanita yang telah menopause seringkali mengalami peningkatan berat badan dan lingkaran pinggang akibat redistribusi lemak *androidal*. Pada wanita di atas usia 40 tahun atau menjelang menopause, 65% mengalami kelebihan berat badan dan hingga 30% atau lebih menjadi obesitas (Stachowiak and Pertyński, 2015 ; Xi et al, 2012). Hal ini disebabkan karena menurunnya estrogen akibat proses penuaan ataupun menurunnya aktifitas fisik (Lizcano and Guzmán, 2014; McInnes et al, 2012). Hal itu akan merusak pengaruhnya terhadap petanda inflamasi dan adipokines, menyebabkan meningkatnya obesitas sentral (Lee et al, 2009). Kerusakan pada *adipokines* (mis. IL-1, IL-6, leptin, resistin dan TNF- α) memainkan peran sentral dalam *patofisiologi* penyakit *kardiovaskuler*, *sindroma metabolik*, *diabetes melitus*, *resistensi insulin*, *dislipidemia*, *hipertensi*, *aterosklerosis*, *steatohepatitis non-alkoholik* (NASH) dan keganasan (Redinger, 2007).

Obesitas dan Gangguan Fungsi Reproduksi Infertilitas, Anovulasi dan Gangguan Menstruasi

Infertilitas atau kemandulan dimaksudkan sebagai ketidakmampuan untuk hamil dengan hubungan seksual yang tidak terhalangi. Hal ini sangat erat hubungannya dengan keadaan anovulasi atau ketidaksuburan (Bolumar et al, 2000). Di beberapa studi, ditemukan bahwa risiko infertilitas tiga kali lipat lebih tinggi pada wanita dengan obesitas dibandingkan wanita non-obesitas (Rich-Edwards et al, 1994). Wanita yang mengalmai obesitas di awal masa dewasa akan mempengaruhi fungsi reproduksi sehingga risiko masalah menstruasi dan infertilitas meningkat. (Lake et al, 1997).

Obesitas menyebabkan infertilitas melalui berbagai mekanisme, antara lain gangguan perkembangan *folikel ovarium*, perkembangan *oosit* secara kualitatif dan kuantitatif, pembuahan, perkembangan embrio, dan implantasi (Jungheim et al, 2013). Walaupun hubungan antara obesitas

dan kesuburan belum sepenuhnya dipahami. Tapi kuat dugaan bahwa penyebab infertilitas adalah anovulasi yang berlangsung lama karena *hiperandrogenisme*.

Pada wanita dengan obesitas, *hiperandrogenemia* terjadi akibat *hiperinsulenemia* yang menyebabkan terjadinya apoptosis sel *granulosa*, dan ini berpengaruh pada fungsi *ovarium*. (Willis et al, 1998). Insulin juga berpengaruh kepada FSH untuk memproduksi *estradiol* dan *progesteron*. Seperti pada wanita dengan *Poly cystic Ovary Syndrome* (PCOS) dengan resistensi insulin. Insulin juga meningkatkan *steroidogenesis* dengan menambah efek LH pada sel granulosa. LH merangsang *steroidogenesis* dan menghambat mitosis lebih lanjut dan diferensiasi akhir sel *granulosa* di *folikel praovulasi* (Hillier, 1994). PCOS adalah salah satu gangguan hormonal yang banyak terjadi pada wanita di masa reproduksi. Biasanya ditandai dengan gangguan menstruasi berupa *oligo-amenorrhoea* yang sering kali berakibat terganggunya fertilitas (Barber et al, 2019). Demikian pula dengan meningkatnya kadar leptin pada obesitas menyebabkan hambatan perkembangan sel *follikel ovarium* dan *steroidogenesis*, yang berkontribusi terjadinya infertilitas pada wanita yang mengalami obesitas (Syah, 2009).

Obesitas juga mempengaruhi sumbu HPG oleh peningkatan kadar estrogen karena peningkatan konversi androgen menjadi estrogen dalam jaringan adiposa. Peningkatan estrogen menyebabkan penurunan GnRH melalui umpan balik negatif. akibat, sumbu HPG yang terganggu menyebabkan siklus ovulasi tidak teratur atau anovulasi. Wanita dengan berat badan berlebih dan obesitas memiliki insiden lebih tinggi untuk disfungsi menstruasi dan anovulasi (Grodstein et al, 1994).

Gangguan Kehamilan dan Keguguran

Wanita yang mengalami obesitas sebelum kehamilan berpeluang mengalami komplikasi dalam kehamilannya, seperti munculnya hipertensi, *pre eclampsia*, *gestational diabetes*, kesulitan dalam tindakan seksio cesaria dan kematian pada bayinya (Kulie et al, 2011). Selain itu angka anomali pada janin seperti kelainan *neural tube*, *spina bifida* dan gangguan jantung dan pembuluh darah juga meningkat pada ibu yang mengalami obesitas (Weintraub et al, 2008).

Prevalensi kasus keguguran yang berhubungan dengan obesitas juga meningkat (Lashen and Sturdee, 2004). Resiko keguguran ditemukan 38,1% pada wanita gemuk, sedangkan angka ini adalah 13,3% pada pasien dengan IMT normal (Bellver et al, 2003). Walaupun demikian belum kesepakatan terhadap mekanisme yang mendasarinya. Kemungkinannya adalah karena obesitas dapat mempengaruhi embrio atau endometrium atau keduanya (Metwally et al, 2007). ataupun mempengaruhi proses implantasi hasil pembuahan dan perkembangan awal kehamilan. (Bellver, et al, 2011).

Penyakit Keganasan

Secara umum obesitas berhubungan erat dengan berbagai penyakit kanker Pada wanita pascamenopause, IMT tinggi terutama terkait dengan peningkatan risiko payudara dan endometrium (Reeves et al, 2007; De Pergola and Silvestris, 2013). dan peningkatan rasio pinggang: pinggul dengan kanker payudara (Kaaks et al, 2002; Harvie et al, 2003). Meningkatnya risiko wanita obesitas mengalami berbagai macam kanker dikaitkan dengan meningkatnya estrogen endogen (Chang et al, 2007). Beberapa jenis keganasan yang sering dijumpai seperti:

1. Kanker endometrium

Kanker endometrium atau rahim berhubungan erat dengan obesitas. Pada wanita *premenopause estradiol* menyebabkan proliferasi dan potensi perubahan neoplastik. Selain itu, pada wanita obesitas *premenopause* maupun *postmenopause*, peningkatan insulin dan androgen menurunkan produksi globulin pengikat hormon seks. Ini menyebabkan makin meningkatnya kadar estrogen pada wanita *pascamenopause* (Kulie et al, 2011). Wanita obesitas mempunyai risiko 2-3 kali lipat untuk mengalami kanker endometrium (Purdie and, Green, 2001) dan paling tidak 40% dari insiden kanker endometrium terjadi pada wanita yang mengalami obesitas (Calle et al, 2003). Pada wanita *pascamenopause* yang mengalami obesitas sentral, kejadian kanker endometrium dihubungkan juga dengan resistensi insulin yang merupakan agent mitogenic, yang memungkinkan terjadinya kanker endometrium. (Harvie et al, 2003). Menurut *American Cancer Society*, wanita dengan IMT >40 kg/m²

berisiko 6,25 kali mengalami kematian akibat kanker endometrium (Schouten, 2008).

2. Kanker Ovarium

Obesitas juga merupakan faktor risiko terjadinya kanker ovarium (Lane, 2007) yang dominan terjadi pada wanita pascareproduksi (Foong and Bolton, 2017). Meningkatnya kasus kanker ovarium pada wanita obes dihubungkan dengan mekanisme hormonal, yaitu meningkatnya kadar estrogen (Kaaks et al, 2002).

3. Kanker Payudara

Obesitas juga berhubungan erat dengan terjadinya kanker payudara utamanya *pascamenopause* (De Pergola and Silvestris, 2013; Kuhl, 2005). Diduga bahwa hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi serum estradiol. Pada obesitas juga terjadi resistensi Insulin dan hiperinsulinemia yang mana insulin yang berefek anabolik pada metabolisme sel memicu terjadinya kanker. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya ekspresi reseptor insulin pada kanker payudara (Syah et al, 2014).

4. Manajemen Obesitas

Obesitas juga berhubungan erat dengan terjadinya kanker payudara utamanya *pascamenopause* (De Pergola and Silvestris, 2013; Kuhl, 2005). Diduga bahwa hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi serum estradiol. Pada obesitas juga terjadi resistensi Insulin dan hiperinsulinemia yang mana insulin yang berefek anabolik pada metabolisme sel memicu terjadinya kanker. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya ekspresi reseptor insulin pada kanker payudara (Syah et al, 2014).

Kesimpulan

Obesitas pada wanita merupakan masalah kesehatan serius yang semakin meningkat prevalensinya. Faktor risiko obesitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Obesitas pada wanita berkontribusi terhadap munculnya berbagai masalah kesehatan pada sistem reproduksinya. Berbagai mekanisme terjadinya penyakit pada sistem reproduksi wanita yang berhubungan dengan obesitas masih perlu untuk

didalami. Manajemen obesitas dengan gangguan sistem reproduksi pada wanita dapat dilakukan dengan memperbaiki gaya hidup dan pendekatan medis.

Daftar Pustaka:

Aslan G, Karadag S, Bakan AB., “Obesity and Risk Factors in Women Aged Between 18 And 64”, *International Journal of Caring Sciences, Volume 12 | Issue 1 | Page219*, Tchernof A, Despres JP (2013), Pathophysiology of Human Visceral Obesity: an update, *Physiol Rev* 93: 359-404, 2019.

Kurachi H, Takahashi K, Abe A, Ohmichi M, *Women and Obesity*, JMAJ 48(1): 42– 46, 2005.

Dağ O, Dilbaz B., *Impact of Obesity On Infertility in Women*, Zeynep J Turk Ger Gynecol Assoc 2015; 16: 111-7, 2015.

Passarello K, Kurian S, Villanueva V, *Endometrial Cancer: an Overview of Pathophysiology, Management, and Care*, Semin Oncol Nurs.;35:157-165.

Kulie T, Slattengren A, Redmer J, Counts H, *Eglash A and Schragger S. Obesity and Women’s Health: An Evidence-Based Review*, (J Am Board Fam Med 2011;24:75– 85.

Labib M, “Investigation and Management of Obesity”, *Medi- link Journal*, 5 (3), 16-24 Hruby A, Hu FB. (2014), The Epidemiology of Obesity: A Big Picture Pharmacoeconomics. DOI 10.1007/s40273-014-0243-x.

W.H.O, *Obesity and Overweight*, 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.

Al-Hazaa HM, Abahussain NA, Al-Sobayel HI, Qahwaji DM, Alsulaiman NA, Musaiger AO, *Prevalence of Overweight, Obesity, and Abdominal Obesity Among Urban Saudi Adolescents: Gender and Regional Variations*, J Health Popul Nutr.;32(4):634–45, 2014.

Wang H, Wang J, Liu MM, Wang D, Liu YQ, Zhao Y, et al., *Epidemiology of*

General Obesity, Abdominal Obesity and Related Risk Factors in Urban Adults from 33 Communities of Northeast China: The CHPSNE Study, BMC Public Health.;12:967, 2012.

Harbuwono DS, Pramono LA, Yunir E, Subekti I, “Obesity and Central Obesity in Indonesia: Evidence from A National Health Survey”, *Medical Journal of Indonesia*, 2018.

Herrera BM, Lindgren CM., *The Genetics of Obesity*, Curr Diab Rep. Dec;10(6):498- 505, 2010.

Giskes K, van Lenthe F, Avendano-Pabon M, Brug J., *A Systematic Review of Environmental Factors and Obesogenic Dietary Intakes Among Adults: Are We Getting Closer to Understanding Obesogenic Environments?*, Obes Rev. May;12(5):e95-e106, 2011.

Qi L, Cho YA., *Gene-environment Interaction and Obesity*, Nutr Rev. Dec;66(12):684- 94. 2008.

Han TS & Lean MEJ, “Anthropometric Indices of Obesity and Regional Distribution of Fat Depots”, In *International Textbook of Obesity*, Edited by Per Bjorntorp. John Wiley & Sons, LTD, Brisbane, 2001.

World Health Organization, *Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic*, Geneva: World Health Organization, WHO/NUT/NCD/98.1, 1998.

Scottish Intercollegiate Guidelines Networ, *Obesity in Scotland. Integrating Prevention with Weight Management*, Edinburgh: Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 1996.

National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute, *Clinical guidelines on the Identiffication, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults—the Evidence Report*, Bethesda, 1998.

Ashwell M, Cole TJ, Dixon AK., *Obesity: New Insight Into the Anthropometric Classification of Fat Distribution Shown by Computed Tomography*, *BMJ*; 250: 1692—1694, 1985.

Seidell JC, Bakx E, de Boer E, Deurenburg P, Hautvast JGAJ, *Fat Distribution*

of Overweight Persons in Relation to Morbidity and Subjective Health, Int J Obes; 9: 363—374, 1985.

Kahn HS, Williamson DF, *Sagittal abdominal diameter*, Int J Obes; 17: 187—196, 1993.

Jungheim ES, Travieso JL, Carson KR, Moley KH, , 39: 479-93, 2012.

Rojas J, Chávez M, Olivar L, Rojas M, Morillo J, Mejías J, Calvo M, and Bermúdez V., *Polycystic Ovary Syndrome, Insulin Resistance, and Obesity: Navigating the Pathophysiologic Labyrinth*, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Reproductive Medicine Volume, Article ID 719050, 17 pages, 2014.

Giudice LC., *Insulin-like Growth Factors and Ovarian Follicular Development*, Endocrine Rev;13: 641-69, 1992.

Diamanti-Kandarakis E, Dunaif, *A New perspectives in polycystic ovary syndrome*, Trends Endocrinol Metab; 7: 267-71, 1996.

Mircea CN, Lujan ME, Pierson RA., *Metabolic Fuel and Clinical Implications for Female Reproduction*, J Obstet Gynaecol Can; 29: 887-902, 2007.

Moschos S, Chan JL, Mantzoros CS., *Leptin and reproduction: a review*, Fertil Steril; 77: 433-44, 2002.

Metwally M, Li TC, Ledger WL., *The Impact of Obesity on Female Reproductive Function*, Obes Rev; 8: 515-23, 2007.

Stachowiak G, Pertyński T, Pertyska-Marczewska M., *Metabolic Disorders in Menopause*, Prz Menopauzalny 14: 59-64, 2015.

Lizcano F, Guzmán G., *Estrogen Deficiency and the Origin of Obesity During Menopause*, Biomed Res Int: 757461, 2014.

McInnes KJ, Andersson TC, Simonyt Å K, Saderstram I, Mattsson C, et al., *Association of 11-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type I Expression and Activity with Estrogen Receptor β in Adipose Tissue from Postmenopausal Women*, Menopause 19: 1347-1352, 2012.

Lee MS, Kim JI, Ha JY., Boddy K, Ernst E., *Yoga for Menopausal Symptoms: A Systematic Review*, *Menopause* 16: 602-608, 2009.

Redinger RN., *He Pathophysiology of Obesity and its Clinical Manifestations*, *Gastroenterol Hepatol (N Y)* 3: 856-863, 2007.

Bolumar F, Olsen J, Rebagliato M, Saez-Lloret I, Bisanti L., *Body Mass Index and Delayed Conception: A European Multicenter Study on Infertility and Subfecundity*, *Am J Epidemiol*; 151: 1072-9, 2000.

Rich-Edwards JW, Goldman MB, Willet WC, Hunter DJ, Stamfer MJ, Colditz GA, et al., *Adolescent Body Mass Index and Infertility Caused by Ovulation Disorders*, *Am J Obstet Gynecol*; 171: 171-7, 1994.

Lake JK, Power C, Cole TJ., *Women's Reproductive Health: The Role of Body Mass Index in Early and Adult Life*, *Int J Obes Relat Metab Disord*; 21: 432-38, 1997.

Jungheim ES, Travieso JL, Hopeman MM., *Weighing the Impact of Obesity on Female Reproductive Function and Fertility*, *Nutr Rev*; 71: 3-8, 2013.

Barber TM., Hanson P, Weickert MO and Franks S., *Obesity and Polycystic Ovary Syndrome: Implications for Pathogenesis and Novel Management Strategies*, *Clinical Medicine Insights: Reproductive Health* Volume 13: 1-9, 2019.

Shah M., *Obesity and Sexuality in Women*, *Obstet Gynecol Clin N Am*;36:347-60, 2009.

Weintraub AY, Levy A, Levi I, Mazor M, Wiznitzer A, Sheiner E., *Effect of Bariatric Surgery on Pregnancy Outcome*, *Int J Gynaecol Obstet*;103:246 -51, 2008.

Lashen H, Fear K, Sturdee DW., *Obesity is Associated with Increased Risk of First Trimester and Recurrent Miscarriage: Matched Case Control Study*, *Hum Reprod* 19: 1644-6, 2004.

Bellver J, Rossal LP, Bosch E, Zuniga A, Corona JT, Melendez F, et al., *Obesity and the Risk of Spontaneous Abortion after Oocyte Donation*, *Fertil Steril*; 79: 1136-40, 2003.

Metwally M, Tuckerman EM, Laird SM, Ledger WL, Li TC., *Impact of High Body Mass Index on Endometrial Morphology and Function in the Peri-implantation Period in Women with Recurrent Miscarriage*, *Reprod Biomed Online*; 14: 328-34, 2007.

Bellver J, Cruz F, Martínez MC, Ferro J, Ramírez JF, Pellicer A, Garrido N., *Female Overweight is not Associated with a Higher Embryo Euploidy Rate in First Trimester Miscarriages Karyotyped by Hysteroembryoscopy*, *Fertil Steril*; 96: 931-3, 2011.

Reeves GK, Pirie K, Beral V, Green J, Spencer E, et al., *Cancer Incidence and Mortality in Relation to Body Mass Index in the Million Women Study: cohort study*, *BMJ* 335: 1134, 2007.

De Pergola G, Silvestris F., *Obesity as a Major Risk Factor for Cancer*, *J Obes* 2013: 291546, 2013.

Kaaks R, Lukanova A, Kurzer MS., *Obesity, Endogenous Hormones, and Endometrial Cancer Risk: A Synthetic Review*, *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*;11:1531– 43, 2002.

Harvie M, Hooper L, Howell AH., *Central Obesity and Breast Cancer Risk: A Systematic review*, *Obes Rev* 4: 157-173, 2003.

Chang S, Lacey JV, Brinton LA, et al., *Lifetime Weight History and Endometrial Cancer Risk by Type of Menopausal Hormone use in the NIH-AARP Diet and Health Study*, *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*;16:723–30, 2007.

Purdie DM, Green AC., *Epidemiology of Endometrial Cancer*, *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*;15:341–54, 2001.

Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, Thun MJ., *Overweight, Obesity and Mortality from Cancer in a Prospectively Studied Cohort of US Adults*, *N Engl J Med*;348:1625–38, 2003.

Schouten LJ, Rivera C, Hunter DJ, et al., *Height, Body Mass Index, and Ovarian Cancer: A Pooled Analysis of 12 Cohort Studies*, *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*;17:902– 12, 2008.

Foong W, and Bolton H., *Obesity and Ovarian Cancer Risk: A Systematic Review* *Ke, Post Reproductive Health* 0(0) 1–16, 2017.

Lane G., *Obesity and Gynaecological Cancer*, *Review Menopause International* 2008; 14: 33–37, 2007. DOI: 10.1258/mi..007036

De Pergola G, Silvestris F., *Obesity as a Major Risk Factor for Cancer*, *J Obes* 2013: 291546, 2013.

Kuhl H., *Breast Cancer Risk in the WHI Study: The Problem of Obesity*, *Maturitas*;51:83–97, 2005.

Shah R, Rosso K, and Nathanson SD., *Pathogenesis, Prevention, Diagnosis and Treatment of Breast Cancer*, *World J Clin Oncol*. Aug 10; 5(3): 283–298, 2014.

DAMPAK *POST TRAUMATIC STRESS DISORDER* PADA ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL

Hera Wahyuni

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya,
Universitas Trunojoyo, Madura
e-mail: herapsi@yahoo.co.id

Pendahuluan

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya sehingga perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena krusial masa anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Keluarga merupakan faktor internal yang dapat berperan sebagai pondasi dasar untuk memulai langkah-langkah pembudayaan karakter melalui pembiasaan bersikap dan berperilaku. Selain faktor internal seperti keluarga faktor eksternal yang berasal dari lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh penting dalam tumbuh kembang seorang anak seperti dukungan teman, masyarakat dan lingkungan sekolah.

Sekretaris Jenderal KPAI mengemukakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Pernyataan tersebut berarti bahwa satu orang korban yang melapor, dibelakang ada

enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor (KPAI, 2014). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi indikasi bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya penuh dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan harus berputar balik menjadi sebuah gambaran ketakutan karena anak telah menjadi subjek kekerasan seksual. Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu diposisikan sebagai objek lemah yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.

Adapun definisi anak disini mengacu pada istilah anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 *tentang* Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1); “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Begitu pun dengan data kekerasan seksual pada anak yang dirilis oleh KPAI adalah individu yang usianya belum mencapai usia 18 tahun (Pemerintah Indonesia, 2002).

Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia menjadi persoalan serius karena terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial ditahun 2017, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan dari 1.965 kasus ditahun 2016 menjadi 2.117 ditahun 2017 (KPAI, 2017). Selain itu, dari data informasi dan pengaduan KPAI tahun 2014 diketahui bahwa jumlah angka kekerasan seksual terbilang cukup tinggi. Berdasarkan 11 klaster atau bidang kekerasan pada anak, angka kekerasan seksual menempati urutan teratas bila dibandingkan dengan klaster yang lain (KPAI, 2014).

Beberapa penelitian memaparkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat mengakibatkan dampak kerusakan fisik seperti kerusakan pada organ seksual, kerusakan syaraf dan kemungkinan besar tertular penyakit menular seksual. Anderson, dkk (2004) mengungkapkan bahwa pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Bahkan pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut tergantung pada umur, ukuran anak, dan tingkat kekuatan yang digunakan pelaku. Hal ini sejalan dengan penelitian Dinwiddie (2000) menyebutkan bahwa pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan

kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk cedera fisik dan psikopatologi dikemudian hari.

Selain itu, Arnow (2004) menjelaskan bahwa pelecehan seksual pada anak berdampak pada gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, dan sakit kronis. Lebih lanjut Freyd, dkk (2005) memaparkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang ketika kanak-kanak akan berimbas pada masalah sekolah seperti terganggunya proses belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Bullik, dkk (2001) menjelaskan anak yang dilecehkan secara seksual menderita gejala psikologis lebih besar dibanding anak-anak normal lainnya. Risiko bahaya akan lebih besar jika pelaku adalah keluarga atau kerabat dekat, apabila pelecehan sampai ke hubungan seksual seperti pemerkosaan dengan melibatkan kekerasan dan dilakukan secara paksa.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik tetapi juga berimbas pada gangguan psikologis seperti penelitian Rossa (1999) yang mengungkapkan bahwa efek kekerasan seksual terhadap anak berdampak pada perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, *post traumatic stress disorder* (Widom, 1999), kegelisahan (Levitan, 2003), dan ada kecenderungan akan menjadi korban lebih lanjut pada saat dewasa (Messman- Moore, 2003).

PTSD adalah gangguan mental yang dapat berkembang setelah seseorang terkena peristiwa traumatis, seperti kekerasan seksual, peperangan, tabrakan lalu lintas, atau ancaman lain pada kehidupan seseorang (APA, 2013). Chou (2007) menyatakan bahwa pengalaman traumatis yang dialami seseorang tidak selalu berlanjut sehingga menyebabkan PTSD. Bagi sebagian orang yang mengalami trauma menunjukkan bahwa dengan berjalannya waktu dapat teratasi, namun sebagian yang lain tidak juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mengembangkan gejala PTSD.

Senada dengan penelitian tersebut Tull (2018) memaparkan bahwa sekitar 30% hingga 40% anak-anak yang mengalami pelecehan fisik atau

seksual akan berakhir menjadi PTSD, sedangkan 60% sampai dengan 70% lainnya dapat menurunkan tingkat traumanya bahkan tuntas sehingga dapat menjalani hidupnya dengan baik dalam kurun waktu tertentu. PTSD yang dialami oleh anak yang pernah mengalami kekerasan seksual tentu saja akan berdampak pada tumbuh kembang mereka.

Tidak hanya berdampak pada gangguan fisik saja, namun anak terindikasi PTSD juga mengalami gangguan psikologis, hal tersebut terungkap dari beberapa hasil wawancara dengan anak korban kekerasan seksual yang terindikasi PTSD. PTSD yang dibiarkan tentu saja akan berdampak pada perkembangan dan kehidupan anak dalam kurun waktu tertentu bahkan hingga saat dewasa kelak, seperti kemampuannya dalam menjalin relasi dengan lingkungan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Carmen dkk (2013) bahwa gejala keparahan PTSD secara signifikan berhubungan dengan kemampuan sosial yang rendah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Najdowski dan Ulman (2009) bahwa pelecehan seksual anak dikaitkan dengan gejala yang lebih besar dari PTSD dan masalah minum dikemudian hari. Hal tersebut di atas juga dikuatkan oleh penelitian dari Walsh, dkk (2014) melakukan studi yang menghasilkan bahwa gangguan traumatis karena pelecehan seksual pada saat anak-anak memunculkan gangguan kecanduan alkohol pada saat dewasa.

Schaefera, dkk (2013) menjelaskan bahwa pengalaman pelecehan seksual pada saat anak-anak menyumbang varian unik dalam gejala keparahan PTSD akibat paparan tempur dan memiliki hubungan langsung yang negatif dengan kepuasan pernikahannya. Howgego (2005) lebih mengeneralisasikan dampak PTSD bahwa individu yang mengalami PTSD mengalami penurunan pada *quality of life* mereka dalam menjalani kehidupannya. Sejalan dengan penelitian tersebut, pada DSM V (APA, 2013) juga telah menjabarkan bahwa individu yang mengalami PTSD akan berdampak pada kemampuannya dalam berkegiatan seperti sekolah atau bekerja, dan mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi.

Seperti yang dialami oleh Melati (12 Tahun). Setelah mengalami kekerasan seksual tingkat kewaspadaannya meningkat (merasa curiga) ketika melihat laki-laki dewasa menggunakan helm teropong (pelaku

menggunakan helm teropong). Ia menganggap bahwa laki-laki saat ini banyak yang rusak'. Ia juga berusaha menghindari sawah karena sawah merupakan stimulasi yang mengingatkannya akan perkosaan atau peristiwa traumatik.

“Iya takut Mbak, ya takut itu ketemuan, takut ketemu laki-laki sekarang kan itu banyak-banyaknya kan itu anak rusak. Sama orang laki-laki pake helm terawang-terawang itu sering takut. Iya trauma, takut Mbak. Kalo ketemu sawah. (Melati, 12 tahun)”

Informasinya dari ibunya, setelah kejadian ini melati menjadi lebih sering marah, terutama ketika ibu menasehatinya. Perilaku marah-marahnya terbilang cukup ekstrim dengan melempar barang-barang yang berada di dekatnya atau menggebrak-gebrak pintu, sebelum kejadian tersebut tidak pernah menunjukkan sikap seperti ini. Ibu Melati terkesan sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan perubahan putrinya, lebih sering marah-marah, melamun dan kesehariannya kerap kali menangis. Ia tidak memiliki teman setelah peristiwa ini sehingga tidak ada yang bisa menenangkan dan membesarkan hatinya.

“Inggih kuatah mbak perubahane, sakniki larene niku radi meneng, tapi kedah muring-muringan sakniki, gak isok dinasehati. Nggih nyawatnyawat sak entene, yo buku, asbak, yo sembarang Mbak. Nggebrak-nggebrak pintu. Padahal mbiyen mboten nate kados ngoten niku. Mantun kejadian niku kok yo dados larene kados ngoten). Ga mesti Mbak, yo pas lenger-lenger muring-muring terus nangis larene. Ga onok konco gak onok seng nen. engno atine. Ga ono sing gedekno atine. Kulo yo mboten saget.” (Iya banyak mbak perubahannya, sekarang anaknya lebih diam, tetapi sering marah-marah, tidak bisa dinasehati. Ya melempar-lempar yang ada, seperti buku, asbak, ya sembarang mbak. Nggebrak-nggebrak pintu. Padahal dulu tidak seperti itu. Tidak mesti, terkadang melamun, marah-marah terus menangis. Tidak ada yang membesarkan hatinya, saya tidak bisa). (Ibu Melati, 47 Tahun)

Dampak lain diungkapkan oleh seorang anak laki-laki bernama Lanang (14 tahun bercita-cita menjadi seorang pelayar yang bisa berkeliling

Indonesia bahkan dunia, sehingga setelah lulus SMP ia berkeinginan untuk melanjutkan Sekolah Tinggi Pelayaran di Surabaya. Tetapi, adanya peristiwa ini membuyarkan mimpi dan cita-citanya setelah kejadian ini ia tidak berminat lagi untuk bersekolah. Hal ini dikarenakan Lanang mengalami kesulitan untuk tidur, dalam sehari ia hanya tidur sekitar 2 (dua) jam sehingga badannya merasa capek dan tidak bisa dibuat untuk mikir.

“Ya...tidak bu, saya betul ga bisa tidur. Baru nanti subuh tidur. Ya 2 jam saja bu...tapi juga ga sekolah karena telat Bu, badan saya ini capek semua. Udah ga bisa mikir Bu. Malu yang mana ya Bu? Saya di masa depan Bu, he3....saya ini ga sekolah Bu. Mau jadi apa ya. Dulu saya ingin jadi pelayaran bisa keliling Indonesia atau Dunia, banyak uangnya. Tetapi sekarang ... ya heee...(Lanang, usia 14 tahun)

Berdasarkan studi literatur dan wawancara, maka dapat diungkapkan bahwa PTSD yang berkempanjangan pada anak yang pernah mengalami kekerasan seksual berdampak pada kualitas dan fungsi kehidupannya hingga dewasa.

Dampak PTSD pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Gejala PTSD yang Dapat Diamati

PTSD adalah gangguan mental yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis, seperti kekerasan seksual, peperangan, tabrakan lalu lintas, atau ancaman lain pada kehidupannya (APA, 2013). Pengalaman hidup apapun yang terlalu mengguncang' dapat memicu berkembangnya PTSD, terutama jika peristiwa tersebut dilihat sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga dan dikendalikan/dikontrol (Smith & Segal, 2008).

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa PTSD dapat diakibatkan oleh beberapa peristiwa traumatis yang dialami individu seperti bencana alam, kecelakaan, peperangan, kekerasan seksual dan lain-lain, akan tetapi dampak peristiwa dapat berbeda setiap orang tergantung dari seberapa parah atau mengancamnya. Penulis akan memfokuskan PTSD pada anak yang pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan

seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual, dan biasanya disertai dengan adanya tekanan psikologis atau fisik (Barnett dkk., 2004).

Berdasarkan sudut pandang kognitif PTSD berhubungan dengan proses berpikir, individu yang mengalami peristiwa traumatis cenderung lebih memfokuskan pikirannya pada stimulus negatif, menginterpretasikan informasi yang bersifat ambigu (tidak jelas) sebagai ancaman, dan percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan akan terjadi lagi dimasa mendatang. Seperti studi yang dilakukan oleh Friedman, dkk (2014) bahwa PTSD dapat berkembang karena prediksi berlebihan terhadap rasa takut, adanya keyakinan yang self-defeating dan irasional, sensitivitas berlebih (was-was/berlebihan) terhadap sinyal-sinyal dan tanda-tanda ancaman, harapan-harapan self-efficacy yang terlalu rendah PTSD dapat didiagnosa apabila dalam kurun waktu 4 (empat minggu) atau 1 (satu) bulan menampakkan gejala-gejala yang mengarah pada indikasi PTSD.

DSM V (APA, 2013), PTSD diklasifikasikan dibawah kelompok *trauma and stressor-related disorders*. Gejala PTSD yang tercantum pada DSM V, dapat dipergunakan untuk individu, dewasa atau anak yang memiliki usia >6 (enam) tahun, dengan beberapa gejala yang akan dijabarkan sebagai berikut;

1. Kembali mengingat kejadian (*re-experiencing*) – seakan-akan mengalami kilas balik secara berulang, mengalami mimpi buruk, menunjukkan reaksi disosiatif, mengalami tekanan psikologis berkepanjangan.
2. Perubahan dalam gairah (*arousal*) - agresif, adanya perilaku *sebrono* atau merusak diri sendiri, mengalami gangguan tidur, kewaspadaan yang berlebihan
3. Penghindaran (*avoidance*) – terhadap kenangan yang menyedihkan, pikiran, tempat, orang atau berusaha untuk tidak mengingat kembali peristiwa tersebut.
4. Perubahan negatif pada kognisi dan suasana hati (*negative mood and cognition*) – keyakinan negatif yang *persistent*, terdistorsi untuk menyalahkan, atau timbul emosi yang terkait dengan trauma; seperti perasaan terasing, sulit berkonsentrasi dan fungsi hidup berkurang. Durasi gejala tersebut terjadi selama satu bulan atau lebih, sehingga

menyebabkan terganggunya fungsi kehidupan seperti bersosialisasi, bersekolah dan bekerja. Selain itu, gangguan PTSD tidak dapat dikaitkan dengan suatu zat atau kondisi medis yang lain. Selain PTSD, anak-anak dan remaja yang pernah mengalami kekerasan seksual sering memiliki masalah dengan rasa takut, kecemasan, depresi, kemarahan dan permusuhan, agresif, seksual perilaku yang tidak pantas, perilaku merusak diri sendiri, perasaan terisolasi dan stigma negatif, harga diri rendah, sulit percaya pada orang lain, dan penyalahgunaan zat seperti obat-obatan dan alkoholisme. Anak-anak yang mengalami trauma juga sering mengalami masalah hubungan dengan teman sebaya dan anggota keluarga, masalah dengan lingkungan, dan masalah dengan kinerja atau sekolah (Hamblen, 2007).

Data WHO pada tahun 2004 menempatkan Indonesia diposisi ke-2 yang memiliki jumlah PTSD terbanyak dari 25 negara padat penduduk di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia, terdapat 58 orang mengalami PTSD per/100.000 (seratus ribu), hanya saja belum terdapat data pasti peristiwa traumatis apa saja yang menjadi pemicu/penyebab berkembangnya PTSD di Indonesia. Berdasarkan informasi jumlah orang yang memiliki gangguan PTSD di Indonesia maka kajian PTSD dianggap perlu untuk dilakukan.

Dampak Fisik

PTSD pada anak yang pernah mengalami kekerasan seksual akan mengakibatkan pada gangguan fisik dan psikologis, sehingga akan berdampak pada tumbuh kembang pada anak pada rentang kehidupan selanjutnya. Howgego (2005) menjelaskan individu yang terdiagnosa PTSD akan mengalami penurunan pada kualitas kehidupan (*quality of life*) mereka dalam menjalani kehidupannya.

PTSD yang dialami anak korban kekerasan seksual dapat berdampak pada gangguan fisik, antara lain; mengalami kesulitan ketika akan buang air kecil karena psikosomatis, sakit kepala (pusing), dada berdegup kencang, hingga seluruh tubuh terasa lemas dan gemetar bila teringat peristiwa traumatis yang dialami. Ketika teringat peristiwa tersebut merasa tidak nyaman, begitu pun ketika orang bertanya perihal tersebut sehingga mereka berusaha untuk menghindari pembicaraan yang

terkait dengan topik kekerasan seksual karena biasanya berdampak pada kepalanya yang akan terasa sakit (pusing).

Peristiwa kekerasan seksual yang dialami berdampak pada gangguan fisik dan psikosomatis. Istilah gangguan psikosomatis digunakan untuk menggambarkan penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor mental, seperti stres dan kecemasan, ketika teringat akan paparan traumatis yang pernah dialaminya. Hal tersebut membuat badan gemetar, sehingga ia mengalami kesulitan untuk tidur. Di samping itu, mereka juga mengalami sesak nafas, seakan-akan ada yang memegangi bahunya.

Dampak Psikologis

Tidak hanya dampak fisik anak yang terindikasi PTSD juga mengalami gangguan psikologis. Lebih jelasnya dampak Psikologis PTSD dapat dibagi menjadi dua, yakni; 1) perilaku *internalizing* (*emotional effects* dan *cognitive effect*); 2) Perilaku *externalizing* (*interpersonal/behavioral effects* dan *destructive effect*).

Seseorang yang memiliki gangguan *internalizing* biasanya memiliki kecenderungan menyimpan masalahnya sendiri (Smith, 2014). Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung menampilkan emosi yang bersifat negatif, yang dapat merusak kualitas kehidupannya kelak. Adapun emosi negatif yang muncul adalah rasa takut, rasa bersalah, merasa malu, putus asa, kecewa dan merasa sedih yang mendalam. Emosi negatif yang berlarut-larut tentunya akan berdampak pada permasalahan yang lebih besar ke depannya, seperti mengisolasi diri di dalam rumah atau menarik diri dari lingkungan sosialnya serta bersikap menutup diri.

Hal tersebut selaras dengan studi yang dilakukan oleh Weston, C. S. (2014) bahwa individu yang mengalami PTSD ditandai dengan perilaku dan emosi yang sedih, pasif dan umumnya persisten, dan mengarah ke gangguan serius fungsi ekonomi dan sosial, serta bisa meningkatkan angka kematian. Di samping itu, penulis juga ingin menjelaskan bahwa partisipan perempuan cenderung tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap lawan jenisnya (laki-laki), mereka beranggapan “semua laki-laki jahat”. Kekerasan seksual memberikan dampak permasalahan seksual

dan rusaknya kepercayaan terhadap lawan jenis.

Sebagai akibat dari peristiwa traumatis yang dialami, korban yang berusia anak memikul tanggung jawab yang lebih besar, bila dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka menghadapi tantangan moral dalam hubungannya dengan lingkungan disekitarnya (terutama hubungan teman sebaya), yang secara langsung akan berdampak pada perkembangan moral mereka. Perkembangan moral pada anak yang terkena peristiwa tarumatis berhubungan dengan respon emosional yang negatif, seperti rasa takut, malu dan rasa bersalah (Goenjian, dkk., 1999). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa PTSD yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual dapat berdampak pada fungsi kehidupan seseorang hingga dewasa, bahkan seumur hidupnya.

Tidak hanya terganggu pada fungsi emosi, anak-anak yang terindikasi PTSD karena pernah mengalami kekerasan seksual juga berdampak pada sisi kognitifnya, seperti mengalami kendala untuk memfokuskan perhatiannya, sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Mereka sulit untuk memfokuskan perhatiannya terhadap materi yang disampaikan, konsentrasinya mudah terdistraksi sehingga menghambat mereka untuk memahami materi yang disampaikan. Hal tersebut mengganggu proses belajarnya di sekolah dan mengakibatkan nilai-nilainya mengalami penurunan sehingga berimbas pada hasil belajar atau prestasinya. Bahkan beberapa anak memutuskan untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Sejalan dengan hal tersebut DSM V (APA, 2013) juga telah menjabarkan bahwa individu yang mengalami PTSD akan berdampak pada kemampuannya dalam berkegiatan seperti sekolah atau bekerja, dan mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi.

Selain itu anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mempersepsikan peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang negatif dan dapat menghancurkan hidupnya. Mereka kerap kali merasa kebingungan atau distorsi, mengalami pemikiran-pemikiran yang salah akibat *labeling* atau *judgment social* negatif dari lingkungan sosialnya dan menjadikan mereka cenderung khawatir akan masa depannya. Selain itu, mereka juga merasa tidak memiliki harga diri lagi karena menganggap dirinya kotor, hancur, berantakan serta tidak lagi memiliki tujuan hidup. Masa depan

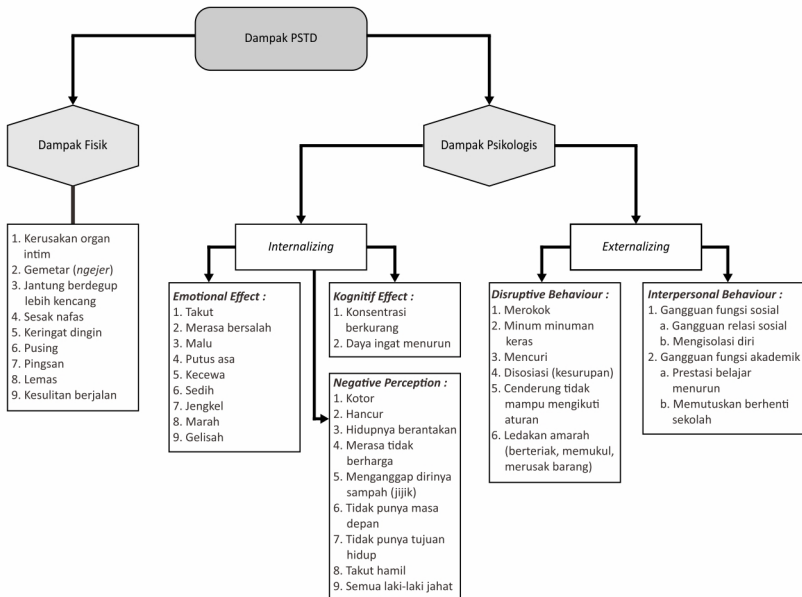
bagi mereka saat ini terlihat suram.

Dampak *externalizing* pada anak yang terindikasi PTSD karena kekerasan seksual dapat dicirikan dengan ketidakmampuannya menyesuaikan diri di lingkungannya sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi sosialnya. Dampak perilaku *externalizing* dibagi menjadi dua, yakni fisik seperti yang sudah dijelaskan, sehingga pada perilaku *externalizing* disini penulis menjelaskan *interpersonal/behavioral effects* dan *disruptive behavior*. PTSD yang dibiarkan tentu saja akan berdampak pada perkembangan dan kehidupan anak dalam kurun waktu tertentu bahkan hingga saat dewasa kelak, seperti kemampuannya dalam menjalin relasi dengan lingkungan. Anak yang terindikasi PTSD karena mengalami kekerasan seksual kerap kali mengalami gangguan fungsional pada relasi kehidupannya sehari-hari seperti hubungan sosial dengan teman-temannya baik di sekolah maupun di rumah, dan hubungan dengan keluarganya. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Carmen, dkk (2013) bahwa gejala keparahan PTSD secara signifikan berhubungan dengan kemampuan sosial yang rendah. Dampak lainnya adalah dalam hal konsekuensi sosial. Perempuan yang menderita kekerasan seksual sering mengalami stigma dan penolakan wajah oleh mitra, suami, keluarga, dan masyarakat (LBH Apik, 2006). Tidak semua lingkungan menunjukkan penerimaan yang baik terhadap korban kekerasan seksual atau pemerkosaan.

Simtom-simtom PTSD kerap memunculkan perilaku berisiko paska kekerasan seksual sebagai efek emosional atau rentannya psikis korban (Dallam, 2002). Hasil penelitian Lipschitz, dkk (2000) menunjukkan bahwa PTSD berkorelasi signifikan dengan penggunaan obat dan alkohol. Perilaku berisiko umumnya dilakukan individu sebagai bentuk *coping* terhadap efek viktimisasi yang tidak tertahankan (Ballon, Courbasson, & Smith, 2001). Anak yang terindikasi PTSD biasanya akan melakukan berbagai cara agar dapat melupakan peristiwa traumatis yang pernah dialaminya. Adapun pengalihan yang dilakukan terutama pada anak laki-laki cenderung pada perilaku-perilaku disruptif seperti merokok di usia anak, dan minum-minuman beralkohol. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Najdowski dan Ulman (2009) bahwa pelecehan seksual anak

dikaitkan dengan gejala yang lebih besar dari PTSD dan masalah minum dikemudian hari. Hal tersebut di atas juga dikuatkan oleh penelitian dari Walsh, dkk (2014) melakukan studi yang menghasilkan bahwa gangguan traumatis karena pelecehan seksual pada saat anak-anak memunculkan gangguan kecanduan alkohol pada saat dewasa.

Di samping itu, anak laki-laki yang terindikasi PTSD kerap kali hilang kesabaran ketika temannya bersikap merendharkannya (seperti menganggapnya sebagai penipu atau anak yang tidak bener). Ia akan berbalik untuk membalas perilaku tersebut dengan cara adu fisik atau memukul. Baginya hal tersebut dilakukan untuk menjaga harga dirinya sebagai laki-laki meskipun harus berakhir di kepolisian. Menurut Hallahan dan Kauffman (1988) perilaku *externalizing* memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap orang lain, seperti perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri dan ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Dampak PTSD dapat digambarkan berikut ini;



Gambar 1. Dampak PTSD pada anak yang pernah mengalami kekerasan seksual

Keterangan:

PTSD yang dialami oleh anak karena kekerasan seksual akan berdampak pada tumbuh kembangnya, baik berdampak pada gangguan fisik maupun gangguan psikologis. Gangguan fisik yang dialami, antara lain; mengalami luka pada organ vitalnya sehingga mengalami kesulitan saat buang air kecil, sakit kepala (pusing), dada berdegup kencang, hingga seluruh tubuh terasa lemas dan gemetar bila teringat peristiwa traumatis yang dialami.

Dampak psikologis terbagi menjadi dua, yakni; 1) dampak *internalizing*, yakni *emotional effect*, *cognitive effect* dan *negative perception*; 2) Dampak *externalizing* (yakni, *disruptive behavior* dan *interpersonal behavior*). Dampak *internalizing* pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami PTSD, yaitu adanya emosi negatif yang dirasakan oleh anak, seperti rasa malu, takut, putus asa, kesedihan berlarut-larut dan adanya perasaan bersalah. Anak-anak yang terindikasi PTSD juga mengalami gangguan kognitif, yaitu kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengalami penurunan daya ingat, sehingga akan berdampak pada proses belajar dan penurunan prestasi belajarnya di sekolah.

Di samping itu, mereka mempersepsikan peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang negatif yang menghancurkan hidupnya. Mereka beranggapan bahwa dirinya kotor, hancur, berantakan, tidak punya harapan, tidak memiliki tujuan hidup dan pesimis dalam dalam menatap masa depan. Dampak *externalizing* terbagi menjadi dua, yaitu; 1) *interpersonal/behavioral effects*, yang berdampak pada gangguan fungsi sosial. Banyaknya teman-teman yang mengetahui peristiwa ini berimbas pada perilaku *bullying verbal* yang dilakukan di sekolah, sehingga mereka memilih untuk menghindar dan mengisolasi diri; 2) Selain itu, anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung berperilaku *disruptive*, melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan pemukulan yang dilakukan sebagai upaya menjaga integritas dirinya. Selain itu, anak juga menampakkan ledakan kemarahan dan perilaku *disosiative* yang mengganggu lingkungan sekitarnya.

Kesimpulan

PTSD yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual akan berdampak pada gangguan fisik, antara lain; mengalami kesulitan ketika

akan buang air kecil karena psikosomatis, sakit kepala (pusing), dada berdegup kencang, hingga seluruh tubuh terasa lemas dan gemetar bila teringat peristiwa traumatis yang dialami. Dampak psikologis terbagi menjadi dua, yakni; 1) dampak *internalizing* (yakni, *emotional effect*, *cognitive effect* dan *negative perception*); 2) Dampak *externalizing* (yakni, *destruptive behavior* dan *interpersonal behavior*). Dampak perilaku *internalizing* seperti rasa malu, takut, putus asa, kesedihan berlarut-larut, perasaan bersalah, kecewa, gelisah dan sikap waspada. Perilaku *externalizing* terdiri atas *interpersonal/behavioral effects*, hal tersebut berdampak pada gangguan fungsi sosial dan akademiknya, sehingga anak mengalami penurunan nilai atau prestasi belajar. Selain itu, anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung berperilaku mengganggu (*distruptive*) dimana anak cenderung merusak aturan-aturan dan melanggar hak-hak orang lain.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga diantaranya adalah; 1) Idealnya Keluarga memahami bahwa dukungan keluarga menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh anak yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam melewati masa-masa kritisnya. Orang tua dapat disarankan dapat turut terlibat secara aktif dalam proses penanganan peristiwa traumatis yang dialami anak, baik secara hukum atau penanganan pemulihan secara psikologis, sehingga anak merasakan adanya dukungan sosial dan emosional yang membuatnya merasa disayangi, dicintai, dan didukung, keluarga menunjukkan sikap positif dan cara pandang yang optimis bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi oleh anak, adik atau saudaranya tersebut; 2) Mengajari anak melepaskan diri dari perasaan bersalah atau emosi negatif yang berlebihan, melalui kalimat-kalimat positif yang membangkitkan semangat seperti mengatakan pada anak bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, mereka tidak bersalah, semuanya akan berakhir dengan baik dan akan kembali normal seperti dulu lagi.

Selain keluarga, peran masyarakat tidak kalah penting dalam memberikan dukungan kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami PTSD. Adapun yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut; 1) Pentingnya lingkungan dan masyarakat menunjukkan empatinya terhadap anak, dengan tidak melakukan

tindakan-tindakan yang menyudutkan, tidak menyalahkannya, tidak bersikap menghindari, dan tidak melakukan *bullying* (baik verbal maupun fisik); 2) Lingkungan dan masyarakat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan pada anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, bahwa masih cukup banyak orang baik yang menyayanginya, sehingga mereka tidak perlu takut untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Mereka dapat merasa aman, nyaman dan diterima secara baik di masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013.

Anderson, J., Mangels, N., & Langsam, A., *Child Sexual Abuse: A Public Health Issue, The Justice Professional*, 17 (1), 107-126, 2014.

Arnow, B.A., *Relationships between Childhood Maltreatment, Adult Health and Psychiatric Outcomes, and Medical Utilization*, J Clin Psychiatry, 65 (12), 10-5, 2004.

Ballon, B. C., Courbasson, C. M. A., & Smith, P. D., "Physical and Sexual Abuse Issues Among Youths With Substance Use Problems", *The Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie*, 46(7), 617-621, 2001.

Barnett, O.W., Miller-Perrin, & Perrin, D. R., *Family Violence Across the Lifespan: An Indroction*, London: Sage Publication, 2004.

Chou, F.H., Wu, H.C., & Chou, P., "Epidemiologic Psychiatric Studies on Post-disaster Impact Among Chi Chi Earthquake Survivors in Yu-Chi," Taiwan. *Psychiatric and Clinical Neurosciences*, 61, 370-378, 2007.

Dallam, S. J., "Crisis or Creation: A Systematic Examination of False Memory Claims", *Journal of Child Sexual Abuse*, 9 (3/4), 9-36, 2002.

Dinwiddie, S., Heath, A.C., Dunne, M.P., Bucholz, K.K., Madden, P.A., Slutske, W.S., Bierut, L.J., Statham, D.B., & Martin, N.G., "Early Sexual Abuse and

Lifetime Psychopathology: A co-Twin-Control Study”, *Psychological medicine*, 30(1), 41–52, 2000.

Friedman, M. J., Keane, T. M., & Resick, P. A., *Handbook of PTSD: Science and Practice (2nd ed.)*. New York, NY: Guilford Press, 2014.

Goenjian, A., Stilwell, B.M., Steinberg, A.M., Fairbanks, L.A., Galvin, M.R., Karayan, I., & Pynoos, R.S., “Moral Development and Psychopathological Interference in Conscience Functioning Among Adolescents After Trauma”, *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 38(4), 376–384, 1999.

Hamblen, J., & Barnett, E., *PTSD in Children and Adolescents: A National Center for PTSD Fact Sheet*, 2008. Neptsd.va.gov [on-line]. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 dari https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/specific/ptsd_child_teens.asp

Howgego, I.M., Owen, C., Meldrum, L., Yellowlees, P., Dark, F., & Parslow, R., *Posttraumatic Stress Disorder: An Exploratory Study Examining Rates of Trauma and PTSD and its Effect On Client Outcomes in Community Mental Health*, *BMC Psychiatry*, 5, 21–38, 2005.

KPAI (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia), “Kekerasan Pada Anak dan Aspek Kuratif”, 2014, Slideshare [on-line]. Diakses pada tanggal 23 April 2016 dari <http://www.slideshare.net/ritapranawati/kekerasan-pada-anak-dan-aspek-kuratif-2>).

KPAI (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia), “KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”, 2017. Kpai.go.id [on-line]. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 dari <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>.

Levitan, R.D., Rector, N.A., Sheldon, T., & Goering, P., “Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders in a Community sample of Ontario: Issues of co-Morbidity and Specificity”, *Depression and anxiety*, 17(1), 34–42, 2003.

Lipschitz, D. S., Grilo, C. M., Fehon, D., McGlashan, T. M., & Southwick, S.

M., “Gender Differences in the Associations Between Posttraumatic Stress Symptoms and Problematic Substance Use in Psychiatric Inpatient Adolescents”, *The Journal of nervous and mental disease*, 188(6), 349–356, 2000.

Messman-Moore, T. L., & Long, P. J., “The Role of Childhood Sexual Abuse Sequelae in the Sexual Revictimization of Women: an Empirical Review and Theoretical Reformulation”, *Clinical psychology review*, 23(4), 537–571, 2003.

Najdowski, C.J., & Ullman, S.E., “Prospective Effects of Sexual Victimization on PTSD and Problem Drinking”, *Addictive behaviors*, 34(11), 965–968, 2009.

Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1)*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.

Roosa, M.W. , Reinholtz, C., & Angelini, P. J., “The Relation of Child Sexual Abuse and Depression in Young Women: Comparisons Across Four Ethnic Group”. *Journal of Abnormal Child Psychology*27(1), 65–76, 1999.

Schaefera, K.E., Keith, D.R., & Rebecca, K.B., “PTSD and Marital Satisfaction in Military Service Members: Examining the Simultaneous Roles of Childhood Sexual Abuse and Combat Exposure”, *J. Negl Child Abuse*, 37 (11), 979-985, 2013.

Smith, M., Segal R., & Segal, J., “*Post-traumatic Stress Disorder (PTSD): Symptoms, Treatment, and Self-Help*, Helpguide.org [on-line], 2020. Diakses pada tanggal 8 April 2020 dari http://www.helpguide.org/mental/post-traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm.

Tull, M. T., Berghoff, C. R., Wheelless, L. E., Cohen, R. T., & Gratz, K. L. “PTSD Symptom Severity and Emotion Regulation Strategy Use During Trauma Cue Exposure Among Patients With Substance Use Disorders: Associations With Negative Affect, Craving, and Cortisol Reactivity”, *Behavior therapy*, 49(1), 57–70, 2018.

Walsh, K., Elliott, J.C., Shmulewitz, D., Aharonovich, E., Strous, R., Frisch, A., Weizman, A., Spivak, B., Grant, B.F., & Hasin, D., “Trauma Exposure, Posttraumatic Stress Disorder and Risk for Alcohol, Nicotine, and Marijuana Dependence in Israel’, *Compr Psychiatry*, 55(3), 621-30, 2014.

Weston, C. S., “Posttraumatic Stress Disorder: A Theoretical Model of the

Hyperarousal Subtype”, *Frontiers in psychiatry*, 4(5), 37, 2014.

Widom, C. S., “Posttraumatic Stress Disorder in Abused and Neglected Children Grown Up”, *The American journal of psychiatry*, 156(8), 1223–1229, 1999.

PROFIL PENULIS

Andi Wahyu Irawan

Lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Barat 20 Agustus 1992. Sejak September 2018 menjadi staf pengajar di Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda. Ia tertarik isu keberagaman karena percaya bahwa pendidikan harus dibangun diatas pondasi keberagaman, tanpa diskriminasi. Kepercayaan itu yang membuatnya mengikuti berbagai kegiatan yang mengusung tema keberagaman, salah satunya adalah Sekolah Kemanusiaan dan Kebudayaan Ma'arif Institute 2020 dan mengajar mata kuliah Konseling Multi budaya.

Danial

Menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Ilmu Kedokteran, Universitas Airlangga, Surabaya. Mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Karya tulis yang telah terbit adalah *Gambaran Variasi Vena Saphena Parva pada Cadaver Indonesia*, *Graniometri pada Cadaver Indonesia*.

Diah Rahayu

Dosen Psikologi, Universitas Mulawarman Samarinda. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S3 Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Ibu dari tiga orang anak ini bergabung dalam organisasi Asosiasi Psikologi Islam dan anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kaltim. Tertarik pada penelitian dibidang anak dan perempuan. Beberapa publikasi ilmiah antara lain *Post-traumatic Growth Among Domestic Violence Survivors: A Systematic Review*, *Kajian Model Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi di kota Samarinda), *Posttraumatic Growth pada Korban Kekerasan*.

Dina Lusiana

Lahir di Purworejo-Jawa Tengah, 29 Desember 1979. Ia mulai mengenal dan belajar tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejak kuliah di Program D III Hiperkes & KK Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta (lulus tahun 2001). Pendidikan S1 (lulus tahun 2007) dan S2 Magister Promosi K3 (lulus tahun 2013) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman sejak 2008 sampai sekarang. Ia juga aktif melakukan penelitian, pengabdian, pelatihan dan publikasi hasil penelitian, seminar maupun jurnal-jurnal ilmiah. Tulisannya juga diterbitkan di *book chapter* “Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19 Pada Masyarakat di Kecamatan Sanga-Sanga dan Muara Jawa Kutai Kartanegara”.

Fajar Apriani

Lahir di Samarinda 14 April 1983. Menyelesaikan S-1 & Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman Samarinda dan S3 Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin, Makasar. Sejak 2005 mengajar pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda. Sejumlah penelitian dan artikel yang sesuai dengan keilmuannya, seperti administrasi

publik, kebijakan publik, gender dan kajian strategi telah dihasilkan dan dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.

Fatimah M.

Lahir 7 Juli 1988 di Enrekang, Sulawesi Selatan dari pasangan Siti dan Muhajir. Memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S.) pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2011. Ditahun 2012 menempuh pendidikan Magister konsentrasi Kesusastraan Inggris pada English Language Studies (ELS), Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, dan memperoleh gelar Magister Humaniora pada 2015. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Selain itu, penulis juga aktif peneliti pada bidang kajian ilmu sosial sastra, feminisme, post-structuralisme dll. Pada tahun 2016, penulis menjadi pemakalah kajian sastra bandingan pada konferensi internasional “Social Sciences Postgraduate International Conference (SSPIC)” University Sains Malaysia, Bukit Jambul Penang Malaysia. Tulisan yang pernah diterbitkan adalah kajian sosiologi sastra dalam karya sastra Inggris Klasik Victoria dengan Judul “*The Representation of Victorian Gentleman in the 19th Century in Charles Dickens’ Great Expectations*” pada jurnal Calls Fakultas Ilmu Budaya.

Hera Wahyuni

Ibu dari 2 anak laki-laki yaitu Moch. Maulana Ali Akbar dan Maulana Akhtar Siradj Ali Mughni. Berasal dari Sidoarjo Jawa Timur, Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2003, menyelesaikan S2 Magister Profesi Psikologi di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya pada tahun 2005, dan melanjutkan S3 Ilmu Psikologi di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Keseharian kegiatan penulis selain mengajar adalah sebagai psikolog UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Sidoarjo Jawa Timur. Buku-buku yang penulis

sudah diterbitkan adalah Tes Psikologi, Psikoterapi dan Modul Digital Parenting sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak.

Katrin Bandel

Lahir di Wuppertal, Jerman 1972. Menyelesaikan studinya ditingkat doktoral pada tahun 2004 jurusan Kajian Indonesia, Universitas Hamburg, Jerman. Menetap di Yogyakarta sejak tahun 2002 sampai sekarang. Karyanya banyak terbit di surat kabar, jurnal dan yang terbit dalam bentuk buku adalah *Sastra Perempuan Seks* (2006), *Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas* (2013), *Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial* (2016), dan beberapa buku kumpulan tulisan seperti *Nguwongke* (2020), dan lain-lain. Mengajar di Magister Kajian Budaya, Program S3 Seni dan Masyarakat, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan mengelola Pusat Studi Perempuan, Media dan Seni (ANJANI) di Universitas yang sama.

Rina Juwita

Lahir di Kutai Kartanegara, 17 April 1981. Menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2004), Program Master of Human Resources and Industrial Relations di Business School-The University of Western Australia (2008) dan Program Doktoral di Universitas Airlangga Surabaya (2019). Mengajar di prodi Ilmu Komunikasi, Fisipol, Universitas Mulawarman. Beberapa karya tulisnya yang telah terbit antara lain; MSMEs Empowerment Communication in New Normal Era: The Case of Mini University Kaltim Preneurs in Indonesia” BIRCU Journal, Thesis and Suicide Ideation: Interpersonal Communication to Strengthened Self-Resillience Among College Student dipresentasikan pada 4th BICSS dan Generation Gap in Online Learning: Should We Consider Social Media? Yang dipresentasikan pada 3rd ESIC.

Riza Hayati Ifroh

Lahir di Samarinda 24 Maret 1990. Saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman bidang Ilmu Promosi Kesehatan Masyarakat. Menamatkan sarjana (S1) di Fakultas

Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman (2012) dan melanjutkan studi Magister (S2) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI). Beberapa riset yang telah dihasilkan berdasarkan minat penulis telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi dalam negeri dan seminar nasional dan internasional. Salah satu Publikasi Internasional dalam Seminar Internasional Australasian HIV & AIDS Conference tahun 2015 yang diselenggarakan di Brisbane Australia adalah *Effectiveness of Combination Audiovisual Media Aku Bangga Aku Tahu and Group Discussions to Improve Adolescent's Knowledge about HIV-AIDS*. Penulis juga menjadi salah satu penerima beasiswa *Conference Scholarship* oleh The HIV Foundation Queensland. Salah satu penelitian yang juga telah dipublikasikan di salah satu jurnal nasional yaitu *Kajian Teori Thought and Feeling* (WHO) mengenai Jumlah Kunjungan Ibu ke Posyandu Tarap guna Meningkatkan Cakupan D/S Bayi-Balita. Salah satu artikel ilmiah terbaru yang juga dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi yang berjudul *Health Literacy, Media Exposure and Behavior Among Young Adults During the COVID-19 Pandemic*.

Sumarni

Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Januari 1974. Menempuh pendidikan Prodi D3 Administrasi Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 1996. Berprofesi sebagai guru SMK sejak 2005 - 2014. Saat tahun 2007 mengambil program kualifikasi S1 bagi guru-guru se Samarinda oleh Pemkot Samarinda di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman dan lulus di tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis langsung melanjutkan studi S2 di Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar, lulus tahun 2014. Sejak tahun 2014 beralih profesi sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Penulis juga sebagai pembina tetap di English Club di Fisipol di universitas yang sama.

Sri Murlianti

Staf pengajar Prodi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri, Fisipol Universitas Mulawarman. Menamatkan Program Sarjana di Prodi Ilmu

Sosiatri (1998), Program Master Sosiologi (2005), dan Program Doktor Sosiologi (2011) di Fisipol UGM. Beberapa tulisan yang pernah dihasilkan: *Cycles Of beauty Culture: Etnoghaphy of Beauty Clinics Commodification*,” Jurnal Komunitas Universitas Negeri Semarang, Vol. 6 No: 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i2.3312>. 2014. 9). Prosiding Konferensi: *Parodi kampanye Pemilu di Media Jejaring Sosial: Retekstualisasi Para Pengguna Fecebook Terhadap Mitos Kesempurnaan Prabowo Subianto* Yogyakarta, 20 Mei 2014. *Transformasi Kultural Elemen-Elemen Budaya Disiplin Klinis ke dalam Praktik Jasa Kecantikan*, Prosiding Seminar Kerjasama ISI & UNS, 2013, *Agama Sebagai Teks Budaya: Tantangan Islam Garis Keras Indonesia*,” Prosiding Konferensi antar Bangsa Islam Borneo, MARA University, Serawak, Malaysia 2012, *Parodi Kuda Prabowo Dalam Kampanye Akbar Partai Gerindra 23 Maret 2014*,” Prosiding Diskusi pada konferensi Nasional Sosiologi III, UGM.

Uni W. Sagena

Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta peneliti di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Konsentrasi ilmunya adalah seputar isu-isu keamanan internasional dan strateginya, baik tradisional maupun non-tradisional, utamanya seputar keamanan energi dan dimensi-dimensinya seperti manusia dan lingkungan. Selain mengajar dan meneliti, ia juga aktif diberbagai organisasi sosial dan terlibat dalam kegiatan literasi dan kepastakaan yang telah membidani lahirnya beberapa buku bertema sosial-politik-keamanan, baik sebagai kontributor, editor, maupun sebagai *reviewer* dan juri lomba esai. Beberapa kajiannya dapat diakses melalui: <https://scholar.google.fr/citations?user=1lbbO3kAAAAJ&hl=id&oi=ao>

Yayuk Anggraini

Lahir di Samarinda 1980. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 Administrasi Publik Universitas Mulawarman, dan S3 Program Doktorat Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mengajar di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Mulawarman, dan menjadi Koordinator Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) LP2M di universitas yang sama.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian maupun yang dilimpahkan kepada masing-masing fakultas sebagai mitra kerja di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pembentukan kelembagaan penelitian di Universitas Mulawarman, diawali dengan terbentuknya SK Rektor N0.03/1975 tanggal 1 April 1975 tentang pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat yang disingkat dengan nama LAPAN. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1977 dengan SK Rektor No.078/1977, LAPAN dipecah menjadi dua bagian, masing-masing menjadi Lembaga Riset dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Selanjutnya berdasarkan SK Presiden No.66/1982 tanggal 27 September 1982 tentang Susunan Organisasi Perguruan Tinggi yang aturan pelaksanaannya diatur melalui SK Mendikbud No. 0512/0/1983, Lembaga Riset berubah menjadi Pusat Penelitian (PUSLIT). Berdasarkan SK Rektor Universitas Mulawarman tanggal 18 Juli 1994, Pusat Penelitian berubah menjadi menjadi Lembaga Penelitian dengan pembentukan Pusat-pusat Penelitian yang kemudian menjadi 14 Pusat Penelitian (PUSLIT).

Sesuai SK Rektor Universitas Mulawarman tanggal 21 Januari 2008 tentang Pencabutan dan Pembentukan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Puslit-puslit dirampingkan menjadi 6 Pusat Penelitian. Disamping Lembaga Penelitian merupakan coordinator pelaksana ppenelitian, Lembaga ini juga merupakan tulang punggung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik di Kawasan Kalimantan, nasional maupun internasional.

PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KGPA)

Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Universitas Mulawarman terbentuk tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 85/Kep/1989 tentang pembentukan Kelompok Studi Wanita (KSW) yang merupakan cikal bakal berdirinya Pusat Penelitian Gender memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

Kemerdekaan milik seluruh warga negara dan manusia, termasuk perempuan dan anak punya hak untuk berbicara serta memperjuangkan nasib dan kesejahteraannya

MISI

1. Penelitian berperspektif gender di segala bidang yang lebih memperhatikan/memunculkan posisi subjeknya aktif berbicara (menghindari objektifikasi) terhadap kekerasan, ketimpangan, diskriminasi dan lain-lain dalam rangka mengedepankan kemanusiaan
2. Melakukan pelatihan, pengembangan diri dan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran berkeadilan, kemanusiaan dan perundang-undangan yang masih kurang memperhatikan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak

Perempuan dan Dinamikanya

Secara empirik, seorang perempuan sebenarnya tidak terabaikan tapi keberadaan perempuan seringkali digambarkan terselubung karena suara laki-laki sekaligus mewakili suara perempuan dan anak. Ketika seorang peneliti atau penulis menggali informasi tentang pengalaman perempuan maupun anak yang ditanya justru informan laki-laki karena keterangan laki-laki sudah dianggap mewakili mereka. Otomatis hal itu menjadi biasa dan suara perempuannya sendiri justru tidak muncul, subyektifitasnya menjadi tertiadakan.

Artinya perspektif perempuan dan anak dihalangi dan tidak bisa langsung mengungkapkan pengalamannya. Hal itu menunjukkan kegagalan para peneliti selama ini atau penulis yang bermaksud ingin menggali pengalaman perempuan dan anak berdasarkan subyektifitasnya sendiri sehingga suara perempuan dan anak yang sesungguhnya tidak masuk dalam ranah analisis.

ISBN 978-623-7480-66-2



9 786237 480662